

Seuntai Bunga Rampai

Pertautan Ruang Hidup



Khalisah Khalid & Ade Fadli



CELOTEH SANG PEREMPUAN

Kumpulan Tulisan ALIEN di <http://sangperempuan.blogspot.com>

Sya ... (I)

10/27/2008 10:40pm

Sya

Aku sedang berada didalam kereta menuju kota Den Haag, detik-detik kecepatannya semakin membawaku jauh diambang batas khayalan yang selalu menjadi teman dimasa remajaku. Dulu aku selalu marajuk, mengapa ibu belum juga membelikanku bra dengan renda yang lucu-lucu, padahal hampir semua temanku sudah memakai bra dengan beraneka warna. Aku juga selalu bertanya kepada ibu, mengapa aku belum juga mendapatkan datang bulan sebagai tanda kalau aku sudah beranjak remaja, dan boleh mulai pacaran tentu saja.

Ah,... Hampir saja ibu menjawab. Tapi rem kereta segera mengembalikan waktuku tepat disini. Kala dingin mulai menyingkap perlahan-lahan, merayapi seluruh badanku hingga ke sum-sumnya. "Seperti di Lembang", begitu bisikku pada teman lelaki yang menjemputku. Dia hanya tersenyum melihat kepolosanku yang baru menapak di bumi Eropa.

"Eropa euy"..... setengah mati girangnya aku begitu keluar dari stasiun Holland Spoor, sama persis begitu girangnya ketika aku pertama kali aku mendapati rok sekolahku ternoda darah. "Yes, ibu....." setengah berteriak aku berlari menghampiri ibuku. "aku menstruasi, aku sudah besar dan artinya sudah boleh pacarankah?" bisikku setengah memohon. Apalagi aku ingat cerita ibu, yang dinikahi ayahku diwaktu umurnya belum lagi genap 15 tahun.

Akhirnya aku memiliki cerita yang sama dengan teman-teman sebayaku, meskipun aku mendapatinya diumur 17 tahun. Terlambat ya, ah... tapi enggak pa-palah. Kata ibu, biar terlambat, yang penting aku sudah merasakan menjadi perempuan setengah sempurna. Kenapa cuma setengah? Protesku kepada ibu. "Ya.... Setengah, karena setengah lagi bisa kamu dapatkan jika kamu sudah menikah dan melahirkan".

"Susah banget jadi perempuan ya"? "Apa teman lelakiku juga begitu?" Pasti enggaklah ya, mereka tidak akan pernah menjadi laki-laki yang sempurna, karena mereka tidak akan bisa melahirkan bukan?? Bisikku dalam hati dengan senangnya.

Sya

Dingin semakin kuat memenjaraku aku dalam jaket tebal ini, padahal salju belum lagi turun di awal September ini. Teh hangat secepat kilat kuteguk habis dalam sekejap, seperti jamu yang secara rutin harus aku minum setiap hari, untuk menghilangkan rasa sakit yang teramat sangat dikala jadwal menstruasiku tiba. Rasa gembira tiba-tiba berubah menjadi rasa benci dan sekarang aku malah membenci diriku sebagai perempuan, dan setiap kali menstruasi, aku selalu merengek pada ibu untuk mengganti vaginaku dengan penis. Belum lagi rasa mual yang hampir terlalu sering menguras isi perutku, hingga rasanya makanan menjadi duri sembilu yang menyayat-nyayat lambung dan ulu hatiku.

Ibu pasti begitu repot, sama repotnya dengan teman-temanku yang sempat berpikir bahwa tuntutan cuti haidh itu tuntutan kegenitan dari aktifis perempuan, karena selama ini kawan-kawanku tidak pernah punya pengalaman melihat istri atau teman perempuannya mengalami penderitaan seperti ini, beberapa kali pingsan saking tidak kuatnya menahan rasa sakit. Dokter bilang ada kelainan pada saluran vaginaku, dan terakhir dokter bilang ada kista di rahimku.

Syit, sungguh Sya.... aku nggak peduli meskipun dokter bilang aku sulit punya anak. Aku cuma mau rasa sakit itu pergi jauh-jauh, karena itulah aku rela harus meminum obat yang rasanya seperti empedu saja.

Sya (II)

11/15/2008 07:05pm

Sya....

Keperempuananku tiba-tiba terus menerus menjadi pertanyaan yang sulit untuk kupahami, sesulit aku membayangkan pikiran kolonial Belanda yang begitu sempurna menancapkan kuku-kuku kolonialismenya di tanah kelahiranku. Bahkan, memorial succes story penjajahannya terhadap pribumi Indonesia, juga dibenamkan begitu kuat paling tidak di tempat istirahatku di Okkey Hostel di Amsterdam, semua sudut-sudut ruangan ini menggunakan nama-nama tempat yang aku pastikan kenal betul bertujuan untuk memperlihatkan tapak jejak penguasaan mereka. Ada tempat pertemuan yang diberi nama Jawa, tempat aku lahir dan besar di pulau ini.

Jawa yang sungguh terkenal dengan sistem per-Nyaian atau pergundikan, sebuah sistem penguasaan kolonial terhadap tubuh perempuan di Jawa dalam rangka pelanggengan kekuasaannya. Nyai-nyai yang dipelihara oleh kolonial Belanda, seperti yang dialami oleh Nyai Dasima yang dijadikan selir oleh Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan sistem pernyaian, sampai saat ini menyisakan bentuk penindasan yang lain, untuk konteks saat ini banyak perempuan yang dijadikan istri simpanan oleh laki-laki, dengan tujuan penguasaan terhadap tubuh perempuan yang dimilikinya. Pun, seperti yang dialami oleh salah seorang perempuan Kwitang, yang mengalami Pernyaian modern. Bagiku, inilah jejak kehancuran perempuan yang paling nyata, yang diwariskan oleh sebuah tirani kolonialisme Belanda.

Eh Sya, kamu tahu nggak? Belanda, luasnya tidak lebih besar Sukabumi di Jawa Barat, tempat dimana saat ini kunjunganku kedua setelah mendapatkan bea-siswa short course ekologi politik dengan uang saku yang sangat lumayan, belanja seminggu dua kali di open market atau albert heijn jika open market sudah tidak cukup waktu untuk dikeja, paling tidak untuk memenuhi selera makan ala Indonesia. Aneh, mungkin begitu bisikku dalam hati. Aku menghujat dan sekaligus menikmati negara ini dengan semua latar belakang yang bisa dijadikan sebagai basis argumentasi, bahwa program ini sama dengan bentuk politik balas budi Belanda terhadap Indonesia.

Ah, tapi aku mencoba untuk mengambil sisi lain, juga dari sejarah yang sempat aku baca. Pengalaman para pendiri republik ini, merumuskan

sebuah konsep kebangsaan, juga dilakukan di tempat ini. Sebut saja Tan Malaka yang merumuskan gagasan Menuju Republik Indonesia, Soekarno yang menuliskan dengan sangat baik Menuju Indonesia Merdeka, Hatta yang menuliskan Indonesia Merdeka. Hmm, tapi kok tidak ada perempuan ya??? Gugatku seketika. Oooh, mungkin sejarah lupa untuk menuliskan bagaimana perempuan menuliskan konsep kebangsaannya melalui struktur penindasan yang menjadi cerita keseharian para Nyai-Nyai.

Lalu aku, ada disini untuk apa? Aku juga tidak terlalu mengerti, setauku hanya karena aku mendapatkan keberuntungan bisa belajar di tempat beberapa tokoh penting pergerakan Indonesia merumuskan pikirann-pikirannya tentang Indonesia yang berdaulat disini, di negeri Belanda. Tapi ucapku, paling tidak aku pernah punya cita-cita, mimpi atau entah apapun lah namanya yang disebut oleh para pemimpi perubahan, untuk mencorat-coret ulang definisi sebuah nilai kebangsaan yang kini sudah dikooptasi oleh pasar bebas, oleh atas nama demokrasi, oleh segelintir kelompok yang secara kebetulan menjadi mayoritas dalam parlemen. Seperti anak kecil yang suka menggambar, aku hanya ingin membuat paling tidak titik-titik yang bisa ditarik menjadi sebuah garis, potret dunia baru bagi Indonesia. Mungkin, nggak mungkin, mungkin, nggak mungkin, tiba-tiba Tika Panggabean nyeletuk begitu saja disamping kupingku lewat lagunya yang menemaniku minum kopi sebelum masuk kelas, tapi konon another world is possible, paling tidak itu pesan kuat dari sebuah kumpulan teman yang menamakan dirinya Indoprogress.

Sya.... kurang lebih 10 menit dari tempat tinggalku, jalan kaki menuju Institute of Social Studies. Sangat dekat, apalagi berjalan kaki disini begitu nyaman, tidak seperti Jakarta yang rasanya pejalan kaki itu menjadi kelas yang paling termarginal. Dalam pembangunan jalanpun, kita bisa melihat relasi kelas, kelas mana yang berkuasa atas jalan raya di Jakarta. Jawabannya mudah bukan, pemilik mobil pribadi, dan pejalan kaki menempati bagian yang sudah semakin tergeser.

Ini kelas pertamaku di kampus yang katanya kiri, meskipun temanku yang tinggal di London sempat mengenyitkan dahinya, menurutnya kampus ini tidak lagi menjadi kampus kiri. Enggak pa-palah, agak-agak berbau kiri juga nggak mengapa. Hujan rintik-rintik menjadi inspirasi baru akan lahirnya mimpi sebuah perubahan. Paling tidak mencoba untuk melihat sisi nasionalisme dari dunia yang berbeda, Utara - Selatan. Entah, apa aku memaknainya dengan bacaan ini. Tapi paling tidak, cuaca dingin ditambah rintik-rintik hujan yang turun, menjadi sebuah isyarat nyata bahwa dunia ini bisa dilihat dalam dua sisi yang berbeda. Di negeri kolonial, justru para pemuda merumuskan konsep

kebangsaan Indonesia yang didasari atas satu keinginan, persatuan dan kemerdekaan.

Aku memasukkan coin untuk mendapatkan secangkir kopi, lumayan pikirku untuk menghangatkan badan setelah seharian dari pagi hingga petang menghabiskan waktu di kelas, keliling kampus mulai dari perpustakaan hingga mampir dalam sebuah kelas diskusi Marxist, kebetulan kawanku yang baru kukenal satu hari itu. Aku menikmati kopi di pelataran kampus, kebetulan ada kursi didepan kanal yang mengalir disitu, sambil sesekali menebar senyum pada sekawanan turis yang berwisata sungai dengan japa-kapal kecil, sesekali khayalanku melayang pada sebuah mimpi sungai di Jakarta tak kalah menariknya dari kanal yang didepanku ini, apalagi dalam sejarahnya kali Ciliwung pernah menjadi cerita yang sangat terkenal di Belanda.

Sya ... (III)

12/12/2008 09:25pm

Sya...

Kamu pernah lihat jingga diatas mendung? Aku menemukan itu disini, diwaktu rasa rinduku memuncak pada sebuah asa yang dikemas dalam balutan nilai kesetiaan. Pun sakit dan menyesakkan, tapi jingga itu tetap menyemburat dengan penuh kedamaian. Disini, dikamarku yang paling luas dibandingkan dengan kamar lainnya yang dimiliki oleh kampus yang berada di Oudemoulstrat. Ketika aku menengok gerimis diantara tirai jendela, aku seperti melihat jingga itu menyemburat dengan sempurna.

Tatapannya yang masih kuingat dalam-dalam, sembari membayangkan alangkah kuatnya nilai itu bersemayam dalam hatinya. Nilai kesetiaan pada sebuah kebenaran akan sejarah, sejarah hidupnya, sejarah keibuannya, sejarah keistriannya, sejarah kewarganegaraannya, dan seluruh sejarah yang pernah coba dipangkas untuk diingat oleh anak cucunya karena dia tidak pernah bermimpi sejarah itu melukai masa depan anak cucunya. Rasanya, berapa banyak orang yang ingin melupakan sejarah hidupnya dengan berbagai cara.

Tapi jingga itu lain Sya, dia menampakkan hal yang lain, meskipun memiliki rasa yang kuat untuk melupakan sejarah. Aku melihat, disanalah nilai keabadian jingga itu meski dia berada diatas mendung. Dia begitu kuat, dia begitu sempurna, dia begitu percaya bahwa inilah cara dalam hidupnya untuk melalui sejarah. Tenggorokanku juga rasanya begitu kering, ketika sepucuk surat ditanganku yang diberikannya membuat aku semakin percaya bahwa alur hidup memang niscaya adanya, dan sesungguhnya itulah hakikatnya pembentukan jingga. Dalam genggamannya yang begitu kuat, diantara kecilnya kepalan tanganku sambil meradang senja dan berharap agar butiran air mata tak mengganggu apapun dan siapapun. Bukan hanya dia, tapi juga aku dan atau bahkan kebanyakan orang yang masih percaya bahwa kebenaran itu masih ada, paling tidak itu yang ada dalam hatiku.

Sya...

Sepucuk surat itu kini kupegang dalam genggamannya tanganku, semilir angin yang merasuk perlahan-lahan di kamar ini semakin membuatku takut menghadapi jingga. Tapi puji Tuhan, diapun berdoa untuk agar Tuhan tidak menarikku dalam alur hidup yang sama. Tidak dinistakan oleh orang-orang disekelilingku, apalagi oleh negara yang dalam jiwa

dan ragaku sudah tertanam itu sejak lama, paling tidak sejak aku mengenal pelajaran PMP di sekolah. Perlahan-lahan, aku kembali membukanya. Maaf jingga, aku selalu membuka surat ini, membacanya berulang-ulang. Mungkin itu tidak cukup membuat sakitmu terobati, tapi paling tidak aku ingin mengerti bahwa betapa kebenaran itu begitu mahal dan kuat menampung semua dalam pundakmu, menyimpannya rapat-rapat dalam hatimu.

Catatan bagi mereka yang mau mendengarnya
Pertama diterima kebenarannya

Sekilas saya menyatakan kebenaran saya namun kalau sudah semua orang menyatakan itu tidak benar, maka yang tidak benar itu menjadi kebenaran.

Saya berpesan kepada anakku, semoga menjadi pedoman hidupmu

Saya tetap merasa dipihak yang benar, tetap merasa apa yang dikatakan orang itu semuanya adalah hal tidak benar, semua meruapkan fitnahan bagi diri saya, dimana fitnahan itu dianggap sebuah kebenaran.

Kenapa orang menyatakan yang tidak benar ? mungkin ini adalah sekedar mencari keselamatan dirinya, padahal dia lupa kehidupan yang lain akan timbul dengan kebenaran yang kita buat.

Belum lagi kalau pembalasan ataukah hukum karma, tapi hal ini tidak begitu dipikirkan oleh karena kebenaran itu biasanya (selalu) terlambat datangnya. Menyebabkan banyak orang mau memilih kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran.

Anak-anakku, hati-hatilah dalam hidup ini, tetap berbanggalah bahwa bagaimanapun bapakmu tidak pernah merasa berbuat sebagaimana yang dikatakan oleh semua orang itu.

Saya tidak mempersalahkan mereka itu, karena saya tau mereka mau mencari keselamatan dirinya, sekalipun orang lain dikorbankan.

Hadapilah hidup ini dengan penuh kesatria, sekalipun banyak orang tidak senang dengan kamu. Biarlah mereka itu menyatakan bahwa saya tidak benar karena itu adalah haknya untuk menyatakan itu.

Saya tetap berbangga sampai dimanapun, bahwa apa yang dikatakan oleh saya itulah yang benar, dan yang lain itu adalah fitnahan yang penuh dengki.

Apa sebab banyak dari mereka itu dengki pada saya? Itu saya sendiri tidak tau.

Anakku, (putraku) mudah-mudahan saja doaku, engkau menjadi manusia yang bahagia. Bahagiakanlah ibumu yang nanti tetap mengasuh dirimu. Sayangilah ibumu yang tetap berkorban mau menderita

untukmu. Melihat cobaan ini, mungkin saya tidak bisa lebih lama lagi memberikan kebahagiaan pada ibumu.

Kepada isteriku, tabahlah hadapi hidupmu. Kau trepaksa akan melayarkan bahtheramu sendiri dengan kesanggupanmu sendiri dan pemikiranmu sendiri.

Jangan gentar menghadapi hidup ini, karena hidup ini adalah penuh dengan tantangan dan cobaan. Kita tidak boleh mengeluh, karena mengeluh adalah meruapakan usaha yang sia-sia.

Aku tak bisa lagi melanjutkan, air mataku tiba-tiba saja mengalir dan hampir jatuh di lembaran surat berikutnya. Tenggorokanku terasa kering dan teramat kering. Ya Tuhan, begitu beratnya cobaan ini untuk seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, bukan karena tangan Tuhan yang menghendakinya. Tapi kerakusan manusia oleh kursi kekuasaan. Tapi ketika kulihat, mata ibu kasim yang menatapku teguh, menguatkan lagi hatiku untuk melanjutkan alur cerita ini.

Isteriku,

Entah berapa lama nanti engkau sendiriran menghadapi hidup ini, ditengah-tengah gelombangny hidup ini. Mudah-mudahan saya akan tahan dalam ujian, pada prinsipnya semua terserah padamu. Bagaimana kau akan menanggulangi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, akan saya jadikan azimat dalam pengembaraan saya ini. Saya kira itu sudah cukup banyak. Sekarang, aturlah hdiupmu untuk anak-anakmu, agar mereka itu dapat bertumbuh menjadi manusia yang baik dan berguna untuk kemanusiaan. Do'akan jangan putus-putus, beri pada saya agar dapat memberi keselamatan diri saya. Maaf, dan ampunkanlah segala dosa-dosaku padamu, sebagai isteriku kalau ada dosa padamu agar soal menyesalnya dan harapanku dimaafkan.

Hanya kepadamu manusia satu-satunya yang benar-benar saya telah banyak berbuat dosa, mungkin inilah pembalasannya pada diriku, tapi mengapa akibatnya menimpa kau juga isteriku. Padahal kau tetap orang bersih, orang yang saya tau tidak berdosa.

Saya rasa ini tidak layak, tidak adil, karena dosaku kalian ikut memikulnya. Terlepas saya salah atau tidak dalam persoalan ini, tapi ini sudah meruapakan takdir Illahi pada diriku ini. Dalam selku sekarang, saya tidak dapat melihat alam lagi, hanya cahaya yang masuk melalui lobang 20 x 30 cm, itulah yang memberi saya petunjuk bahwa hari sudah siang ataupun sudah malam. Malam ini, saya akan lalui tidur di selku ini, sebagai malam pertama tanggal 8 April 1969.

Sya IV

03/25/2009 09:34am

Sejarah, akan dibuat oleh siapa yang sedang dan atau ingin berkuasa di belahan bumi manapun. tapi jangan pernah ingin melupakan sejarah, meskipun ada yang kelam disana. dan aku kembali mengingat-ingat apa yang kau ucapkan padaku Jingga, disaat alunan maghrib menyapa kita dalam sebuah geliat asa, yang mengintip malu-malu sambil sesekali tangannya mengusap wajahku. "ibu sudah memaafkan, namun tidak untuk dilupakan, karena kebenaran akan sejarah tidak boleh dihapus dan dihilangkan dalam memori otak dan hati anak bangsa".

ya... tentu aku ingat kata-katamu dan sambil menembus malam aku menelusuri jalan ini yang dirangkai dari berbagai peristiwa.

"selamat ulang tahun Sya", aku mengetik surat elektronik ini padamu. entahlah, mengapa aku sangat suka dengan kata-kata ini, seperti air yang masuk menggenangi tenggorokanku yang kering dikelabui waktu. mungkin juga itu yang dirasakan oleh putrimu yang cantik Jingga, setiap kali hari kelahirannya diketuk pada pukul 00.00 waktu indonesia bagian timur, meskipun jauh suara lembut yang menuliskan kebenaran didalam sel itu berbisik lirih "selamat ulang tahun sayang", dan esoknya bungkus kado itu terus menerus menemuinya setiap tahun, sambil tak lupa dengan sapaan hangatnya diujung telpon. sampai satu masa memaksamu tunduk pada titik sejarah baru dalam hidupmu, untuk memahami bahwa begitu mahal kebenaran itu dirampas oleh kelompok yang menjadi hakim untuk menilai bahwa merekalah yang paling benar.

ya... akhirnya putrimu tahu juga Jingga, saat pelajaran sekolahnya sudah mengajarkan bagaimana kewajiban negara melindungi rakyatnya, justru disaat itu dia tahu ayahnya tak mungkin lagi akan mengucapkan selamat ulang tahun padanya, kebenaran telah dikebumikan, kebenaran telah dirampas. disini, ditanah ini yang jaraknya setengah dari putaran bola dunia. di kamarku, nomor satu yang paling luas dibandingkan dengan kamar-kamar lainnya di asrama kampusku.

matakmu terbuka, saat waktu sudah menarikku pada rutinitas anak sekolah yang dibayari pemerintah Belanda. hari ini cuaca lebih dingin dari biasanya, mungkin sekitar 12 derajat celcius. jaket tebalku memenjaraku begitu kuat, dan hari ini aku berjanji ketemu dengan mentorku yang sering mengkritik tulisanku yang dianggap tidak memenuhi standar ejaan yang disempurnakan.

lucu ya Sya, rasanya aku yang dari kecil diajarkan pelajaran bahasa Indonesia. "Ini Budi, ini Bapak Budi". Bapak Budi pergi ke kantor, ibu Budi memasak di dapur". aiiih, mungkin karena pelajaran ini tidak berubah mengikuti dinamika jaman, hingga aku malas mengikuti pelajaran ini. nah, kalau karena ini ejaan EYD ku tidak bagus, aku tidak akan protes ke mentorku yang lebih mengenal sejarah Indonesia yang penuh manipulasi, dari pada aku yang dilahirkan di bumi Batavia.

sungguh Sya, Jingga sudah mengenalkanku pada banyak sejarah yang dimanipulasi. bukan dengan dokumen berlembar-lembar buku sejarah atau tontonan wajib di televisi. dia mengenalkan sejarah, dari pengalaman hidupnya sebagai perempuan dengan penuturan yang tidak pernah mau diungkap oleh sejarah, apalagi untuk meminta maaf. tidak seperti dirimu, maafku begitu luas bagai samudera.

Panasnya Batu Bara

Selasa, 19 Agustus 2008

Khalisah Khalid

Di luar dugaan, Menteri Keuangan mengeluarkan surat pencekalan terhadap petinggi perusahaan tambang. Mereka dicekal karena mangkir membayar royalti 13,5 persen. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 3 triliun.

Lelucon politik

Situasi memanas. Adu argumentasi terjadi antara pemerintah dan perusahaan tambang batu bara yang dicekal. Situasi ini sebenarnya hanya lelucon politik yang dimainkan elite oligarki yang menguasai hampir seluruh negeri. Negeri ini sudah dikuasai korporasi sehingga dikenal sebagai negeri korporatokrasi yang berwatak eksploitatif.

Disebut lelucon karena kondisi ini muncul akibat regulasi yang dibuat pemerintah sendiri melalui peraturan pemerintah yang menyebutkan, tambang batu bara tidak terkena pajak, lalu mengapa kebakaran jenggot?

Kita tahu, karakter pertambangan di Indonesia tidak terbarukan, berumur pendek, berdaya rusak tinggi. Pertambangan juga berorientasi ekspor bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengakibatkan Indonesia mengalami krisis energi di tengah limpahan batu bara. Bukankah ini buah skenario kolaborasi penguasa dan pemodal melalui instrumen hukum yang dikeluarkan tahun 2000?

Saat perusahaan itu menghancurkan keselamatan rakyat, merusak produktivitas dan kesejahteraan rakyat, serta menghambat keberlanjutan pelayanan alam sekitar wilayah konsesi tambang, di manakah negara?

Pada sisi lain, apakah negara juga kebakaran jenggot karena saat rakyat mengalami kerugian begitu besar karena kehilangan keselamatan ruang hidup, kehilangan produktivitas, kehilangan kesejahteraan, dan lingkungan rusak tak terpulihkan mengancam generasi ke depan?

Negara tidak pernah menghiraukan itu semua karena yang terpenting adalah pendapatan bagi negara, bukan bagi kepentingan rakyat. Negara ribut karena perusahaan tambang lalai membayar royalti, tetapi pengurus negara diam saja saat perusahaan lalai memenuhi kewajibannya terhadap rakyat yang hidup di sekitar tambang.

Jared Diamond menggambarkannya dalam teori collapse. Dinyatakan, runtuh dan berkembangnya satu entitas dalam satuan lingkungan bukan ditentukan kondisi geografik alami saja.

Pilihan untuk bertahan atau collapse jatuh pada entitas manusia yang tinggal di dalamnya. Entitas pada konteks tertentu ditentukan oleh pilihan pemimpinnya dan pemimpin di Indonesia menghendaki kehancuran sumber-sumber kehidupan. Pemimpin juga melihat sumber daya alam bukan sebagai sumber kehidupan, tetapi sumber daya yang bisa diekstraksi dengan mengabaikan keselamatan manusia penduduk bumi Indonesia.

Utang ekologis

Jaringan advokasi tambang mencatat, sejak lama perusahaan tambang batu bara ini bermasalah dan ini telah melahirkan berbagai krisis di Indonesia.

Sejak tahun 1999, PT Arutmin Indonesia, misalnya, melakukan serangkaian kejahatan korporasi (corporate crime) berupa kejahatan lingkungan di sekitar wilayah konsesi pertambangan yang separuhnya ada di kawasan hutan lindung. Pertambangan ini mencemari lingkungan hidup yang menyebabkan hancurnya fungsi-fungsi ekologis kawasan itu.

Belum lagi PT Adaro Indonesia, yang telah menenggelamkan Desa Lamida Atas dan Desa Juai di Kalimantan Selatan tahun 2003, merusak pertanian dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup petani sekitar.

Jika berniat bangkit, seharusnya negara tidak hanya menuntut royalti dari perusahaan tambang batu bara. Pengurus negara juga harus menuntut utang ekologis yang ditinggalkan. Sejak berproduksi dan mengeruk kekayaan alam di Indonesia, mereka meninggalkan kerusakan alam, mencemari tanah, air, dan sumber kehidupan dan perlu dimintai pertanggungjawaban. Belum lagi pelanggaran HAM, baik terkait hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengadili mereka bukan hanya karena soal uang, tetapi juga cara dan watak mereka, datang, gali, dan pergi dengan meninggalkan kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas kesehatan dan kemiskinan.

Pengurus negara perlu menyadari, industri pertambangan skala besar—salah satunya batu bara—kontraproduktif dengan sumber kehidupan berkelanjutan.

Lagu Lama, Aransemen Ulang

Khalisah Khalid

Siapa rakyat Indonesia yang tidak tahu bahwa presidennya jago mencipta dan menyanyikan lagu. Di awal Juni 2008, Susilo Bambang Yudhoyono kembali akan melansir sebuah lagu dan kali ini lagu itu diberi judul Naiknya Harga BBM. Yudhoyono memastikan bahwa harga BBM akan naik hingga 30 persen, dan tentu saja rakyat diminta menerima "dengan lapang dada", sembari menjanjikan kompensasi bagi rakyat miskin.

Tulisan ini hendak mengingatkan kita semua bahwa kenaikan harga BBM adalah sebuah lagu lama yang coba diaransemen ulang. Presiden Yudhoyono menyatakan menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir dari berbagai skenario untuk mengamankan anggaran pendapatan dan belanja negara. Alasan kenaikan harga BBM tahun ini juga sesungguhnya alasan lama yang sama, sewaktu Yudhoyono-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM pada 2005, yang hampir mencapai 120 persen. Dengan nada yang sangat menyedal dan intonasi yang sedih, Yudhoyono menyampaikan kondisi naiknya harga minyak dunia yang dinilai akan mempengaruhi APBN jika pemerintah tetap memberikan subsidi kepada rakyat, yang sama artinya menciptakan defisit anggaran dan pada akhirnya akan membebani APBN.

Kenaikan harga BBM sebagaimana yang direncanakan pemerintah sesungguhnya bukan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, melainkan mengamankan anggaran belanja negara, sedangkan kita mengetahui bahwa APBN kita tidak pernah berpihak kepada rakyat. Ini dapat dilihat dari komposisi anggaran yang sebagian besar diperuntukkan bagi kepentingan pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri yang mencapai Rp 94 triliun per tahun, peruntukan obligasi perbankan Indonesia antara lain melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang mencapai Rp 60 triliun per tahun, belum lagi untuk membiayai kebutuhan birokrasi aparatus negara. Bahkan dalam catatan Koalisi Anti-Utang disebutkan bahwa tidak kurang dari 46 persen pos dalam APBN kita setiap tahunnya tidak terserap. Ini sama artinya dengan pemerintah sesungguhnya tidak becus membuat perencanaan strategis, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Agenda liberalisasi

Agenda kenaikan harga BBM sesungguhnya menjadi agenda liberalisasi atas sumber daya alam, khususnya liberalisasi di sektor minyak dan gas.

Kenaikan harga minyak dunia sesungguhnya tidak cukup mendasari pencabutan subsidi BBM kepada rakyat dan menaikkan harga BBM. Sebab, konstitusi, yang mewajibkan negara memberi jaminan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa dibatasi oleh mekanisme pasar dunia yang liberal.

Krisis energi selalu dipakai pemerintah untuk memuluskan kebijakannya, seperti memaksakan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir dan kali ini dipakai untuk menaikkan harga BBM. Krisis energi yang dialami Indonesia saat ini tidak lebih disebabkan oleh kebijakan negara terhadap kegiatan pembangunan yang mengarah pada industrialisasi yang menyebabkan tingkat konsumsi energi begitu tinggi dan telah mengakibatkan krisis lingkungan hidup yang semakin tidak terpulihkan. Kasus Lapindo menjadi contoh kerusakan lingkungan hidup dan tragedi kemanusiaan yang paling kontekstual, dengan atas nama pemenuhan produksi energi.

Agenda kenaikan harga BBM memang tidak bisa hanya melihat Yudhoyono-Kalla sebagai aktor tunggal, Yudhoyono-Kalla tidak lebih hanya boneka yang dipakai oleh aktor liberalisasi, antara lain lembaga keuangan internasional dan pemodal. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia menyebutkan kenaikan harga BBM disinyalir hanya membuka pintu bagi 107 pengusaha swasta asing dan domestik yang sudah memiliki izin prinsip usaha hilir BBM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yang 90 persen usaha hulu (eksploitasi) migas telah dikuasai sepenuhnya oleh modal asing. Secara keseluruhan, sektor minyak telah didedikasikan untuk pasar bebas dan bukan demi kepentingan rakyat.

Liberalisasi migas adalah salah satu paket yang tercantum dalam nota kesepahaman antara Indonesia dan IMF pada 1998. Dari sini kita dapat menyatakan pemerintah saat ini lebih patuh kepada industri dan bisnis multinasional serta pemerintah negara-negara Utara ketimbang mengurus rakyatnya. Yudhoyono tidak segan-segan menurunkan popularitasnya di mata rakyat daripada popularitasnya turun di mata para aktor liberalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Permen politik

Pemerintah berjanji akan memikirkan rakyat miskin sebagai prioritas ketika harga BBM dinaikkan. Ada beberapa opsi yang ditawarkan pemerintah Yudhoyono-Kalla sebagai kompensasi untuk rakyat miskin atas naiknya harga BBM, antara lain, melalui bantuan langsung tunai plus (BLT plus) dan Program Nasional Pembangunan Mandiri, di mana

sejumlah dana akan digelontorkan oleh World Bank: Rp 19,7 triliun pada tahun ini dan Rp 58 triliun pada 2009.

Perlu diketahui, BLT plus yang akan diberikan pemerintah kepada rakyat miskin sesungguhnya tidak lebih hanya menjadi alat untuk menyuap rakyat miskin. Apa yang disampaikan Yudhoyono bahwa dia tidak peduli dengan popularitasnya menjelang Pemilu 2009 sesungguhnya bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dana BLT plus yang akan diberikan Yudhoyono akan didorong sebagai "kemurahan hati" Yudhoyono kepada rakyat miskin. Ini bisa dikategorikan sebagai biaya suap politik Yudhoyono kepada rakyat miskin. Tampaknya Yudhoyono akan menggunakan model kampanye karitatif selama kurun waktu satu tahun ini untuk menaikkan lagi popularitasnya dengan segera melalui dana kompensasi atas kenaikan harga BBM ini.

Kompensasi atas kenaikan harga BBM untuk rakyat miskin melalui uang tunai sarat berbagai dampak, terutama dampak sosial dengan meningkatnya konflik horizontal di tengah masyarakat. Dana kompensasi kenaikan harga BBM akan menjadi permen pemanis untuk kepentingan melanggengnya kekuasaan politik dominan menjelang Pemilu 2009, dan naiknya tingkat inflasi karena akan meningkatkan sektor riil di tingkat rakyat tidak lebih hanya pembohongan publik dan akal-akalan pemerintah hari ini. Kenaikan harga BBM justru akan semakin meningkatkan angka kemiskinan dan semakin menjerumuskan rakyat ke dalam krisis turunannya, seperti krisis pangan, yang dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat. Tercatat, tidak kurang dari 4.456 kali peristiwa rawan pangan terjadi di Indonesia.

Rakyat mensubsidi negara

Yudhoyono-Kalla mengklaim bahwa negara telah memberikan subsidi kepada rakyat dengan memberikan harga BBM yang murah, dan hari ini negara akan mencabut subsidi tersebut dengan alasan akan terjadi defisit anggaran APBN. Pertanyaan penting yang mesti dijawab adalah apakah selama ini negara benar-benar telah memberikan subsidi kepada rakyat?

Ketika negara absen memberikan jaminan atas keselamatan, keamanan, serta keberlanjutan kehidupan bagi warga Sidoarjo dalam kasus Lapindo, dan rakyat harus membangun kekuatannya sendiri, seharusnya itu dihitung sebagai sebuah subsidi rakyat kepada negara. Selama ini keselamatan rakyat dihitung negara dalam angka-angka yang sungguh tidak masuk akal, sambil rakyat diminta bersabar dan bertawakal demi keamanan APBN. Ketika pengurus negara bermain-main dalam hitungan angka-angka asumtif, bahwa angka-angka

tersebut sesungguhnya tidak berdiri sendiri, dia akan membangun relasi sebab-akibat dengan derajat kehidupan manusia. Bukankah menurunkan derajat kemanusiaan manusia yang merdeka sama artinya dengan menghilangkan nilai kemanusiaan itu sendiri, dan itu bagian dari sebuah proses pelanggaran terhadap hak asasi manusia?

Pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan yang jauh sekali dari krisis yang dihadapi rakyatnya. Kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan bencana ekologis justru dijawab dengan mengeluarkan kebijakan yang bahkan tidak ada relevansinya sama sekali dengan krisis yang dihadapi rakyat dan bahkan justru menjerumuskan rakyat ke dalam jurang krisis yang lebih dalam. *

Menakar Kedaulatan Pangan Indonesia

Khalisah Khalid

Kedaulatan Indonesia berawal dari kedaulatan pangan. Harapan ini tampaknya sangat masuk akal disampaikan oleh sebuah negara agraris dalam peringatan Hari Pangan, yang jatuh pada 16 Oktober setiap tahun. Namun, menjadi jauh panggang dari api karena dengan sengaja pengurus negara menggunakan pilihan politiknya untuk terus-menerus menciptakan krisis di negeri ini, yang produksi pangannya bergantung pada industri pertanian trans-nasional dan multi-nasional, dan menempatkan pangan sebagai komoditas untuk mengumpulkan akumulasi modal. Padahal, sejatinya, pangan adalah hak dasar rakyat yang penguasaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara, untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Krisis pangan memang tak hanya melanda Indonesia, tapi juga negara miskin dan berkembang lainnya yang bersandar pada kekuatan ekonomi pasar bebas, yang dimainkan oleh World Trade Organization (WTO), yang mengendalikannya pasar dan memaksa Indonesia tunduk dan patuh pada agenda liberalisasi di sektor pertanian. Krisis pangan global memperlihatkan begitu lemah dan tidak berdayanya negara melindungi kebutuhan dasar rakyatnya.

Kondisi krisis keuangan dan ekonomi global yang terjadi saat ini diprediksi juga akan membuat Indonesia menempuh kekeliruan politik yang sama. Paling tidak, ini terungkap dalam diskusi "Krisis Keuangan Amerika Serikat dan Dampaknya terhadap Indonesia" (Jumat, 11 Oktober 2008) oleh gerakan *civil society* di Jakarta bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar Rp 130 triliun yang diperuntukkan bagi perbankan dan sektor keuangan, sementara 67 persen uang yang beredar di Indonesia ada di pasar asing. Itu artinya, ketika krisis ekonomi global terjadi, yang diselamatkan pertama oleh pengurus negara adalah modal, dan lagi-lagi yang diuntungkan dalam krisis ini adalah pasar. Pemerintah tidak memprioritaskan anggaran Rp 130 triliun tersebut untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti petani, nelayan, buruh, dan kaum miskin kota, yang selalu menjadi korban pertama dalam setiap cerita krisis global yang terjadi dan berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari.

Sepuluh langkah (baca: perintah) yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merespons krisis keuangan global, di mana salah satunya berisi seruan untuk menggunakan produk dalam negeri, semakin memperlihatkan dangkalnya pemahaman SBY terhadap

krisis yang dialami oleh rakyat, khususnya petani sebagai penyedia pangan negeri ini. SBY mungkin lupa bahwa sumber pangan kita diimpor dari luar. Masih ingatkah ketika tempe hilang dari peredaran akibat ketergantungan Indonesia pada kedelai, yang 60 persen dari Amerika Serikat dan 85 persennya berasal dari transgenik. Akibatnya, ketika Amerika Serikat memprioritaskan pertaniannya untuk pemenuhan bahan bakar *biofuel*, yang terjadi adalah kerentanan di Indonesia. Sebuah konsekuensi logis atas ketergantungan Indonesia terhadap bahan pangan impor.

Dalam lembar fakta yang dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dinyatakan bahwa krisis finansial dan ekonomi global, serta situasi ekonomi, semakin buruk dan memojokkan mereka, sehingga mereka terdorong melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pertanian berkelanjutan. Salah satu gambarannya adalah dengan memaksakan produktivitas tinggi menggunakan pupuk kimia dan pestisida, yang kemudian menyebabkan terjadinya degradasi kualitas lahan, lalu mereka semakin terdorong untuk menjual lahannya. Perbandingan nilai tukar lahan antara sebagai pertanian dan sektor lain sungguh tidak seimbang, sehingga tidak ada penahan untuk setia pada pertanian.

Revolusi hijau

Rezim SBY-JK bukan tidak mengetahui bahwa Indonesia berada dalam cengkeraman krisis pangan. Paling tidak, kondisi ini tergambar dalam pernyataan Presiden SBY dalam forum pertemuan G-8 di Hokkaido, Jepang. Revolusi Hijau Jilid Kedua adalah agenda yang ditawarkan kepada negara-negara maju tersebut, karena Revolusi Hijau Jilid pertama, yang digulirkan pada 1960, dinilai berjalan dengan sukses. Revolusi Hijau Jilid Kedua diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan Indonesia, jika dilakukan dengan investasi yang masif dan kerja sama yang aktif dalam tingkatan global.

Pernyataan yang disampaikan dalam pidato Presiden ini menjelaskan kepada kita bahwa agenda alternatif yang diusulkan oleh pemerintah tersebut ahistoris, dan menandakan SBY-JK tidak paham dengan krisis pangan yang dialami Indonesia. Agenda alternatif ini sekaligus menandakan bahwa Indonesia akan semakin memperlebar pintu liberalisasi pertanian dan industrialisasi pangan yang akan dikendalikan oleh pasar internasional.

SBY tidak mengerti bahwa krisis pangan global dan khususnya di Indonesia disebabkan oleh kebijakan ekonomi global melalui mekanisme perdagangan internasional, dan kebijakan penguasaan lahan

yang diprioritaskan bagi kepentingan modal, dengan mengkonversi lahan-lahan pertanian untuk membuka perkebunan sawit skala besar. Di Sumatera dan Kalimantan, perluasan perkebunan sawit mencapai 3 juta hektare untuk pengembangan *agrofuel*. Serta menyulap lahan pertanian untuk ekstraksi industri tambang yang memiliki daya rusak yang tinggi. Padahal Departemen Pertanian menyebutkan, kebutuhan terhadap beras Indonesia mencapai 40,182 juta ton pada 2018.

Undang-undang sektoral, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menjadi alat legitimasi yang paling ampuh bagi pemilik untuk mengambil tanah rakyat. Bagi petani, tanah merupakan aset terpenting bagi kegiatan pertaniannya. Sayangnya, pemerintah lalai dalam hal ini. Kepemilikan tanah sebagai pilar terpenting kegiatan produksi semakin lama kian tidak ramah dengan kebutuhan sektor pertanian. Rata-rata lahan kepemilikan rumah tangga petani semakin menciut, bahkan kini di Jawa rata-rata kepemilikan lahan itu hanya 0,25 hektare. Penciutan kepemilikan lahan itu bisa bersumber dari pola warisan yang membuat lahan terfragmentasi, infiltrasi sektor industri atau jasa yang lapar lahan, dan kebijakan pemerintah yang meninggalkan sektor pertanian.

Langkah politik

Sekali lagi, kebijakan politik pengurus negara sangat menentukan apakah Indonesia akan keluar dari krisis pangan ini dan membawa negeri ini pada kedaulatan yang hakiki. Pemerintah seharusnya berani mengeluarkan sikap politik dan langkah-langkah politik yang penting dan mendesak. Krisis ekonomi dan keuangan saat ini bisa dijadikan sebagai momentum politik untuk mengeluarkan kebijakan yang strategis di bidang pangan dan pertanian. Reformasi agraria merupakan salah satu jalan menuju kedaulatan pangan, dengan meletakkan tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi, dan tata konsumsi kepada pemangku kepentingan terbesar, yakni rakyat Indonesia.

Koran TEMPO-10 Juni 2008

Krisis Kedaulatan dalam Perspektif Politik Hijau

Khalisah Khalid

Hari Lingkungan pada 5 Juni 2008 menjadi sebuah momen penting untuk melihat lebih jauh arah gerakan lingkungan di Indonesia, sebagai sebuah gerakan perlawanan yang lahir dari kesadaran akan kondisi pembangunan yang tidak adil, khususnya bagi negara yang berada di belahan selatan, belahan bumi yang selalu menjadi sumber eksploitasi sumber daya alamnya.

Jika dicermati, ada tiga isu utama yang selalu disampaikan oleh pengurus negara tentang krisis yang dialami oleh rakyat. Dalam membaca sebuah krisis, pengurus negara mampu melihat peta persoalan yang dialami oleh rakyatnya, antara lain krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Sayangnya, road map yang dibuat sebagai sebuah solusi atas krisis yang dihadapi tidak ada relevansinya dengan krisis yang dialami oleh rakyat. Semua krisis dijawab dengan peta jalan memberikan alternatifnya dan mekanismenya kepada pasar, entah itu melalui regulasi, privatisasi, maupun liberalisasi yang semuanya dimainkan dalam sebuah alunan orkestra penjajahan yang melemahkan negara di dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyatnya.

Bagi Cecil Rhodes (1852-1902), kolonialisme adalah penemuan tanah baru yang dari tanah tersebut dapat dengan mudah didapatkan bahan-bahan mentah (sumber daya alam) yang dapat dieksploitasi dengan menggunakan buruh murah dari penduduk pribumi. Sumber daya alam sesungguhnya selalu menjadi alasan utama bagi kolonial di mana pun untuk mendominasi dan menanamkan kekuasaannya. Dari sini saja jelas digambarkan bahwa penguasaan negara (kolonialisasi) terkait erat dengan sumber daya alam sebuah negara.

Sumber daya alam berupa bahan mentah yang dikeruk menjadi sebuah komoditas di dalam kerangka pemenuhan konsumsi bagi negara-negara maju. Kebutuhan tersebut bukan ditentukan oleh konsumennya, melainkan oleh sebuah sistem ekonomi kapitalis yang menjual jargon globalisasi dan pasar bebas. Sementara negara yang ditempatkan sebagai penghasil sumber daya alamnya justru kehilangan akses atas sumber dayanya.

Ini lah yang kemudian dinamakan dengan krisis kedaulatan yang disebabkan oleh adanya dominasi ekonomi global yang dibangun oleh

sebuah sistem kapitalis, yang penguasa modalnya dalam hal ini TNC's/MNC's, lembaga keuangan internasional maupun elite oligarki di Indonesia, melumpuhkan kedaulatan negara untuk mampu menjalankan mandat konstitusinya untuk menjamin pemenuhan terhadap hak-hak dasar rakyatnya. Dominasi atas kekuatan ekonomi terhadap pengelolaan sumber daya alam menempatkan modal sebagai lokomotif dari seluruh cerita eksploitasi sumber daya alam.

Keadaan ini lebih lanjut telah menghancurkan nilai-nilai kedaulatan dan keadilan intra dan antargenerasi yang selanjutnya telah menciptakan pemiskinan rakyat. Kemerosotan kedaulatan ini ditandai dengan semakin hilangnya hak menentukan nasib sendiri, di tataran negara hingga di tataran satuan-satuan politik yang terkecil. Kemudian kemerosotan nilai keadilan tampak dari adanya ketimpangan distribusi manfaat, bahkan hilangnya hak-hak rakyat atas tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, kekuatan elite politik dan ekonomi yang mewarisi watak penguasa sebelumnya telah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya kembali dalam ruang-ruang politik.

Ketimpangan yang dialami bangsa ini juga merupakan potret global bahwa terjadi ketimpangan dalam kesejahteraan dan penguasaan asset antara segelintir orang dengan mayoritas rakyat di dunia. Tingkat kesejahteraan yang tinggi yang dinikmati oleh segelintir orang ini dapat berlangsung, karena pengisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara dunia ketiga atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya.

Di sisi lain gaya hidup, pola konsumsi, dan tingkat kesejahteraan segelintir orang ini bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup di negara-negara yang menjadi sumber pengisapan karena eksploitasi yang membabi buta. Pola konsumsi segelintir kelompok secara berlebih telah menyebabkan munculnya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang berdimensi global. Ini sekaligus kritik terhadap pandangan yang menyebutkan bahwa kelebihan populasi penduduk berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam di negara miskin yang jumlah penduduknya besar seperti Indonesia.

Krisis lingkungan

Paradigma pembangunan yang mengacu pada nilai-nilai yang dibangun oleh sistem ekonomi global selalu memiliki watak yang eksploitatif, pertumbuhan ekonomi hanya mengandalkan sektor tertentu yang ekstraktif, seperti pertambangan dan kehutanan yang berkonsekuensi pada perubahan fungsi bentang alam. Atau, seperti perkebunan dan

pembangunan infrastruktur yang menyingkirkan kebutuhan lain seperti lahan untuk penyediaan lahan pangan, dan akibat lebih lanjut adalah menghasilkan pengungsi ekologis dan pengungsi pembangunan.

Jon Schubart menyatakan bahwa ekologi politik mencoba untuk menelusuri empat hal, yakni (a) bagaimana struktur sosial dan alam saling menentukan, dan bagaimana keduanya membentuk akses terhadap sumber daya alam, (b) bagaimana konsep alam dan masyarakat yang telah dikonstruksi menentukan interaksi manusia dengan lingkungan, (c) koneksi antara akses terhadap dan kontrol atas sumber daya dan perubahan lingkungan, (d) hasil sosial dari perubahan lingkungan.

Gerakan politik lingkungan di Indonesia harus mampu menjelaskan bahwa persoalan lingkungan tidak sesederhana yang dibayangkan, tidak hanya bicara soal sains dan teknologi. Bicara soal lingkungan artinya kita bicara tentang persoalan yang lebih mendasar tentang sosial-politik, dan ekonomi-politik, bahwa saat ini ada kondisi yang tidak adil atas nama pembangunan ekonomi global, yang menghasilkan perubahan lingkungan yang tidak adil, khususnya bagi negara dunia ketiga. Konstruksi yang ingin kita bangun ulang tentu saja dengan fondasi yang melihat kelas siapa yang hari ini paling dimiskinkan, disingkirkan, dihilangkan hak-hak dasarnya.

Gerakan politik lingkungan di Indonesia saat ini harus memiliki kemampuan untuk memperbesar dan memperluas gerakannya, dan itu hanya bisa dilakukan jika subyek dari gerakan politik lingkungan itu adalah basis massa yang memiliki garis ideologi yang berpikir bahwa perjuangan penegakan keadilan ekologi bukan sekadar membicarakan soal degradasi lingkungan, tetapi juga membicarakan soal keberlanjutan generasi yang akan datang. Bicara soal gerakan lingkungan juga tidak terlepas dari bicara soal bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat terhadap hak-hak dasarnya yang dibangun dengan semangat kolektivitas.

Jika Indonesia ingin keluar dari krisis lingkungan dan krisis kedaulatan, maka pada seluruh cerita model pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harusnya menggunakan tiga hal mendasar dan semuanya harus didefinisikan menurut korban terbesar dan siapa yang paling ter subordinasi dalam pembangunan. Tiga hal mendasar tersebut adalah bagaimana jaminan keselamatan rakyatnya, bagaimana jaminan atas kesejahteraan dan produktivitasnya, dan bagaimana jaminan atas keberlanjutan dari fungsi pelayanan alamnya. Semuanya harus menjadi pilar utama dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

Permen Politik Korporasi

Khalisah Khalid

Tanggung jawab sosial perusahaan tiba-tiba memang menjadi isu yang hangat diperbincangkan, setelah kewajiban *corporate social responsibility* (CSR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), khususnya pada Bab V, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun bukan barang baru--karena CSR lebih dikenal dengan istilah *community development*, meskipun lagi-lagi komunitas hanyalah menjadi alat jualan--perjalanan proyek *community development* biasanya selalu mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai basis perencanaan dan pelaksanaannya di lapangan.

Yang pasti, undang-undang ini jauh lebih populis dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, yang juga mengatur tanggung jawab perusahaan terkait dengan permasalahan lingkungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Bahkan undang-undang ini telah membangun opini publik perihal kebaikan hati perusahaan yang seolah-olah memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar, terhadap lingkungan, dan bahkan kehidupan berbangsa, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Yudhoyono dalam pidatonya pada pembukaan Apindo, Maret 2008.

Dalam diskusi yang mempertanyakan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada 16 Desember 2008, sempat terbersit pernyataan yang menggelitik: apakah tanggung jawab sosial perusahaan itu merupakan sebuah manifestasi sosialis ala kapitalis? Pertanyaan ini tentu saja tidak ingin mengatakan bahwa korporasi yang berbaju kapitalis itu memiliki ideologi lainnya, yakni sosialisme, karena tentu saja itu sama artinya dengan pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar kapitalisme yang mereka anut.

Pertanyaan ini untuk mengantarkan kita pada sebuah paradoks atas upaya korporasi untuk membangun opini publik yang baik di tengah masyarakat, di tengah bobroknnya sistem kapitalisme yang diagung-agungkan yang selalu menyisakan berbagai persoalan rakyat, mulai dari kerusakan lingkungan karena industri ekstraktif yang memiliki daya rusak tinggi dan tidak terpulihkan, masalah sosial, hingga pelanggaran

terhadap hak asasi manusia, baik menyangkut hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak sipil dan politik.

Ada filosofi yang mendasari praktek CSR saat ini, yang tetap meletakkan ideologi neo-liberalisme sebagai dasar-dasar atau nilai-nilai yang dianutnya. Tentu saja bukan sesuatu yang ahistoris, karena korporasi-korporasi masuk dan memastikan menjadi alat yang bisa mengontrol negara melalui kekuatan modalnya. CSR kemudian lahir untuk membangun negara di dalam negara, salah satunya dengan mengambil-alih peran dan tugas negara melalui dana yang dimiliki oleh korporasi. Karenanya, sangat beralasan jika proyek CSR tidak pernah akan dapat menyentuh persoalan mendasar yang dialami oleh rakyat. Bahwa sesungguhnya, dalam cerita pengelolaan sumber daya alam, masalah utamanya adalah soal tata kuasa yang timpang antara rakyat sebagai pemangku kepentingan terbesar dan korporasi. Sementara itu, negara, yang diharapkan menjadi payung bertindung, justru absen dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Belajar dari lima perusahaan yang mengklaim dirinya telah melakukan praktek CSR, baik yang baru mengeksplorasi maupun yang sudah mengeksploitasi, antara lain Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), PT Medco E&P Indonesia, PT DPM, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Newmont Nusa Tenggara, terbukti bahwa CSR hanyalah gula-gula atau pemanis dan taktik perusahaan untuk menutupi berbagai kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran terhadap hak asasi lainnya yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kemudian dikompensasi dalam bentuk proyek CSR antara lain membangun jalan, jembatan, masjid, sekolah dan lain-lain yang tidak ada relevansinya dengan krisis yang dialami oleh rakyat akibat ekstraksi sumber daya alam yang dilakukan. Bahkan, CSR tidak mampu mengubah secara mendasar, ketimpangan relasi kuasa atas akses dan kontrol terhadap sumber daya alam antara komunitas lokal dengan perusahaan yang dalam hal ini selalu membangun relasinya dengan negara.

Dengan filosofi yang dianut oleh kapitalisme, perusahaan sesungguhnya juga sedang mencari keuntungan yang bisa diperoleh dari pencitraan yang dibangun melalui CSR sebagai medianya. Seluruh pembangun infrastruktur sering kali diklaim oleh perusahaan sebagai budi baik mereka, padahal sesungguhnya seluruh pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan di lingkaran industri mereka tidak lebih untuk menjaga alir kapital mereka berjalan dengan baik, tanpa terganggu oleh sarana dan prasarana. Karena itulah, tidak mengherankan jika kemudian ada ungkapan yang menyatakan bahwa setiap 1 dolar yang dikeluarkan oleh alat kapital harus bisa mendatangkan 10 dolar

keuntungan bagi pelanggaran kekuasaan dan rente ekonominya. CSR hanya salah satu dari sekian banyak strategi yang dimainkan oleh pasar untuk mengakumulasi keuntungannya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Milton Friedman, aktor intelektual neo-liberal, bahwa "korporasi adalah milik pemilik sahamnya, jika eksekutif perusahaan memperlakukan nilai-nilai sosial dan lingkungan, hal itu merupakan bagian dari cara untuk memperbesar keuntungan pemilik saham".

Inkonstitusional

Bicara dalam konteks negara, praktek tanggung jawab sosial perusahaan saat ini sedang berupaya mengalihkan apa yang menjadi tanggung jawab negara kepada aktor lain yang justru menjadi sumber masalah dalam cerita kemiskinan di wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam. Dalih yang selalu disampaikan oleh pemerintah adalah, CSR menjadi bagian dari bentuk komitmen industri terhadap proses pembangunan berkelanjutan, selalu dijadikan basis utama atas pengingkaran menjalankan kewajiban negara untuk memastikan seluruh jaminan keselamatan, kesejahteraan, produktivitas.

Studi kasus praktek CSR di PT Kaltim Prima Coal, atau yang kini telah beralih ke tangan Bumi Resources yang dimiliki oleh keluarga Bakrie, menemukan bagaimana sebesar 78,1 persen peran negara telah beralih kepada PT Kaltim Prima Coal ini. Dan hal yang sering kali dilupakan adalah PT Kaltim Prima Coal ini merupakan salah satu perusahaan, dari enam perusahaan batu bara, yang sempat mengemplant royalti 13,5 persen kepada negara, yang seharusnya dengan royalti tersebut negara dapat menjalankan fungsi dan perannya, bukan dengan menyerahkannya kepada perusahaan melalui CSR yang dapat berimplikasi secara politik ketika perusahaan tersebut melakukan perusahaan lingkungan.

* * *

George Junus Aditjondro, peneliti CSR, menyatakan bahwa CSR yang diwajibkan dalam UU PT ini, yang saat ini dipraktekkan, merupakan tindakan yang inkonstitusional atau melanggar undang-undang dasar negara sebagai konstitusi negara, khususnya yang terkait dengan pemenuhan atas hak-hak dasar rakyat sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara kita. Beralihnya peran negara, khususnya dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya kepada korporasi besar, perlahan telah membentuk sebuah kekuatan negara di dalam negara.

Akhirnya, jika pemerintah tidak ingin disebut telah melakukan tindakan

yang menyalahi mandat konstitusi negara, sebaiknya pemerintah tidak menyerahkan fungsi dan perannya kepada korporasi melalui dana CSR-nya. Terlebih, praktek CSR selama ini hanya menjadi upaya menutupi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan, dan juga melanggengkan konflik horizontal di tingkat masyarakat karena biasanya dana CSR digunakan oleh perusahaan untuk meredam kesadaran kritis masyarakat yang hidup di lingkaran industri ekstraktif.

Membaca (Lagi) Krisis Pulau Jawa

Khalisah Khalid

Cerita tentang krisis Pulau Jawa bukan hal yang baru, demikian juga dengan prediksi bahwa pulau ini akan tenggelam karena sudah kelebihan beban. Maklum, banjir pernah mengepung Pulau Jawa pada 2007. Pada awal tahun ini, banjir juga menenggelamkan tiga perempat wilayah Jakarta, 62 kecamatan di Jawa Barat, 7 kabupaten di Jawa Tengah, dan 4 kabupaten di Jawa Timur. Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jatam pada 2000-2003, tidak kurang dari 2.822 desa tenggelam akibat banjir, dengan kerugian yang tidak sedikit.

Walhi telah mengingatkan soal peta rawan bencana di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang mempunyai beban cukup tinggi. Pulau ini memiliki 125 juta jiwa atau sekitar 65 persen dari total penduduk di Indonesia. Namun, warga sebanyak itu mendiami pulau kecil yang luasnya hanya 7 persen dari seluruh luas daratan Indonesia, dengan kapasitas penyediaan air yang tinggal 4 persen dari ketersediaan air nasional. Dengan luas wilayah kurang-lebih 13 juta hektare, Pulau Jawa hanya memiliki 1,9 juta hektare tutupan hutan. Artinya, Pulau Jawa tinggal menunggu waktu untuk tenggelam.

Saat ini Pulau Jawa sebenarnya tidak lagi memiliki hutan alam. Yang tersisa hanya kebun kayu di bawah pengelolaan badan usaha milik negara, yakni Perhutani. Selama pengelolaan oleh Perhutani, telah terbukti bahwa kondisi hutan Jawa semakin hari semakin hancur. Belum lagi peminggiran terhadap petani-petani di Jawa yang tidak lagi memiliki lahan, sehingga mereka terpaksa harus hidup di kawasan dengan kemiringan yang sangat rawan terhadap bencana.

Potret kehancuran Jawa

Membaca peristiwa banjir yang kini menenggelamkan sebagian Pulau Jawa tidak lepas dari model dan pilihan pembangunan yang mulai dipraktekkan sejak zaman kolonialisasi, ketika Daendels membangun jalan sepanjang Anyer-Panarukan. Praktek industrialisasi yang disokong infrastruktur raksasa inilah yang kemudian menjadi landasan atau pijakan model pembangunan, yang berujung pada tata kuasa, tata penggunaan lahan, tata produksi, serta tata konsumsi yang menguntungkan segelintir elite kuasa politik dan modal.

Jared Diamond dalam teori *collapse*-nya mengatakan runtuh dan berkembangnya satu entitas dalam satuan lingkungan bukan ditentukan oleh kondisi geografik alaminya saja. Pilihan untuk bertahan atau *collapse* jatuh pada entitas manusia yang tinggal di dalamnya. Entitas pada konteks tertentu ditentukan oleh pilihan pemimpinnya. Tampaknya pemimpin entitas manusia Pulau Jawa memilih jalan menuju *collapse* dengan membiarkan bencana terjadi dengan intensitas yang meningkat dari tahun ke tahun. Bencana itu pun diatasi dengan cara yang terus-menerus sama, yakni pembangunan infrastruktur raksasa, mobilisasi bantuan secara serampangan, sambil terus menyalahkan alam.

Berbagai fakta kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang terjadi hingga hari ini semestinya dibaca dalam logika kompleks antara pertumbuhan yang diagung-agungkan, ketidakpahaman atas perubahan lingkungan Pulau Jawa, dan pengabaian atas biaya yang ditanggung warga dalam sejarah pembangunan. Biaya tersebut adalah kemiskinan struktural yang menghasilkan kerawanan pangan serta krisis air bersih dan energi yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh perubahan alih fungsi lahan telah mengubah fungsi lindung. Sementara itu, sedimentasi dan pencemaran air sungai serta pencemaran tanah oleh logam berat terus terjadi tanpa tertangani. Kenyataan ini semakin memicu Jawa bukan hanya berada di titik nadir kehancuran ekologis, tapi juga menuju kehancuran kehidupan (*collapse*).

Diamond mengingatkan bahwa kehancuran lingkungan pada peradaban manusia memicu konflik antarwarga yang sebetulnya bibitnya sudah ada. Kondisi krisis pun digunakan sebagai sarana politik menjatuhkan lawan dengan menyabotase tanggap darurat bencana. Dalam kondisi yang demikian, bukan hanya kondisi perubahan lingkungan yang menjadi ancaman, melainkan respons elemen-elemen negara dan politik yang tampak memilih jalan kehancuran yang jauh lebih mengancam.

Respons rakyat menghadapi krisis Jawa

Sebanyak 83 persen kawasan kepulauan Indonesia pada dasarnya rawan terhadap bencana dan 90 persen warga negara Indonesia terancam keselamatannya. Sering kali negara dan rakyat berada di ruang yang berbeda ketika terjadi bencana, meskipun ada Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kita tidak bisa lagi banyak berharap dari negara, meskipun negara tetap harus dikuatkan untuk menjalankan fungsi dan perannya memberikan jaminan keselamatan, produktivitas,

kesejahteraan, dan keberlanjutan pelayanan alam.

Dalam banyak laporan tampak jelas, warga di wilayah krisistlah yang lebih cepat merespons situasi yang dihadapi sebagai bagian dari cara bertahan di tengah bencana dan seluruh kerepotan yang dihadapinya. Banyak catatan dan pengalaman yang bisa didapat selama terjadinya bencana, paling tidak rakyat sudah membangun inisiatifnya sendiri untuk bahu-membahu menghadapi krisis. Inilah yang dinamakan subsidi rakyat kepada negara, karena negara lamban merespons krisis rakyatnya.

Lagi, Negeri yang tidak becus mengurus sampah

Khalisah Khalid

Jum'at dini hari tiba-tiba saya dikejutkan kabar dari seorang kawan wartawan, TPA. Bantar Gebang longsor. Sedikitnya 3 orang tewas dan seorang diantaranya ibu hamil, serta beberapa orang lainnya dirawat di rumah sakit. Seketika ingatan saya menerawang pada peristiwa Leuwigajah Bandung-Jawa Barat yang terjadi beberapa waktu lalu, yang menewaskan ratusan orang. Akhirnya, bencana itu terjadi lagi disini. Meskipun dengan jumlah korban yang lebih sedikit, tapi bukankah nyawa satu orang, sama artinya dengan nyawa ratusan orang. Sudah dapat ditebak jalan cerita dari peristiwa longsonya TPA Bantar Gebang, Pemerintah yang cuci tangan, dan pihak swasta dalam hal ini PT. Patriot Bangkit Bekasi (PT.PBB) yang sibuk membela diri, dan pihak Kepolisian yang tidak bisa menangkap dan mengadili pihak pemerintah baik Pemprov. DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Bekasi, dan PT. PBB yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan dari system pembuangan sampah sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Meskipun terasa pahit untuk diucapkan, entah kenapa saya begitu yakin bahwa peristiwa bencana yang betul-betul diakibatkan oleh kesalahan manusia ini akan terjadi lagi, dan perkiraan kuat saya akan terjadi di Jakarta. Dugaan ini bukan sekedar ramalan atau *feeling* saja, karena saya bukan seorang peramal yang bisa menebak rentetan peristiwa bencana yang akan terjadi. Bacaan saya merupakan prediksi lingkungan hidup dari aktifitas keseharian yang saya jalani. Prediksi daerah-daerah rawan bencana yang disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, sebenarnya menyangkut bencana ekologis yakni sebuah bencana yang diakibatkan oleh murni kesalahan manusia didalamnya. Bencana longsor di TPA Bantar Gebang sama dengan bencana longsor yang terjadi di TPA Leuwigajah, dimana bencana ini terjadi akibat dari kelalaian pemerintah yang hingga hari ini tidak memiliki manajemen pengelolaan sampah yang baik. Rakyat miskin seperti pemulung yang seharusnya dilindungi hak asasinya oleh Negara, justru menjadi korban dari buruknya pengelolaan sampah.

Negeri ini memang selalu memproduksi bencana, sayangnya bencana itu bukan bencana alam. Melainkan sebuah bencana yang seharusnya tidak perlu terjadi, karena berbagai pengalaman seharusnya menjadi pembelajaran untuk pengurus negeri ini. Tapi nampaknya harapan seperti jauh api dari panggang, karena negeri ini memang tidak pernah becus mengurus persoalan rakyat. Longsonya TPA Bantar Gebang

hanyalah salah satu dari rangkaian berbagai peristiwa bencana dari kesalahurusan pengelolaan lingkungan hidup.

Akibat Manajemen Sampah yang Buruk

Persoalan sampah bukanlah persoalan baru di DKI Jakarta dan juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia. 6000 ton dihasilkan setiap harinya oleh ibukota provinsi ini, dan hampir sebagian besar dibuang di kawasan sanggahan Jakarta. TPA Bantar Gebang adalah salah satu kawasan yang selama 17 tahun dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah DKI Jakarta, sekitar 4000 ton sampah dibuang ke tempat ini. Sehingga seharusnya pemerintah sudah bisa memprediksi bahwa ini akan sangat berbahaya dan mengancam keselamatan rakyat yang hidup di area Bantar Gebang.

Zona III A yang longsor ini, ketinggian sampahnya sudah mencapai 20 Meter, yang artinya memang pengelolaan di zona ini menggunakan model *open dumping*, meskipun PT. Patriot Bangkit Bekasi (PT. PBB) sebagai pihak swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah membantahnya, dengan mengatakan bahwa mereka menggunakan model sanitary landfill.

Hingga saat ini, pemerintah tidak memiliki model pengelolaan sampah yang baik. Paradigma membuang sampah, bukan hanya ada di masyarakat awam, paradigma ini justru masih bercokol dibenak pejabat pemerintah. Jika melihat dari master plan pengelolaan sampah sampai tahun 2015, kita dapat menilai bahwa paradigma pemerintah dalam mengelola sampah tidak berubah. Pemerintah sudah seharusnya mereduksi model pembuangan sampah, apalagi biasanya lahan yang digunakan sebagai TPA/TPST adalah lahan-lahan produktif masyarakat.

Pemerintah selalu bertumpu pada teknologi yang canggih, padahal teknologi saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Karena bicara soal pengelolaan sampah, sebenarnya kita sedang bicara 85% soal gaya hidup masyarakat kota yang cenderung konsumtif. Pola konsumtif yang memang dirangsang oleh pertumbuhan pasar (kapitalisme), yang menempatkan konsumen hanya sebagai objek dari produk-produk yang dihasilkan. Tengoklah, apakah pihak produsen yang menghasilkan banyak sampah dan turut serta berkontribusi dalam menumpuknya sampah, telah ikut bertanggungjawab terhadap sampah kemasan produksinya??, jawabannya tidak ada.

Pemerintah sudah seharusnya tegas kepada pihak produsen yang tidak mempunyai system pengelolaan kemasan dari produk yang dihasilkan. Dipihak masyarakat sebagai konsumen juga harus membangun

kekuatannya sebagai konsumen untuk menuntut dan mendesak pihak produsen bertanggungjawab terhadap emasan produknya. Bukankah konsumen ketika memilih produk (sabun, shampo dan lain-lain), sebenarnya sedang membeli isinya, bukan kemasannya. Sehingga kemasannya harus diserahkan kembali kepada pihak produsen, karena jumlahnya cukup signifikan untuk menghasilkan sampah di kota-kota besar.

Dibeberapa komunitas sebenarnya sudah mencoba untuk melakukan inisiatif pengelolaan sampah untuk membantu meringankan beban tugas pemerintah, misalnya dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Tapi tampaknya upaya masyarakat tersebut tidak cukup mendapat respon yang positif dari pihak pemerintah, misalnya petugas kebersihan yang system mengangkut sampahnya tetap dicampur, sehingga masyarakat beranggapan percuma. Selain itu juga system birokrasi pemerintah yang tidak bisa menjadi panutan untuk mengelola sampah dari kantornya masing-masing. Cobalah diperiksa, apakah kantor-kantor instansi pemerintah sudah mengelola gaya hidupnya untuk tidak boros memakai penggunaan kertas.

Menantikan Payung Hukum Pengelolaan Sampah

Meskipun korban jiwa yang ditimbulkan akibat buruknya pengelolaan sampah oleh Pemerintah telah berjatuhan, selain itu juga konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah yang menolak kawasannya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah atau tempat pengelolaan sampah, seperti peristiwa bentrokan yang terjadi ketika warga menolak TPST Bojong. Kita melihat bahwa Negara masih menganggap bahwa persoalan sampah bukan menjadi prioritas utama dari persoalan negeri ini. Mungkin persoalan sampah dianggap tidak politis, padahal pengelolaan sampah telah menjadi komoditas bisnis elit yang menghasilkan proyek-proyek yang tidak sedikit nilainya. Selain itu, persoalan sampah juga telah menimbulkan konflik social yang besar di masyarakat dan juga telah mengakibatkan banyak nyawa rakyat miskin yang harus melayang tertimbun sampah.

Bukti dari ketidakseriusan Negara mengurus soal sampah adalah masih terkatung-katungnya rancangan undang-undang (RUU) pengelolaan sampah, dan konon sampai sekarang masih ada di Departemen Hukum dan HAM. Padahal rancangan ini sudah 3 tahun ini menantikan untuk segera disahkan menjadi undang-undang, dan dapat segera menjadi landasan hokum dalam pengelolaan sampah secara nasional terutama bagi kota-kota besar yang mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

5 (lima) aspek yang harus ditinjau dalam pengelolaan sampah, tidak menjadi sebuah acuan dalam kerangka pengelolaan sampah yang baik. 5 (lima) aspek tersebut antara lain menyangkut perangkat undang-undangnya, kelembagaannya, aspek pembiayaan, aspek teknologi dan aspek peran serta masyarakat. Kelima aspek tersebut, jika dijalankan secara baik dan konsisten, sesungguhnya cukup signifikan menjawab persoalan sampah.

Undang-undang ini sekaligus juga dapat secara jelas membagi tugas dan kewenangan setiap orang didalam pengelolaan sampah, selain Pemerintah dan pihak swasta, peran serta masyarakat juga bisa mengacu pada undang-undang ini.

Undang-undang ini sekaligus juga dalam rangka penegakan hukum bagi pihak swasta yang selama ini dipercaya untuk mengolah sampah, tapi tidak konsisten dalam menjalankan kerjasama yang dibuat dengan alasan dana. Seperti yang terjadi di Bantar Gebang, jika pihak perusahaan benar-benar menggunakan system sanitary landfill, maka peristiwa longsor ini tidak akan terjadi. Jadi jelas, PT. PBB telah melakukan kebohongan public, dan undang-undang pengelolaan sampah harusnya bisa menjadi alat hukum untuk menyeret PT. PBB ke Pengadilan sebagai pelaku kejahatan lingkungan.

Bencana longsornya TPA untuk yang kedua kalinya, harus bisa menjadi pelajaran berharga buat pemerintah, sehingga tidak akan dicap pemerintah tak ubahnya seperti keledai yang sudah dua kali jatuh dalam lubang yang sama. Persoalan sampah yang harus diperbaiki diantaranya manajemen (pengelolaan sampah), serta payung hukum pengelolaan sampah yang harus segera disahkan. Sudah waktunya, Rancangan Undang-Undang pengelolaan sampah segera dibahas dan disahkan, agar rakyat tidak lagi menjadi korban dari longsor sampah yang bisa terjadi di daerah lainnya (selesai).

Ketika Gong RUU Pengelolaan Sampah telah Ditabuh

Khalisah Khalid

Kompleksitas Persoalan Sampah

Persoalan sampah kembali mencuat, ketika Pemerintah kota Bandung akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah yang menggunakan teknologi *incenerator* di Gedebage, yang ditolak oleh masyarakat setempat yang tentu saja tidak menginginkan ruang hidupnya tercemar oleh TPST. Sebuah fenomena penolakan masyarakat yang daerahnya dijadikan sebagai TPA/TPST atau apapun namanya terjadi hampir di kota-kota besar di Indonesia. Persoalan ini kemudian terus berlangsung dan bahkan selalu direplikasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sama, meskipun mendapatkan pertentangan keras di masyarakat. Belum lagi bencana yang ditimbulkan akibat buruknya manajemen pengelolaan sampah, longsor sampah dan banjir selalu menghantui perjalanan kota-kota besar yang memproduksi banyak sampah.

Siapapun akan mengatakan bahwa persoalan sampah begitu kompleks, dan membutuhkan perhatian semua pihak untuk menanganinya. Namun sebagai institusi Negara yang diberi mandate oleh rakyat, pemerintah berkewajiban untuk membuat ketentuan hukum dan pelaksanaan dalam pengelolaan sampah. Selama ini, pemerintah selalu menggunakan paradigma lama dan selalu menggunakan pendekatan yang parsial dalam melihat persoalan sampah. Model pengelolaan sampah yang ditawarkan selalu bersandar pada aspek teknologi dan padat modal yang sarat dengan peluang menjadi ladang korupsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah telah mengabaikan sebuah akar persoalan dalam penanganan sampah, bahwa 85% bicara soal sampah berarti bicara soal gaya hidup yang memang sengaja direkayasa oleh pasar, sehingga budaya konsumtif begitu dilanggengkan dan dipelihara. Tidak bisa kemudian gaya hidup hanya diselesaikan dengan teknologi. Apalagi belum pernah ada sejarah yang menunjukkan keberhasilan Indonesia mengelola sampah, karena teknologi canggih yang ditawarkan juga belum terbukti.

Untuk perlu dibangun sebuah aturan dan mekanisme bagaimana persoalan sampah bisa diatasi, dan semua aturan dan mekanisme tersebut akan sulit diwujudkan di Indonesia, karena selama ini tidak

ada payung hukum yang menjadi rujukan bagi semua orang dalam melihat persoalan sampah. Payung hukum pengelolaan sampah menjadi penting untuk diselesaikan secepat mungkin, dikarenakan inilah yang akan menjadi sebuah keputusan hukum yang bisa memastikan seluruh proses pengelolaan sampah sebagaimana yang diharapkan dapat terjadi. Ada beberapa aspek yang dapat terus didesakkan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang pengelolaan sampah, antara lain sebagai berikut:

Pertama, soal kelembagaan yang diberi mandat untuk mengelola sampah, karena tidak cukup hanya dinas kebersihan yang bisa menyelesaikan persoalan sampah. Jika ada pihak swasta yang ditunjuk untuk mengelola sampah, dibutuhkan sebuah aturan main dan penunjukan yang tegas karena selama ini banyak pihak swasta yang tidak menjalankan aturan main yang benar dalam melakukan kebohongan public dalam melakukan usahanya seperti yang dilakukan oleh PT. WGS di TPST Bojong.

Kedua, soal peran serta masyarakat yang seharusnya menjadi bagian yang paling utama dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat ini termasuk didalamnya peran lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti lembaga agama, lembaga kepemudaan, organisasi perempuan dan tentu saja komunitas-komunitas kritis yang selama ini telah berinisiasi melakukan pengolahan sampah dikomunitasnya. Peran serta masyarakat ini juga sekaligus termasuk didalamnya pihak produsen yang selama ini menjadi kontributor terbesar dalam meningkatkan volume sampah dari kemasan produk yang dihasilkan.

Ketiga, pembiayaan yang mengatur soal bagaimana pemerintah dapat menetapkan biaya retribusi sampah dalam rangka pengelolaan sampah yang bisa ditetapkan berdasarkan volume sampah yang ditimbulkan, serta pengaturan pengelolaan retribusi itu sendiri yang dipergunakan untuk kepentingan pengelolaan sampaj yang dicantumkan dalam APBD. Selain itu tentu saja bicara soal kompensasi yang diberikan sebagai sebuah imbalan dampak negative yang telah ditimbulkan akibat pengelolaan sampah, seperti biaya pemulihan lingkungan dan kesehatan yang selama ini terabaikan.

Keempat, bicara soal ketentuan yang mengatur tentang mekanisme hokum dalam pengelolaan sampah, jika terjadi sengketa yang selama ini banyak terjadi di berbagai daerah di kota-kota besar di Indonesia. Ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung dan atau tidak langsung akibat proses pengelolaan sampah. Selain itu juga dalam mekanisme

hukum ini juga diatur tentang pengawasan dan sanksi hukum dalam pengelolaan sampah.

Kelima, baru bicara soal aspek teknis yang mengatur soal tata cara penanganan sampah. Mulai dari pengangkutan, pengolahan dan proses akhir dalam penanganan sampah spesifik. Disinilah baru kemudian bisa dikaji lebih mendalam teknologi apa yang bisa digunakan disuatu tempat yang sesuai dengan karakteristik sampah, sehingga pilihan untuk menggunakan system incinerator telah melalui kajian yang mendalam, terutama yang menyangkut soal kajian dampak kesehatan dan kajian socialnya. Yang harus dipastikan adalah bahwa dalam kurun waktu satu tahun setelah RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang, tidak diperbolehkan lagi menggunakan system *open dumping* seperti yang banyak terjadi di TPA/TPST.

Paling tidak, inilah lima aspek yang penting untuk dilihat dalam pengelolaan sampah yang bisa terus didesakkan kedalam sebuah payung hukum yang akan memastikan semua aturan dan mekanisme dalam pengelolaan sampah memiliki kekuatan hukum untuk dapat mengoptimalkannya. Tanpa payung hukum tetap yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pengelolaan sampah, maka buruknya pengelolaan sampah yang saat ini dipraktekkan, akan terus menjadi persoalan bagi kota-kota besar di Indonesia seperti polusi udara, air dan tanah, serta bencana longsor dan banjir yang akan menjadi keseharian dari rentetan bencana ekologi.

Setelah tiga tahun RUU pengelolaan sampah dinantikan untuk segera dibahas, tersiar kabar baik bahwa saat ini sudah terbentuk Pansus DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang pengelolaan sampah, meskipun belum diketahui oleh public luas dan kapan Pansus ini akan bekerja. Harapan besar tentu saja agar Pansus ini bekerja secara terbuka dan transparan, sehingga public bisa melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berlangsungnya prosesnya pembahasan ini. Kemauan politik dari Pemerintah didalam melihat persoalan sampah begitu dinantikan, sebelum bencana ekologi yang lebih besar terjadi lagi di daerah lain. Keputusan politik untuk menyelesaikan payung hukum ini juga menjadi penting, untuk mengurangi bisnis pengelolaan sampah yang gelap karena banyak penunjukan pengolahan sampah oleh Pemerintah kepada pihak swasta tidak transparan dan accountable. Sehingga kemudian menjadi wajar jika muncul sebuah kecurigaan oleh masyarakat awam, bahwa TPA/TPST atau apapun namanya menjadi lahan bisnis yang begitu empuk, dan selalu menyengsarakan masyarakat yang hidup disekitar TPA/TPST. (selesai)

MEMBACA NASIONALISASI INDUSTRI DARI PERSPEKTIF *GREENPOLITIK*

Khalisah Khalid

Penguasaan asing terhadap perekonomian Indonesia, memang telah sejak lama ditanamkan, paling tidak dalam hitungan masa kolonisasi Belanda. Daendels, menjadi sosok pertama dari jaman kolonisasi Belanda yang meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi di Pulau Jawa dan yang selanjutnya melahirkan banyak lagi Daendels-Daendels lain yang menerapkan dasar yang sama. Jawa dipilih oleh kolonial Belanda untuk menancapkan kekuasaan ekonomi dan politiknya, karena pulau Jawa dinilai sangat strategis, kaya dengan sumber daya alamnya dan memiliki banyak sumber daya manusia yang sangat murah, yang dapat dipekerjakan secara paksa, antara lain di perkebunan teh dan kopi yang dikuasai oleh Perusahaan Belanda. Yang lainnya adalah, karena pemimpin politik di Jawa dapat dijadikan sebagai penghubung atau mitra Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kenyataan inilah, alur kolonisasi secara ekonomi, sejalan beriringan dengan kolonisasi secara politik. Praktek-praktek kolonisasi ini, untuk selanjutnya diikuti oleh para penerus neo kolonialisme di belahan bumi Indonesia yang lain. Kolonisasi melalui industrialisasi telah ikut menggeser budaya pedesaan menjadi budaya masyarakat industri, yang juga menempatkan baik kelas petani maupun kelas buruh sebagai konsumen, karena sumber produksinya dikuasai oleh sebuah *power system* yakni pemodal dan negara, yang menjadikan semuanya berbasis pada sebuah nilai komoditi.

Serangkaian krisis yang dihadapi oleh rakyat antara lain kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, bencana ekologis, kemudian direspon secara keras oleh aktivis pro demokrasi dengan berbagai tuntutan yang didesakkan kepada negara dan modal. Nasionalisasi industri, menjadi isu yang marak diperjuangkan oleh gerakan pro demokrasi, yang menghendaki agar negara mengambilalih industri yang hari ini dikuasai oleh asing seperti Freeport, Newmont, INCO, Rio Tinto dan masih banyak lagi industri asing, yang dinilai tidak pernah memberikan keuntungan signifikan kepada rakyat Indonesia. Industri asing, khususnya industri ekstraktif (tambang), hanya menyisakan persoalan lingkungan hidup dan kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan di Indonesia, justru berada dimana wilayah tersebut sangat kaya dengan sumber daya alam (SDA), seperti Aceh, Papua, Riau dan Kalimantan Timur.

Nasionalisasi Industri, Keberlanjutan Kehidupan?

Isu nasionalisasi terhadap industri-industri asing yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan membangun kemandirian bangsa, sehingga tidak menjadi bangsa budak, memang menjadi sebuah keharusan. Pada tahap ini, saya sangat sepakat dan mendukung penuh agenda nasionalisasi industri-industri asing terutama industri ekstraktif, yang selama ini hanya menyisakan kerusakan lingkungan hidup dan kemiskinan bagi rakyat yang justru seharusnya menguasai sumber-sumber kehidupan mereka. Namun demikian, ada beberapa hal saya secara subjektif menilai, bahwa gagasan nasionalisasi industri, masih kering dengan perspektif *green* politik.

Tulisan ini tidak hendak mempertentangkan antara gagasan kesejahteraan bagi rakyat melalui nasionalisasi industri, dengan gagasan keberlanjutan lingkungan hidup yang disokong oleh gerakan yang menganut *green* politik. Tulisan ini justru hendak ingin mengupas lebih dalam dan menguatkan agenda nasionalisasi industri ini, terkait dengan apa saja prasyarat yang mestinya dipenuhi ketika industri bisa dikuasai oleh negara dan sejauh mana nasionalisasi industri bisa menjawab krisis yang dialami oleh rakyat. Sehingga nasionalisasi industri yang disuarakan oleh gerakan pro demokrasi di Indonesia, dapat menjadi salah satu alat yang dapat menjawab krisis yang dialami oleh rakyat.

Pengalaman dengan sistem yang ada hari ini, telah membuktikan kepada kita bahwa perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah sekalipun, ternyata tidak berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Perhutani dengan PTPN misalnya, justru menjadi aktor yang paling dominan menyengsarakan petani di Indonesia, dan telah menyebabkan berbagai bencana ekologis (banjir dan longsor) yang terjadi di pulau Jawa. Terakhir, baru saja Perhutani menembak petani di Jawa Timur dan mengakibatkan 2 (dua) orang petani tewas. Lapindo Brantas yang dimiliki oleh Bakri Group dan Medco Group menjadi potret yang paling kontekstual, bahwa industri migas yang dimiliki oleh industri nasional sekalipun, justru menjadi alat pemusnah manusia yang paling cepat.

Sebelum kita bicara soal nasionalisasi industri, yang seharusnya dilihat lebih jauh dan dan tajam adalah prasyarat yang harus dipenuhi untuk mendukung sebuah jalan menuju nasionalisasi industri. Bagaimana tata kuasanya, bagaimana tata guna lahannya, bagaimana tata produksinya, bagaimana tata konsumsinya. Belum lagi syarat-syarat yang harus dijamin oleh negara seperti syarat keselamatan rakyat, syarat

produktivitas rakyat, syarat kesejahteraan rakyat, syarat keberlanjutan pelayanan alam. Semua prasyarat tersebut, harus sudah mampu dijawab sebelumnya, dan menempatkan warga krisis sebagai aktor utama untuk menentukan arah sebuah pembangunan kemandirian negara, yang salah satunya melalui nasionalisasi industri.

Bacaan lain terhadap nasionalisasi industri adalah selama *state* (negara) dalam hal ini sebagai penguasa sistem juga sama menempatkan tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi dan tata konsumsi oleh entitas politik negara, maka yang terjadi akumulasi hanya akan berpindah tangan, dari industri asing ke industri nasional. Jika nasionalisasi industri dijalankan oleh sebuah negara yang menganut sistem kapitalisme, maka yang ada hanyalah fasisme seperti yang dijalankan oleh Hitler.

Nasionalisasi industri, ketika dijalankan oleh sistem pemerintahan yang ada saat ini dan sistem parlemen yang dipraktekkan hari ini, hanya melahirkan elit oligarki. Nasionalisasi industri justru semakin melanggengkan para politisi saudagar untuk menguasai seluruh sumber-sumber kehidupan rakyat, dengan menggunakan partai-partai politik konservatif yang hari ini masih mendominasi sistem bernegara Indonesia saat ini. Kita tinggal menunjukkan tangan kita kepada Yusuf Kalla, Abu Rizal Bakri dan masih banyak lagi saudagar yang duduk di kursi pemerintahan saat ini. Jika sekalipun industri dikuasai oleh negara, jika capaian utamanya bahwa industri dimaksudkan sebagai komoditi ekspor, bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Maka kecenderungannya adalah sama, yakni eksploitatif dan akan memicu bencana ekologis yang lebih besar.

Dalam perspektif *green* politik, nasionalisasi industri ditempatkan sebagai sebuah salah satu alat demokrasi politik yang sejati haruslah dibangun berdasarkan kerangka kedaulatan dan kemandirian dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat atau basis material yang menjadi fondasi tata kemasyarakatan dan negara. Penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat (sosial dan ekonomi) haruslah berlandaskan semangat BERDIKARI dan kekuatan daya kreasi rakyat secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila didedikasikan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara.

Dalam perspektif *green* politik, nasionalisasi industri harus menempatkan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia. Namun, alam memiliki keterbatasan untuk menunjang kehidupan manusia. Untuk itu kita perlu menghargai integritas ekosistem dan menjamin keanekaragamannya sebagai prasyarat untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya dengan baik, dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang sama baiknya.

Akhirnya, Selamat Hari Buruh 1 Mei 2008. Semoga front persatuan rakyat pekerja dapat mewujudkan sosialisme di Indonesia.

Menyoal RUU PA dalam Agenda Pengelolaan Sumber Daya Alam

Khalisah Khalid

Nasib RUU Pemerintahan Aceh yang saat ini sudah sampai pada pemerintah pusat, merupakan sebuah komitmen kedua belah pihak baik pemerintah RI maupun Gerakan Aceh Merdeka pasca MoU Perdamaian, untuk memberikan harapan baru bagi sebuah negeri yang telah mengalami sejarah konflik yang tak berkesudahan. Tentu saja kita semua berharap, agar gerbang perdamaian yang telah terbuka di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat menjadi tonggak baru sebuah kehidupan berbangsa.

Kita menyadari, bahwa selama ini kekayaan Aceh telah semakin menipis dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, harus menjadi tanggungan rakyat Aceh. Bukan hanya soal kedaulatan rakyat yang tercerabut, kemiskinan, ketertinggalan, dan banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia mewarnai ladang perusahaan-perusahaan besar. Realitas yang terjadi hampir 30 tahun ini, rakyat yang hidup di sekitar perusahaan pertambangan migas, 40-60% adalah penduduk miskin.

Sayangnya, harapan untuk mendapatkan kedaulatan Aceh sepenuhnya yang tertuang dalam pasal yang diusulkan rakyat Aceh, telah di"manipulasi" lewat pemangkasan pasal-pasal yang dianggap krusial yang diusulkan oleh rakyat Aceh, antara lain yang mengatur soal pengelolaan sumber daya alam (PSDA) yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri), kita masih berharap ruang-ruang untuk memberikan bacaan secara imparial masih terbuka ditengah waktu yang tinggal sedikit lagi, sebelum ketuk palu dijatuhkan untuk mensahkan RUU Pemerintahan Aceh yang sangat dinantikan oleh rakyat Aceh khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya sebagai preseden baik untuk sebuah penyelesaian konflik.

RUU PA, Sebuah Kewenangan Pengelolaan SDA Aceh yang Dikebiri?

Ditengah banyaknya elemen masyarakat sipil yang mencoba mengawal proses berjalannya RUU PA dari daerah hingga ke pusat, hanya sedikit yang mencoba melihat RUU PA sebagai sebuah agenda besar bagi pengelolaan sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan hidup di Aceh. Kekayaan alam Aceh yang melimpah ruah, hutan, tambang, pesisir laut, dan energi dan gas (hidrokarbon), seharusnya menjadi

modal utama dalam sebuah kebijakan pengelolaan perekonomian rakyat Aceh, yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Aceh dan keberlanjutan hidup antar generasi didalamnya.

Didalam nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), disebutkan bahwa Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan dimasa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.

Saya mencoba mengajak kita semua untuk melihat kembali pasal-pasal dalam RUU PA, terutama mengenai beberapa pasal yang kita nilai terlalu berani untuk dipangkas oleh departemen dalam negeri karena akan berkibat buruk bagi kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat yang selama ini telah banyak mengeruk dan mengintervensi kedaulatan rakyat Aceh dalam mengelola sumber daya alamnya. Bab dan Pasal yang coba kita lihat saat ini adalah masalah perekonomian, dimana pengelolaan sumber daya alam (PSDA) menjadi bagian dalam laju perekonomian Aceh dalam bab XXIII yang terbagi dalam beberapa pasal dan mengatur tentang prinsip dasar perekonomian dan arah perekonomian Aceh serta pengelolaan sumber daya alam (PSDA), pesisir dan laut.

Pertama, kita melihat yang terpenting adalah soal kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dalam mengelola perekonomiannya bahwa ada kesan pemerintah setengah hati memberikan hak pengelolaan perekonomian yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam kepada Aceh, padahal dalam MoU secara jelas menyebutkan bahwa prosentase perekonomian adalah sebesar 70% bagi Aceh. Harusnya dari sana pemerintah berpijak bahwa prosentase tersebut dapat terpenuhi, jika kewenangan Aceh diberikan secara penuh dalam mengelola sumber daya alamnya tanpa perlu membatasinya dengan peraturan dalam perundang-undangan lainnya sebagaimana yang diatur secara nasional, yang bersifat sektoral seperti undang-undang pertambangan, undang-undang Migas, undang-undang kehutanan dan lain-lain, yang justru akan menjadi benturan bagi pemerintah Aceh untuk mengelola sumber daya alamnya.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, seharusnya Aceh sebagai bagian dari kesatuan republik Indonesia menjadi penentu perekonomian nasional dan menjadi bagian dari perekonomian global dengan dibukanya kerjasama secara langsung dengan internasional. Pemingkasan kata perekonomian Aceh merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global menunjukkan bahwa ada ketakutan-ketakutan dari pemerintah terhadap otoritas yang akan dilakukan oleh

pemerintah Aceh untuk melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar, dan tidak perlu melalui pemerintah pusat.

Asumsi ketakutan yang muncul dari pemerintah ddasari atas sebuah kondisi yang tengah berlangsung bahwa hari ini, dengan kekayaan sumber daya alamnya, Aceh dari hasil minyak dan gasnya telah menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 10,6 Trilyun atau 43% setiap tahunnya. Asumsinya, jika itu langsung dilakukan oleh pemerintah aceh, praktis pemerintah pusat akan kehilangan penyokong dana terbesarnya. Dari sumbangan pendapatan yang sebesar itu, rakyat Aceh hanya mendapatkan alokasi dana dari pusat sebesar Rp. 153 miliar, tentu saja angka yang tidak berimbang dan tidak adil bagi rakyat Aceh selama ini.

Dalam pasal 130 tentang pengelolaan sumber daya alam yang berbunyi :”pemerintah aceh berwenang mengatur penyediaan, pengaturan, dan pengelolaan minyak bumi dan gas serta sumber daya alam lainnya di wilayah Aceh baik di darat maupun di laut teritorial perairan nusantara, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen”. Penegasan wewenang untuk penyediaan, pengaturan dan pengelolaan minyak bumi dan gas alam zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, lagi-lagi menyiratkan bahwa ada ketidakrelaan pemerintah terhadap Aceh. Padahal kita tahu bahwa sumber daya alam dari hidrokarbon (energi dan gas) sebagai sumber pendapatan utama Aceh dan sumber daya alam lainnya, banyak terdapat di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yakni sepanjang 12 Mil dari pulau terluar. Kita dapat melihat bahwa eksplorasi gas dan energi berada disepanjang lepas pantai ZEE, sumber daya alam minerba lainnya seperti emas, uranium atau galian c. Sumber-sumber kekayaan alam inilah yang kemudian didorong untuk menguatkan kewenangan pemerintah Aceh dalam mengelola perekonomiannya.

Agenda mendesak (sebuah usulan) terhadap pengelolaan SDA

Idealnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa soal pengelolaan sumber daya alam yang masuk kedalam bab XXIII perekonomian, sangat rentan terhadap eksploitasi yang dilakukan secara beras-besaran tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologi didalamnya. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam lainnya yang harus diatur secara tegas kedepannya adalah sektor kehutanan dengan melihat hutan dan kawasan hutan, Ini didasari atas kekhawatiran akan pengalaman paradigma pembangunan yang selama ini berorientasi ekonomi sentris. Untuk itu, beberapa agenda penting yang harus didesak antara lain:

1. Sambil menunggu proses pembahasan dan pengesahan RUU PA

yang saat ini sedang berlangsung, pemerintah harus melakukan moratorium terhadap pemberian ijin eksploitasi sumber daya alam yang telah dikeluarkan selama ini. Ini menjadi penting, agar kedepannya sumber daya alam di Aceh benar-benar dikelola oleh pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Terlebih ditahun ini, pejabat Gubernur Aceh mencanangkan bahwa tahun 2006 menjadi tahun investasi di Aceh.

2. Dalam setiap ijin eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam terutama sumber daya minerba, pemerintah segera menetapkan kewajiban untuk melakukan kebijakan *mine closure* sebagai sebuah kewajiban perusahaan atas sumber daya alam yang telah diambilnya, bukan hanya untuk mengembalikan/pemulihan lingkungan, tapi juga pemulihan kondisi sosial masyarakat, terutama bagi pemulihan bagi masyarakat korban pelanggaran HAM.
3. Dalam pengelolaan sumber daya alam kedepan, hendaknya secara kelembagaan, ada lembaga tersendiri yang mengatur soal pengelolaan sumber daya alam (PSDA) di Aceh dan tidak bersifat sektoral. Kelembagaan ini bertanggungjawab secara penuh untuk mengkoordinasikan dan mengoptimalkan departemen-departemen terkait seperti departemen ESDM (energi dan sumber daya mineral), departemen kehutanan, departemen perkebunan, departemen perikanan dan kelautan.
4. Dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai modal utama dari perekonomian daerah, hendaknya tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana. Ini didasari atas sebuah pemikiran, bahwa kondisi Aceh sebagai daerah yang sangat rentan terhadap bencana, selain memang faktor kehancuran ekologis sebagai akibat dari maraknya eksploitasi sumber daya alam tanpa melihat daya dukung alam didalamnya.
5. Pemerintah hendaknya juga berhati-hati atau meminimalisir penerimaan bantuan utang luar negeri, ini menjadi penting untuk menghindari eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam demi kepentingan pembayaran utang luar negeri.

Kita berharap bahwa pengelolaan sumber daya alam (PSDA) bukan hanya menjadi konsesi politik bagi sekelompok elit, sehingga sejarah perlawanan untuk mendapatkan kesejahteraan bagi rakyat tak lagi berulang. Kita juga berharap, agar RUU PA tidak mengalami distorsi maknanya bagi kepentingan rakyat Aceh, terutama yang selama ini hak-haknya telah terabaikan oleh pemerintah pusat. Selagi palu belum diketuk, selagi masih banyak do'a dari rakyat yang memberikan amanah bagi wakil rakyat untuk melanjutkan komitmen bagi perdamaian di Aceh, akan sangat baik jika kita membuat keberanian politik untuk

<http://alien.adefadli.hijaubiru.org>

tidak menempatkan sumber daya alam hanya sebagai ladang eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata, melainkan juga untuk keberlanjutan generasi Aceh kedepan. Serta memberikan ruang kemerdekaan sepenuhnya bagi Aceh untuk menangani pengelolaan sumber daya alam mulai dari perencanaan, pengurusan izin sampai proses monitoringnya.

Orkestrasi Gerakan Hijau dan Pesta Korporatokrasi

Khalisah Khalid

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”

Aransemen Korporatokrasi

Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Chalid Muhammad dalam diskusi nasional “Membaca politik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjelang 2009”, yang mengatakan bahwa “negeri ini telah dikuasai oleh rezim korporatokrasi dan kleptokrasi”. Sebuah pernyataan yang menggambarkan bagaimana kekuatan aktor-aktor korporatokrasi telah menghegemoni seluruh kehidupan bangsa ini. Korporatokrasi saat ini kembali menjadi wacana publik, karena tidak ada satupun yang dapat menyangkal bahwa krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh semakin kuatnya rezim ini memainkan peran-perannya, baik secara ekonomi maupun politik ditandai dengan produk-produk kebijakan yang dikeluarkan.

Istilah korporatokrasi sendiri diperkenalkan oleh John Perkins dalam bukunya *Confession of an Economic Hit Man* (2004) yang mengatakan bahwa dunia saat ini dikuasai oleh ‘imperium internasional’, dimana imperium ini menyatukan kekuatan yang dimilikinya, baik kekuatan finansial maupun kekuatan politiknya untuk menguasai berbagai sumber kehidupan di belahan bumi ini. Dalam bukunya yang berjudul *Selamatkan Indonesia* (2008), Amin Rais melihat korporatokrasi sebagai sebuah gambaran atas sistem kekuasaan yang dikontrol dan didominasi oleh berbagai korporasi besar, bank internasional dan pemerintah.

Imperium internasional yang dimaksud, selain korporasi juga lembaga keuangan internasional dan negara yang membangun jaring kerjasamanya dan mengkonsolidasikan kekuatannya melalui kebijakan liberalisasi ekonomi, melalui perangkat-perangkat hukum yang dimiliki oleh negara.

Korporasi semakin menemukan ruang kemenangannya ketika pengurus negara memberikan penguasaan penuh untuk memainkan peran-peran mereka, dengan melegalisasi melalui sejumlah undang-undang dan produk regulasi lainnya. Disinilah Bentuk transaksi antara penguasa dengan modal salah satunya adalah kebijakan, kenyataan inilah yang disebut dengan alur kolonisasi secara ekonomi, berjalan beriringan

dengan kolonialisasi secara politik.

Kuasa korporasi yang sangat besar di Indonesia diawali oleh peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah sejak rezim Soeharto dan terus dilanjutkan dengan sangat baik oleh rezim-rezim berikutnya. Diawali UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No 5/67 tentang Kehutanan, UU No 11/67 tentang Pertambangan, Kontrak Karya Pertambangan Generasi I dan II, menghantar Indonesia memasuki fase: **Jual Murah; Jual Cepat; dan Jual Habis** Kekayaan Alam demi kejayaan korporasi. Beberapa perundangan yang menyokong kuasa korporasi antara lain: UU Minyak dan Gas, UU 41/99 tentang Kehutanan, Perpu No 1/2004 yang telah jadi UU NO 19.2004 tentang Pertambangan di Kawasan Lindung, UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No 26/2007 tentang Tata Ruang, UU no 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Peperes 36/2005 jo Peperes 65/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan lain-lain.

Secara legal, setiap jengkal tanah dan setiap tetes air Indonesia telah dikuasai oleh korporasi baik melalui kontrak karya pertambangan, kontrak bagi hasil minyak dan gas, kontrak bagi hasil batu bara, kuasa pertambangan, hak penguasaan hutan, hak penguasaan perkebunan besar kelapa sawit. Data WALHI dan JATAM pada tahun 2005 menunjukkan, bahwa sekitar 35,1 juta hektar kawasan hutan telah dikuasai oleh perusahaan pemegang HPH, 15 juta hektar untuk Hak Guna Usaha, 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industri, 35 % daratan Indonesia di kuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 Kontrak Karya Pertambangan dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B). Sementara rakyat yang selama ini hidup didalam dan sekitar hutan, dipaksa keluar dari tanah mereka.

Negara sesungguhnya tidak pernah diuntungkan dari aktifitas mereka, kasus penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan batubara baru-baru ini, semakin memperjelas posisi bahwa yang diuntungkan oleh korporasi yang mengeruk sumber daya alam hanyalah segelintir elit, yang menjual kekayaan alam dan buruh murah tanpa perlindungan keselamatan kerja. Nampaknya apa yang disampaikan oleh Cecil Rhodes (1852-1902), yang menyatakan bahwa kolonialisme adalah penemuan tanah baru dimana dari tanah tersebut dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan mentah (sumber daya alam) yang dapat dieksploitasi dengan menggunakan buruh murah dari penduduk pribumi. Sumber daya alam (SDA), sesungguhnya selalu menjadi alasan utama bagi kolonial baru (baca, korporasi) dimanapun untuk mendominasi dan menanamkan kekuasaannya, dan entitas politik negeri ini mengamini seluruh nafsu kolonialisme tersebut, karena

menguntungkan bagi mereka secara politik melalui ongkos-ongkos politik yang disediakan oleh kekuatan modal.

Modal internasional tidak hanya mengeruk sumber daya alam untuk pemenuhan konsumsi bagi negara-negara maju, mereka bahkan mendikte negara untuk mengurangi tanggungjawabnya melindungi dan mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang dimandatkan oleh Konstitusi. Telah terjadi defisit kedaulatan negara dan bertemu dengan defisit kesejahteraan yang berujung pada kemiskinan. Mencabut subsidi terhadap BBM bagi rakyat miskin, menjadi salah satu contoh kuat bagaimana kekuatan ekonomi internasional telah mengambil-alih tanggungjawab negara dan menyerahkannya kepada pasar. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu contoh dari sebuah alat yang didorong oleh modal, untuk mengambilalih peran dan fungsi sosial negara, dan mengalihkan tanggungjawab negara tersebut.

Kekuatan aransemen kolaboratif yang dimainkan begitu cantik oleh korporasi besar, lembaga keuangan internasional dan elit politik yang duduk di pemerintahan, telah menghasilkan sebuah cerita penghisapan ekonomi disatu sisi, dan kerusakan lingkungan hidup disisi yang lain, bahkan telah melahirkan krisis dan ancaman terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan rakyat intra dan antar generasi. Industri tambang misalnya, industri ini memiliki karakter yang tidak terbarukan, berumur pendek, berdaya rusak tinggi dan berorientasi ekspor.

Dengan watak dan cara kerjanya, kekuatan ini telah mendominasi semua yang menyangkut kehidupan nasib orang banyak, dengan memegang prinsip mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang semurah-murahnya dengan menggunakan buruh murah, dan mengabaikan lingkungan hidup yang dinilai berbiaya mahal dan tidak menguntungkan bagi kepentingan bisnis mereka.

Sumber daya alam (SDA) ditempatkan tidak lebih hanya sebagai sebuah komoditas, yang bisa dikeruk habis guna memenuhi tingkat konsumsi bagi negara-negara maju, dan menghancurkan secara sistematis dan struktural produktifitas yang disebabkan oleh penguasaan akses dan kontrol atas tanah dan alat-alat produksi yang lain, dan menghancurkan pengetahuan lokal yang mengatur regulasi wilayah dan tata kehidupan masyarakat itu sendiri. Semua modal sosial yang ada dalam tatanan masyarakat, diruntuhkan oleh mesin-mesin kapitalisme yang bekerja secara baik dan didukung penuh oleh kekuatan politik.

Pemilu, Absen Agenda Krisis

Reformasi 1998, memang terjadi berbagai perubahan yang positif menyangkut hak-hak sipil-politik, seperti kebebasan pers, kebebasan pendirian partai-partai politik, reformasi dalam sistem pemilu, antara lain sistem pemilihan presiden langsung. Namun secara substansial, berbagai perubahan ini hanya mencerminkan pergeseran kepentingan dan sirkulasi di tingkat elit kekuasaan, dengan mengabaikan aspek akuntabilitas dan representasi kepentingan publik. Ini tercermin dari kegagalan reformasi mewujudkan janjinya, untuk memperbaiki pemenuhan keadilan dan hak-hak dasar rakyat di bidang ekonomi dan sosial.

Agenda reformasi bahkan dibajak oleh elit politik untuk kepentingan kekuasaannya, bahkan korporasi semakin memperkuat perangkatnya dengan serangkaian strategi yang lebih sistematis dengan kemas *legal reform* yang melahirkan “good governance” yang membuat korupsi semakin vulgar dipertontonkan oleh wakil rakyat, *economic reform* yang menghasilkan liberalisasi ekonomi, khususnya di sektor sumber daya alam, dan *political reform* yang melahirkan demokrasi namun baru sebatas demokrasi prosedural dan belum menyentuh persoalan mendasar rakyat. Semua reformasi yang ditawarkan oleh neolib, semakin melahirkan angka kemiskinan yang panjang. Kompas dalam headlinenya bahkan memprediksikan bahwa dalam 25 tahun mendatang, Indonesia akan mengalami krisis pangan. Demikian juga dengan temuan ILO menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2008, terdapat 52,1 juta pekerja miskin. Ini belum ditambah dengan pukulan kenaikan harga sebesar 125 persen, yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM.

Elit politik yang sudah lama menghiiasi reklame iklan di media massa juga absen melihat krisis rakyat dalam agenda-agenda politik yang ditawarkan. Jalan keluar yang disodorkan, bahkan tidak melihat persoalan mendasar yang dialami oleh bangsa ini. Tidak ada tawaran perubahan atas pilihan ekonomi, yang menempatkan tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi dan tata konsumsi kedalam sebuah kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Kekuatan korporatokrasi telah mampu mempengaruhi agenda-agenda politik mulai dari tingkatan Pilkada hingga Pemilu Legislatif dan Pilpres. Caranya melalui dukungan finansial pada kandidat-kandidat yang bertarung pada pesta demokrasi, janji-janji politik yang disampaikan tidak lebih hanya untuk semakin melanggengkan dominasi agenda neoliberal. Harapan pembaruan terhadap pemilu 2009, hampir sama dengan pemilu 2004. berbagai janji juga digelontorkan oleh partai

politik dan beberapa calon presiden melalui belanja iklannya di media massa yang menawarkan berbagai jalan baru, yang jika dicermati secara seksama tidak lebih hanya sebuah kamuflase.

Dari diskusi panjang Demokrasi dibawah tirani modal yang beberapa waktu lalu diselenggarakan di Universitas Indonesia, semakin memperjelas posisi korporatokrasi ini terhadap ruang demokrasi yang dibangun di Indonesia. Demokrasi yang terpusat pada pemilihan umum (electoral democracy) tidak lebih hanya sebagai sebuah kemenangan dari politik prosedural, dan hanya memberi kesempatan kepada kekuatan neoliberal dan predatoris untuk bergantian menguasai lembaga-lembaga negara. Hasil dari pertarungan ini adalah kombinasi yang amat buruk: liberalisasi dibidang ekonomi dan konservatif dibidang politik.

Pemilu sama sekali jauh dari krisis yang dialami oleh rakyat, bahkan hiruk pikuk pilkada dan ribuan banner dan bendera partai politik, telah menenggalamkan jeritan penderitaan yang dialami oleh perempuan yang tidak bisa memberikan asupan gizi yang cukup bagi keluarganya. Pilkada pemilihan Gubernur Jawa Timur menjadi sebuah pembelajaran yang utuh untuk menggambarkan, bagaimana kekuatan korporasi yang bernama Lapindo Brantas Inc telah mampu menutup mata seluruh kandidat Gubernur Jawa Timur untuk membicarakan derita rakyat korban lumpur Lapindo yang harus menjadi pengungsi ekologis dan tercerabut dari ruang hidupnya.

Blok Politik Hijau, Meretas Jalan Perubahan

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Gerakan lingkungan hidup sebagai bagian dari gerakan sosial menyadari bahwa begitu berat dan besarnya musuh yang dihadapi oleh rakyat, karena kekuatan mereka bahkan telah masuk ke ruang-ruang kehidupan masyarakat, yang menjelma menjadi sebuah fasisme baru yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kita dapat menyaksikan, bagaimana fundamentalisme pasar telah melahirkan sebuah bentuk fundamentalisme agama yang menduplikasi cara kerja yang sama yakni tidak menghormati pluralisme dan keberagaman tak ubahnya cara pandang monokultur dalam industri perkebunan besar.

Namun, ditengah berbagai ancaman hidup yang diciptakan oleh kekuatan modal dan politik, berbagai inisiatif perjuangan juga

diciptakan oleh berbagai elemen rakyat. Mencoba membangun demokrasi dan ekonomi dari bawah sebagai sebuah bentuk perlawanan yang digagas oleh rakyat sebagai sebuah alternatif diluar proses *electoral democracy*

Demikian juga inisiatif yang dibangun dari gerakan lingkungan hidup, yang bercita-cita melakukan perubahan gerakan, salah satunya dengan menggunakan blok politik hijau sebagai kendaraannya untuk membangun kekuatan politik alternatif yang dibangun dari pondasi massa rakyat yang kritis. Memainkan peran-peran politiknya untuk dapat mendiseminasi gagasan hijau sebagai sebuah upaya melakukan reformasi pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan konsepsi ekonomi yang berbasiskan pada kedaulatan rakyat dan keadilan ekologi sebagai sebuah jalan baru yang ditawarkan.

Inisiatif ini didasari atas sebuah keyakinan, bahwa gerakan lingkungan hidup berada di jantung perlawanan atas penghisapan penjajahan baru (eksploitasi sumber-sumber kehidupan), karenanya dibutuhkan kekuatan dari blok politik anti imperialisme lainnya selain blok politik hijau (buruh, nasionalis, sosialis dan lain-lain) yang menjadi kekuatan politik alternatif dengan garis ideologi yang kuat dan berbasiskan pada kekuatan massa kritis yang masif, terorganisir, terpimpin untuk mendobrak kebekuan politik yang terjadi.

Pandangan ini juga didasari atas analisis bahwa rezim kekuasaan hari ini berada di dalam kebangkrutan karena menjadi sumber ancaman keselamatan rakyat dan menanamkan benih kehancuran negeri ini. Bahwa oligarki politik hari ini bercokol di hampir semua partai politik yang ada hari ini. kepentingannya tunggal yakni mempertahankan kekuasaan dan share/pembagian sekaligus persaingan kalangan sendiri untuk memperebutkan rente ekonomi dari penggadaian kekayaan alam negeri ini. Kalau pun ada pertentangan dan sikap yang seolah-olah opisisi, sesungguhnya hanya permainan politik dan sirkulasi elit atau oligarki politik-ekonomi.

Habermas menyatakan bahwa bagaimana demokrasi dapat memasuki ruang-ruang kuasa, bukan hanya kepada elit, tetapi juga kepada masyarakat sipil. Blok politik hijau, kemudian yang menjadi sebuah alternatif yang ditawarkan oleh berbagai gerakan sosial, baik gerakan tani, buruh, maupun gerakan yang mengusung isu lingkungan sebagai agenda utama perubahan.

Dalam survey nasional yang dilakukan oleh DEMOS yang berjudul satu dekade, maju dan mundurnya demokrasi di Indonesia menilai bahwa aktor-aktor demokrasi yang ada saat ini marjinal secara politik dan

mengambang secara sosial. Karenanya Blok politik hijau diharapkan mampu berdialektika untuk menghadapi politik keteraturan yang dimainkan oleh elit oligarki dibawah bendera korporatokrasi. Blok politik hijau diharapkan dapat melakukan aktifitas politik yang teroganisir bersama dengan pihak-pihak yang selama ini menjadi korban kebijakan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam.

Riset ini juga menemukan mulai tumbuhnya agenda dan visi yang komprehensif, dalam fenomena jejaring gerakan *green politic*. Ditemukan bahwa kasus-kasus individual yang berkaitan dengan isu tanah, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, hak-hak sosial ekonomi, lingkungan hidup dan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi, tampak berhubungan erat dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan pembangunan partisipatoris - termasuk pengelolaan secara swadaya atas kehidupan sosial-ekonomi, pengelolaan sumberdaya kolektif/komunitas, maupun tuntutan perbaikan penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka melawan privatisasi; juga gagasan-gagasan mengenai participatory budgeting.

Semua ini bisa menjadi basis bagi agenda politik kiri-hijau yang lebih umum. Ini berseberangan dengan tidak adanya pertanda yang sama dalam agenda gerakan buruh yang lebih luas, dengan atau tanpa kepedulian kelas menengah liberal. Lepas dari sudah terbentuknya demokrasi prosedural menyangkut keberadaan lembaga-lembaga pemilu, amandeman konstitusi, legilatif, eksekutif, yudikatif namun perjalanan meraih demokrasi substansial masih jauh. Maka tidak bisa tidak, kita harus semakin gigih melawan dengan kecerdasan dan imajinasi.

JAWABAN KRISIS KESELAMATAN RAKYAT, TEGAKAN KEADILAN SOSIAL

Kunci untuk mewujudkan keadilan sosial adalah pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya sosial, lingkungan hidup (alam) yang berlangsung dari tingkat lokal, nasional hingga tingkat global. Selama ini kemiskinan dan kehancuran lingkungan hidup bukan disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk di negara dunia ketiga, sebagaimana yang selalu dikampanyekan oleh negara dunia pertama. Realitas dunia yang timpang saat ini, lebih dikarenakan penguasaan akses sumber daya alam yang hanya bertumpu pada segelintir kelompok, untuk pemenuhan tingkat konsumsi mereka dengan mengabaikan sebagian besar dari penduduk bumi.

Keadilan sosial ini untuk menjamin pemihakan yang kuat terhadap kelompok terlemah di dalam masyarakat dunia, jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, adanya jaminan bagi semua warga negara

memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial, sekaligus tanggung jawab sosial dan ekologisnya. Tercakup di dalam perwujudan keadilan sosial adalah penghargaan terhadap pluralisme budaya, keadilan gender, masyarakat adat dan keadilan antar generasi.

JAWABAN KRISIS RUANG HIDUP RAKYAT, TEGAKAN KEADILAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP (KEADILAN EKOLOGI)

Sering kali agenda lingkungan hidup juga disetir oleh kekuatan pasar, yang membelokkan wacana kepentingan lingkungan untuk kepentingan pasar. Lingkungan hidup kemudian didominasi oleh kekuatan modal yang memodernisasi pembangunan dengan tujuan untuk menyingkirkan rakyat yang tidak memiliki kekuatan secara politik dan ekonomi terhadap sumber-sumber kehidupan. Kasus penggusuran masyarakat adat dari tanah mereka untuk kepentingan konservasi, menunjukkan bahwa lingkungan hidup dijadikan sebagai alasan untuk menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya. Disinilah kita dapat menilai, bagaimana strategi modal dalam menjawab isu keadilan ekologi, melalui penghindaran, kambing hitam dan kooptasi.

Keadilan ekologi yang dimaksud adalah bagaimana Lingkungan Hidup dipandang kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia.

Namun, alam memiliki keterbatasan untuk menunjang kehidupan manusia. Karenanya, alam harus dikelola secara keberlanjutan. Keberlanjutan pelayanan alam sama artinya dengan memberikan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam yang utuh yang memungkinkan manusia dapat hidup dan bertahan, termasuk tanah, tempat tinggal, pangan, air dan udara.

Untuk itu kita perlu menghargai integritas ekosistem dan menjamin keanekaragamannya sebagai prasyarat untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya dengan baik, dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang sama baiknya.

JAWABAN KRISIS PRODUKTIFITAS RAKYAT, TEGAKAN KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN SOSIAL-EKONOMI

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Demokrasi politik yang sejati haruslah dibangun berdasarkan kerangka kedaulatan dan kemandirian dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat atau basis material yang menjadi fondasi tata kemasyarakatan dan negara. Penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat (sosial dan ekonomi) haruslah berlandaskan semangat BERDIKARI dan kekuatan daya kreasi rakyat secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila didedikasikan kepada kepentingan hak asasiarganya.

Bung Hatta dalam konsepsi ekonominya menyebutkan, bahwa bangsa ini akan mencapai kemandiriannya jika menggunakan mesin ekonomi yang digerakkan oleh kekuatan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Hatta mengatakan bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup damai dan sejahtera, jika sumber-sumber kehidupannya dikuasai oleh manusia yang lain yang berkuasa baik secara ekonomi maupun politik. Dalam pemikirannya, ekonomi menjadi penting dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan politik, harusnya diletakkan dengan tujuan untuk menata sumber-sumber kehidupan (ekonomi) yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utamanya.

Kondisi krisis keuangan di Amerika Serikat saat ini, yang mengancam ekonomi Indonesia memberikan pelajaran yang berharga, bahwa ekonomi global yang diusung oleh kekuatan korporatokrasi menciptakan kerentanan ekonomi bagi negara lain yang bergantung kepada kekuatan tersebut. Karenanya, krisis keuangan Amerika dapat menjadi momentum perbaikan ekonomi bangsa ini untuk melepaskan diri dari ketergantungan kekuatan ekonomi global, dengan meletakkan ekonomi rakyat sebagai fundamen utamanya.

Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat. Inilah yang

dinamakan mengalokasikan kekayaan alam untuk pemenuhan dalam negeri, bukan komoditas ekspor atau yang diistilahkan oleh Ichsanudin Noorsy dengan *Close Circuit Economy* dalam sebuah diskusi yang mengupas tentang politik anggaran dan penyakit kronis ekonomi klasik.

Reformasi Pengelolaan Lingkungan

Semua agenda yang ditawarkan oleh gerakan lingkungan hidup ini akan terwujud jika gerakan lingkungan hidup mampu mempengaruhi publik luas bahwa agenda reformasi pengelolaan lingkungan hidup dikemas dalam sebuah gerakan reformasi pengelolaan lingkungan hidup, dan semua dapat diwujudkan dengan pra syarat sebagai berikut: Pertama, mengembalikan mandat negara sebagaimana yang terdapat didalam konstitusi untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak dasar rakyat, khususnya terkait dengan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Kedua, menata kembali relasi antara negara, rakyat dan modal yang telah mengalami ketimpangan karena begitu kuatnya agenda korporasi yang menggunakan kekuatan hak menguasai negara, untuk kepentingan akumulasi modal mereka. Rakyat justru ditempatkan sebagai pihak pelengkap, padahal sesungguhnya kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam berada di tangan rakyat sebagaimana yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, menyelesaikan konflik sumber daya alam dan agraria struktural yang dialami oleh rakyat menghadapi dua kekuatan yakni kekuatan di sektor bisnis dan atau negara sebagaimana yang disebutkan oleh Alexis Tocqueville. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, tidak kurang dari 1.753 kasus tanah terjadi dari tahun 1970-2001. Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga mencatat, tidak kurang 70 kasus konflik sumber daya alam di tingkat nasional yang masih belum bisa diselesaikan.

B

beberapa gerakan sosial juga mengusulkan nasionalisasi, sebagai jawaban atas agenda penguasaan dan dominasi korporasi. Namun gerakan politik hijau juga menekankan hendaknya sebelum kita bicara soal nasionalisasi industri, yang seharusnya dilihat lebih jauh dan dan tajam adalah prasyarat yang harus dipenuhi dan tahapan untuk mendukung sebuah jalan menuju nasionalisasi industri. Bagaimana tata kuasanya, bagaimana tata guna lahannya, bagaimana tata produksinya, bagaimana tata konsumsinya. Belum lagi syarat-syarat yang harus dijamin oleh negara seperti syarat keselamatan rakyat, syarat produktivitas rakyat, syarat kesejahteraan rakyat, syarat keberlanjutan pelayanan alam. Semua prasyarat tersebut, harus sudah mampu dijawab sebelumnya, dan menempatkan warga krisis sebagai aktor utama untuk menentukan arah sebuah pembangunan kemandirian negara, yang salah satunya melalui nasionalisasi industri sebagai salah

satu alat demokrasi politik kerakyatan.

Nasionalisasi seharusnya tidak hanya bicara soal penguasaan terhadap aset-aset strategis, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Misalnya dalam krisis energi dan kenaikan BBM, perspektif hijau melihat bahwa selama ini pengelolaan minyak dan gas dikuasi oleh industri, jawabannya adalah melakukan diversifikasi energi oleh rakyat. Selain akan lebih menjamin keberlanjutan lingkungan, karena teknologinya tidak memiliki daya rusak yang tinggi seperti industri migas skala besar, diversifikasi energi juga dapat membangun kemandirian ekonomi rakyat.

Critical Mass, Belajar dari Lao Tzu

Semua mimpi membangun orkestrasi gerakan yang membawa perubahan oleh gerakan blok politik hijau, hanya akan menjadi cita-cita yang melangit. Cita-cita tersebut tidak akan terwujud, jika tidak diturunkan ke bumi sebagai cita-cita bersama rakyat.

Masyarakat Indonesia memang masih banyak yang meragukan blok politik hijau ini, menyadari bahwa isu lingkungan hidup di Indonesia masih berupa "kesadaran semu" bukan "pengetahuan". Isu lingkungan bahkan masih dianggap tidak seksi dan politis, padahal sangat jelas semua kehancuran lingkungan disebabkan oleh kebijakan ekonomi negara yang mengabaikan kepentingan lingkungan. Berbagai bencana ekologi yang datang silih berganti, penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin tinggi, konflik sumber daya alam dan krisis yang selalu muncul menghiasi media, sebenarnya menjadi cukup alasan bagi gerakan blok politik hijau untuk mengajak masyarakat lebih luas untuk mendukung gerakan politik alternatif ini.

Massa yang kritis sebagai pra syarat utama perubahan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh gerakan blok politik hijau ini, sehingga mimpi perubahan Indonesia ini diciptakan sendiri oleh rakyat. Mengutip apa yang dikatakan oleh Lao Tzu : "Berjalanlah bersama rakyat, tinggal bersama mereka, belajar dari mereka, cintailah mereka, mulailah dengan apa yang mereka miliki. Hanya dengan pemimpin terbaik, ketika pekerjaan sudah selesai dan tujuan tercapai, rakyat akan berkata kita telah melakukannya sendiri. Semuanya bisa dimulai dengan inisiatif-inisiatif perlawanan lokal yang telah dipraktekkan oleh berbagai organisasi rakyat untuk memperjuangkan , dan terus memperluas dan memperbesar gerakan ini menuju keberlanjutan lingkungan dan kemandirian ekonomi rakyat.

Blok politik hijau diharapkan mampu membangun dialektika dengan

<http://alien.adefadli.hijaubiru.org>

momentum politik 2009 sebagai titik awalnya, untuk membuat sebuah jalan baru yang diharapkan bisa merespon krisis yang dialami oleh rakyat dan bangsa ini. Apa yang ditawarkan oleh Blok Politik Hijau semangatnya seperti apa yang diletakkan secara mendasar oleh gerakan kemerdekaan yang diusung dimasa kolonial. Semangat yang ingin digelorakan lagi adalah bagaimana membangun optimisme, menuju Indonesia merdeka seratus persen secara ekonomi dan politik.

Rokok Haram, Freeport Bagaimana?

Khalisah Khalid

JUDUL di atas tiba-tiba menggelitik saya, ketika melihat siaran di sebuah stasiun televisi (3 Desember 2008) di mana Menteri Perindustrian menjadi salah satu pembicaranya. Isu yang dibahas seputar fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haram merokok dan dampak ikutannya. Saya tidak hendak ikut-ikutan setuju atau tidak dengan fatwa MUI, tetapi saya mencoba melihat sisi lain yang mungkin luput dari pandangan kita.

Saya tertegun atas pernyataan atau tepatnya hitung-hitungan Menteri Perindustrian tentang kisaran angka yang diperoleh negara dari cukai rokok, yakni Rp 53 triliun. Angka yang cukup besar untuk menambah pundi-pundi negara. Karena itulah fatwa MUI itu kemudian tampaknya menempatkan pemerintah seperti berada di simpang jalan: setuju dengan alasan melindungi warga negara dari kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak; tidak setuju karena nasib sekitar 10 juta orang bergantung pada industri bernama “Tuhan sembilan senti”, seperti diistilahkan Taufik Ismail, baik yang bersentuhan langsung di pabrik maupun orang-orang yang tidak secara langsung bergelut dengan mesin pabrik.

Bukan Rp 53 triliun itu yang membuat saya tertegun, melainkan hitungan berikutnya. Jika angka tersebut dibandingkan dengan royalti yang didapatkan dari perusahaan tambang besar seperti PT Freeport Indonesia, yang lagi-lagi mengutip pernyataan Bapak Menteri itu, angka royaltinya paling tinggi mencapai Rp 20 triliun. Itu pun sudah mendapatkan bonus dengan menyandang sebagai perusahaan pembayar royalti terbaik dari majalah tambang pada tahun 2008. Artinya, segitulah pundi-pundi kas negara yang masuk dari perusahaan emas yang sudah tiga dasawarsa mengurus isi perut Papua, meskipun tidak pernah dihitung ongkos lain yang ditimbulkan akibat praktik industri pertambangan baik berupa kerusakan lingkungan maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang semuanya difasilitasi dengan baik oleh negara.

Dalam logika saya yang paling sederhana muncul pikiran, jika begitu angkanya, seharusnya pengurus negara ini berpikir ulang untuk menempatkan industri ekstraktif sebagai sumber pendapatan ekonomi bangsa. Pun sudah ditempatkan sebagai basis pertumbuhan ekonomi, toh keuntungannya jauh lebih besar dari industri rokok yang sekarang difatwakan haram. Namun lagi-lagi saya juga tidak hendak hitung-

menghitung angka keuntungan baik yang bersumber dari cukai rokok maupun dari royalti PT Freeport Indonesia.

Yang menarik bagi saya untuk dipertanyakan lebih jauh adalah ketika pengharaman rokok dihubungkan dengan sebuah nilai kemaslahatan dan kemudaratannya. Ditafsirkan bahwa merokok lebih banyak mudaratnya, khususnya bagi warga negara tertentu, dibandingkan dengan maslahatnya, sehingga demi kesehatan masyarakat maka MUI mengeluarkan fatwa haram tersebut. Nah, saya juga ingin menariknya pada satu kondisi dari nilai yang sama yang dijadikan sebagai alat tafsir, yakni maslahat dan mudarat dalam industri ekstraktif seperti tambang emas yang antara lain dikerjakan oleh PT Freeport. Jika dinilai, sungguh kemudaratannya jauh lebih besar ketimbang kemaslahatannya bagi umat manusia. Kemaslahatan (itu pun jika ada) yang paling mungkin dirasakan oleh segelintir elite baik pusat maupun lokal, tapi kemudaratannya paling tidak dicatat oleh organisasi yang *concern* bekerja untuk isu lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Jaringan Advokasi Tambang, di mana PT Freeport Indonesia yang konon memberikan kontribusi pendapatan negara, sesungguhnya lebih banyak mudaratnya bagi rakyat dan lingkungan. Angka tertinggi Rp 20 triliun royaltinya harus dibayar dengan harga yang juga sangat tinggi oleh rakyat akibat hilangnya sumber-sumber kehidupan rakyat dan rusaknya lingkungan hidup yang tidak terpulihkan.

Jika Taufik Ismail yang menyebut Indonesia sebagai surga luar biasa ramah bagi para perokok, negeri ini juga menjadi surga bagi industri tambang. Datang, gali, dan pergi, semuanya difasilitasi negara. Jasa keamanannya, undang-undangnya, bahkan berkali-kali dengan iklan-iklannya. Apa itu bukan surga?

Saya menilai fatwa pengharaman rokok yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia menjadi satire didengar. Sebab, sebelum-sebelumnya lembaga ini hampir absen mengeluarkan fatwa yang terkait dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jika merokok haram bagi kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak demi kemaslahatan, mengapa MUI tidak sekalian saja mengeluarkan fatwa haram terhadap perusahaan industri tambang seperti PT Freeport, untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap limbah industri tambang? (E4)

Top Ten “Lagu” Pemerintahan SBY – JK

Khalisah Khalid

Menjelang pemilu 2009, berlomba-lomba partai-partai politik terutama partai politik yang telah berkuasa mengkampanyekan dirinya sebagai partai yang telah berhasil membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin di segala bidang, mulai dari isu penurunan harga BBM sampai isu pendidikan yang dinilai telah berhasil, sembari memasang angka target capaian sebagai indikator dari keberhasilan pemerintahan saat ini.

Namun sebuah tayangan di Metro TV membuat tercengang, yang menampilkan sejumlah kebijakan pemerintahan SBY - JK yang dinilai “menyebalkan” oleh rakyat. Cukup mencengangkan, karena justru kebijakan-kebijakan inilah yang diklaim sebagai sebuah keberhasilan bagi pemerintah saat ini. Berikut ini top ten tangga “lagu” yang dikeluarkan selama satu periode kepengurusan rezim SBY - JK, yang bernada sumbang bagi rakyat miskin di desa dan kota.

Tulisan ini akan mencoba melihat kembali 10 tangga lagu yang dibuat dan dimainkan oleh pemerintahan SBY-JK yang dinilai “menyebalkan” rakyat, 10 tanggal lagu tersebut sebagai berikut:

Urutan tangga kesepuluh dimulai dari ajakan pemerintah kepada rakyat untuk menghemat penggunaan listrik akibat krisis energi yang dialami oleh berbagai negara, Indonesia termasuk salah satunya. Disini, pemerintah mungkin lupa, bahwa tanpa hemat listrikpun begitu banyak warga negara yang belum menikmati listrik, meskipun daerahnya dibangun bendungan besar (DAM), sebagian besar listrik diperuntukkan bagi industri. Dari pantauan yang dilakukan oleh WALHI dari berbagai sumber menyatakan bahwa tidak kurang dari 13 provinsi di Indonesia mengalami krisis energi, dan kondisi inilah yang membuat SBY panik, dan dengan serta merta mengeluarkan kebijakan penghematan penggunaan energi atau listrik, dengan mengabaikan akar persoalan dari krisis energi di Indonesia.

Naik ke tangga sembilan, pemerintah mengeluarkan kebijakan *outsourcing* bagi buruh-buruh. Kebijakan ini tentu saja banyak ditentang oleh gerakan buruh, karena dengan kebijakan ini semakin terlihat keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha dari pada pekerja.

Tangga lagu kedelapan, pemerintah melakukan privatisasi terhadap

BUMN, dimana Indosat sebagai salah satu sektor yang strategis diprivatisasi dengan alasan efisiensi pengelolaan aset negara. Tahun 2008, SBY - JK telah memprivatisasi 34 BUMN dan sebelumnya sebanyak 10 BUMN telah diprivatisasi, karenanya tidak heran jika para pengamat ekonomi progressif menyatakan bahwa peristiwa ini sebagai ledakan privatisasi.

Di urutan ketujuh, penyelesaian kasus Lapindo yang semakin jauh dari harapan masyarakat, semakin memantapkan langkah pemerintah untuk jauh dari rakyatnya. Terlebih saat ini, pihak Lapindo menyatakan ketidakmampuannya membayar ganti rugi kepada warga, meskipun perusahaan yang digawangi oleh keluarga Bakrie ini justru memiliki aset yang menempatkan pemiliknya sebagai salah satu orang terkaya di Asia.

Pendidikan yang murah dan berkualitas masih menjadi “barang” yang langka bisa dirasakan oleh seluruh warga negara, terlebih bagi rakyat miskin. Konon pemerintah telah mengalokasikan 20% alokasi APBN untuk pendidikan, meskipun sampai saat ini belum direalisasikan. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang disahkan pada bulan Desember 2008, semakin menunjukkan jauhnya orang miskin dapat menjangkau pendidikan yang baik dan berkualitas. Meskipun ditentang oleh masyarakat sipil khususnya kelompok mahasiswa, UU ini tetap jalan terus. Pendidikan kini telah menjadi komoditas yang sangat mahal, padahal pemenuhan pendidikan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya bagi seluruh rakyat sebagaimana mandat konstitusi.

Urutan kelima, pemberantasan korupsi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada rezim pemerintahan SBY - JK. Angin segar nampaknya belum memberikan harapan banyak bagi rakyat untuk menyaksikan para koruptor diadili dan mengembalikan harta kekayaan yang dicurinya kepada negara. Pemberantasan korupsi dinilai oleh publik masih tebang pilih dan setengah hati, bahkan jauh dari rasa memenuhi keadilan bagi masyarakat antara hukuman dengan kekayaan yang dikeruk dari hasil mencuri uang negara.

Konversi minyak tanah ke elpiji, menduduki urutan ke empat dari kebijakan yang membuat susah rakyat khususnya ibu-ibu yang selama ini bersentuhan langsung dengan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji tidak dibarengi dengan kesiapan dari pemerintah, dan bahkan pasokan minyak tanah langka di pasaran dan menyebabkan harga minyak tanah melambung tinggi. Tidak berlangsung lama, harga elpiji juga mengalami kenaikan.

Tangga lagu ketiga, diisi dengan lagu bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi atas pengurangan subsidi terhadap bahan bakar minyak. Tidak kurang dari 14 trilyun rupiah dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk BLT. BLT dinilai sebagai program yang tidak efektif karena seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi rakyat, belum lagi penyaluran BLT di lapangan juga tidak tepat sasaran.

Urutan kedua, kenaikan harga sembako. Selain dipicu oleh krisis pangan dunia sebagaimana yang dilaporkan oleh FAO pada tahun 2007, kenaikan harga sembako seperti beras, gula, minyak goreng, susu hingga mencapai 43 persen juga didongkrak oleh kenaikan harga BBM. Bukan hanya sekedar naik, bahkan beberapa bahan pokok ini seolah raib dari pasaran dan membuat mayoritas ibu-ibu panik. Melambungnnya harga sembilan bahan pokok ini menyebabkan banyak keluarga miskin yang harus mengurangi jatah makan atau lauk pauk keluarganya agar dapat tercukupi kebutuhan makan keluarganya yang mencapai 50-70% dari total pengeluaran anggaran keluarga sebagaimana yang dilansir dalam evaluasi kebijakan pertanian oleh Serikat Petani Indonesia (SPI).

Akhirnya, secara berturut-turut pemerintah SBY - JK menaikkan harga BBM sebanyak tiga kali. Kebijakan kenaikan harga BBM inilah yang menempatkannya berada di urutan pertama dari 10 tangga lagu yang berisi kebijakan pemerintah selama satu periode pemerintahan ini. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 3 (tiga) kali pemerintah menaikkan harga BBM, dengan alasan harga minyak dunia yang naik. Alasan ini semakin membuktikan bahwa negara ini sangat tergantung dengan pasar minyak dunia, dan tidak memiliki sistem yang dapat memproteksi warga negaranya dari kepungan sistem pasar dunia. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 90 persen industri hulu migas telah dikuasi oleh modal asing, dan kenaikan BBM menjelaskan secara jelas bagaimana praktek-praktek liberalisasi dijalankan oleh rezim ini.

Top Ten tangga "lagu" yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY - JK yang bukan hanya bernada sumbang atau menyebalkan bagi rakyat, tetapi juga semakin menunjukkan tunduknya pemerintahan ini pada kekuatan lain diluar negara yakni kelompok pemodal.

Yang menarik, dari 10 lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh rezim ini, sebanyak 5 (lima) kebijakan ini saling terkait dengan hilangnya kedaulatan negara atas energi dan pangan. Padahal pemerintah SBY-JK menempatkan soal kebijakan ketahanan energi dan sumber daya alam sebagai prioritas paket kebijakan ekonomi pemerintah tahun 2008-2009 sebagaimana yang tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 2008 yang seharusnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Krisis energi

global dan nasional yang terjadi saat ini, seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk melakukan reformasi terhadap kebijakan energi dalam negeri, dan tidak terjebak juga pada mekanisme skema pemenuhan energi yang tidak berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan. Selama ini, restrukturisasi energi yang dilakukan oleh pemerintah, diimplementasikan melalui produk kebijakan Undang-Undang Migas, yang merupakan manifestasi dari skenario penguasaan dan kontrol pasar terhadap sumber daya energi bangsa ini.

Bumi, Rumah Manusia

Khalisah Khalid

Bumi, rumah manusia. Begitu kira-kira sosok Pramoedya Ananta Toer menggambarkan ruang hidup manusia Indonesia yang semakin hilang eksistensinya, yang terus menerus diteropong layaknya miniatur (*baca, rumah kecil*) oleh sebuah sistem kapitalisme. Kini, bumi Indonesia tidak bisa lagi menjadi rumah yang aman bagi manusia Indonesia yang mendiaminya. Kata-kata keselamatan bagi manusia yang ada di rumah besar ini, saat ini semakin kabur dari esensinya. Realitas inilah yang dihadapi oleh anak-anak di belahan bumi Sidoarjo, yang rumahnya ditenggelamkan oleh lumpur Lapindo Brantas dan terancam kehilangan eksistensinya sebagai manusia.

Derajat kerusakan lingkungan di Indonesia, sudah mencapai krisis ekologi yang mengkhawatirkan. Pencemaran (udara, air, tanah) yang menyebabkan turunnya kualitas kesehatan dan kualitas hidup manusia, kehancuran ekosistem yang tidak terpulihkan yang menyebabkan krisis panjang bagi rakyat antara lain kemiskinan akibat hilangnya hak dan akses terhadap sumberdaya alam, kelangkaan sumberdaya alam menyebabkan merosotnya ketahanan pangan, gizi buruk dan kemiskinan. Fenomena perubahan iklim (*climate change*) saat ini, menjadi potret nyata atas pengabaian terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan hak-hak dasar rakyat untuk mendapatkan jaminan keselamatan, produktifitas, kesejahteraan.

Dari semua manusia yang menempati rumah besar yang sudah mengalami krisis ini, yang paling merasakan dampak yang lebih besar adalah manusia yang hidup dalam garis kemiskinan. Rakyat miskin mengalami masalah dalam mengakses sumber-sumber air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha tani karena menurunnya kuantitas dan kualitas air yang dapat dimanfaatkan. Pengungsi ekologi dan pengungsi pembangunan yang setiap saat kehidupannya tidak lepas dari ancaman, yang dibangun secara sistematis oleh sebuah pembangunan ekonomi global.

Sebagai rumah bagi manusia, bumi Indonesia kita semakin meradang. Keberlanjutannya saat ini telah tergadai oleh sebuah sistem kapitalisme, yang mensyaratkan menjadikan seluruh isi bumi sebagai sumber daya yang bisa dikeruk secara besar-besaran, dengan atas nama mengejar pertumbuhan ekonomi, pembangunan, peningkatan devisa negara dan bahkan atas nama stabilitas negara. Proses penghancuran terhadap bumi dan makhluk bumi inilah yang mendorong terjadinya

ecocide, sebagaimana yang dituliskan dalam buku yang berjudul *Ecocide, Pelanggaran HAM dan Kejahatan Lingkungan*, bahwa *ecocide* adalah sebuah tindakan terencana yang secara langsung maupun tidak langsung, ditujukan untuk menguras, menghancurkan dan memusnahkan eksistensi dasar ekologi dari sebuah tata kehidupan semua makhluk bumi didalamnya. Walhasil, berbagai upaya *destruktif* bagi eksistensi keberlanjutan lingkungan hidup, sama halnya dengan penghapusan identitas diri manusia sebagai makhluk yang berakal budi (*dehumanisasi*).

Ditengah hampir robohnya rumah Indonesia ini, tentu saja kita harus membangun kekuatan kolektif seluruh penduduk bumi untuk menata ulang pondasi dari bangunan dengan konstruksi berbasis ideologi yang jelas. Meskipun, setiap masanya ada proses transisi yang terus menerus mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangan sebuah masyarakat memaknai dan memperlakukan alam itu sendiri. Konstruksi yang ingin kita bangun ulang tentu saja dengan pondasi yang melihat kelas siapa yang hari ini paling dimiskinkan, disingkirkan, dihilangkan hak-haknya dasarnya.

Gerakan politik lingkungan di Indonesia saat ini harus memiliki kemampuan untuk memperbesar dan memperluas gerakannya, dan itu hanya bisa dilakukan jika subyek dari gerakan politik lingkungan itu adalah basis massa yang memiliki garis ideologi yang berpikir bahwa perjuangan penegakan keadilan ekologi, bukan sekedar membicarakan soal degradasi lingkungan, tetapi juga membicarakan soal keberlanjutan generasi yang akan datang, bicara soal gerakan lingkungan juga tidak terlepas dari bicara soal bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat terhadap hak-hak dasarnya yang dibangun dengan semangat kolektivitas.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Lao Tzu, bahwa seorang pemimpin adalah orang yang berjalan bersama rakyat, tinggal bersama rakyat, belajar dari rakyat, mencintai rakyat, memulai dari apa yang diketahui oleh rakyat, membangun dari apa yang rakyat miliki. Hanya dengan pemimpin-pemimpin terbaik, ketika pekerjaan sudah selesai dan tujuan rakyat telah tercapai. Rakyat akan berkata, kita telah melakukannya sendiri. Karenanya, gerakan politik lingkungan harus bisa memainkan ritme iramanya dengan manfaat dari gerakan itu sendiri, dan menyentuh kebutuhan dasar dari gerakan rakyat dan merubah kondisi politik yang kontekstual dengan kebutuhan politik rakyat. Kita percaya, bahwa perjuangan politik rakyat tidak bisa lagi diserahkan kepada elit politik dominan hari ini. Semua orang adalah makhluk politik, karenanya tanggungjawab dan tindakan politik harus dimulai setiap hari dimulai dari lingkungan komunitas terkecil sampai lingkungan Negara.

Akhirnya, selamat hari lingkungan 5 Juni 2008. Semoga seluruh kekuatan rakyat hari ini bisa merebut kembali kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya.

DAENDELISME

Khalisah Khalid

Dandelisme di Indonesia

Daendels, menjadi sosok pertama dari jaman kolonisasi Belanda yang meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi di Pulau Jawa dan yang selanjutnya melahirkan banyak lagi daendels-daendels lain yang menerapkan dasar yang sama. Praktek industrialisasi yang disokong infrastruktur raksasa inilah yang kemudian menjadi landasan atau pijakan model pembangunan, yang berujung pada tata kuasa, tata penggunaan lahan, tata produksi dan tata konsumsi yang menguntungkan segelintir kuasa politik dan modal.

Dalam kurun waktu yang relatif singkat, Daendels membuat sebuah terobosan dengan meletakkan dasar-dasar industrialisasi dan sketsa awal di Jawa dalam masa-masa berikutnya, dengan membangun infrastruktur jalan raya pos yang menyambungkan Anyer sampai Panarukan yang juga berfungsi mengintegrasikan dagang, industri, pertanian, hukum, administrasi pemerintahan, dan tata pengurusan wilayah dalam sekali pukul.

Pada saat itu, Daendels memimpikan dapat menguasai perdagangan dan jalur ekonomi, yang dapat dicapai dengan membangun infrastruktur ekonomi di antaranya jalan raya yang menjadi poros dari jalur perdagangan di Pulau Jawa dengan mempekerjakan secara paksa sekitar 12.000 orang. Jawa dipilih oleh kolonial Belanda untuk menancapkan kekuasaan ekonomi dan politiknya, karena Pulau Jawa`dinilai sangat strategis, kaya dengan sumber daya alamnya dan memiliki banyak sumber daya manusia yang sangat murah, yang dapat dipekerjakan secara paksa, antara lain di perkebunan teh dan kopi yang dikuasai oleh Perusahaan Belanda.

Yang lainnya adalah karena pemimpin politik di Jawa dapat dijadikan sebagai penghubung atau mitra Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya. Kenyataan inilah yang selanjutnya menjadi alur kolonisasi secara ekonomi, sejalan beriringan dengan kolonisasi secara politik. Jalan raya ini berperan dalam perubahan-perubahan ekologis, sosial, politik demi pertumbuhan ekonomi pada abad ke 19. Dalam kurun waktu kurang dari 25 tahun, sejak tahun 1898-1922 hutan yang hilang mencapai 22.000 km² (atau 220,000 hektar) (Whitten: 1996). Sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan kereta api mengikuti jalan raya pos. Sementara itu sejak tahun 1830-an hingga

1900 hutan yang hilang sudah mencapai 5 juta hektar. Hingga tahun 1973 saja, hutan alam di Jawa hanya tinggal 11% (Donner: 1987).

Rezim Daendelisme

Kini, 63 tahun mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan kurang lebih 200 tahun paska Daendels menjadi Gubernur Hindia Belanda, entitas politik di negeri kepulauan ini mengikuti dan memperkokoh watak dan memiliki ambisi yang serupa dengan Daendels, mengembangkan imperium bisnis atas ongkos-ongkos yang harus ditanggung oleh rakyat. Pembangunan dan janji pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah mitos yang terus-menerus disuarakan oleh pengurus negara dan pemodal yang menguasai tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi dan tata konsumsi manusia di Indonesia.

Pemimpin manusia di Indonesia kini menjadi pengikut setia dari paham yang dibangun oleh Daendels, di dalam sistem kekuasaannya (power system) telah menempatkan diri sebagai sebuah elit yang mengatasnamakan kelas yang dikuasainya. Dalam hal ini, rakyat yang selalu ditempatkan menjadi objek dalam seluruh cerita pembangunan, untuk mewujudkan mimpi kemakmuran dan kesejahteraan untuk kelompoknya.

Jared Diamond dalam teori collapse-nya mengatakan runtuh dan berkembangnya satu entitas dalam satuan lingkungan bukan ditentukan oleh kondisi geografik alamnya saja. Pilihan untuk bertahan atau collapse jatuh pada entitas manusia yang tinggal di dalamnya. Entitas pada konteks tertentu ditentukan oleh pilihan pemimpinnya. Tampaknya pemimpin entitas manusia di Indonesia memilih jalan menuju collapse dengan membiarkan bencana terjadi dengan intensitas yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tim riset Jawa Collapse Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, bahwa Pulau Jawa menuju collapse dan akan diikuti segera oleh kepulauan lain di Indonesia, riset ini dilakukan dengan menggunakan cara baca terhadap krisis yang terjadi di Jawa difokuskan pada agregat krisis yang ditetapkan tim, antara lain: (1) Kebijakan pembangunan berisiko tinggi terhadap manusia dan alam; (2) Kebijakan (budaya) manusia di Jawa menggeser siklus saling ketergantungan antara manusia dan alam; (3) Kebijakan pembangunan yang mengabaikan siklus alam; (4) Ketiadaan informasi siklus alam dan karakter wilayah; (5) Ketegangan ekonomi dan politik elit kekuasaan mengorbankan rakyat kebanyakan.

Jika ditarik garis lurus, bahwa kelas yang berkuasa pada jamannya, dari jaman kolonial hingga rezim saat ini, meletakkan sebuah pondasi

pembangunan dengan mimpi yang sama yakni kemakmuran dan kesejahteraan bagi pelanggaran kekuasaannya. Bahkan dengan menggunakan bacaan yang sama, bahwa seluruh cerita pembangunan infrastruktur industri, digunakan sebagai sebuah ajang bagi bentuk konsolidasi modal, politik (kekuasaan) dan militer. Mimpi besar integrasi berwatak Daendelisme, kreatif destruktif. Elit oligarki yang berjaya, proletarisasi dan korban-korban yang berjatuhan dari rakyat.

Agama dan Solidaritas Ekologis

Khalisah Khalid

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi, sebagai Rahmat daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS. Al-Jatsiyah 45:13)

Alam dan Spiritualitas Agama

Jika alam semesta sebagaimana yang disebutkan oleh Cak Nur sebagai sebuah jalan mencapai spritualitas tertinggi sebagai *khalifatul fil ardi*, maka seharusnya alam ditempatkan sebagai penciptaan Tuhan yang dianugrahi untuk manusia yang harus dikelola sebagaimana yang menjadi pelaksanaan tugasnya dengan tetap berpegang kepada pengetahuan dan petunjuk Illahi.

Apa yang menjadi pemikiran Cak Nur, juga diutarakan oleh Dennis Lardner Carmody dan John Tully Carmody dalam Jejak Rohani Sang Guru Suci, bahwa "Tuhan meletakkan penjagaan alam ke dalam penjagaan manusia, dalam arti bahwa manusia mempunyai keperluan dan hak untuk mengembangkan sumber-sumber alam. Akan tetapi manusia tidak diberi hak penuh kepada manusia untuk menjadi pemilik ontologis ciptaan Tuhan secara penuh, karena penciptaan dari Sang Pencipta menjadi satu-satunya sumber yang ada dan makna tertinggi."

Segelintir orang kaya (*baca: pemilik modal*), dengan menggunakan pakaian globalisasinya, mengabaikan daya dukung alam yang terbatas untuk pemenuhan tingkat konsumsi yang diciptakan oleh negara-negara maju dengan menggunakan kepemilikan sumber daya alam menjadi akumulasi kekayaan dan kekuasaannya sebagai sebuah pengganti kekayaan spritual. Mereka memiliki kekayaan yang berlimpah, tapi miskin dengan spiritualitas agama yang hakiki.

Sayangnya, segelintir manusia yang kemudian banyak mengklaim dirinya sebagai manusia modern, dengan kekuatan modal dan kekuatan politiknya melihat sumber daya alam bukan sebagai media untuk mencapai tingkat spiritualitasnya dalam beragama, melainkan sebagai tujuan akhir agar mencapai kepuasan duniawinya menguasai atau mendominasi atas manusia yang lain.

Globalisasi mencoba mereduksi pengetahuan alam menjadi sebuah bagian dari penaklukan manusia terhadap alam, dan bertujuan untuk

mengakumulasi keuntungan dari alam tersebut. Kekhalifahan yang menjadi kodrati manusia sebagai khalifah (pemimpin di muka bumi), kemudian justru yang mendorong manusia untuk memiliki kecenderungan mengeksploitasi alam.

Cara berpikir inilah yang kemudian digunakan oleh sistem kapitalisme untuk menggunakan ruang agama sebagai aktualisasi melanggengkan kekuasaannya untuk menguasai dunia. Jika dulu, peran agama dinegasikan oleh pengetahuan modern yang disimbolkan dengan globalisasi, justru saat ini agama digunakan sebagai alat untuk melegitimasi bentuk-bentuk pengerusakan yang telah dilakukan oleh fundamentalisme pasar, sebagaimana kekuatan pasar mampu mempengaruhi sebuah kehidupan beragama sebuah bangsa.

Solidaritas Ekologis

Alois Agus Nugroho menggunakan kata "solidaritas ekologis" dalam tulisannya yang berjudul *Postmodernisme, Toleransi Multikultural dan Solidaritas Ekologis* yang terdapat di dalam buku "Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan yang Membebaskan." Sebuah refleksi atas pemikiran Nurcholis Madjid yang melihat bagaimana keberadaan lingkungan hidup dan akselerasinya bagi wadah ketundukan dan kasih sayang bagi segenap penghuni semesta, serta jalan untuk meretas nilai-nilai spiritualitasnya. Bagi saya, apa yang disampaikan oleh Cak Nur, seharusnya bisa menjadi bagian diri kita untuk melihat ulang pengetahuan beragama, yang selama ini masih berkuat pada persoalan *Ubbudiah - Illahiah*. Beragama, seharusnya juga melihat relasi antara Tuhan, alam dan manusia.

Saat ini, solidaritas ekologis semakin jauh dari harapan yang diinginkan oleh sebuah masyarakat yang beragama, ketika tingkat kerusakan lingkungan hidup semakin membawa manusia mengalami penurunan kualitas hidupnya. Padahal, berbagai upaya destruktif bagi eksistensi keberlanjutan lingkungan hidup sama artinya dengan penghapusan identitas diri manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Seperti yang dialami oleh warga korban lumpur Lapindo, yang mengalami berbagai upaya destruktif oleh sebuah kepentingan industri yang telah menguras, menghancurkan dan memusnahkan eksistensi dasar ekologi dan sebuah tatanan kehidupan semua makhluk di dalamnya.

Ekologi ditafsirkan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan

dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia.

Bukankah Sa'adi sang penyair masyhur mengatakan bahwa ibadah tidak lain kecuali melayani manusia, bukan dengan tasbih, sajadah dan jubah. Jika demikian adanya, sesungguhnya mempertahankan keadilan ekologis, termasuk di dalamnya membangun solidaritas ekologis yang melihat alam sebagai bagian dari diri manusia yang harus dipertahankan keberadaannya demi keberlanjutan kehidupan manusia, sama artinya dengan menjalankan nilai-nilai ibadah.

Banyak orang-orang yang berjubah, berkhotbah dan menggunakan ayat-ayat suci untuk membenarkan serangkaian kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, dengan mengatakan bahwa bencana ekologis itu sebagai bencana alam dan takdir dari Tuhan, sembari meminta kepada rakyat untuk bersabar dan bahkan bertaubat karena semua kesalahan dilimpahkan kepada rakyat yang sering kali distigmakan pada kaum pembuat dosa dan seorang kriminil.

KOMPAS14 Juli 2008

Agar Negara Belajar Mendengar Suara yang Tidak Terdengar

Khalisah Khalid

Sebagai anak petani yang tidak memiliki tanah, Weni terpaksa harus mengadu nasibnya di negeri orang dengan harapan dapat memperbaiki nasib keluarga yang lahan pertaniannya tergusur oleh pembangunan pabrik di Karawang.

Bayangan kesejahteraan dengan bekerja sebagai buruh migran di Arab Saudi juga jauh panggang dari api, rentetan penderitaan dia alami dan tidak ada perlindungan yang diberikan negara kepada WNI yang telah menyumbangkan devisa bagi negara yang jumlahnya begitu besar.

Di empat lain, di Sulawesi Selatan sana, sebagai petani perempuan, Daeng Bau mengalami nasib sama. Dia kehilangan sawah yang menjadi sumber pangan keluarganya dan berganti menjadi petani sayur dengan menggunakan pupuk pestisida yang sangat berbahaya bagi kesehatan rproduksi. Ironisnya, pupuk pestisida itu diperkenalkan pemerintah tanpa disertai menjelaskan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, khususnya perempuan.

Risiko atas kesehatan yang sama juga dialami Surtini Papatungan yang terkontaminasi arsenik 4 mg/m sejak tahun 1998 akibat dari buangan tailing PT Newmont Minahasa Raya (NMR). Sebagai pencari nener untuk menambal! penghasilan keluarga, setiap hari Surtini harus berjibaku dengan tailing untuk menghasilkan emas yang sebagian besar dikonsumsi di luar negeri. Kemiskinan semakin melingkari kehidupan keluarga Surtini dan masyarakat Buyat korban PT NMR karena mereka tidak bisa lagi melaut, selain derita penyakit yang menggerogoti masyarakat di sana.

Di kota, perempuan juga tidak kalah miskinnya. Perempuan miskin di kota-kota-besar, seperti Jakarta, tidak dapat mengakses air bersih seperti dialami Ratih. Padahal, air bersih menjadi kebutuhan dasar yang seharusnya bisa didapat gratis tanpa mengeluarkan tidak kurang dari Rp 540.000 tiap bulan.

Penghasilan keluarganya yang hanya Rp 900.000 per bulan menyebabkan Ratih tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan standar minimum sekalipun.

Menggugat

Seluruh cerita tadi bukan cerita fiksi. Empat sosok perempuan ini mewakili nasib banyak perempuan Indonesia, yang memberi kesaksian dalam Pengadilan Perempuan tentang berbagai kekerasan ekonomi akibat jauhnya akses dan kontrol perempuan terhadap lingkungan hidup dan sumber kehidupannya.

Mereka menggugat negara dan lembaga nonnegara yang telah merugikan masyarakat melalui produk kebijakan, seperti undang-undang penanaman modal asing, undang-undang sumber daya air, dan berbagai produk kebijakan ekonominya lain, seperti kenaikan harga BBM.

Kekerasan yang menciptakan pemiskinan struktural terhadap perempuan yang dilakukan negara maupun lembaga nonnegara sesungguhnya bukan hal baru. Ini menjadi realitas politik yang dipilih negara ketika memilih model pembangunan. Negara lebih memilih mengorbankan rakyatnya dengan merampas sumber-sumber kehidupan masyarakat melalui liberalisasi kekayaan alam dengan akibat degradasi lingkungan yang tidak terpulihkan.

Negara lebih memilih lahan Ibu Pertiwi diserahkan untuk investasi pertambangan asing daripada kepentingan pemenuhan lahan bagi petani. Padahal, pengurus negara mengakui Indonesia mengalami krisis pangan akibat penyediaan pangan berorientasi sebagai komoditas global.

Politik lingkungan menilai, berbagai persoalan lingkungan hidup dan kemiskinan akibat hilangnya akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, berelasi kuat dengan perusakan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di negara-negara maju dan kepentingan global (Balkie, 1985). Dalam hal ini, politik lingkungan melihat inter-relasi antara dampak lingkungan dan relasi kekuasaan sosial-ekonomi. Relasi kekuasaan di sini termasuk masalah perebutan ekologis, yakni dalam hal penggunaan lahan dan praktik pengaturan yang dominan dalam wilayah tersebut

Sementara itu. D Rocheleau, B Thomas-Slayer dan E Wangari dalam analisis politik ekologi feminis melihat, akses dan kontrol perempuan terhadap lingkungan hidup dan sumber kehidupannya diciptakan secara struktural yang kemudian membuat perempuan semakin jauh dari akses dan kontrol terhadap sumber kehidupan itu. j,

Pendidikan politik

Pengadilan perempuan melawan pemiskinan oleh Solidaritas Perempuan ini masih sebatas ruang kampanye oleh gerakan perempuan dan gerakan masyarakat sipil lain. Meskipun demikian, pengadilan ini menjadi media pendidikan politik bagi perempuan akar rumput korban kekerasan, terutama terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya untuk melawan semua bentuk pemiskinan yang dilakukan negara maupun aktor di luar negara.

Cara ini juga memberi ruang bagi perempuan untuk memperlihatkan kepada pengurus negara agar negara belajar mendengarkan suara-suara yang selama ini tidak terdengar.

Bisnis Agrofuel, Kolonialisasi Perkebunan

Khalisah Khalid

Tergelincir Sawit

Meningkatnya permintaan bahan bakar nabati untuk pemenuhan energi yang dipandang tidak terlalu mencemari lingkungan hidup dan berkontribusi terhadap perubahan iklim, terutama di negara-negara industri, telah mendorong terjadinya perluasan perkebunan penghasil bahan baku nabati. Kebijakan investasi global lebih diarahkan pada pemenuhan industri penghasil energi nabati, termasuk terhadap penyediaan bahan baku. Kondisi ini mendorong pada terjadinya "pemaksaan" perluasan perkebunan penghasil bahan baku energi nabati, di wilayah-wilayah yang "dipandang" mampu menyediakan lahan skala luas. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mentargetkan luasan yang luar biasa untuk menjadi hamparan perkebunan besar kelapa sawit, kedelai maupun tebu, yang diarahkan pada dukungan terhadap energi nabati.

Pilihan komoditi lalu diarahkan pada kelapa sawit, karena dipandang komoditi ini mampu menyediakan kebutuhan energi "hijau" dalam jumlah yang cukup besar. Yang menjadi masalah kemudian adalah agrofuel berkembang mengikuti hasrat pasar, dan sebagai komoditas untuk memenuhi akumulasi modal tentunya. Paling tidak, ada tujuh kelompok besar industri yang berada dibalik bisnis Agrofuel di Indonesia yang menguasai kurang lebih seribu tujuh ratus hektar. Inilah yang kemudian terjadilah beragam permasalahan di wilayah perkebunan besar maupun pada industri pengolahan dasar, semisal konflik tenurial, kekerasan, penghilangan lahan-lahan produktif, krisis air, hingga pencemaran.

Berbagai permasalahan umum yang hadir pada setiap rantai produksi bahan bakar nabati terhadap komunitas lokal, diantaranya adalah: (1) meningkatnya beban kelola rumah tangga; (2) hilangnya sumber pangan akibat hilangnya lahan produktif pertanian; (3) meningkatnya biaya untuk pemenuhan kesehatan, energi dan air; (4) hilangnya sistem sosial dan budaya; dan lain sebagainya. Berbagai fakta penghancuran inilah yang menjadi indikator bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu basis produksi kotor yang diandalkan Indonesia, setelah industri tambang.

Kolonialisasi Perempuan di Perkebunan

Masalah lainnya adalah jika bisnis agrofuel ditarik pada garis sebuah entitas yang berjenis kelamin sosial perempuan. Dalam peristiwa yang ada di atas, nampaknya cerita perempuan sungguh jauh dari pembahasan tentang industri sawit, jika tidak mau dikatakan dihilangkan dari seluruh cerita tentang sawit. Dalam peristiwa kebanyakan yang bicara soal ekstraksi sumber daya alam, cerita perempuan menjadi sangat jauh dan seringkali kebijakan yang dipilih oleh pemerintah yang selalu bicara soal perluasan produksi, harga sawit, pasokan dan seterusnya yang tidak relevan dengan cerita kekerasan yang dialami oleh perempuan yang hidup di sekitar perkebunan besar kelapa sawit.

Selain berbagai persoalan yang ditimbulkan sebagai dampak dari agrofuel, ada hal mendasar lainnya yang secara spesifik dialami oleh perempuan. Ekologi politik feminis melihat aspek pengetahuan, hak atas kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan, termasuk di dalamnya aspek akses dan kontrol, serta aspek institusi pengurusan kekayaan alam dan perjuangan merebut kembali hak atas pengurusan kekayaan alam dari perspektif gender, kelas, etnisitas, dan aspek-aspek lain (Rocheleau, Thomas-Slayter, Wangari 1996).

Ekologi politik feminis sebagai pisau analisis karena pendekatan ini membuka peluang untuk melihat relasi kekuasaan dalam masyarakat yang dipengaruhi gender, kelas, etnisitas, agama, dan aspek-aspek lain. Pendekatan ini juga mengakui bahwa perempuan bukan entitas homogen dan bahwa perempuan memiliki kompleksitas posisi, fungsi, dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan perbedaan kelas, etnisitas, dan hal-hal lainnya, sehingga pengalaman dan reaksi perempuan terhadap satu isu akan berbeda dengan perempuan lainnya.

Dengan menggunakan pisau analisis ekologi politik feminis, cerita yang diungkapkan oleh perempuan yang tinggal di area perkebunan besar kelapa sawit, mencoba untuk lebih dalam melihat bagaimana lapis kekerasan yang dialami oleh perempuan di perkebunan besar kelapa sawit disebabkan oleh penguasaan sumberdaya alam oleh para pihak yang memiliki kekuasaan, baik secara kultural maupun struktural dengan aktor utama negara dan pasar. Yang menghasilkan sebuah potret dari alur cerita penghancuran sumberdaya alam yang menciptakan sebuah rangkaian peristiwa yang menyebabkan terganggunya atau putusnya sumber-sumber kehidupan perempuan, terutama dari kelas sosial yang paling rendah. Dimana, peristiwa tersebut bisa berulang, berbabak-babak, berubah bentuk maupun pelaku.

Akumulasi dari beragam permasalahan pada penyediaan bahan bakar nabati, memberikan dampak yang lebih besar kepada kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak. Dalam setiap rantai produksi tetes-demi-tetes bahan bakar nabati, terdapat beragam permasalahan yang menjadikan perempuan sebagai korban yang menerima dampak yang lebih besar di dalam sebuah komunitas korban bahan bakar nabati.

Sejak perkebunan besar kelapa sawit masuk, perempuan kehilangan akses dan kontrolnya terhadap tanah, dan menempatkan perempuan sebagai buruh di perkebunan sawit tanpa adanya perlindungan formal sebagai tenaga yang membuah dan menyemprot dengan menggunakan pestisida yang berbahaya bagi kesehatan perempuan. Konflik terjadi, bukan hanya karena terjadinya perbedaan persepsi antara komunitas lokal dengan pelaku pendukung agrofuel baik pasar maupun pemerintah. Konflik terjadi, karena kebijakan agrofuel telah mengabaikan pengetahuan dan pengalaman perempuan didalam mengelola sumber kehidupannya, khususnya sebagai penjaga dan pengelola sistem produksi rumah tangga dan produksi sosial. Bukankah pengabaian sebuah entitas dengan semua pengetahuan dan pengalaman yang melekat dalam dirinya sebagai sebuah bangunan tatanan social, merupakan bentuk yang paling mendasar dari sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia?

Kondisi ini diperparah dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri sawit yang memang diketahui mempengaruhi air sungai masyarakat setempat. Kondisi ini bukan tidak disadari oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh perempuan, tapi mereka tidak punya pilihan ekonomi lain untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Terlebih, perkebunan besar kelapa sawit secara struktural juga membangun sistem kapital yang mampu menciptakan perubahan pola konsumsi pada perempuan dan masyarakat yang dibangun sedemikian sistemik oleh pasar, sehingga mampu merubah persepsi atau pandangan perempuan terhadap kebutuhan hidupnya dan bahkan terhadap tubuh perempuan itu sendiri.

Potret kekerasan dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap perempuan berbasis jender dalam sebuah relasi personal, dalam komunitas dan dalam lingkup negara yang terkait dengan agresi pasar dan alir kapital yang berdasarkan pada produksi kotor, ketamakan dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup, yang dalam konteks ini dapat ditemui dalam cerita situasi global produksi agrofuel di Indonesia . Kelangkaan dari daya dukung alam yang dikeruk tanpa mempertimbangkan kerentanan dan keberlanjutan lingkungan, yang terjadi karena intervensi pasar dan negara, telah menyebabkan konflik

<http://alien.adefadli.hijaubiru.org>

terjadi di tingkat masyarakat dengan mengabaikan pengalaman perempuan maupun keberadaan perempuan sebagai subyek keberlangsungan reproduksi sosial, dan pada akhirnya menempatkan perempuan kelas paling bawah berada dalam kondisi terpuruk, terpinggirkan dan terabaikan dalam seluruh cerita yang bernama bisnis Agrofuel.

Senin, 12 Mei 2008 | 01:08 WIB

Ekofeminis di Indonesia, Apakah Ada?

Khalisah Khalid

Werima Mananta adalah sosok perempuan biasa yang setiap hari berkebun dan melakukan pekerjaan domestik dalam kehidupan sehari-harinya jauh di Sorowako Sulawesi Selatan. Namun, ada yang tidak biasa dalam sosok dirinya. Dengan kebersahaannya, tersimpan kecerdasan luar biasa dan nilai hidup yang jauh begitu mulia dalam memaknai ruang hidupnya.

Itulah kesan mendalam yang saya dapatkan selama satu minggu tinggal bersama dia di rumah mungilnya yang tidak mendapatkan fasilitas listrik, di tanah Karonsi'e yang artinya lumbung utama. Sebelum ada industri pertambangan di sana, wilayah Dongi Karonsi'e begitu subur dan selalu menghasilkan panen padi melimpah.

Bagi Werima, tanah kelahiran adalah entitas ruang hidup, bukan komoditas yang bisa dijual-beli, apalagi dipertukarkan. Itulah yang mendasari mengapa tubuhnya yang mulai renta dimakan usia melakukan reclaiming dan dia berkebun di atas tanah nenek moyangnya yang telah diokupasi perusahaan tambang nikel skala internasional milik Kanada. Perusahaan itu menguras sumber daya alamnya tidak kurang dari 30 tahun lamanya dan mengubah tanah pertanian milik masyarakat Dongi Koronsi'e menjadi lapangan golf dan permukiman elite sebagai sarana fasilitas perusahaan kepada karyawan.

Warima Mananta mungkin tidak sekaliber Vandana Shiva dengan segala pemikirannya tentang ekofeminisme. Vandana Shiva melihat kenyataan yang dialami Dunia Ketiga: pembangunan melahirkan mitos yang semakin menempatkan warganya pada kondisi tidak adil, terutama dalam potret pembangunan yang dipraktikkan negara-negara Utara yang melanggengkan kekerasan psikis, ekonomi, dan fisik.

Ekofeminis lahir didasari kondisi di mana bumi yang digambarkan sebagai ibu telah dieksploitasi, dijajah, dan dirusak sistem kapitalisme yang berkuasa dengan melanggengkan budaya patriarki dan feodalisme. Ekofeminis lahir untuk menjawab kebutuhan penyelamatan bumi dengan berbasiskan pada kekhasan perempuan yang selama ini memiliki pengetahuan dalam mengelola lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan.

Bumi adalah ibu

Bagi perempuan, bumi adalah ibu yang harus diselamatkan dari ancaman kerusakan yang dilakukan korporasi yang didukung lembaga keuangan internasional dan pengurus negara. Perempuan adalah tangan pertama yang bersentuhan dengan sumber daya alam karena itulah perempuan kemudian menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap risiko dan dampak kerusakan lingkungan hidup.

Akses dan kontrol perempuan hilang akibat sumber daya alam yang ada sudah tidak dapat dikelola lagi. Misalnya, membuat anyaman dari rotan dan daun pandan seperti tikar, bakul, dan tas. Aktivitas khas lain seperti penyadap damar, upacara adat, dan kerja gotong royong di ladang atau sawah tidak lagi bisa dilakukan perempuan.

Ekofeminisme sesungguhnya adalah cara pandang menganalisis persoalan lingkungan hidup dengan menggunakan pisau analisis feminis. Di sini feminis menilai akar persoalan, dampak yang ditimbulkan, khususnya spesifik pada kelompok rentan antara lain perempuan, dan apa yang mendasari gerakan ini untuk terus besar dan meluas.

Walaupun dengan bahasa sederhana dan mungkin tidak terdengar heroik, yang dipraktikkan Werima dan perempuan-perempuan lain dalam melawan praktik merugikan ibu bumi industri tambang di Indonesia telah mengajarkan bahwa ada proses ketidakadilan yang dipertontonkan industri pertambangan yang meraup keuntungan 513,35 juta dollar AS pada tahun 2006.

Praktik ekofeminisme

Werima Mananta, mewakili perempuan di Indonesia, melihat ketidakadilan yang dialaminya sebagai relasi yang utuh atas ketidakadilan yang dibangun oleh sistem kapitalistik dengan jargon pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Werima memperlihatkan, perempuan sebagai korban yang lebih rentan sesungguhnya memiliki kekuatan dan bisa memperjuangkan hak-haknya dengan cara yang diyakininya dan pengalamannya yang khas sebagai perempuan. Merebut tanah dengan membangun kampung halaman serta melakukan revitalisasi terhadap aset-aset adat dan pengetahuan adat secara turun-temurun menjadi pilihan sadar yang ditempuh Werima bersama dengan perempuan-perempuan Dongi Karonsi'e lain.

Bagi saya, meskipun tidak menuliskan pandangan hidupnya dalam buku sebagaimana Vandana Shiva, apa yang dipraktikkan Werima adalah

penghayatan seorang ekofeminis. Cara pandang dan nilai hidup yang banyak diyakini perempuan di pelosok-pelosok Tanah Air yang sedang berjuang merebut ruang keadilan ekologi, keadilan keberlanjutan kehidupan yang secara sederhana mempratikkan nilai-nilai ekofeminisme dalam hidupnya.

Bukankah yang terpenting bagaimana kita memaknai ekofeminisme bukan hanya dalam kata melainkan juga dalam cara bertindak kita dalam melihat keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya.

PEREMPUAN DAN JEJAK EKOLOGI YANG DITINGGALKAN

Khalisah Khalid

Ada survey singkat terhadap 10 orang perempuan yang tinggal di Jakarta, terkait dengan jejak ekologi yang ditinggalkan dari sebuah pola konsumsi yang setiap harinya dilakukan. Survey ini berdasarkan atas pertanyaan yang sederhana, berapa sering mereka berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dimana kecenderungan mereka berbelanja. Hasilnya tidak mengejutkan, perempuan di kota lebih dari 3 (tiga) kali berbelanja setiap bulannya di pusat perbelanjaan. Survey ini kita juga bisa melihat jejak ekologi yang ditinggalkan oleh perempuan untuk pemenuhan pola konsumsinya.

Dalam hitungan jejak ekologi (*ecological footprint*), kita bisa menilai sejauhmana tingkat konsumsi kita mempengaruhi kualitas lingkungan hidup kita dan tentu saja berapa besar kemudian korban yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan hidup yang bersumber dari pola konsumsi. Hitungan jejak ekologi ini memang cara menghitung dengan cepat dan relatif akurat untuk perseorangan yang bisa dihitung perbulan atau pertahun, dan tentu saja ini bisa diterapkan dimana saja termasuk di Indonesia yang tingkat kerusakan ekologinya begitu tinggi. Hasil dari hitungan *ecological footprint* kita mungkin akan sangat mengagetkan, tapi hitungan ini sekaligus bisa menjadi "alat" bagi kita untuk mulai mengurangi tingkat konsumerisme dalam kehidupan sehari-hari.

Tulisan ini juga hendak mengajak kita untuk melihat, bahwa jejak ekologi yang ditinggalkan oleh perempuan, bukan hanya menyisakan persoalan lingkungan hidup, tetapi bahkan berkontribusi besar atas proses kekerasan yang dialami oleh perempuan di belahan bumi lain yang mungkin tidak pernah terbayang di benak perempuan yang ada di kota. Tulisan ini hendak membawa kita (perempuan) yang tinggal di kota, untuk mulai membangun kepekaan terhadap perempuan yang tinggal di pedesaan.

Mari hitung tingkat konsumsi kita sebagai perempuan, yang mengkonsumsi lebih banyak *tissue* baik untuk menghapus keringat, kebutuhan di toilet, sampai menghapus *makeup* wajah. Apakah kita pernah berhitung, berapa banyak kemudian konsumsi kertas kita telah ikut menyumbangkan laju kerusakan hutan yang hingga kini mencapai 3,8 juta hektar pertahun. Pernahkah kita juga menghitung tingkat konsumsi terhadap *tissue* yang berasal dari hutan akasia, telah ikut menyumbangkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan pulp

and paper di Sumatera Utara terhadap perempuan yang tinggal di Porsea Sumatera Utara.

Kita juga sangat konsumtif terhadap kebutuhan mandi seperti sabun dan shampoo dengan berbagai aroma dan kemasannya, hingga kita tidak menyadari bahwa sabun dan shampoo itu dihasilkan dari minyak sawit (CPO) dari perkebunan besar kelapa sawit yang sangat tidak ramah lingkungan karena menggunakan pestisida dan insektisida pada masa pemupukan. Bahkan, banyak industri besar perkebunan sawit memperkerjakan buruh perempuannya dibidang pemupukan yang notabene itu beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan perempuan. Belum lagi tingkat diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh buruh perempuan di industri perkebunan besar kelapa sawit seperti yang dialami oleh buruh perempuan di Riau dengan satu perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Fakta ini mungkin memang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh perempuan di perkotaan, karena kita berpikir bahwa semua pemenuhan kebutuhan kita tidak ada relasi sama sekali dengan pola produksi yang dibangun oleh industri yang tidak pernah menghitung dampak ekologi yang ditimbulkan dari hasil produknya. Sesungguhnya budaya konsumtif yang dibangun oleh sistem kapitalisme tidaklah berdiri sendiri, karena ini terkait erat dengan kebijakan ekonomi politik yang dibangun dan diskenariokan sebagai sebuah papan reklame yang mengiklankan gaya hidup masyarakat perkotaan. Sistem kapitalisme menciptakan tata kuasa, tata konsumsi dan tata produksi berada di genggamannya pemilik modal, dan menjadikan perempuan sebagai target utama dalam pemasaran produk yang dihasilkan.

Seorang teman perempuan pernah mengingatkan kepada saya, untuk tidak menerima pemberian emas sebagai bentuk ungkapan cinta, karena emas ternyata bukan lagi menjadi logam mulia. Emas yang sering menjadi ukuran strata sosial atau kelas bagi perempuan, ternyata telah menjadi logam penindasan bagi perempuan yang menjadi korban industri pertambangan emas. Bahkan emas yang sangat disukai oleh perempuan, setiap gramnya menghasilkan tidak kurang 2,1 ton limbah batuan dan lumpur tailing yang dibuang. Ditambah 5,8 kilogram emisi beracun, 260 gram timbal, 6,1 gram merkuri dan 3 gram sianida. Semua limbah-limbah yang dihasilkan untuk memenuhi hasrat kita terhadap perhiasan emas, ternyata berandil besar terhadap lingkungan, khususnya perempuan yang lebih rentan dan spesifik terkena resiko dampak limbah terhadap alat reproduksinya.

Suara dari perempuan untuk perempuan, menjadi sebuah langkah nyata menuju keberlanjutan kehidupan yang lebih adil. Mari merubah gaya

<http://alien.edefadli.hijaubiru.org>

hidup, suara perempuan untuk kehidupan. Vote for Life, setidaknya itu dimulai bertepatan dengan peringatan hari perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2008.

ECO-FEMINIS, DAN PERJUANGAN MEREbut KEADILAN EKOLOGI

Khalisah Khalid

22 April 2007 yang baru saja berlalu, hampir di seluruh penjuru dunia memperingati International Earth Day atau Hari Bumi, sebuah momen penting untuk menyuarakan penyelamatan bumi. Di Indonesia, peringatan Hari Bumi juga dilakukan oleh organisasi yang memperjuangkan lingkungan hidup dan rakyat seperti yang dilakukan secara nasional oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Peringatan Hari Bumi di Indonesia, bukan saja untuk menyuarakan penyelamatan bumi, melainkan juga sebagai sebuah sinyal untuk menabuhkan genderang perlawanan terhadap korporasi dan negara, yang selama ini telah salah didalam mengurus negara, sehingga Indonesia saat ini bukan hanya terus duhantui oleh bencana ekologis, tetapi juga dibayangi-bayangi oleh kebangkrutan nasional. Kita dapat menyaksikan bagaimana daerah yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, kantong-kantong kemiskinannya begitu tinggi seperti di Papua, Aceh, Riau dan Kalimantan Timur.

Mainstream pembangunan yang bertumpu pada kepentingan modal dengan jargon pertumbuhan ekonomi, menjadi pemicu utama dari kehancuran ekologi dan kebangkrutan yang terjadi di Indonesia. Sistem kapitalisme telah menempatkan sumber daya alam sebagai sebuah komoditi yang bisa dieksploitasi sebebaskan-bebasnya, tanpa pernah mempertimbangkan daya dukung alam di dalamnya. Selain potret kehancuran ekologi, sistem kapitalisme juga telah melanggengkan sebuah model penjajahan yang dinamakan oleh Hira Jhamtani sebagai eco-kolonialisme, yakni sebuah penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Utara melakukan penjajahan ekonomi dan politik dengan sejumlah kebijakan ekonomi dan politiknya, untuk lepas tanggungjawab terhadap utang ekologi, yang ditimbulkan oleh industri yang meraka kembangkan di negara miskin dan berkembang.

Isu climate change misalnya, justru menjadi skema baru bagi negara-negara utara untuk melakukan penjajahannya dengan melepaskan diri dari tanggungjawab ekologinya akibat gaya hidup mereka yang begitu merusak, dengan agenda trade carbon atau perdagangan karbon yang dipaksakan kepada negara-negara di Selatan untuk menyelamatkan bumi dari ancaman climate change, padahal merekalah yang menjadi kontributor terbesar dari dampak perubahan iklim ini. Inilah yang dimaksudkan dengan ketidakadilan ekologi, yang dirasakan oleh negara miskin dan berkembang seperti Indonesia.

Sistem kapitalisme yang menggunakan alat-alat kekuatannya seperti TNC's/MNC's dan lembaga keuangan internasional, bukan saja melakukan kejahatan lingkungan dengan agenda eco-kolonialismenya, tetapi juga melakukan sejumlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan dan anak-anak.

Perempuan dan anak-anak menjadi korban yang paling besar harus mengalami dampak dari ketidakadilan ekologi ini. Perempuan bukan saja dihadapkan pada sistem kapitalisme, tetapi juga budaya patriarki dan feodalisme yang menempatkan perempuan sebagai kelas dua, kondisi inilah yang semakin memperburuk posisi perempuan di dalam kelas masyarakat. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dimulai dari pekarangan rumahnya, sampai kekerasan yang dilakukan oleh negara. Bukan saja kekerasan fisik dan psikis, tetapi juga kekerasan ekonomi yang diakibatkan oleh sebuah sistem pasar yang tidak adil bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Eco-feminis dan Perjuangan Keadilan Ekologi

Meskipun eco-kolonialisme telah menancapkan antek-anteknya di bumi ini, Perjuangan untuk menegakkan keadilan ekologi di hampir seluruh dunia telah dilakukan di mana-mana terutama oleh negara miskin dan berkembang. Sejumlah perlawanan telah dilakukan oleh kelompok perempuan di dunia untuk menyelamatkan bumi, seperti yang dilakukan oleh Vandana Shiva di India yang terkenal dengan gerakan ibu-ibu yang memeluk pohon untuk menyelamatkan hutan mereka dari ancaman eksploitasi industri.

Di dalam bukunya, jelas ditegaskan bahwa pembangunan telah menyebabkan perempuan yang telah berada dalam kondisi miskin, semakin dimiskinkan karena sejumlah kebijakan ekonomi dan politik negara maju untuk menjajah negara miskin dan berkembang dengan menjual jargon globalisasi sebagai sebuah mitos pembangunan yang tidak akan pernah memikirkan keselamatan, apalagi memikirkan kesejahteraan rakyat yang hidup di negara miskin dan berkembang.

Eco-feminis lahir juga didasari atas sebuah kondisi di mana bumi yang digambarkan sebagai ibu telah dieksploitasi, dijarah dan dirusak oleh sistem kapitalisme yang melanggengkan budaya patriarki dan feodalisme di dalam praktek-praktek penjajahan yang dilakukan. Eco-feminis lahir untuk menjawab sebuah kebutuhan penyelamatan bumi dengan berbasiskan pada kekhasan perempuan yang selama ini memiliki pengetahuan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengelola

Bagi perempuan, bumi adalah ibu yang harus diselamatkan dari ancaman kerusakan yang telah dilakukan oleh korporasi dan pengurus negara. Perempuan adalah tangan pertama yang bersentuhan dengan air, tanah dan seluruh. Karena itulah perempuan juga menjadi kelompok pertama dan yang paling rentan terhadap resiko dampak kerusakan bumi akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh industri, seperti yang dialami oleh banyak perempuan dan anak yang tercemar oleh limbah dari perusahaan-perusahaan pertambangan Internasional seperti yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya terhadap ruang hidup rakyat di tanah Buyat.

Di Indonesia, nama-nama perempuan telah berpeluh keringat dan darah untuk memperjuangkan hak mereka atas lingkungan hidup dan sumber daya alamnya, mungkin tidak banyak yang mengenal. Padahal perempuan-perempuan inilah yang berada dibarisan utama didalam menghadapi kekuatan modal (korporasi) dan penguasa, yang telah mengorbankan banyak hal di dalam hidupnya. Mama Yosepha yang begitu militan menghadapi kekuatan PT. Freeport, ibu-ibu Sugapa di Sumatera Utara yang mempertahankan hutan ecoliptusnya yang akan dirampok oleh PT. Inti Indorayon untuk kebutuhan bahan pulp dan papernya, Ibu Naomi yang tidak pernah menyerah menghadapi PT. Inco yang telah merampas tanah ulayat masyarakat adat Soroako Sulawesi Selatan, ibu-ibu di Buyat Sulawesi Utara yang harus berjuang dengan penyakitnya akibat limbah buangan PT. Newmont Minahasa Raya, meskipun harus selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Masih banyak lagi rentetan nama perempuan yang mungkin masih sedikit tercatat dalam sejarah gerakan perjuangan rakyat, namun tiada henti dan pernah takut para perempuan ini berjuang dengan sebuah landasan nilai filosofis bahwa yang diperjuangkan adalah sebuah nilai-nilai kebenaran terhadap sumber-sumber kehidupan mereka dan untuk keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Tangan-tangan perempuan yang begitu kuat dan berani inilah yang bersedia menjadi martir bagi sebuah perjuangan rakyat atas mewujudkan keadilan ekologi, yang selama ini telah tergadaikan oleh pengurus negaranya sendiri. Sejumlah pelanggaran terhadap hak asasi perempuan di sektor sumber daya alam telah terjadi, yang dilakukan justru oleh negara yang seharusnya menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut, dan korporasi serta lembaga keuangan internasional. Kekerasan baik fisik maupun psikis telah dialami oleh perempuan yang begitu gigih memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, kekerasan ekonomi juga harus mereka alami, sehingga perempuan selalu menjadi kelompok yang paling miskin karena ketiadaan akses dan kontrolnya di dalam pengelolaan sumber daya alam.

Komitmen 22 April

Hari bumi yang jatuh di setiap tanggal 22 April, bukan hanya sebatas diperingati untuk menyuarakan penyelamatan bumi. Di sinilah sesungguhnya menjadi sebuah kesempatan bagi seluruh gerakan rakyat untuk mengkonsolidasikan dirinya dari kehancuran bumi dan ketidakadilan ekologi yang terjadi. Jika kelompok eco-feminis telah sekian lama menyuarakan perjuangan perempuan untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran, maka pada tanggal 22 April 2007 sudah waktunya menjadi titik tolak bagi kelompok yang mengusung ideologi eco-feminis, untuk terus mengobarkan perlawanan terhadap agenda eco-kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara maju lewat industri dan lembaga keuangan Internasional

Kelompok yang mengusung eco-feminis harus mulai memperluas gerakannya, bukan hanya di gerakan pro demokrasi yang memperjuangkan hal yang sama untuk menghadapi kekuatan modal, melainkan juga kepada publik secara lebih luas dan massif. Strategi ini menjadi sebuah kebutuhan mendesak, karena banyak perempuan di belahan bumi lain yang tidak mengetahui bahwa pasar telah menciptakan sebuah rekayasa gaya hidup yang menciptakan sebuah gaya hidup konsumtif yang banyak diamini oleh perempuan mapan perkotaan.

Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dia menjadi korban sekaligus pelaku dari sebuah sistem pasar dan sistem eco-kolonialisme, perempuan yang hidup di perkotaan banyak yang tidak mengetahui, bahwa penggunaan tissue yang banyak digunakan, telah menyebabkan perempuan pedesaan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi harus mengalami sejumlah pelanggaran terhadap hak-haknya hidupnya oleh industri pulp and paper. Gerakan perempuan bersolidaritas terhadap perempuan menjadi penting, untuk membangun kekuatan politik bagi perempuan untuk merebut keadilan ekologi bagi semua orang, untuk menyelamatkan kehancuran bumi dari ancaman kapitalisme global.

Dalam momen peringatan hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April ini, sudah waktunya kelompok eco-feminis memperbesar gerakannya untuk mendesak kepada negara agar segera memenuhi hak asasi perempuan atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan, dengan memberikan akses dan kontrol kepada perempuan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidupnya berdasarkan kekhasan perempuan.

Sebagaimana yang telah menjadi amanat bagi pengurus Negara yang

telah meratifikasi konvensi CEDAW dan konvenan Ekosob dan Sipol untuk mempercepat langkah-langkah dan tindakan dalam kerangka melakukan pemenuhan terhadap hak asasi perempuan, terutama kepada perempuan pedesaan dan perempuan miskin perkotaan sebagai sebuah kewajiban bagi negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya. Negara juga sudah harus segera menghentikan kekerasan pada perempuan di sektor pengelolaan sumber daya alam yang sampai saat ini terus terjadi, dan mendorong agar negara berani melakukan perlawanan terhadap TNC's/MNC's dan lembaga keuangan Internasional.

Environmentalisme, Arah Gerakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Khalisah Khalid

Akar Persoalan Lingkungan Hidup di Indonesia

Masalah lingkungan hidup tak berada di ruang kosong pergulatan ideologi ekonomi dan sosial. Dan tak ada musuh paling merusak bagi lingkungan hidup planet ini kecuali paham Neoliberal (neoliberalisme). Paham Neoliberal mempromosikan bahwa sistem pasar harus diberi hak penuh untuk menentukan keputusan penting di bidang politik dan sosial. Inti paham ini adalah mendesak agar negara secara sukarela melepaskan perannya di bidang ekonomi-sosial. Paham Neoliberal adalah serangkaian kebijakan ekonomi yang membuat si kaya semakin berkuasa dan si miskin kian melarat dengan cara memberi keleluasaan sebebas-bebasnya kepada perusahaan swasta mengembangkan diri seraya melupakan hak serta perlindungan bagi rakyat kebanyakan.

Serangkaian kepentingan politik global, yang mengintervensi lewat serangkaian kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan investasi dengan melakukan pengabaian terhadap kepentingan rakyat dan lingkungan hidup. Kepentingan politik global juga mengkebiri fungsi dan tugas Negara, saat ini pemegang kekuatan Indonesia adalah Negara-negara maju, lembaga keuangan internasional dan TNC's/MNC's.

Fenomena degradasi lingkungan memiliki sebuah efek yang menyengsarakan bagi kehidupan umat manusia. Tanpa sebuah lingkungan yang layak hidup, hak-hak kemanusiaan lainnya menjadi tak dapat dicapai atau tak ada artinya, karena sesungguhnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait dengan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob).

Fakta-Fakta Kehancuran Lingkungan Hidup Indonesia

Kondisi krisis ekologis di Indonesia saat ini juga makin hari makin menampakan titik yang memiriskan hati. Dalam catatan dan tinjauan lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang dikeluarkan setiap tahun, peringatan (*warning*) akan terjadinya bencana lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan hidup selalu saja tidak mendapatkan respon struktural baik ditingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Pemerintah bertindak untuk kepentingan lingkungan hidup dan penyelamatan sumber-sumber kehidupan rakyat jika sudah terjadi bencana. Koordinasi lintas sektoral/departemen juga tumpang-tindih, sebagaimana juga layaknya pemerintah dan DPR RI saat ini, sedang giat-giatnya membuat berbagai ragam rancangan Undang-undang sektoral. Kegiatan mana sama sekali meminggirkan peran serta suara rakyat di tingkatan akar-rumput (*grass roots*) untuk berpartisipasi dalam penyusunan berbagai kebijakan yang mengatur relasi hidup dan kehidupan mereka tersebut.

Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumberdaya alam dan perubahan lingkungan. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan, daerah pinggiran hutan, kawasan pesisir, dan daerah pertambangan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan. Sedangkan masyarakat miskin di perkotaan umumnya tinggal di lingkungan permukiman yang buruk dan tidak sehat, misalnya di daerah rawan banjir dan daerah tercemar.¹ Berdasarkan data Departemen Sosial (2004), hingga saat ini, komunitas adat terpencil tercatat sebanyak 205.029 KK atau sekitar 1,1 juta orang yang tersebar di 2.328 desa, 807 kecamatan, 211 kabupaten di 27 propinsi.

Kenyataan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara hak atas lingkungan hidup dengan hak atas sumber daya alam. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih bersifat universal dan untuk semua orang tanpa membedakan baik status sosial ekonomi maupun letak geografis wilayah. Selain itu, aspek lingkungan hidup memuat unsur “kewajiban” bagi semua orang untuk turut serta menjaga dan melestarikannya. Sementara hak atas sumberdaya alam terkait dengan akses dan keadilan dalam pemanfaatan, sehingga relevan bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

Masyarakat miskin mengalami masalah dalam mengakses sumber-sumber air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha tani karena menurunnya kuantitas dan kualitas air yang dapat dimanfaatkan. Salah sebab utama akibat penurunan mutu lingkungan hidup terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan. Berdasarkan statistik kehutanan, luas hutan Indonesia telah menyusut dari 130,1 juta ha (67,7% dari luas daratan) pada tahun 1993 menjadi 123,4 juta ha (64,25 dari luas daratan) pada tahun 2001. Penyusutan ini disebabkan oleh penebangan hutan yang merusak dan

¹ Lihat Komite Penanggulangan Kemiskinan, *supra*, no.2. h.33-34

tidak terkendali (*destructive logging*), penjarahan hutan, kebakaran, dan konversi untuk kegiatan lain seperti pertambangan, pembangunan jalan, dan permukiman (Bappenas, BPS dan UNDP 2004).

Bencana banjir yang setiap tahunnya terjadi di Jakarta, lebih banyak disebabkan oleh alih fungsi pemanfaatan lahan. Dalam catatan WALHI Jakarta, ruang terbuka hijau yang ada saat ini tinggal 6%, ditambah lagi dengan kerusakan hutan mangrove akibat pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta dan pencemaran dari limbah industri. Bencana limpasan air laut menjadi sebuah potret yang nyata atas rusaknya hutan mangrove yang sesungguhnya dapat berfungsi untuk menahan laju air pasang laut.

Sebagai Ibukota negara, Jakarta menempati urutan ketiga sebagai kota yang memiliki kualitas udara yang buruk, dimana 70% pencemaran udara di Jakarta disebabkan oleh kendaraan pribadi dan juga buruknya sistem transportasi massal. Yang paling rentan merasakan dampak dari pencemaran udara adalah kelompok miskin yang setiap harinya menggunakan angkutan umum, dengan kondisi tingkat kemacetan akibat kendaraan bermotor roda dua yang jumlahnya mencapai 5.253.000 dan 1.400.000 kendaraan roda empat. Sehingga wajar kalau kemudian Jakarta menjadi penghasil emisi terbesar di Indonesia yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yakni 0,511 ton/jiwa pada tahun 2004.

Akibat pencemaran udara yang begitu tinggi, paling tidak penyakit ISPA berada di posisi paling tinggi dan ongkos kesehatan yang harus dikeluarkan akibat pencemaran udara sebesar 4,3 trilyun pada tahun 2015. (data ADB). Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan PERDA No 2/2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Sayangnya PERDA tersebut justru dilanggar oleh pemerintah sendiri, yang lebih banyak memfasilitasi perluasan jalan dengan memangkas ruang terbuka hijau untuk kepentingan kendaraan pribadi.

Semua fakta-fakta ini menjadi sebuah gambaran krisis yang dialami oleh masyarakat di Indonesia, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, nelayan dan miskin kota. Dimana negara melakukan pengabaian terhadap jaminan keselamatan rakyat, kesejahteraan dan produktifitas rakyat, serta jaminan atas keberlanjutan pelayanan alam.

Kebangkitan Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia

Gerakan lingkungan hidup menurut literatur sosiologi istilah "gerakan

lingkungan hidup" digunakan dalam tiga pengertian yaitu pertama sebagai penggambaran perkembangan tingkah laku kolektif (*collective behavior*). Kedua, sebagai jaringan konflik-konflik dan interaksi politis seputar isu-isu lingkungan hidup dan isu-isu lain yang terkait. Ketiga, sebagai perwujudan dari perubahan opini publik dan nilai-nilai yang menyangkut lingkungan.

Di Indonesia istilah gerakan lingkungan hidup di pakai dalam konsorsium : "15 tahun Gerakan Lingkungan Hidup : Menuju Pembangunan Berwawasan Lingkungan". Yang di selenggarakan oleh kantor Meneg Kependudukan Dan Lingkungan Hidup di Jakarta, 5 Juni 1972. Melihat kondisi kerusakan lingkungan hidup yang terus mengalami peningkatan dan semakin tergusurnyanya rakyat dari ruang-ruang pengelolaan sumber daya alamnya, membuat keresahan baru sekelompok orang yang memiliki kepedulian untuk membangun sebuah gerakan lingkungan hidup yang memiliki cita-cita menyelamatkan lingkungan hidup dan rakyat terutama bagi kelompok-kelompok rentan.

Sayangnya, gerakan lingkungan hidup kemudian masih jalan di tempat. Berbagai krisis dan bencana ekologis, terus saja mewarnai Indonesia. Fenomena perubahan iklim (*climate change*), menjadi sebuah tantangan baru bagi semua orang yang berpotensi besar terkena dampak perubahan iklim, untuk mulai mau peduli dan kritis terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang sering kali mengabaikan daya dukung alam.

Kedepannya dibutuhkan berbagai upaya untuk membangun gerakan lingkungan hidup yang lebih besar, sehingga gerakan lingkungan hidup di Indonesia dapat menjawab kebutuhan pokok perbaikan kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai organisasi lingkungan hidup di Indonesia, WALHI menyadari bahwa krisis lingkungan hidup ini tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang, gerakan lingkungan harus menjadi sebuah gerakan sosial yang didukung oleh masyarakat yang lebih besar. Gerakan environmentalisme adalah sebuah gagasan baru yang ditawarkan oleh WALHI kepada publik, khususnya kelompok kaum muda, untuk menyelamatkan lingkungan hidup di Indonesia.

WALHI sangat percaya, bahwa kaum muda memiliki nilai lebih untuk membangun kekuatannya mewujudkan environmentalisme di Indonesia menuju keadilan lingkungan. Menularkan semangat dan nilai-nilai environmentalisme di komunitas masing-masing, dan menjadikan environmentalisme sebagai sebuah gaya hidup baru yang mampu menjawab tantangan krisis lingkungan hidup yang terjadi.



CELOTEH TIMPAKUL

Kumpulan Tulisan ADE FADLI di <http://timpakul.hijabiru.org>

Masa Depan Indonesia Tak Tergantung Hari Ini

04. 9. 2009 - 76 dilihat

Banyak yang berpandangan bahwa hari inilah, saat para pemilih mencontreng (atau mencoblos) pilihan legislatifnya, merupakan proses penentuan dari masa depan Indonesia. Senyatanya, tak terlalu signifikan apa yang telah dicontreng hari ini, dengan apa yang akan terjadi kemudian. Tidak ada sebuah ikatan emosional yang kuat antara para pencontreng dan yang dicontreng.

Beberapa kawan memutuskan memilih untuk tidak memilih. Pertanyaan berikutnya adalah apa hak warga negara untuk terlibat dalam proses berkehidupan bernegara? Karena tidak menggunakan hak pilih, lalu gugur dengan begitu saja hak politiknya. Sebenarnya tidak. Hak politik bagi setiap warga negara masih ada. Bahkan ketika tidak memiliki sebuah nomor induk kependudukan sekalipun.

Konstitusi neger ini secara jelas menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak dan memiliki hak-hak sebagai warga negara. Memilih dalam Pemilihan Umum adalah sebuah hak, yang bila tidak digunakan, tidak akan menggugurkan hak lainnya.

Cara pikir pendek para politikus untuk mempengaruhi pemilih adalah dengan melakukan pengabaian hak politik warga negara. Dimana selalu menghantu-hantui dengan bahwa ketidak tidak menggunakan hak pilih, maka gugurlah hak sebagai warga negara. Pendidikan politik tidak pernah dilakukan secara benar, sehingga proses mobilisasi yang selalu terjadi.

Warga negara, apalagi para pembayar pajak, memiliki hak yang cukup kuat untuk menentukan masa depan Indonesia. Tidak hanya melalui penggunaan hak pilih, namun dengan menggunakan hak-hak lain, semisal keterlibatan dalam pengambilan keputusan atas pilihan investasi yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan, hingga keterlibatan dalam proses-proses mendorong adanya akuntabilitas pemerintahan.

Jangan berhenti pada hari ini, bila ingin bertindak terhadap perubahan masa depan Indonesia. Keberanian untuk mengkritisi kebijakan dan arah gerak Indonesia, yang didiskusikan diparlemen dan disiapkan oleh pemerintah, merupakan hal yang WAJIB untuk dilakukan. Mulai dari konsistensi terhadap konstitusi, hingga pada bersama-sama mencegah adanya kebijakan yang menghilangkan hak dasar warga negara.

Pemilu hari ini, bukanlah sebuah pesta. Ini hanyalah sebuah jalan untuk menentukan anggota parlemen. Yang kondisinya hari ini, bila kemudian ditemukan anggota parlemen bertindak menyimpang dari mandat yang diberikan rakyat, belum ada mekanisme pemberhentian mereka langsung oleh rakyat. Partai politik, yang sebagian besar tidak memiliki platform, menjadi sangat kuasa dalam menentukan gerak anggota parlemen.

Kekuatan kolektif rakyat, akan jauh lebih berharga dalam penentuan arah gerak Indonesia masa depan. Bangun proses-proses pendidikan kritis pada beragam tingkatan. Sebarkan pengetahuan tentang hak warga negara, termasuk hak politik dan hak atas lingkungan hidup. Membangun kesatuan, menguatkan solidaritas ekologi, dan terus melakukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat. Masa depan Indonesia tak tergantung hari ini, tapi akan sangat tergantung pada sikap rakyat di esok hari!

Tak Penting Hijau Bagi Partai

04. 4. 2009 - 133 dilihat

Hijau, selalu identik dengan partai keagamaan dalam pertarungan politik. Namun kali ini, hijau akan lebih dimaknai sebagai keberpihakan terhadap ekologi (lingkungan hidup). Kejadian (tragedi) Situ Gantung ataupun banjir bandang di Sumatera Barat, merupakan sebuah potret dari ketidakpedulian pelayan publik dan para pelaku politik terhadap keselamatan warga dari bencana ekologis.

Para petarung politik hari ini, baik partai politik maupun kandidat presiden, masih sangat minim menempatkan agenda perlindungan ekologi dan memastikan keselamatan rakyat. Situasi ini menjadi dimaklumkan, karena ternyata hanya sedikit partai dari seluruh petarung yang memiliki platform partai. Padahal platform partai merupakan landasan perjuangan partai politik yang harusnya di'perjualbeli'kan kepada calon pemilihnya. Bahkan partai-partai yang sudah sangat lama berdiri sekalipun, belum memiliki ataupun belum pernah mempublikasikan platform perjuangan partainya.

Bila melihat perjalanan lima tahun kemarin, maka sebagian besar anggota legislatif di berbagai tingkatan parlemen, tidak memperjuangkan kepentingan ekologi dan keselamatan warga. Kebijakan yang dilahirkan diantaranya adalah: UU No. 19/2004 yang memperbolehkan 13 perusahaan tambang melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung; UU No. 18/2004 yang menjadikan perusahaan perkebunan dapat terus beroperasi walaupun kemudian menghilangkan hak atas lingkungan hidup dan hak berkehidupan komunitas lokal; UU No. 7/2004 yang memungkinkan diberlakukannya privatisasi air, yang kemudian berdampak pada menurunnya pasokan air bagi persawahan akibat beroperasinya perusahaan air minum dalam kemasan; UU No. 27/2007 yang membagi-bagi kawasan laut sehingga meniadakan hak hidup nelayan tradisional, UU No. 25/2007 yang mendorong semakin banyaknya investasi asing yang diberikan hak khusus, serta semakin menjauhkan negeri ini dalam mewujudkan Pasal 33 UUD 45; UU No 26/2007 yang mengecilkan hak publik dalam penataan ruang, serta; UU No. 4/2009 yang menjadikan kawasan daratan dikoyak oleh perusahaan tambang.

Refleksi kelahiran peraturan perundang-undangan tersebut menjadikan sebuah potret nyata atas minimnya perhatian para petarung politik terhadap isu keadilan ekologis dan keselamatan rakyat. Belum lagi ditambah dengan kebijakan pemerintahan (yang merupakan koalisi dari

beberapa partai), dimana tetap melakukan kenaikan harga BBM, dan melakukan penjualan aset strategis. Juga memberikan perijinan terhadap industri ekstraktif (perkebunan besar, pertambangan, kebun kayu monokultur) dan diperbolehkannya industri pulp-kertas tetap menggunakan kayu alam, yang menjadikan ancaman bencana ekologis semakin meningkat.

Bila menyaksikan hamparan hutan alam Indonesia yang hanya menyisakan tidak lebih dari 30% kawasannya, maka tidak salah kejadian bencana ekologis akan semakin meningkat. Ditambah dengan kebijakan penataan ruang yang dikuasai oleh kelompok berekonomi kuat, sehingga kawasan perlindungan (semisal situ, rawa, mangrove), telah beralih fungsi menjadi perkantoran, pusat industri ataupun perumahan mewah, semakin menggusur harapan untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik di negeri ini.

Walau kemudian ada beberapa calon legislatif yang mengkampanyekan akan melakukan upaya perbaikan lingkungan hidup, ini bak air di gurun pasir. Kebijakan partai yang masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan keberpihakan pada investasi asing, dibandingkan dengan mengutamakan pemerataan ekonomi dan keberpihakan pada ekonomi rakyat, akan meniadakan kesempatan dari seorang anggota legislatif untuk memperjuangkan mimpinya sendiri.

2009 yang dihiasi oleh begitu banyak baliho, spanduk ataupun bentuk alat kampanye lainnya, telah pula menghasilkan berton-ton sampah yang tak terurai, termasuk dengan semakin banyaknya pohon-pohon yang dirusak, dipaku dan tersakiti.

Pilihan untuk terus bermimpi akan lahirnya kebijakan yang menjamin kepastian pangan, berkurangnya bencana, ataupun terfasilitasinya kepentingan warga dalam parlemen dan pemerintah di masa datang, masih belum akan beranjak dari sebuah mimpi. Dan bisa saja mimpi ini akan terwujud, bila kecerdasan politik rakyat telah terbangun dan semakin menguat. Menyatukan diri dalam kelompok yang berafiliasi dengan partai politik yang memang terbangun dari akar rumput.

Lima tahun, sebuah waktu yang tak lama. Walau kemudian ada begitu banyak perubahan di tiga tahun mendatang. Namun kesiapan dari para pemilih dan rakyat untuk menyatukan kekuatan dan pikiran, untuk berpikir dan bertindak bagi sesama dan semua di negeri ini, harus dilakukan. Bila tidak, 2014 akan kembali ditemukan situasi serupa di tahun ini, dimana tak penting hijau bagi partai.

Bukan Salah Harimau, Pemerintah dan Negara Industri Yang Menyebabkan Hancurnya Habitat

03. 4. 2009 - 381 dilihat

Kejadian berulang serangan satwa liar terhadap manusia memang bukan dikarenakan kesalahan harimau, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan. Namun ini juga bukan kesalahan dari komunitas lokal yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Situasi tersebut lebih disebabkan karena Pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan, selalu melakukan pembiaran terhadap proses kehancuran hutan, yang merupakan habitat dan tempat hidup satwa liar, dengan memberikan perijinan pengalihfungsian kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan maupun pertambangan.

Tercatat setidaknya 11,4 juta hektar kawasan hutan Indonesia terancam diamputasi oleh industri pertambangan. Dan tidak kurang dari 5,6 juta hektar lahan gambut serta 9 juta hektar kawasan hutan terancam industri perkebunan besar kelapa sawit. Serta 18 juta hektar kawasan hutan juga akan dikonversi menjadi perkebunan kayu akasia dan leda (*eucalyptus*) untuk memenuhi industri pulp dan kertas.

Semakin berkurangnya kawasan hutan tropis yang baik di Indonesia akibat pengalihfungsian (konversi) kawasan, telah mendorong kawasan satwa liar berpindah pada kawasan-kawasan permukiman dan ruang-ruang kehidupan rakyat. Koridor (jalur migrasi) satwa yang terpotong oleh industri ekstraktif juga telah mengalihkan pola migrasi dan menjadikan satwa liar kehilangan sumber pakannya di alam.

Hutan-hutan di Indonesia selama ini menjadi sandaran bagi perkembangan ekonomi internasional, dimana Indonesia merupakan negara strategis bagi negara-negara Asia Timur, Eropa dan Amerika Serikat, untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara tersebut. Tidak berkurangnya permintaan pasar internasional terhadap barang tambang, diantaranya batubara dan emas, minyak sawit serta pulp dan kertas, telah menjadikan kawasan-kawasan hutan Indonesia semakin terancam keberadaannya. Kondisi ini bahkan diperparah dengan semakin kacaunya cara pikir negara industri terhadap upaya menurunkan emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global. Sementara, Indonesia tetap difungsikan sebagai penyedia bahan baku dan pasar bagi produk tidak ramah lingkungan dari industri dunia.

Pemerintah Indonesia sudah harus segera menghentikan proses-proses pengalihfungsian ekosistem hutan untuk kepentingan-kepentingan

korporasi, agar tidak semakin sering terjadi konflik antara manusia dengan satwa liar, termasuk untuk menghindari terjadinya peningkatan kejadian bencana ekologis di Indonesia. Sudah terlalu banyak anggaran negara yang dialokasikan untuk penanggulangan dampak bencana ekologis, yang sebenarnya tidak harus dikeluarkan oleh negara bila kondisi ekosistem hutan Indonesia tetap terjaga.

Penting untuk mendesak agar Pemerintah Indonesia, beserta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia untuk segera memberlakukan jeda tebang (moratorium logging) dan memberlakukan kebijakan penghentian pengalihfungsian ekosistem hutan (stop konversi hutan). Dalam masa diberlakukannya jeda tebang, Pemerintah dapat memaksimalkan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan, untuk memperbaiki kawasan hutan yang telah rusak, termasuk untuk melakukan penyelesaian deliniasi kawasan hutan, disertai dengan pengakuan terhadap sistem kelola hutan kerakyatan. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga harus melakukan restrukturisasi industri berbahan kayu melalui penurunan kapasitas industri, serta melakukan rasionalisasi industri minyak sawit di seluruh wilayah Indonesia.

Ancaman terhadap kehidupan rakyat Indonesia kian bertambah seiring dengan semakin masifnya investasi yang diberikan kemudahan oleh pemerintah. Semakin banyak rakyat yang tak lagi memiliki lahan pertanian dan kebun yang dapat digarap, karena sebagian besar lahan diberikan kepada korporasi. Pilihan untuk mengembalikan arah dan paradigma pembangunan pada platform pendirian negeri ini adalah sebuah keharusan. Mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia yang beringan dengan terbangunnya demokrasi politik yang berkeadilan akan mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat di Indonesia.

Nasionalisme Tergelincir Minyak Sawit

03. 3. 2009 - 602 dilihat

Isu perubahan iklim telah membawa permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Sejak Eropa mendeklarasikan penurunan penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan biofuel hingga 10%, tak dapat dihindari lagi terjadinya pembukaan perkebunan besar kelapa sawit di Asia Tenggara, serta pembukaan perkebunan tebu dan bahan pembuat bio-energy lainnya di Amerika Selatan dan Afrika. Sebuah perusahaan Finlandia, Neste, bahkan merencanakan membangun kilang biofuel yang cukup besar di Singapura dalam waktu dekat.

Investasi biofuel telah mulai berdatangan ke Indonesia. Perusahaan energi asal Swedia, Sweden Bio Energy akan menginvestasikan dana sekitar Rp 1,3 triliun untuk pengembangan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel di Indonesia. Investasi Biofuel juga dilakukan oleh China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) sekitar US\$ 5,5 miliar, Genting Biofuel bersama Sinopec senilai US\$ 3 miliar dan Indomal senilai US\$ 1 miliar.[1]

Dari Perbankan Indonesia, pada 2007 hingga 2010, Bank Mandiri akan mengalokasikan kredit Rp 11 triliun untuk pembiayaan kebun kelapa sawit seluas 321.268 hektar, yang tersebar di Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi. Pendanaan perbankan lainnya untuk Kredit Pengembangan Energi Nabati (KPEN) mencapai Rp 25,48 triliun yang antara lain berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp 12 triliun, Bank Mandiri (Rp 11 triliun), Bank Bukopin (Rp 1 triliun), Bank Pembangunan Daerah Sumbar (Rp 0,98 triliun, dan Bank Pembangunan Daerah Sumut (Rp 0,50 triliun).[2]

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi utama yang digunakan sebagai bahan baku penghasil biofuel. Selama ini, perkebunan besar kelapa sawit menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Sistem perkebunan besar yang kerap mengabaikan sosial-budaya komunitas lokal/adat, juga kerap menimbulkan permasalahan ekologi, dikarenakan dilakukan pada kawasan-kawasan ekologi genting. Tidak kurang dari 7.125.331 juta hektar lahan telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, yang terdiri dari 3,3 juta hektar perkebunan rakyat, 760.010 hektar perkebunan negara, dan 3,064 juta hektar perkebunan besar swasta.[3]

Luasan tersebut akan semakin berkembang, seiring dengan adanya

permintaan biofuel yang meningkat di dunia, serta semakin diberikannya keleluasaan investasi oleh pemerintah. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26/Permentan/OT.140/2/2007 yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2007 mengizinkan swasta mengembangkan perkebunan kelapa sawit hingga 100 ribu hektar dalam satu kawasan di satu kabupaten ataupun provinsi, yang disertai kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal yang diusahakan perusahaan. Ditambah dengan lahirnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit pada tanggal 16 Februari 2009, akan menambah terjadinya penghilangan lahan-lahan berkehidupan rakyat.

Kelapa Sawit: Spesies Hutan Brazil Yang Mendunia

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan/industri berupa pohon batang lurus dari famili Palmae. Tanaman tropis ini dikenal sebagai penghasil minyak sayur yang berasal dari Amerika. Brazil dipercaya sebagai tempat dimana pertama kali kelapa sawit tumbuh. Dari tempat asalnya, tanaman ini menyebar ke Afrika, Amerika Equatorial, Asia Tenggara dan Pasifik selatan. Benih kelapa sawit pertama yang ditanam di Indonesia pada tahun 1984 berasal dari Mauritius Afrika. Perkebunan kelapa sawit pertama dibangun di Tanahitam, Hulu Sumatera Utara oleh Schadt seorang Jerman pada tahun 1911.

Pulau Sumatera terutama Sumatera Utara, Lampung dan Aceh merupakan pusat penanaman kelapa sawit yang pertama kali terbentuk di Indonesia, namun demikian sentra penanaman ini berkembang ke Jawa Barat (Garut selatan, Banten Selatan), Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Papua.

Perluasan perkebunan besar kelapa sawit sangat dipicu oleh meningkatnya kebutuhan minyak sawit, termasuk untuk kepentingan biofuel bagi kebutuhan masyarakat eropa. Sejak naiknya harga crude palm-oil (CPO) di pasaran dunia, akibat kebijakan Uni Eropa untuk menggantikan 20% kebutuhan bahan bakarnya dengan biodiesel, maka semakin cepat juga terjadi pembukaan kawasan hutan dan lahan-lahan produktif rakyat menjadi perkebunan kelapa sawit.

Awal tahun 1968, areal kelapa sawit yang semula hanya terbatas di tiga wilayah (Sumatera Utara, Aceh dan Lampung) saat ini sudah berkembang di 22 daerah Provinsi. Luas areal tahun 1968 seluas 105.808 ha dengan produksi 167.669 ton, pada tahun 2007 telah meningkat menjadi 6,6 juta ha dengan produksi sekitar 17,3 juta ton

CPO, dimana 50,79% dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta, 38,8% merupakan Perkebunan Rakyat dan 10,39% merupakan Perkebunan Besar Negara.[4]

Perkebunan Monokultur Skala Luas Memusnahkan Tanah Harapan

Kelapa sawit di Indonesia dikembangkan dalam sistem perkebunan monokultur skala luas. Sekurangnya dibutuhkan lahan seluas 6.000 hektar dalam satu hamparan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolah minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). Sehingga dibutuhkan sekurangnya lahan perkebunan seluas 8.000 hingga 10.000 hektar untuk membangun sebuah usaha perkebunan yang integrated dengan industri CPO. Akibatnya semakin banyak lahan-lahan hutan serta lahan produktif rakyat yang diambil secara paksa oleh perusahaan yang berkolaborasi dengan pemerintah (lokal maupun pusat). Pada beberapa kawasan, wilayah rawa (swamp forest), termasuk rawa gambut (peatland), kerangas (heat forest) dan hutan hujan dataran rendah (lowland rainforest), menjadi wilayah yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Konflik sosial cenderung kerap terjadi pada perkebunan besar kelapa sawit. Sawit Watch mencatat sekurangnya terjadi 513 konflik antara masyarakat dengan perusahaan di tahun 2008. Beberapa perkebunan besar kelapa sawit bahkan menggunakan lahan hutan lindung ataupun kawasan konservasi (taman nasional) untuk menanam kelapa sawit.

Berbagai permasalahan lingkungan hidup juga harus dihadapi oleh masyarakat, disaat pembukaan lahan perkebunan yang berskala luas ini, kemudian menghadirkan banjir, erosi dan kekeringan di kawasan sekitar perkebunan. Sungai-sungai menjadi coklat dan tidak lagi dapat berfungsi sebagai biasanya. Sumur-sumur dan sumber air tanah lainnya semakin sukar ditemui di musim kemarau, dan terkadang juga terjadi di musim penghujan.

Ketika pabrik pengolahan minyak sawit mulai terbangun, limbah-limbah dari pabrik CPO, yang kabarnya dapat diolah kembali menjadi sumber hara bagi tanaman kelapa sawit, justru menghasilkan limbah hitam dan berbau di aliran sungai yang selama ini dimanfaatkan oleh komunitas lokal untuk kebutuhan sehari-hari.

Pelibatan kelompok rakyat dalam perkebunan kelapa sawit melalui sistem plasma, juga belum memberikan sebuah keuntungan yang sebenarnya. Diletakkannya sertifikat tanah petani di perbankan sebagai jaminan kredit investasi kebun sawit, sering kali tidak mampu diperoleh kembali walaupun sudah melalui satu periode tanam (18-25 tahun).

Sistem perjanjian lain yang sering diberikan oleh perusahaan adalah dengan menukarkan lahan seluas 10 hektar dengan kebun sawit seluas 2 hektar, dan tetap dengan menjaminkan sertifikat lahan milik petani untuk biaya pembangunan kebun sawit untuk petani.

Mengantungkan Harapan di Pelepah Yang Rapuh

Secara jenis, Kelapa sawit melahirkan permasalahan sendiri. Kelapa sawit membutuhkan bibit yang terbaik, yang hanya diperoleh dari industri penghasil bibit kelapa sawit. Hingga saat ini, baru lima perusahaan yang dinyatakan sebagai penghasil bibit kelapa sawit bersertifikat di Indonesia. Bila menanam bibit sawit yang dihasilkan dari kelapa sawit yang telah ditanam, maka kualitas minyak sawit yang dihasilkan menjadi sangat rendah, sehingga sering kali ditolak oleh pabrik pengolah minyak sawit.

Kendali harga dalam menjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berada di tangan pabrik pengolah minyak sawit. Buah kelapa sawit yang cepat membusuk dan hanya berkualitas baik pada 24 jam pertama hingga 72 jam, dan setelah itu tidak dapat menghasilkan kualitas minyak CPO yang baik. Sehingga pada wilayah-wilayah yang kapasitas pabriknya tidak mampu menampung produksi buah kelapa sawit, seperti di Kalimantan dan Sumatera, maka harga yang ditawarkan oleh pabrik kepada petani sangat tidak berada pada posisi yang menguntungkan bagi petani sawit. Harga yang sempat melonjak hingga Rp 1.200,- setiap kilogram sempat membahagiakan petani kelapa sawit. Namun kondisi tersebut hanya berlangsung tak lama, yang kemudian harga setiap kilogramnya di tingkat petani kelapa sawit berkisar antara Rp 80,- hingga Rp 300,-. Sehingga hanya petani kelas menengah[5] dan berlahan luas saja yang mampu bertahan.

Cara memanen tandan buah segar kelapa sawit hanya dapat dilakukan oleh orang yang masih bertenaga kuat, atau orang-orang muda. Pada usia 10 tahun ke atas, diperlukan galah tambahan untuk memanen buah kelapa sawit. Jenis ini yang kemudian membedakan dengan pohon karet, dimana setiap orang, termasuk anak-anak dan orang tua, dapat memanen getah karet. Kondisi tersebut menjadikan setiap petani sawit yang sudah lanjut usia, harus mempekerjakan buruh dodos dan buruh angkut, yang akan menambah biaya produksi kelapa sawit[6].

Penggunaan pestisida[7] dan pupuk[8] sangat dianjurkan dan cenderung wajib bagi petani sawit. Inputan kimia yang tinggi ini melahirkan ketergantungan tersendiri bagi petani kelapa sawit, belum termasuk dampak kesehatan akibat penggunaan pestisida tanpa pengamanan. Pestisida dan pupuk kimia dipastikan mengalir kepada aliran air menuju

sungai-sungai dan air tanah, yang selama ini merupakan sumber air bagi kebutuhan keseharian. Ini belum termasuk untuk mengatasi hama babi hutan, landak, ataupun hewan yang memakan bonggol sawit lainnya. Biaya produksi sudah dipastikan meningkat dengan kondisi yang ada ini. Belum lagi, dampak kesehatan yang akan dialami oleh petani sawit, karena penggunaan pestisida yang tidak memperhatikan cara penggunaannya.

Kelapa sawit juga memiliki keunikan tersendiri, dimana setiap harinya kelapa sawit membutuhkan sekurangnya 20-30 liter air setiap harinya. Secara perlahan kemudian, kelapa sawit akan mengeringkan air tanah. Walau kemudian terlihat pada kebun-kebun kelapa sawit masih dapat ditumbuhi oleh tumbuhan penutup tanah (cover crop), namun sejatinya air tanah sudah sangat jauh berkurang. Pada usia 3 tahun, di daerah sekeliling kelapa sawit sudah sukar ditumbuhi oleh jenis-jenis pepohonan ataupun tanaman pertanian. Sistem tumpang sari yang selama ini dianjurkan dalam menanam kelapa sawit, belum pernah secara benar terjadi.

Dalam proses penanaman kembali (re-planting) kelapa sawit, terdapat kesulitan, dimana akar dan bonggol kelapa sawit harus dicabut untuk kemudian dapat menanam kembali. Atau kemudian melakukan penanaman pada wilayah yang belum ada akar kelapa sawitnya. Akar dan batang kelapa sawit sangat sukar untuk membusuk[9], kecuali kemudian diberikan perlakuan dengan menambahkan zat kimia tertentu (yang cenderung berbahaya bagi tanah dan kehidupan) pada batang dan akar kelapa sawit agar cepat membusuk. Biaya yang dibutuhkan untuk re-planting berkisar antara Rp 25-30 juta setiap hektarnya. Hingga saat ini hanya pada wilayah Nanggore Aceh Darussalam dan Sumatera Utara bagian timur yang telah melakukan re-planting hingga kedua (periode tanam ketiga). Sementara pada sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan Timur bagian selatan, sedang memasuki tahap re-planting pertama (periode tanam kedua).

Kelapa Sawit, Mau?

Kelebihan komoditi kelapa sawit ini hanyalah ketika Pemerintah dengan sangat mudah memberikan beragam fasilitas, terutama bagi pengusaha, dalam pengembangan komoditi ini. Mulai dari kebijakan, finansial, hingga pengamanan kawasan kebun[10]. Langgengnya bisnis perkebunan kelapa sawit hari ini lebih banyak dikarenakan masih tingginya kebutuhan negara utara terhadap crude palm-oil dan produk turunan dari minyak sawit. Kondisi yang sama pernah dihadapi oleh komoditi cengkeh yang saat ini telah mengalami kehancurannya.

Pilihan terhadap pengembangan komoditi tunggal dalam usaha pertanian dan perkebunan hanya akan membawa ketergantungan dan mendorong pada penghancuran sistem ekonomi kerakyatan. Konstitusi negara Indonesia (Pasal 33 UUD 1945) telah mengamanatkan demokrasi ekonomi[11] sebagai pilar ekonomi Indonesia, termasuk didalamnya terhadap sistem kelola kekayaan alamnya. Perluasan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki korporasi akan semakin menghilangkan akses dan kontrol sebagian besar rakyat Indonesia terhadap tanah dan sumber-sumber kehidupannya. Kondisi ini akan menjadikan cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat sejahtera akan semakin sulit terwujudkan.

Footnote:

[1] Swedia Investasi Biofuel Senilai Rp1,3 Triliun, KapanLagi.com, 23 Juli 2007, <http://www.kapanlagi.com/h/0000182813.html>, diakses tanggal 12 Februari 2009

[2] Tempo interaktif, 19 Maret 2007, Mandiri Salurkan Kredit ke Perkebunan Sawit, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/03/19/brk,20070319-95794.id.html>, diakses 7 Oktober 2008

[3] Swasta Diizinkan Miliki Kebun Sawit Hingga 100 Ribu Ha, KapanLagi.com, 7 Maret 2007, <http://www.kapanlagi.com/h/0000161235.html>, diakses tanggal 28 Februari 2009

[4] Dirjen Perkebunan, Pendataan Kelapa Sawit Tahun 2008 Secara Komprehensif dan Objektif, 6 Mei 2008, http://ditjenbun.deptan.go.id/sekretbun/sekret/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=26. Diakses tanggal 7 Oktober 2008

[5] Petani kelas menengah merupakan petani yang memiliki lahan lebih dari 8 hektar dan telah mempekerjakan lebih dari 2 tenaga kerja pada lahan kebun kelapa sawitnya.

[6] Rata-rata produksi kelapa sawit sekitar 1,25 ton per hektar per bulan.

[7] Terdapat sekitar 25 jenis pestisida yang berbeda yang digunakan di perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut tentang penggunaan pestisida untuk kelapa sawit dapat dilihat di: <http://dte.gn.apc.org/66ipes.htm>

[8] Kelapa sawit merupakan tanaman yang rakus akan hara, setidaknya dibutuhkan pupuk sekitar 800-1.000 kg per hektar setahun

[9] Dalam beberapa catatan disebutkan bahwa akar kelapa sawit baru dapat membusuk secara alami dalam kurun waktu 140 tahun

[10] Pasal 21 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, secara jelas menyebutkan "setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan."

[11] Dalam kutipan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Ungkapan konseptual yang ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 itu adalah mengenai 'demokrasi ekonomi'. Penjelasan Pasal 33 tersebut dikemukakan "Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi". Dikutip dari makalah Revrisond Baswir berjudul "Ekonomi Kerakyatan, Amanat Konstitusi Untuk Menyelenggarakan Demokrasi Ekonomi di Indonesia" yang disampaikan pada Konferensi Membangun Tata Ekonomi-Politik Baru Pasca Krisis Kapitalisme Global, Jakarta, 16-17 Februari 2009

membubarkan institusi sektor kehutanan

02. 20. 2009 - 565 dilihat

Pembubaran Departemen Kehutanan bukanlah sekedar dikarenakan ini adalah masalah manajemen ataupun sekedar masalah orang. Dan bagaimana keterkaitan dengan Fakultas Kehutanan, mari melihat ulang bagaimana wacana yang berkembang dalam diskusi Mukhtamar PERSAKI tahun lalu. Stereotype yang ada adalah bahwa Hutan hancur karena Sarjana Kehutanan terlalu banyak. Padahal Departemen Kehutanan lah yang secara legal melakukan pengelolaan 143 juta hektar daratan Indonesia.

Bila melihat pada UU No 41/1999 jo UU No 19/2004, maka terlihat jelas bahwa konteks pembangunan kehutanan adalah pada pengelolaan hutan, dimana di dalamnya termasuk perencanaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengawasan. Dalam porsi kebijakan yang dihasilkan, sebagian besar kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan hanya berpijak pada wilayah pemanfaatan, khususnya lagi pada pemanfaatan kayu. Porsi bagi perlindungan hutan kemudian dilepaskan dari kewenangan Dephut dengan memindahkan tanggungjawab kepada masyarakat, yang kemudian selama ini diambil oleh Lembaga konservasi ataupun lembaga "conserfashion".

Dalam perjalanannya juga, Departemen Kehutanan selalu bertarung dengan kepentingan Departemen lainnya, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, terkait dengan kawasan administrasi desa, Departemen ESDM, terkait dengan pertambangan, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, terkait dengan pembangunan jalan dan transmigrasi, juga Departemen Pertanian, terkait dengan perkebunan skala besar.

Memang tak mudah menerima sebuah gagasan yang mengganggu kestabilan sebuah materi. Akan banyak pro-kontra didalamnya. Saya mengajak untuk melihat pada konstitusi yang hingga saat ini masih diakui di negeri ini. UUD 45 telah mengamanatkan sebuah bangunan model ekonomi-politik dalam pengelolaan negeri ini. Bagaimana kemudian agar posisi pemerintah sebagai pelayan rakyat, posisi rakyat secara kolektif sebagai pemilik sah atas agraria dalam kewilayahan NKRI. Hutan, tanah dan air merupakan sebuah ruang yang sejak lama membangun sistem budaya bangsa ini.

Sepanjang fase gerak modal (asing) yang masuk di Indonesia, telah menjadikan kawasan berkehidupan dan berbudaya ini menjadi

terkapling-kapling dalam satuan yang kemudian dengan murahnyanya diserahkan pada 'penjajah'. Padahal sudah jelas, para penggagas kemerdekaan bangsa ini mengamankan terjadinya sebuah kemerdekaan atas ruang kehidupan secara utuh, tidak hanya secara politik, tapi juga secara ekonomi. Tidak akan pernah sebuah mimpi kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dituliskan dalam Pembukaan UUD 45 dapat terwujud, bilamana kemudian hanya mengakui demokrasi politik, tanpa mengakui demokrasi ekonomi.

Prasyarat demokrasi ekonomi utamanya adalah hak akses dan kontrol rakyat terhadap kekayaan alam yang ada di ruang kehidupan kolektifnya. Sistem ekonomi dibangun atas sebuah kekuatan ekonomi kolektif, dimana bangunan ekonomi utamanya adalah pemerataan, bukan pertumbuhan.

Mungkin sudah terlalu lama sistem kelola hutan Indonesia berada dalam sistem kolonialisme ekonomi, dimana hak akses dan kontrol oleh rakyat telah ditiadakan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah ini yang diinginkan oleh kolektif bangsa ini? termasuk dengan tetap menjadikan kayu, sebagai komoditas satu-satunya yang utama dari kawasan hutan? walau kemudian, pasti akan ada yang menyatakan bahwa hasil hutan non kayu juga sudah terlayani oleh Dephut, namun fakta menunjukkan bahwa Dephut hanya menjadi sebuah dinding tebal yang menghalangi sistem kelola rakyat dalam memanfaatkan hasil hutan non kayu.

Mulailah dengan melihat ulang sistem sosial dari pohon yang menjadi salah satu komponen penyusun hutan. Interaksi antara akar, batang, ranting dan dedaunan, yang keseluruhnya merupakan satu sistem sosial. Dan kemudian bagaimana pohon berinteraksi dengan tetumbuhan dan satwa serta komponen biologi-nonbiologi lainnya. termasuk terhadap bagaimana sistem kehidupan sosial manusia di dalamnya. Interaksi sosial tersebut sudah sangat jauh dari cara pandang pegiat kayu, yang kemudian hanya melihat hutan sebagai sebuah komoditas tunggal kayu, yang dilahirkan untuk memenuhi hasrat biologis segelintir makhluk bernama manusia.

Sistem pendidikan, khususnya pendidikan kehutanan, telah pula terselaputi cara pandang ekonomi uang, yang melepaskan sistem sosial dari ilmu yang sedang dipelajarinya. Apalagi untuk melihat sejarah pengembangan ilmu kehutanan itu sendiri. Yang kemudian menunjukkan bahwa cara pandang sektoral telah mematikan sistem kehidupan diri kita sendiri. Inilah yang kemudian mendasari mengapa penting sebuah ruang yang lebih komprehensif untuk menaungi sebuah sistem ekonomi yang berjalan di dalamnya.

<http://alien.adefadli.hijaubiru.org>

Berikutnya, menjadi penting untuk merombak tata kelembagaan pemerintah, dengan menempatkan kehutanan dan sektor berbasis kekayaan alam lainnya, dibawah sebuah institusi yang mampu melihat lebih lengkap terhadap sistem penyangga kehidupan manusia. Tanah, air, hutan, kehidupan.

Menantikan Getaran Dahsyat Perubahan Peradaban

02. 10. 2009 - 437 dilihat

“Kalau sekadar bertujuan menyampaikan informasi dan pengetahuan, tak satupun universitas punya justifikasi apa pun untuk tetap berdiri sejak berkembangnya mesin cetak di abad kelimabelas” kata matematikawan-filsuf Alfred N. Whitehead, yang dikutip dalam pengantar penerbit untuk buku Fritjof Capra, *The Hidden Connection*. Kalimat ini sangat membawa saya berpikir pada ruang pertarungan, ketika kemudian melihat realita sosial yang ada di Indonesia hari ini. Begitu banyaknya tumbuh lembaga-lembaga kursus komersial hingga tumbuhnya “home schooling” sebagai jawaban atas kehausan pengetahuan. Belum lagi, telah begitu banyaknya blog dan website yang mempertukarkan pengetahuan. Hingga akhirnya terhenti pada sebuah fenomena minimnya mahasiswa yang ingin belajar pada perguruan tinggi negeri, termasuk pada ilmu-ilmu non-marketable (kelompok ilmu yang dipandang tidak memiliki prospek pasar tenaga kerja).

Pagi ini, kawan saya juga berujar “sebuah transformasi sosial hanya bisa terjadi akibat adanya guncangan hebat (shock) terhadap sistem yang sedang berjalan, termasuk diakibatkan oleh kekerasan (massal) maupun akibat bencana”. Kawan saya ini juga menyampaikan bahwa sebagian besar perubahan ideologi peradaban pada sebuah kelompok komunitas (negara), selama ini berubah bukan akibat sebuah proses pembelajaran terhadap proses peradaban sebelumnya (evolusi), dan sangat sukar untuk bertransformasi secara alami.

Merefleksikan kedua pendapat tersebut, menjadikan saya melihat negeri ini sebagai sebuah negeri yang tak pernah mau belajar dan berpikir tentang masa depan bangsa ini. Pada sebuah pertemuan saya dengan salah seorang staf parlemen yang mempersiapkan sebuah peraturan perundang-undangan, ia bertanya “apakah dengan mengakui keberadaan sistem yang berlaku di komunitas lokal/adat tidak akan menggiring Indonesia yang merupakan negara kesatuan menjadi terpecah-pecah?”. Sebuah pertanyaan yang bagi saya sangat tidak beranjak dari sejarah terbentuknya negeri ini. Bila memang benar ada semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang selalu bertengger di kaki Burung Garuda, maka harusnya pertanyaan tadi tidak perlu diajukan. Karena bagi saya, negeri ini dibangun atas puzzle komunitas lokal/adat yang mempersatukan wilayahnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pilihan-pilihan yang diambil oleh para pejabat negeri pun tidak mampu memberikan jawaban jangka panjang atas kegelisahan rakyatnya dalam menggapai kesejahteraan. Kekerasan psikologis yang dimiliki oleh sebagian besar rakyat akibat dari tekanan ekonomi, telah menggiring cara pikir praktis jangka pendek dalam mengambil pilihan berbangsa. Belum lagi, para akademisi dan ilmuwan yang cenderung hanya bersandar pada teori-teori klasik, tanpa pernah membaca kecenderungan perubahan sosio-kultur yang terjadi hari ini, telah menggiring opini dan cara baca banyak orang pada sebuah pilihan-pilihan mengambil kesempatan dalam celah sempit.

Bemunculannya timpakul (istilah dalam idiom Banjar terhadap orang yang opportunist) menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Peluang perayaan politik lima tahunan, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden, serta pemilihan anggota legislatif, tak lebih menjadi sebuah pertarungan semu, yang bahkan hanya menjadi sebuah pilihan untuk memperoleh pekerjaan sesaat, bukan lagi pada implementasi ideologi dalam membangun bangsa ini. Karenanya tidak salah kemudian bila kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cenderung, bahkan hampir seluruhnya, malah menjadikan sebagian besar rakyat menjadi tertindas.

Bila kelompok pembelajar (akademisi, guru, ilmuwan) telah pula melepaskan diri dari sebuah akar dasar fungsi sosialnya, yang merupakan pengelola pengetahuan dan informasi, maka tidak salah juga akan ditemui kelompok sosial masyarakat yang gamang dalam menentukan langkahnya. Bahkan untuk sekedar menyatakan ya atau tidak pun, masih belum cukup memiliki sebuah keberanian. Sementara itu, kelompok politisi yang semakin tidak ideologis juga tidak pernah menggunakan ruangnya untuk membangun jalan baru bagi negeri. Di sisi lain, kelompok yang menamakan dirinya organisasi sosial kemasyarakatan ataupun lembaga swadaya masyarakat, sudah menjadikan organisasi atau lembaganya sebagai ruang bertahan hidup untuk sementara waktu, tidak lagi sebagai kontrol sosial atas sistem yang tengah berjalan. Pun ketika kelompok agama masih berkuat lebih banyak pada urusan hubungan vertikal dibandingkan memperkuat hubungan horisontal, yang mana ketika membangun hubungan horisontal pun, tidak menjadi penguat terhadap pencapaian cita-cita berkehidupan.

Kegelisahan saya yang utama saat ini adalah hingga kapan bangsa ini dan anak bangsa di dunia akan beranjak pada sebuah kesepakatan untuk membangun sebuah kesejahteraan bersama dalam bingkai keseimbangan kehidupan? Yang juga tidak semata pada kesejahteraan

bagi manusia, namun juga pada makhluk-makhluk lain yang telah diberikan nafas kehidupannya hari ini. Bila saja pertarungan-pertarungan kepingan elite permukaan bumi, yang hari ini dikuasai oleh kelompok kapitalis, yang beragam warna, tidak segera dihentikan, maka bisa jadi benar apa yang telah diramalkan oleh peradaban Maya, bahwa akan ada sebuah “shock” dahsyat dalam waktu yang tak lama, yang akan mendorong perubahan peradaban kehidupan makhluk di permukaan bumi. Hanya kepada mereka yang mampu beradaptasi secara cepat dan telah membangun kemandirian pikiran yang akan mampu bertahan di dalamnya.

negeri ini butuh lebih dari sekedar menanam

11. 28. 2008 - 173 dilihat

Hari ini (28/11), Pemerintah mencanangkan sebagai hari gerakan menanam dan bulan menanam. Sebuah inisiatif yang dapat dilihat sebagai sebuah inisiatif yang penuh kebaikan. 100 juta batang pepohonan akan ditanam, dengan harapan akan mampu menghijaukan negeri ini.

Angka laju pengurangan luas hutan pun diklaim telah turun, dari 2,9 juta hektar setiap tahun menjadi 1,08 juta hektar setiap tahun. Padahal secara nyata, proses-proses penggerusan kawasan hutan masih terus terjadi, seiring dengan maraknya perijinan bagi perkebunan besar kelapa sawit dan pertambangan. Bahkan pada beberapa kawasan hutan lindung, akan terjadi pembukaan lahan untuk kepentingan non kehutanan, termasuk untuk pertambangan.

Kegiatan perbaikan kawasan hutan, dalam bentuk reboisasi maupun penghijauan, bukanlah barang baru dalam program Departemen Kehutanan dan institusi kehutanan di daerah. Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi (DAK-DR) telah menjadi program sejak lama, dimana pada tahun 2000 hingga 2004, program ini telah mengucurkan dana triliunan rupiah. Tahun 2003, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (awalnya bernama GNRHL lalu diubah menjadi Gerhan), pun telah menargetkan 5 juta hektar lahan di Indonesia mampu dihijaukan, dengan uang yang tidak kurang dari 7 triliun rupiah.

Realisasi dari kedua program tersebut sangat tidak memuaskan. Dimana dari hasil evaluasi yang dilakukan, baik oleh Ornop maupun Akademisi, ditemukan tingkat keberhasilan antara 0-60% pada lokasi-lokasi penanaman. Dan juga ditemukan terjadinya dugaan korupsi pada proyek-proyek DAK-DR, yang membawa pelaksana proyek di meja persidangan.

Dagelan kehutanan ini masih akan terus berlangsung. Dana yang cukup besar untuk program rehabilitasi hutan dan lahan, baik melalui Dana Reboisasi maupun dana-dana lain yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia, ditambah dengan bencana ekologis yang terus terjadi, menjadikan program penghijauan maupun rehabilitasi sangat populer di publik.

Namun, bila dilihat secara komprehensif, terjadi dualisme pemikiran pemerintah. Di satu sisi melakukan penghijauan yang luasannya sangat

kecil, disisi lain terus melakukan proses pembiaran terhadap proses penghancuran kawasan hutan.

Jeda Tebang Hutan Harus Dilakukan

Jeda tebang hutan (moratorium logging) haruslah menjadi sebuah prasyarat sebelum dilakukannya proses rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan. Sehingga tidak akan terjadi proses penghancuran hutan yang berbarengan dengan perbaikan kawasan hutan. Juga agar penegakan hukum di sektor kehutanan menjadi lebih mudah dilakukan.

Dalam proses jeda tebang hutan, bukanlah semata untuk menghalangi pertumbuhan ekonomi di sektor kehutanan. Atau juga untuk menghasilkan pengangguran di sektor industri kehutanan. Namun jeda tebang hutan justru akan memperbaiki citra sektor kehutanan yang selama ini selalu dihujam dan menjadi kambing hitam.

Menambal Kapal Bocor Sambil Berlayar

Kondisi krisis keuangan global, di tahun 1997-2001 dan yang terjadi tahun 2008 ini, telah menunjukkan bahwa industri kehutanan, berikut sektor perkebunan besar dan pertambangan, merupakan sektor yang dibangun diatas kerapuhannya. Pemutusan hubungan kerja telah terjadi pada dua fase krisis keuangan tersebut. Di krisis keuangan delapan tahun lalu, 19.000 pekerja industri kehutanan di Kota Samarinda menerima pemutusan hubungan kerja. Bulan ini, sudah 1.000 pekerja di industri kehutanan dan perkebunan besar di Kalbar yang menerima pemutusan hubungan kerja.

Penegakan hukum di sektor kehutanan masih belum mampu menembus ke rantai utama penghancuran hutan. Aktor-aktor keuangan dan intelektual penebangan haram masih belum tersentuh oleh palu hakim. Kasus-kasus yang masuk di laporan kepolisian maupun di meja hijau, hanyalah terhadap pelaku lapangannya. Masih belum cukup banyak kabar baik terhadap pelaku utamanya, yang membiayai maupun yang mengotaki penghancuran hutan.

Berlayar sambil menambal kapal yang bocor bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan lebih mudah bila membawa kapal untuk menepi dan memperbaiki kebocoran sektor kehutanan. Jeda tebang hutan akan semakin memudahkan perbaikan tata kelola kehutanan, sehingga lima ataupun sepuluh tahun mendatang, negeri ini tak lagi terlalu sering dilanda bencana ekologis, dan tidak memperoleh label sebagai penghasil kayu haram.

Hutan Indonesia Masa Depan Anak Negeri

Hutan Indonesia merupakan sumber kehidupan bagi setidaknya 60 juta rakyat negeri ini. Komunitas lokal di negeri ini telah membangun ikatan sosio-budaya yang kuat dengan kawasan hutan di lingkup kehidupannya. Walau kemudian sebagian besar harus tergusur, sejak adanya perijinan perkebunan besar, konsesi kehutanan maupun pertambangan.

Konflik-konflik antara komunitas lokal dengan perusahaan masih selalu terjadi, yang bahkan diikuti dengan kematian rakyat. Aparat keamanan sering kali berada di balik perusahaan, bukan berada untuk membela kepentingan rakyat. Pembelaan yang utuh terhadap investasi telah menghasilkan kemiskinan baru di tingkat masyarakat.

Jeda tebang hutan, juga akan memudahkan proses re-kalkulasi kekayaan alam serta kepastian kawasan. Hingga kepastian usaha dan kepastian terhadap berkehidupan bagi komunitas lokal akan ditemukan. Jeda tebang hutan bukanlah semata menghentikan penebangan sementara, namun dalam fase-fase pelaksanaannya akan mengantarkan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.

Negeri ini butuh lebih dari sekedar menanam. Negeri ini butuh perbaikan mendasar dari tata kelola kehutanan. Negeri ini membutuhkan langkah yang cepat dan strategis dalam mengurangi ancaman bencana ekologis. Dan jeda tebang hutan merupakan solusi konkret untuk menuju kehidupan yang lebih baik bagi negeri ini.

Tiang Gantungan di Kebun Sawit

11. 18. 2008 - 532 dilihat

Sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan kelapa sawit, lembaga keuangan dan beberapa organisasi masyarakat sipil tengah berkumpul di Bali untuk melanjutkan perbincangan meja bundar tentang kelapa sawit berkelanjutan. Minyak sawit telah dipandang oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, sebagai produk yang menjanjikan masa depan cerah. Apalagi setelah adanya kebijakan negara-negara di Eropa untuk mengalihkan penggunaan sebagian minyak fosil kepada penggunaan bahan bakar nabati, seperti biofuel dari minyak sawit.

Hingga tahun 2008, 9 juta hektar lahan telah diberikan perijinan kepada perkebunan kelapa sawit, namun hanya 3 juta hektar lahan yang telah tertanami. Lahan-lahan hutan semakin mengecil, seiring dengan semakin menyempitnya lahan-lahan pertanian pangan rakyat, yang harus terus bertarung dengan meluasnya industri kelapa sawit di negeri ini.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia sangat memimpikan untuk menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Kondisi ini menciptakan beragam permasalahan di daerah-daerah, mulai dari kehadiran konflik sosial, permasalahan lingkungan hidup, hingga permasalahan korupsi. Kelapa sawit telah menjadi sangat primadona pada tahun lalu, dimana harga tandan buah segar kelapa sawit berada di atas angka seribu rupiah setiap kilogramnya.

Kegembiraan para petani sawit itu tak bertahan lama. Seiring dengan krisis finansial yang terjadi, harga tandan buah segar kelapa sawit turun drastis hingga dibawah seratus rupiah setiap kilogramnya. Ratusan petani di Jambi mulai stress hingga mengalami gangguan jiwa. Buah-buah sawit dibiarkan membusuk di kebun. Pemerintah cenderung lamban untuk mengantisipasi dampak krisis finansial terhadap komoditas ini.

Kelapa sawit: Komoditas Ketergantungan

Kelapa sawit sebagai tanaman telah melahirkan permasalahan sendiri. Kelapa sawit membutuhkan bibit yang terbaik, yang hanya diperoleh dari industri penghasil bibit kelapa sawit. Hingga saat ini, baru lima perusahaan yang dinyatakan sebagai penghasil bibit kelapa sawit bersertifikat di Indonesia. Bila menanam bibit sawit yang dihasilkan dari kelapa sawit yang telah ditanam, maka kualitas minyak sawit yang

dihasilkan menjadi sangat rendah, sehingga sering kali ditolak oleh pabrik pengolah minyak sawit.

Kendali harga dalam menjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berada di tangan pabrik pengolah minyak sawit. Sehingga, pada wilayah-wilayah yang kapasitas pabriknya tidak mampu menampung produksi buah kelapa sawit, seperti di Kalimantan, maka harga yang ditawarkan oleh pabrik kepada petani sangat tidak berada pada posisi yang menguntungkan bagi petani sawit. Harga yang sempat melonjak hingga Rp 1.200,- setiap kilogram sempat membahagiakan petani kelapa sawit. Namun kondisi tersebut hanya berlangsung tak lama, yang kemudian harga setiap kilogramnya di tingkat petani kelapa sawit berkisar antara Rp 80,- - Rp 300,-. Sehingga hanya petani kelas menengah dan berlahan luas saja yang mampu bertahan.

Cara memanen tandan buah segar kelapa sawit hanya dapat dilakukan oleh orang yang masih bertenaga kuat, atau orang-orang muda. Pada usia 10 tahun ke atas, diperlukan galah tambahan untuk memanen buah kelapa sawit. Jenis ini yang kemudian membedakan dengan pohon karet, dimana setiap orang, termasuk anak-anak dan orang tua, dapat memanen getah karet. Kondisi tersebut menjadikan setiap petani sawit yang sudah lanjut usia, harus mempekerjakan buruh dodos dan buruh angkut, yang akan menambah biaya produksi kelapa sawit.

Penggunaan pestisida dan pupuk sangat dianjurkan dan cenderung wajib bagi petani sawit. Ini belum termasuk untuk mengatasi hama babi hutan, landak, ataupun hewan yang memakan bonggol sawit lainnya. Biaya produksi sudah dipastikan meningkat dengan kondisi yang ada ini. Belum lagi, dampak kesehatan yang akan dialami oleh petani sawit, karena penggunaan pestisida yang tidak memperhatikan cara penggunaannya.

Kelapa sawit juga memiliki keunikan tersendiri, dimana setiap harinya kelapa sawit membutuhkan sekurangnya 20-30 liter air setiap harinya. Secara perlahan kemudian, kelapa sawit akan mengeringkan air tanah. Walau kemudian terlihat pada kebun-kebun kelapa sawit masih dapat ditumbuhi oleh tumbuhan penutup tanah (cover crop), namun sejatinya air tanah sudah sangat jauh berkurang. Pada usia 3 tahun, di daerah sekeliling kelapa sawit sudah sukar ditumbuhi oleh jenis-jenis pepohonan ataupun tanaman pertanian. Sistem tumpang sari yang selama ini dianjurkan dalam menanam kelapa sawit, belum pernah secara benar terjadi.

Dalam proses penanaman kembali (re-planting) kelapa sawit, terdapat kesulitan, dimana bonggol kelapa sawit harus dicabut untuk kemudian

dapat menanam kembali. Atau kemudian melakukan penanaman pada wilayah yang belum ada kelapa sawitnya. Akar dan batang kelapa sawit sangat sukar untuk membusuk, kecuali kemudian diberikan perlakuan dengan menambahkan zat kimia tertentu (yang cenderung berbahaya bagi tanah dan kehidupan) pada batang dan akar kelapa sawit agar cepat membusuk.

Kelapa Sawit Keberlanjutan: Menjual Mimpi Yang Tak Terbeli

Inisiatif untuk menjadikan adanya industri kelapa sawit yang berkelanjutan telah dimulai sejak enam tahun lalu oleh kelompok organisasi konservasi internasional. Berharap akan terjadi sebuah perubahan perilaku dari industri kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit yang mengharuskan membuka lahan secara luas, telah melahirkan beragam permasalahan sosial dan lingkungan hidup.

Banjir, erosi dan kekeringan di kawasan sekitar perkebunan bukan lagi hal yang aneh. Sungai-sungai menjadi coklat dan tidak lagi dapat berfungsi sebagai biasanya. Sumur-sumur dan sumber air tanah lainnya semakin sukar ditemui di musim kemarau, dan terkadang juga terjadi di musim penghujan.

Ketika pabrik pengolahan minyak sawit mulai terbangun, limbah-limbah dari pabrik CPO, yang kabarnya dapat diolah kembali menjadi sumber hara bagi tanaman kelapa sawit, justru menghasilkan limbah hitam dan berbau di aliran sungai yang selama ini dimanfaatkan oleh komunitas lokal untuk kebutuhan sehari-hari.

Sementara inisiatif perundingan akan terus berjalan. Berharap bahwa mimpi akan adanya industri kelapa sawit yang tidak bermasalah secara sosial dan lingkungan hidup. Namun mimpi itu akan tetap menjadi mimpi, karena kelapa sawit bukanlah komoditas yang ramah sosial dan ramah terhadap lingkungan hidup. Konflik berkelanjutan masih akan terus terjadi di industri kelapa sawit.

Kemandirian di Tiang Gantungan

Bila sebelumnya para petani dan rakyat Indonesia telah membangun kemandirian di dalam komunitas, bahkan di tingkatan yang lebih luas, maka setelah hadirnya industri kelapa sawit, secara perlahan mulai hilang kekuatan ketahanan pangan rakyat negeri ini. Lahan-lahan pertanian produktif rakyat kian hari kian menyempit, digerus oleh pembukaan untuk perkebunan kelapa sawit.

Bibit-bibit tanaman pangan yang selalu tersimpan dengan baik di

lumbung-lumbung pangan komunitas pun, semakin berkurang jumlah dan varietasnya. Petani yang dulunya berdaulat pangan, terpaksa harus menjadi buruh kelapa sawit ataupun menyingkir ke wilayah perkotaan. Uang pun menjadi pegangan satu-satunya untuk dapat bertahan hidup. Bukan lagi hutan, sawah ataupun kebun-kebun buah mereka.

Tiang gantungan telah disiapkan oleh industri kelapa sawit. Rakyat Indonesia yang bersandarkan pada kehidupan agraris harus mengantri untuk menyerahkan kehidupannya. Satu per satu akan menggantungkan hidupnya pada pelepah kelapa sawit. Tak ada lagi budaya alam yang telah terbangun sejak ratusan tahun lalu. Juga semakin jarang terdengar nyanyian owa di pagi buta.

Yang akan selalu hadir hanyalah berita turunnya harga tandan buah segar kelapa sawit, masyarakat adat yang digusur, ataupun banjir yang melanda desa-desa di negeri ini. Swasembada pangan takkan pernah terwujud, apalagi ingin memimpikan kedaulatan pangan. Negeri ini memang telah didorong ke tepi jurang kehancurannya. Kecuali kemudian bila ada kesadaran kolektif untuk menata ulang dan merebut kembali kedaulatan akan sumber-sumber kehidupan.

iblog action dayl property konservasi melahirkan poverty

10. 15. 2008 - 333 dilihat

“entar aja beli alat elektronik, nunggu dollar turun aja.”
“tapi kapan?”
“ya.. mungkin empat tahun lagi“

krisis keuangan amerika yang selalu mengimbas pada wilayah lain, melahirkan efek domino yang terkadang sudah diduga. infrastruktur ekonomi yang dibangun atas kepentingan pemodal besar, mendorong rapuhnya pondasi ekonomi. belajar dari perjalanan krisis ekonomi asia yang pernah terjadi, pertahanan terakhir negeri ini adalah para pelaku usaha kecil dan sedikit menengah.

Rapuhnya industri property di US yang telah diprediksi keruntuhannya, sebenarnya tak hanya mengganggu sektor ekonomi. bekerjanya property konservasi dalam bingkai perlindungan alam, cenderung luput dari perhatian. dan beruntungnya negeri ini, perusahaan property konservasi tersebut juga bekerja dengan leluasa di negeri ini.

kemiskinan yang terjadi di negeri ini, lebih banyak berada pada lingkaran-lingkar kekayaan alam. pada sekitar perkebunan besar, pertambangan, hutan tanaman industri ataupun bisnis konservasi, tersajikan potret keterpurukan generasi negeri. minimnya layanan dasar manusia pada wilayah-wilayah tersebut, menghadirkan pemiskinan keberlanjutan.

tanah, air, hutan, kehidupan. sebuah fatamorgana kesejahteraan. walau para gubernur ataupun bupati sibuk untuk menjajakan kawasan hutan untuk dipertukarkan carbonnya dengan keping emas, tak jua akan menghadirkan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat. minimnya sarana dan prasarana transportasi publik yang memadai, ditambah dengan terbatasnya kapasitas dan pengetahuan, menjadikan komunitas yang berkehidupan di sekitar kawasan terlindungi sangat sukar mengembangkan produktifitasnya.

keselamatan rakyat dan jaminan layanan alam yang merupakan keharusan, terkadang dilupakan dalam ranah kebijakan, disebabkan telah tersilaukannya pelayan publik dengan keping emas dan helai hijauan.

property konservasi, yang harusnya melahirkan kesejahteraan, malah cenderung melahirkan pemiskinan. akses dan kontrol terhadap

sumberdaya yang dihilangkan, mendorong komunitas lokal mengambil pilihan pragmatis untuk mampu bertahan hidup. menjadi buruh ataupun pergi meninggalkan tanah kehidupan, merupakan pilihan yang pasti.

menapaki transek masa lalu, perlahan dengan pemastian. ruang belajar, tempat bermain, apotek raksasa, lebih baik dikembalikan kepada mereka yang telah membangun interaksi sosial-kultural yang kuat dengan alamnya. pelayan publik, wajib menentukan posisinya kepada komunitas lokal. perlindungan alam secara kolektif akan lebih memberikan jaminan bagi kehidupan lain di sekitarnya, yang terkadang tak pernah saling mempertemukan.

Upeti Kayu Legal

09. 22. 2008 - 285 dilihat

Awal bulan September ini, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang didukung oleh dua lembaga asing melakukan sebuah Konsultasi Publik Final untuk menemukan formulasi Kelembagaan untuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Staf Departemen Kehutanan hanya terlihat hadir pada saat pembukaan, setelah itu tak sesosok pun terlihat. Padahal, ada sebuah SK Menteri Kehutanan yang menunjukkan bahwa Departemen Kehutanan berkeinginan untuk menghadirkan kejelasan legalitas kayu.

Proses yang tak sebentar. Sejak tahun 2003, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sebuah acara pertemuan para pihak dilangsungkan. Rumusan kata-kata untuk menuju lahirnya definisi legalitas kayu. Banyak tanya, “mengapa masih harus mendefinisikan legalitas kayu? Apakah tidak lebih mudah mendefinisikan kayu ilegal? Atau apakah ketika tidak legal maka ia menjadi ilegal?” Semua berproses, hingga akhirnya semakin mendekati akhir, terlalu banyak aspek sosial yang dilupakan dalam Standar Verifikasi Legalitas Kayu.

Ekologi dalam Krisis

Indonesia telah menetapkan kawasan daratannya seluas 109 juta hektar sebagai kawasan hutan. Dari luasan ini kemudian dibagi menjadi kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi konversi dan hutan cadangan. Namun hingga saat ini, kawasan hutan yang tersisa tak kurang dari 30% luas daratan negeri ini.

Hamparan tegakan Dipterocarpaceae secara perlahan berganti dengan hamparan Acacia ataupun Eucalyptus, dan sebagian lagi menjadi hamparan kelapa sawit atau menjadi lubang tambang. Bencana ekologis semakin kerap terjadi, setidaknya tiga kali dalam setahun bencana banjir melanda kota-kota di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Sementara di Jawa, air telah menjadi barang langka, seiring dengan mengeringnya sumber mata air akibat kurangnya pepohonan ataupun habis dihisap perusahaan air minum dalam kemasan.

Satwa-satwa pun mulai bertarung dengan manusia dalam mempertahankan kehidupannya. Sudah semakin kerap terdengar adanya orangutan, beruang, gajah dan harimau yang bertandang di kebun-kebun rakyat. Menyempitnya kawasan hutan menjadi faktor utama keluarnya satwa dari kawasan hidupnya.

Kayu Legal Untuk Siapa?

Tak kurang saat ini telah 5 (lima) negara yang melakukan perjanjian bilateral dengan Indonesia untuk upaya pemberantasan illegal logging. Perjanjian serupa juga dilakukan dengan Uni Eropa dan ASEAN. Tujuan utamanya tak lebih untuk memberikan pemulas wajah agar tak ada coreng industri negara utara akibat perilaku memperdagangkan kayu illegal.

Kegiatan sesaat ini masalah seputar penegakan hukum ataupun membangun sistem lacak balak, yang diasumsikan dapat mengatasi perdagangan kayu illegal. Akar permasalahan utama sektor kehutanan masih belum pernah tersentuh. Belum selesainya permasalahan tenurial, korupsi dan tingginya gap pasokan dan permintaan kayu, telah memperpanjang usia permasalahan sektor kehutanan.

Sementara juga, ketika ada proses yang menyatakan bahwa sebatang kayu adalah legal ataupun bersertifikat hijau, masih ditemukan adanya praktek-praktek yang menghasilkan dampak ekologi dan sosial dari unit pengelola hutan tersebut. Kondisi ini sangat didukung oleh sistem sertifikasi yang dikeluarkan oleh Forest Stewardships Council (FSC) maupun Lembaga Ekolabel Indonesi (LEI), masih belum mampu menjawab pemenuhan komprehensif terhadap prinsip, standar dan kriteria yang ada oleh unit pengelola. Hal ini yang juga akhirnya dimiliki oleh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.

Ada lebih dari 500 peraturan yang melingkupi perjalanan sebatang kayu mulai dari pohon berdiri, hingga menjadi kertas toilet di negara utara. Kepastian kawasan, pemenuhan prinsip pengakuan terhadap hak-hak komunitas lokal, pemenuhan hak pekerja, hingga kewajiban terhadap pemerintah, serta beragam perijinan yang harusnya dipenuhi agar kayu menjadi legal.

Ketakutan terbesar datang dari kelompok pengusaha, yang sangat khawatir akan menjadi beban baru bagi usaha mereka. Padahal, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu hanyalah mencoba mengkompilasi peraturan-peraturan yang mengikuti perjalanan kayu. Dan masih banyak kelemahan didalamnya, terutama aspek sosial-kultur, yang benar-benar diabaikan oleh sistem tersebut.

Pemenuhan kebutuhan kayu, baik dalam bentuk furniture, plywood, flooring maupun untuk kebutuhan kertas dan tissue toilet, menjadi hal yang dikedepankan dalam menuju kayu yang legal. Sehingga kemudian, cara pandang ini mendorong lebih jauh terkait dengan pemenuhan

kebutuhan tersebut, dan sangat terlihat upaya untuk menurunkan kualitas peraturan perundang-undangan, agar tak sepenuhnya dipenuhi.

Akhir Peradaban Kayu

Bila saja kejadian di pulau Paskah pada berabad lalu terulang kembali saat ini, ataupun hilangnya peradaban Maya kembali berulang, barulah kemudian akan sangat terasa bahwa kayu merupakan barang yang sangat berharga. Layanan hutan terhadap fungsi-fungsi ekologis dan pemenuhan kebutuhan kehidupan bagi komunitas tempatan, harusnya tetap ada hingga pada akhir masa.

Peradaban kayu demi pemenuhan hasrat sekelompok negara industri haruslah sudah diakhiri. Memandang hutan tak sekedar penghasil kayu harus kembali dikumandangkan. Sistem kelola tradisional dengan pengetahuan buah pertarungan pemikiran dalam waktu yang tak pendek, merupakan hal yang sudah saatnya diakui oleh negara.

Pengabaian terhadap pengetahuan dan sistem kelola lokal, akan menghadirkan peningkatan bencana ekologis dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraannya. Pemerintah, pengusaha dan akademisi, sudah saatnya duduk kembali sejenak, menyaksikan hutan kembali tumbuh sementara waktu, tanpa deru gergaji rantai (chainsaw) ataupun alat berat, sambil memperbincangkan ulang arah pembangunan kehutanan dan sistem kelola hutan Indonesia yang lebih berpihak pada rakyat. Bukan waktunya untuk menyajikan upeti kayu legal pada negara utara. [af-080922]

Karst: Kawasan Terakhir Untuk Berkehidupan

03. 8. 2008 - 1,448 dilihat

Istilah karst yang dikenal di Indonesia sebenarnya diadopsi dari bahasa Yugoslavia/Slovenia. Istilah aslinya adalah 'krst / krast' yang merupakan nama suatu kawasan di perbatasan antara Yugoslavia dengan Italia Utara, dekat kota Trieste. Kosistem Karst adalah areal-areal yang mempunyai lithologi dari bahan induk kapur.

Di Kalimantan Timur, lahan ini sebagian besar terdapat di semenanjung Sangkulirang, memanjang sampai ke Tanjung Mangkaliat dengan luas 293.747,84 hektar. Kawasan ini merupakan kawasan yang terancam, karena kepentingan industri dan langkanya semen, menjadikan kawasan pegunungan kapur yang menjadi salah satu bahan baku industri akan segera ditambang.

Ekosistem karst memiliki sebuah keunikan sendiri, baik secara fisik, maupun dalam aspek keanekaragaman hayati. Sifat yang rentan dari biota gua, merupakan sebuah indikator penting terhadap perubahan lingkungan. Belum banyak jenis biota gua Indonesia yang diungkapkan. Baru beberapa jenis udang gua (*Macrobrachium poeti*), kalanjengking gua dari Maros (*Chaerilus sabinae*), kepiting gua buta (*Cancrocaeca xenomorpha*), kepiting mata kecil (*Sesarmoides emdi*), isopoda gua (*Cirolana marosina*), Anthura muna, kumbang gua (*Eustra saripaensis*), *Mateullius troglobiticus*, *Speonoterus bedosae*, ekorpegas gua (*Pseudosinella maros*), *Stenasellus covillae*, *S. stocki*, dan *S. Monodi* dan *S. javanicus* dari Karst Cibinong.

Yang juga menjadi arti penting kawasan karst adalah ketersediaan air tanah yang sangat dibutuhkan oleh kawasan yang berada di bawahnya. Termasuk di dalamnya ketersediaan air tawar (dan bersih) bagi kehidupan manusia, baik untuk keperluan harian maupun untuk pertanian dan perkebunan.

Komunitas lokal pun telah memiliki sebuah sistem untuk melakukan pelestarian terhadap kawasan karst dan hidupan yang ada di dalamnya. Namun kemudian, telah banyak peneliti yang melakukan pengambilan spesimen dengan dalih untuk kepentingan pengetahuan. Selain juga, kelompok petualang yang melakukan "pengrusakan" terhadap kawasan karst demi kesenangan pribadi.

Proses pengrusakan yang lebih besar dilakukan oleh kepentingan industri. Langkanya semen kemudian dijadikan dalih untuk melegalkan

upaya penambangan di kawasan ekosistem karst. Padahal, di Indonesia kawasan ini tak lebih dari 15,4 juta hektar dan 192 juta hektar lahan daratan negeri. Penggunaan bahan peledak untuk menghancurkan batuan pun, menambah proses kehancuran sistem yang ada di kawasan karst.

Masih begitu banyak keunikan yang dimiliki oleh ekosistem karst, yang menjadikan kawasan ini bernilai penting bagi kehidupan. Termasuk, di saat terjadi kekeringan, maka kawasan ini merupakan tempat diperolehnya tetesan air. Sungai-sungai bawah tanah masih akan terus mengalir sungai permukaan, selama kawasan ini terjaga.

Karst, merupakan kawasan terakhir untuk berkehidupan. Kemampuan kawasan ini menyediakan kebutuhan udara, air dan sumber pakan, menjadi kelebihan kawasan ini. Pada fase awal peradaban pun, lebih banyak makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya di kawasan karst. Karenanya, banyak ditemui lukisan di dinding gua, yang kemudian juga menjadi catatan atas sejarah kehidupan.

Perlindungan kawasan karst menjadi penting dan mendesak. Saat ini baru sebagian kecil kawasan karst di negeri ini yang memperoleh kehidupan. Sama halnya dengan kawasan ekosistem kerangas yang masih sangat terancam keberadaannya. Semakin banyak ekosistem unik dan langka di negeri ini yang tak mampu bertahan diantara relung keserakahan segelintir kelompok manusia.

Bukan lagi saatnya untuk memacu diri mengejar keping emas. Kehidupan tak akan pernah dapat berlanjut hanya dengan menggigit batubara, meminum minyak bumi dan menghirup gas alam. Segalanya dapat terus berlanjut hanya bila tersedia air, udara bersih dan makanan yang cukup. Dan pilihan ada pada diri manusia sebagai pemimpin di permukaan bumi. Bila kehidupan ingin semakin cepat menghilang, tetaplah menjadi makhluk yang serakah.

ADIPURA: Cara Lain Membunuh Rakyat

03. 6. 2008 - 1,257 dilihat

Adipura, sebuah penghargaan yang diberikan kepada kota berwawasan lingkungan hidup. Penghargaan yang rencananya diharapkan memacu kota-kota agar mampu melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 tahun 2006, disebutkan bahwa kawasan yang dipantau meliputi: perumahan, sarana perkotaan, sarana transportasi, perairan terbuka, sarana kebersihan dan pantai wisata.

Namun kemudian, dengan dalih untuk mengejar sebuah penghargaan Adipura, banyak pemerintah kabupaten dan kota berlomba untuk melakukan pengurusan. Kelompok-kelompok miskin kota menjadi korban dari sebuah keangkuhan kota. Demi mengejar sebuah prestise, lahan hidup dan berkehidupan warga kota dihilangkan secara paksa, tanpa pernah diberikan sebuah jawaban atas kemiskinan yang diciptakan pemerintah.

Penghargaan Adipura telah dipandang berbeda oleh pemerintah daerah. Melihat penghargaan Adipura hanya dari cara pandang kulit dari sebuah kota. Tanpa pernah melakukan pendalaman terhadap sebuah sistem pengelolaan kota yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh warganya.

Kelompok-kelompok miskin kota, yang sebagian besar berprofesi di sektor informal, semisal pedagang kaki lima, selalu menjadi korban dari sebuah keangkuhan kota. Tak ada lagi tempat mereka untuk tetap dapat berusaha dan berjuang mempertahankan hidupnya. Sementara itu, semakin besar lahan kota yang diberikan kepada kelompok-kelompok menengah untuk berdagang ke atas dalam bentuk mal ataupun superblook.

Di beberapa kota, bahkan ketika disiapkan sebuah tempat untuk kelompok pedagang kaki lima, namun kemudian dalam penempatannya selalu diberikan kepada kelompok menengah ke atas. Kelompok pedagang kaki lima kemudian kembali terpaksa berjualan pada tepi jalan ataupun pada sudut-sudut toko mewah.

Bila saja Kementerian Lingkungan Hidup tidak segera melakukan perubahan terhadap kriteria penilaian Adipura, maka KLH merupakan bagian yang telah menghilangkan hak hidup dan hak bekerja dan berusaha warga negara, yang termasuk dalam hak ekonomi, sosial dan

budaya dalam hak asasi manusia. Proses penghilangan yang secara sistematis dan meluas ini dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran HAM berat.

Adipura, ketika menjadi cara lain membunuh rakyat, harusnya secepatnya dilakukan evaluasi menyeluruh. Pelibatan kalangan organisasi non pemerintah dalam proses penilaiannya pun tak benar-benar dilakukan. Sehingga kemudian penilaian terhadap sebuah kota untuk memperoleh penghargaan Adipura menjadi menghilangkan nilai sosial di dalam lingkungan hidup.

Adipura harusnya bisa memberikan sebuah arahan yang tepat bagi kota untuk lebih ramah terhadap warga, bukan semata terhadap kondisi lingkungan hidup yang lebih baik. Karena sejatinya, pengelolaan lingkungan hidup ditujukan pada peningkatan kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di permukaan bumi. Adipura bukanlah untuk semata permasalahan lingkungan hidup ataupun keindahan di pandangan mata. Adipura, bila tak ingin menjadi sebuah mesin “pembunuh baru”, harus menjadi sebuah penilaian komprehensif, bagaimana pemerintah daerah melakukan pengelolaan lingkungan hidup fisik, biologi dan sosial di dalam kawasan kelolanya.

kebijakan yang tak bijak

03. 5. 2008 - 965 dilihat

Permasalahan pinjam pakai kawasan hutan mengemukan kembali sejak lahirnya Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan pada tanggal 4 Februari 2008. Berbagai pihak menolak kehadiran peraturan pemerintah tersebut dengan berbagai alasan, diantaranya rendahnya nilai kompensasi atas kawasan hutan yang dipinjampakaikan, hingga pada permasalahan hilangnya fungsi ekologis hutan akibat penggunaan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan bahwa investor pertambangan bisa mendapatkan izin untuk bekerja di wilayah hutan lindung, dan lahirnya PP No. 2 tahun 2008 tersebut sangat menguntungkan dan menjadikan investasi di sektor tambang lebih bergairah.

Kelahiran peraturan pemerintah tersebut bukanlah tiba-tiba. Sejak tahun 2004, ketika hadir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada tanggal 1 Maret 2004, yang kemudian menjadi UU No. 19 tahun 2004, maka sejak saat itulah kemudian 13 (tiga belas) perusahaan pertambangan diijinkan untuk melakukan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Bila dicermati lebih lanjut, maka UU No. 19 tahun 2004, bukan hanya memberikan perijinan terhadap 13 (tiga belas) perusahaan pertambangan di hutan lindung, namun juga kepada banyak perusahaan pertambangan dan perijinan lainnya untuk melakukan upaya pengupasan kawasan hutan untuk kepentingan lain.

Pasal I UU No. 19 tahun 2004 menyebutkan penambahasan pasal 38A “Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.” Pasal ini kemudian memberikan makna bahwa segala bentuk perijinan di kawasan hutan akan tetap berlaku.

Bila kemudian UU No. 19 tahun 2004 hanya diperuntukkan pada 13 (tiga belas) perusahaan pertambangan untuk melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, maka seharusnya tidak lagi ada

permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Namun berdasarkan data Dephut, bahwa di Kalimantan Timur saja terdapat 65 permohonan pinjam pakai kawasan hutan, dimana 62 permohonan untuk penggunaan pertambangan.#1)

Bila merujuk pada Pasal 38 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sebenarnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, dengan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan tersebut. Untuk kepentingan pertambangan, maka dapat diberikan ijin pinjam pakai dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu, serta kelestarian lingkungan. Dan untuk yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis harus memperoleh persetujuan DPR. Sedangkan untuk pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung dilarang untuk dilakukan penambangan.

Pasal 38 UU No 41 tahun 1999 tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Permenhut tersebut bertujuan untuk membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta menghindari terjadinya enclave di dalam kawasan hutan.#2)

Adanya pembolehan dilakukannya pinjam pakai di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung ini kemudian terus menuai kontroversi. Padahal Pasal 1 butir (h) UU No.41/1999 menyebutkan bahwa “hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” Berdasarkan pada definisi tersebut, maka seharusnya Pasal 38 (1) UU No. 41/1999 hanya memperkenankan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan pada kawasan hutan produksi dan tidak untuk kawasan hutan lindung.

Dan di dalam kawasan hutan produksi, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain, seharusnya juga tidak diberikan perijinan pinjam pakai pada kawasan-kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung, sebagaimana tercantum dalam Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.#3)

Permasalahan di sektor kehutanan takkan pernah usai. Martua Sirait

dalam risetnya mengungkap bahwa Kawasan hutan yang ditunjuk tahun 84 lewat TGHK 143 juta ha (72% dari luas daratan). Tahun 2000-2001 ditunjuk ulang luasannya 120 juta (63%), akan tetapi 3 propinsi sampai dengan tahun 2002 masih menolak penunjukan ini (Kalteng, Sumut dan Jambi). Kawasan hutan yang sudah selesai penataan batasnya (poligon tertutup) sampai dengan Maret 2002 hanyalah 12 juta hektar. Sedangkan yang sudah ditetapkan lebih kecil dari 12 juta hektar. Sehingga baru 10% dari kawasan hutan ini yang secara hukum dapat dikatakan kawasan hutan negara (walaupun tetap bisa dipertanyakan keabsahannya secara hukum (legalitas) dan penerimaan masyarakat atas kawasan hutan negara tersebut (legitimasinya). Sisanya seluas 108 juta hektar kawasan hutan yang ditunjuk oleh dephut saat ini (90% dari luasan kawasan hutan) merupakan arena konflik status tanah antara Dephut dengan masyarakat (sengketa pertanahan di kawasan yang diklaim sebagai kawasan hutan).

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan langkah-langkah untuk melindungi kawasan hutan yang tersisa bagi kepentingan rakyat di negeri ini, sebelum semakin banyak bencana ekologi yang akan melanda. Juga Pemerintah harus melakukan re-kalkulasi hutan dan kawasan hutan, menghentikan pemberian perijinan kepada usaha-usaha yang diindikasikan dapat menurunkan kualitas ekologi kawasan, serta menyelesaikan segera tata batas kawasan hutan.

—
catatan kaki:

- #1) Lihat <http://www.dephut.go.id/ppkh>
- #2) Pasal 5 (2) dan (3) Permenhut No. P.14/Menhut-II/2006 menyebutkan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis adalah untuk : (1) Kepentingan religi; (2) Pertahanan dan keamanan; (3) Pertambangan; (4) Pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; (4) Pembangunan jaringan telekomunikasi; atau (5) Pembangunan jaringan instalasi air. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas adalah untuk : (1) Jalan umum dan jalan (rel) kereta api; (2) Saluran air bersih dan atau air limbah; (3) Pengairan; (4) Bak penampungan air; (5) Fasilitas umum; (6) Repeater telekomunikasi; (7) Stasiun pemancar radio; atau (8) Stasiun relay televisi.
- #3) Berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, jenis kawasan lindung yang mungkin berada di areal konsesi Unit Manajemen atau berbatasan langsung dengannya antara lain:

1. Hutan Lindung;
2. Kawasan hutan: dengan skoring faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah dan curah hujan > 175 (SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980); dengan lereng lapangan > 40%; dengan ketinggian > 2.000 m; dan dengan lereng lapangan > 15% untuk jenis tanah sangat peka erosi (regosol, litosol, organosol dan renzina);
3. Kawasan bergambut di hulu sungai dan rawa (tebal > 3 m);
4. Kawasan resapan air;
 5. Sempadan pantai (100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat);
 6. Sempadan sungai: sungai kecil (lebar < 30 m) lebar sempadan 50 M; sungai besar (lebar > 30 m) lebar sempadan 100 m;
 7. Kawasan sekitar danau/waduk dengan lebar sempadan 100 m;
 8. Kawasan sekitar mata air dengan radius 200 m;
 9. Kawasan Suaka Alam (cagar alam dan suaka margasatwa);
 10. Kawasan Pelestarian Alam (taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam);
 11. Buffer zone hutan lindung, lebar 500 m (telah ditata batas) atau 1.000 m (belum ditata batas);
 12. Buffer zone Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, lebar 500 m (telah ditata batas) atau 1.000 m (belum ditata batas);
13. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN);
14. Kawasan pengungsian/perlindungan satwa liar;
 15. Kawasan pantai berhutan mangrove: lebar 50 m dari tepi hutan menghadap ke arah pantai; lebar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan yang diukur dari garis surut terendah dan titik pasang tertinggi; lebar 10 m dari tepi hutan menghadap ke arah sungai;
 16. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan: Daerah Karst (kering dan berair); daerah dengan budaya masyarakat istimewa; dan kawasan lokasi situs purbakala/peninggalan sejarah bernilai tinggi;
17. Kawasan rawan bencana alam; dan
 18. Hutan produksi alam yang masih tetap dipertahankan keberadaannya dalam areal kerja.

toilet wajah kita !

02. 10. 2008 - 555 dilihat

toilet. sebuah tempat yang menyediakan pembuangan akhir dari proses metabolisme tubuh. ruang kecil yang juga terkadang menjadi sebuah tempat hadirnya inspirasi. menjadikannya sebagai sebuah tempat yang nyaman merupakan impian bagi sebagian kecil orang yang telah melampaui titik kesejahteraannya. sebagian besar masih hanya menjadikannya sebagai wadah yang tak penting.

seorang kawan sempat berujar “wajar saja tak ada perubahan di wadah ini, toiletnya aja nggak dirawat”. mungkin saja ini sekedar sebuah umpatan. namun ia bisa menjadi sebuah kritik untuk sebuah perubahan. sebuah wadah belajar dengan toilet yang tak terawat, sepertinya menjadi cerminan keterpurukan pendidikan yang dilakukan.

sementara, seorang kawan lainnya berujar “di sebuah kampung, toiletnya merupakan terpanjang di dunia, karena setiap selokan adalah toilet. selokan, bukan sungai”. ia juga mengungkapkan tentang kenyamanan untuk membuang hajat hidup orang banyak hanya dengan menutupi wajah, dengan sarung, sementara bagian bawah tetap bebas menikmati alam.

seribu. rupiah yang harus dikeluarkan saat menggunakan ruang kecil. lebih mahal dibandingkan sebuah kamar kost. dalam satu hari sudah mampu menyewa kamar di hotel. inilah sebuah bisnis toilet yang selama ini semakin berkembang dan akan terus berkembang, karena konsumennya tak akan pernah usai. hanya bermodal sikat dan cairan pembersih, rupiah pun mengalir deras.

toilet menjadi sebuah cerminan atas kondisi sekitarnya. tak terawatnya toilet menggambarkan tak terawatnya lingkungan sekitar. toilet menjadi sebuah etalase yang letaknya tak pernah di depan. toilet wajah kita !

Konservasi, Pariwisata dan Hak Hidup Rakyat di Sumber Klampok

01. 27. 2008 - 905 dilihat

Sumber Klampok, sebuah kampung di kecamatan Grogkak, Buleleng - Bali, merupakan sebuah kampung yang terbentuk sejak tahun 1922, sejak Belanda membawa 40 KK pekerja dari Madura dan Jawa untuk perkebunan kelapa di pantai Utara Pulau Bali. Dalam perjalanannya kepemilikan perusahaan beralih ke perusahaan China, hingga kemudian menjadi perusahaan yang dimiliki oleh tentara. Sumber Klampok, awalnya bernama Kedebung Bunyuk, yang diambil dari nama tanaman sejenis pandan yang digunakan untuk rumah, kemudian berganti nama setelah fase krisis air di kawasan, hingga kemudian ditemukan sumber air di bawah pohon Klampok, sejenis jambu-jambuan.

Sumber Klampok saat ini bagaikan menyimpan bara dalam sekam. Rakyat di kawasan hampir seluas 600 hektar masih berada dalam kebingungan. Pengakuan oleh pemerintah terhadap keberadaan komunitas yang saat ini terdiri dari etnis Madura, Bali Nusa dan berbagai etnis lainnya ini, masih belum diberikan oleh Pemerintah. Keberadaan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) menjadi sebuah pemicu tidak pernah diakuinya keberadaan rakyat di kawasan tersebut.

Kedatangan etnis Bali Nusa di kawasan Sumber Klampok diawali saat perkebunan Belanda memberikan hak kepada pekerja perkebunan Belanda untuk mengelola lahan di sela-sela perkebunan kelapa. Ditambah dengan saat terjadinya letusan Gunung Agung, yang mengakibatkan semakin berkembang jumlah komunitas di kawasan Sumber Klampok. Namun di awal dikeluarkannya keputusan pembentukan TNBB melalui SK Menteri Pertanian No. 169/Kpts/Um/3/1978 pada tanggal 10 Maret 1978 sebagai kawasan Suaka Marga Satwa Bali Barat, menjadikan masyarakat dipaksa untuk meninggalkan kawasan.

Perjalanan panjang ketetapan kawasan tersebut sebagai kawasan yang dilindungi, diawali dengan ditemukannya Jalak Bali saat seorang biologiawan dari Jerman, Dr. Baron Stressman, yang terpaksa mendarat karena kapal Ekspedisi Maluku II, menemukan sekumpulan Jalak Bali. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dr. Baron Viktor von Plesen yang melakukan observasi lebih lanjut. Dewan Raja-Raja di Bali kemudian menetapkan menetapkan kawasan hutan Banyuwedang dengan luas 19.365,6 Ha sebagai Taman Pelindung Alam / Natuur Park melalui SK Dewan Raja-Raja di Bali No.E/1/4/5/47 tanggal 13 Agustus

1947.

Sebuah niat yang ingin dicapai oleh pemerintah berkaitan dengan menjaga keberadaan Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) di alam melalui penetapan sebagai kawasan taman nasional, ternyata justru bertolak belakang dengan kenyataan saat ini. Beberapa rakyat dari Sumber Klampok mengatakan bahwa setelah keberadaan taman nasional, justru populasi Jalak Bali berkurang secara drastis. Bahkan beberapa warga bersaksi bahwa petugas taman nasional merupakan bagian dari perdagangan ilegal Jalak Bali. Hingga saat ini Jalak Bali hanya dapat disaksikan pada pusat penangkaran yang dikelola oleh Balai Taman Nasional dan pada sebuah resort wisata yang dikelola oleh PT Trimbawan Swastama Sejati, yang memperoleh Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) untuk mengelola kawasan seluas 284 hektar selama 30 tahun sejak tahun 1998.

Rakyat di Sumber Klampok pernah dipaksa untuk bertransmigrasi, baik secara lokal di Pulau Bali, maupun untuk bertransmigrasi ke Sulawesi. Beberapa warga bahkan telah bertransmigrasi secara terpaksa ke Sumatera dan Sulawesi, dimana setelah mereka bertransmigrasi, lahan-lahan yang mereka tinggalkan dikuasai oleh seorang pejabat desa, yang kemudian mempekerjakan orang lain di lahan tersebut. Ketika warga tersebut kembali ke Sumber Klampok karena gagal untuk bertahan hidup di tempat transmigrasi, mereka terpaksa menjadi buruh tani dengan meminjam lahan warga yang masih bertahan di Sumber Klampok.

Kegelisahan warga Sumber Klampok semakin menjadi, pada saat akhir tahun 1991, terjadi pertemuan antara DPRD, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Bali, yang kemudian memutuskan bahwa warga Sumber Klampok harus segera meninggalkan desanya. Warga yang menolak kemudian mencoba bertahan. Saat sudah didatangkan alat berat untuk melakukan penggusuran, warga desa kemudian melakukan perlawanan, yang diikuti dengan perlawanan dari kelompok perempuan, yang menjadikan warga tetap dapat bertahan di tempat berkehidupannya. Stigmatisasi terhadap organisasi yang dianggap terlarang pun diberlakukan bagi kelompok warga yang melakukan perlawanan.

Warga Sumber Klampok kemudian juga melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kawasannya, hingga mereka melakukan desakan pada pemerintah pusat, yang dianggap paling berkewenangan terhadap keberadaan mereka. Perjuangan rakyat membuahkan hasil dengan tidak terjadinya pengusiran terhadap warga di Sumber Klampok.

Namun permasalahan bagi warga Sumber Klampok tidak berhenti pada permasalahan tidak diakuiinya keberadaan mereka oleh Pemerintah, walaupun telah ditetapkannya Sumber Klampok sebagai desa definitif. Kelompok nelayan Sumber Klampok, saat ini harus tersingkirkan secara perlahan, setelah diijinkannya PT Disti Kumala Bahari untuk melakukan pengelolaan kerang mutiara, yang menjadikan kawasan tangkapan nelayan semakin menyempit. Satu persatu nelayan harus beralih profesi, karena tak mampu menangkap ikan di tempat yang lebih jauh.

Pertarungan lain yang lebih besar adalah keberadaan Pulau Menjangan yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Dengan diberikannya ijin pengusahaan wisata alam kepada PT Trimbawan Swastama Sejati, PT Disthi Kumala Bahari, dan PT Shorea Barito Wisata oleh Departemen Kehutanan sejak tahun 1997, menghadirkan ketidakadilan bagi warga Sumber Klampok. Warga melalui Desa Adat kemudian melakukan perjuangan untuk memperoleh hak pengusahaan wisata, yang setelah melalui perjuangan panjang di tahun 1999, akhirnya diberikan kewenangan untuk mengelola Pelabuhan Lalolongan dan usaha transportasi menuju Pulau Menjangan. Pulau Menjangan pun memiliki sejarah yang memiliki nilai tinggi, terutama berkaitan dengan dibangunnya pura besar di Pulau Menjangan.

Keberadaan wisata yang dikelola oleh pengusaha dari Jakarta tersebut, kemudian selalu dianalogikan sebagai ekowisata. Padahal secara tegas World Tourism Organization-United Nation Environment Programme (WTO-UNEP) dalam kertas konsepnya saat menyambut Tahun Ekowisata Internasional 2002, menjelaskan bahwa batasan karakter ekowisata, di antaranya, yaitu segala kegiatan wisata yang berbasis alam, ada unsur pendidikan, komunitas setempat sebagai pengelola dan pemilik, dan mendukung kegiatan perlindungan alam dengan mengurangi efek negatif terhadap alam dan lingkungan sosial dari kegiatan pengembangan. Artinya pengusahaan wisata oleh perusahaan di kawasan TNBB tersebut bukanlah termasuk ke dalam ekowisata.

Lembaga Konservasi Internasional sendiri pernah hadir di kawasan TNBB, namun entah dimana saat ini keberadaannya. Yang tersisa hanyalah papan informasi yang tak lagi terawat, dan speedboat yang pengelolaannya diserahkan pada Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pariwisata (FKMPP) Sumber Klampok. Kehadiran lembaga konservasi inipun sangatlah tidak jelas dalam memberikan sebuah ketenangan bagi warga Sumber Klampok.

Pariwisata yang menjadi icon bagi Bali, telah menjadi sebuah hal yang berbeda bila dilihat dari Sumber Klampok. Apalagi tahun 2008 Pemerintah Indonesia menyatakan sebagai tahun kunjungan wisata.

Pariwisata di Bali tak berarti sebuah hal yang memberikan sebuah manfaat sangat dalam bagi Sumber Klampok. Kegelisahan warga Klampok masih akan terus berlangsung. Apalagi Bupati yang baru saja terpilih di Kabupaten Buleleng, belum jua mewujudkan janjinya untuk memberikan kepastian kepemilikan lahan bagi rakyat di Sumber Klampok.

Keberadaan hak hidup bagi rakyat Sumber Klampok bisa menjadikan sebuah hal yang akan tetap menghadirkan api dalam sekam yang suatu saat akan kembali membakar. Konflik secara vertikal dan horisontal akan mungkin terjadi bilamana pemerintah tidak memenuhi hak atas tanah bagi warga Sumber Klampok. Tak ada pilihan lain bagi pemerintah selain memberikan ketenangan bagi rakyat Sumber Klampok melalui pengakuan terhadap kepemilikan lahan.

Konservasi yang menggurita menjadi bisnis pariwisata menjadikan seolah-oleh negeri ini sangat peduli dengan kepentingan dunia, namun sejatinya telah menghilangkan keberadaan komunitas lokal. Konservasi yang bergulat dengan bisnisnya pun telah menjadi sebuah ancaman baru bagi kehidupan anak negeri. Masa datang negeri ini akan terhancurkan bila pemerintah tidak merubah mahzab konservasi yang digunakan saat ini. Layaknya masa datang negeri ini harus dikelola secara berdaulat oleh rakyat.

Hidup Berdampingan Dengan Nuklir: GILA !

12. 28. 2007 - 1,129 dilihat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mungkin semakin tidak waras. Setelah gagal membangun sejuta hektar perkebunan besar kelapa sawit, saat ini kembali menggulirkan wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Alasannya bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan Gubernur se Kalimantan yang katanya tertuang dalam surat nomor 050/02/IV/Sekberkal tanggal 21 November 2005, juga menjadi sebuah pertanyaan sederhana akan keberpihakan para Gubernur se Kalimantan terhadap rakyatnya. Apalagi bila mengatakan bahwa ini telah tertuang dalam RPJP Kaltim, dimana dokumen tersebut juga belum pernah disosialisasikan kepada publik.

Membangun sebuah PLTN pada sebuah kondisi bangsa yang hari ini sedang krisis energi, selalu dipandang sebagai sebuah kebutuhan. Namun senyatanya, rencana ini akan menghadirkan ancaman kehidupan bagi rakyat Kalimantan, utamanya rakyat di Kaltim. Lokasi pembangunan di Babulu Laut-Penajam Paser Utara seluas 1.785 hektar, Tanjung Saban-Prapat seluas 3.000 hetar dan Kariangau Utara-Balikpapan merupakan lokasi yang tinggi resiko, bila rencana pembangunan PLTN diteruskan.

Bila mengutip pendapat Fahmi Mahfuyana, yang katanya pengamat nuklir, bahwa ada permasalahan sampah radioaktif dan bencana kebocoran reaktor yang dapat terjadi. Sehingga sebenarnya Pemprov Kaltim harus lebih cerdas untuk menterjemahkan kebutuhan energi listrik Kalimantan dan bukan dengan cepat memutuskan untuk membangun PLTN. Entah setan dari mana lagi yang sedang menghinggapinya aparat Pemprov Kaltim sehingga mempunyai ide bodoh tersebut.

Bisnis Byar-Pet Berkelanjutan

Kondisi krisis energi listrik yang terjadi saat ini di berbagai tempat di Kaltim, hanyalah sebuah permainan bisnis, agar kemudian pelaku bisnis listrik memperoleh dukungan publik untuk memperoleh lebih banyak investasi baru dan ruang-ruang baru yang dapat dikembangkan. Berlanjutnya krisis ini juga tidak lepas dari kesengajaan pelaku bisnis listrik untuk menjadikan kegelisahaan di tingkat publik.

Bila ditinjau dari ketersediaan bahan baku listrik, Kaltim merupakan penghasil gas alam, minyak bumi dan batu bara yang besar di

Indonesia. Sebagian besar ekspor yang dilakukan dari sektor pertambangan berasal dari provinsi ini. Namun dikarenakan tidak adanya niat baik untuk menyediakan listrik yang memadai bagi rakyat Kaltim, kondisi tersebut sengaja dibiarkan.

Bahkan bila dikatakan krisis energi listrik ini dikarenakan tidak adanya dana untuk perbaikan dan pengembangan pembangkit listrik, senyatanya telah demikian banyak aliran dana dari APBD Kaltim untuk pengembangan energi listrik. Kepentingan perusahaan listrik yang saat ini hanya dikuasai negara juga menjadikan krisis listrik sebagai sebuah komoditi bisnis. Padang sederhana dalam melihat permasalahan krisis energi ini pula yang sebenarnya menunjukkan bahwa krisis listrik sepanjang tahun ini hanyalah sebuah ketidakmampuan perusahaan listrik untuk menjalankan bisnis listrik dengan baik.

Energi Terbaharukan Yang Terlupakan

Indonesia merupakan negeri yang kaya sumberdaya energi. Indonesia memiliki potensi energi angin yang memiliki kecepatan 3-5 m/detik, namun baru mampu menjadi energi 0,5 MW, potensi energi matahari dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/meter persegi, potensi tenaga air yang diperkirakan sekitar 75.000 MW yang tersebar di 1.315 lokasi, potensi energi panas bumi 19.658 MW yang tersebar di 70 lokasi, serta energi gelombang laut yang mampu menghasilkan energi 20-70 kW/m.

Hingga saat ini, pengembangan energi listrik hanya difokuskan pada penyediaan energi listrik skala besar, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan adalah pembangunan pembangkit listrik skala besar. Padahal bila dilakukan upaya pengembangan pembangkit listrik skala kecil, di tingkat kecamatan misalnya, maka energi terbaharukan akan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kelebihan lain dari pemanfaatan energi terbaharukan adalah terbangunnya sebuah persatuan dan kesatuan rakyat dalam pengelolaan bersama wilayahnya, serta meningkatnya perekonomian rakyat, sehingga apa yang menjadi mandat pendirian negeri ini, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujudkan. Bilamana aparat pelayan publik tidak melakukan hal-hal tersebut, maka menunjukkan bahwa aparat pelayan publik tidak menjalankan mandat negara.

Nuklir Bukan Pilihan Tepat

Bila sebagian besar pengamat nuklir mengatakan bahwa PLTN

merupakan solusi yang tepat bagi penyediaan energi listrik di masa datang, maka dapat dikatakan bahwa pengamat nuklir tersebut sedang menggunakan kaca mata kuda. Pengamat nuklir yang cerdas adalah yang mampu melihat lebih lengkap berkaitan dengan dampak yang akan terjadi dengan pembangunan PLTN, baik dampak positif dan negatifnya.

Para praktisi energi nuklir juga terkadang melupakan kondisi geologis dan topografis sebuah kawasan dalam memberikan rekomendasi pembangunan PLTN. Terikatnya konsultan energi nuklir dengan pemberi dana, menjadikan rekomendasi yang diberikan sangat jauh dari obyektifitas. Sebuah hal yang tidak dapat diberikan permakluman, karena sangat menyangkut hajat hidup orang banyak.

Bila berkaca dengan Jepang, sebagai negara yang telah mengembangkan PLTN, maka kita akan menyaksikan kebingungan Jepang untuk membuang sampah radioaktifnya. Belum lagi kegelisahan Jepang saat intensitas gempa semakin kerap terjadi. Melihat kondisi Kalimantan, dimana struktur geologi dan tanahnya yang sangat labil, menjadikan pembangunan PLTN menjadi sebuah ancaman baru bagi kehidupan rakyat Kalimantan.

Katakan TIDAK Pada PLTN!

Negeri ini bukan milik sekelompok kepentingan. Wilayah negeri ini berdaulat atas kepentingan bersama rakyat. Kekuasaan dan kedaulatan kekayaan alam negeri adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah ataupun kelompok pemodal. Sudah saatnya rakyat negeri ini mengambil kembali kedaulatan yang telah dirampas oleh Pemerintah. Pemerintah harusnya berposisi sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai penindas rakyat.

Rakyat harus menjadi lebih kritis terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemerintah, apalagi menyangkut hajat hidup rakyat. Rakyat harus lebih berani untuk menyuarakan kebenaran, dengan melihat kepentingan jangka panjang kehidupan anak negeri ini. Sudah cukup pengebirian kedaulatan rakyat yang telah dilakukan rezim hingga hari ini.

Berkaitan dengan rencana pembangunan PLTN di tanah Kalimantan, maka sudah saatnya rakyat secara bersama mengatakan TIDAK pada PLTN. Berpikirlah bagi generasi mendatang tanah Kalimantan yang akan semakin tidak damai hidupnya, karena selalu khawatir dengan ancaman bencana di sekitarnya. Bencana ekologi saat ini telah mengancam kehidupan, ditambah dengan bencana nuklir, akan menjadikan kedamaian hilang dari tanah Kalimantan. Katakan TIDAK pada PLTN!

Situs Berbasis Komunitas

12. 20. 2007 - 764 dilihat

Banyak orang yang terperangah ketika mengetahui angka yang disajikan untuk pengembangan sebuah situs promosi pariwisata Indonesia yang bernilai Rp 17,5 miliar untuk program tiga tahun. Mungkin sama terperanjatnya banyak orang ketika sebuah kabupaten di Sumatera yang membuat sebuah situs berbasis program tak berbayar dengan nilai Rp 2 miliar. Sebuah perguruan tinggi di Kaltim juga pernah memiliki proyek bernilai Rp 2 miliar untuk pembangunan jejaring internet, yang kemudian tidak ada keberlanjutannya. Bagi kalangan pegiat teknologi informasi, angka tersebut merupakan angka yang sangat luar biasa besar, dan harusnya mampu menjadi sebuah untaian pengetahuan raksasa bagi negeri ini.

Dalam sebuah pertemuan yang menghadirkan pembicara Onno W Purbo di Samarinda, pernah ditanyakan, apa yang akan dilakukan oleh seorang Onno ketika memiliki uang Rp 2 miliar untuk sebuah pengembangan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)? Beliau menjawab dengan singkat, “menerbitkan lebih banyak buku”. Buku pengetahuan berkaitan TIK, termasuk bagaimana pengembangan jejaring informasi berbiaya murah.

Bagi kalangan pemerintah, mungkin sebuah nilai proyek yang miliaran rupiah tersebut masih merupakan angka yang sangat kecil. Walau kemudian masih terlampau kecil anggaran negara yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat, utamanya sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah mungkin perlu kembali mempertimbangkan sebuah pengembangan TIK yang lebih murah, termasuk untuk sebuah promosi kewisataan tanah air ini.

Kondisi TIK yang berkembang sangat cepat tak akan mampu terkejar oleh sebuah skema pengembangan yang berjalan lamban di negeri ini. Perspektif dan cara pandang yang selalu mengharuskan sistem informasi dikelola dari satu titik, takkan mampu menjadi sebuah jawaban terhadap perubahan yang terus terjadi. Pemerintah, atau lebih tepatnya pelayan publik, harus kembali mereposisi dirinya dalam ruang yang tepat, termasuk dalam hal pengembangan TIK di negeri ini.

Sebuah situs yang mempromosikan wisata di negeri ini telah begitu banyak bertebaran. Sebagian besar dibangun secara individu oleh publik negeri, sebagian kecil dibangun oleh kelompok pebisnis, serta sangat kecil sekali yang dibangun oleh pelayan publik. Dari kondisi

tersebut, pelayan publik harusnya mampu menjadi fasilitator yang baik, dengan tidak mengucurkan anggaran yang berlimpah hanya untuk pengembangan sebuah situs wisata, namun lebih pada pengembangan sebuah layanan interaktif, yang menyediakan ruang bagi publik untuk mengisi konten dalam situs, sehingga kemudian anggaran yang dikeluarkan negara hanyalah pada kepastian adanya jaringan internet, kemampuan tempat situs dalam terus hidup, serta sekelompok kecil orang yang cepat tanggap menghadapi “peperangan” di dunia maya.

Kalangan pegiat TI saat ini telah sangat maju dalam mengembangkan web 2.0, dimana sebuah situs menjadi sebuah ruang interaktif yang antara publik yang melakukan kunjungan di situs tersebut. Banyak sekali konten-konten yang dikembangkan oleh para penulis dari publik. Sebuah situs, kemudian dapat memberikan ruang tersebut pada sebuah titik, hingga memudahkan bagi pengunjung baru untuk dapat melakukan pelacakan cepat terhadap informasi yang dibutuhkannya.

Para penulis weblog (blog) pun hingga saat ini tak sekedar menjadi seorang penulis buku harian semata. Jurnalisme publik mulai terbangun oleh para penulis blog. Di masa datang, arus informasi tak akan lagi mampu dibendung oleh sebuah regulasi sekalipun, karena kemudian teknologi yang dimiliki oleh setiap orang di belahan dunia semakin mudah dan memudahkan.

Pelayan publik, tak perlu lagi mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pengembangan sebuah situs, sehingga anggaran dapat dikonsentrasikan pada bagian pengadaan jejaring internet murah bagi publik, penyediaan server yang terbuka, hingga pada fasilitasi pengembangan pengetahuan bagi publik. Anggaran tersebut kemudian juga dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan, utamanya pendidikan dan kesehatan publik.

Situs berbasis komunitas (web 2.0) merupakan sebuah kondisi yang mau tidak mau akan terus berkembang di masa mendatang. Pergerakan informasi dan kebutuhan informasi menjadikannya sebagai sebuah hal yang menemani sarapan di pagi hari. Pelayan publik pun tak akan semakin direpotkan dengan berbagai birokrasi untuk penyerapan aspirasi publik. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terbangun dengan lebih baik dan berbiaya murah.

Situs berbasis komunitas merupakan sebuah jawaban atas sebuah kegelisahan akan proyek-proyek pembangunan website promosi oleh pemerintah yang berbiaya tinggi. Dengan melibatkan publik, negeri ini akan semakin menguat dan pemerintah juga dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi setiap publik di masa mendatang.

Kegenitan Penyelamatan Lingkungan Hidup

12. 20. 2007 - 2,321 dilihat

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi sebuah hal yang menjadi biasa dalam berbagai ruang kehidupan. Mulai dari permasalahan sampah hingga permasalahan bencana ekologi. Berbagai pihak mulai melakukan kegiatan penanaman pohon menjelang berlangsungnya pertemuan para pihak untuk perubahan iklim di awal bulan ini. Usai perhelatan akbar tersebut, semua kemudian menjadi lupa akan arti penting sebuah gerakan lingkungan hidup.

Beberapa pihak, terutama para broker, melihat sebuah peluang bisnis dari hasil pertemuan CoP UNFCCC di Bali tersebut. Skema perdagangan karbon menjadi sebuah isu menarik, yang kemudian coba digulirkan di tingkatan lokal. Sebuah lembaga konservasi internasional, bahkan menggunakan surat bkep Sekretariat Provinsi untuk mengundang berbagai kalangan, hanya sekedar untuk berbicara tentang posisi Kaltim terhadap skema Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD). Padahal, jauh di awal tahun, tak pernah terlontar tentang gagasan isu perubahan iklim di lembaga tersebut.

Permainan Kaum Opportunist Lingkungan

Kelompok-kelompok kepentingan sangat memainkan isu yang hangat saat ini dalam kerangka penguatan kelompok. Bila tidak mengikut pada arah aliran air saat ini, maka bisa terhempas pada batuan jeram yang akan menjadikan banyak orang lupa pada mereka. Kelompok “pebisnis” isu lingkungan sangat memanfaatkan momentum, bahkan dengan menggunakan cara-cara yang tidak etis.

Masih tak mungkin terlupakan, disaat sebuah trend pembentukan lembaga pengelola kawasan mulai didengungkan. Banyak daerah yang berlomba membentuk kelembagaan. Badan Pengelola Teluk Balikpapan, Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, Badan Pengelola Kawasan Lindung Wehea, Badan Pengelola Kawasan Lindung Lesan, yang kemudian lembaga-lembaga tersebut diletakkan pada satu ruang sendiri, dan dipaksa hidup sendiri, disaat baru saja belajar untuk merangkak.

Kaum opportunist lingkungan sangat kental dengan sebuah kegiatan jangka pendek, dengan isu yang hangat. Keikutan pada isu tidak mengarah pada sebuah perbaikan kondisi yang sebenarnya. Kepentingan pemberi uang sangat kental, utamanya kepentingan politik sumberdaya

alam, yang mencoba mengintervensi tata pemerintahan lingkungan hidup di daerah.

Fatamorgana Penyelamatan Lingkungan

Ketika setiap orang telah terbawa arus yang dimainkan oleh kepentingan eksternal wilayah, menjadikan ketidakfokusan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup sesungguhnya. Permainan yang coba dikendalikan oleh lembaga konservasi internasional sangatlah mengajak para pihak di daerah menjadi lupa akan sebuah bangunan pengelolaan lingkungan hidup yang kokoh di daerah.

Rangkaian pertemuan, pelatihan, hingga studi banding, menjadikan agenda utama yang telah menjadi rel pengelolaan lingkungan daerah menjadi sedikit terbelengkalai. Pemerintahan lokal yang punya cara pikir dan cara tindak sendiri menjadi terikut pada arus dan arah gerak yang dimainkan oleh kelompok eksternal.

Upaya penyelamatan lingkungan hidup kemudian hanya menjadi sebuah jargon ataupun tulisan pada sebuah kaos semata. Kerapuhan bangunan kelembagaan lingkungan hidup daerah sangat terlihat, terutama dalam pengetahuan dan kapasitas aparat pengelola lingkungan hidup. Ruh kebersamaan menyelamatkan lingkungan dikooptasi oleh kepentingan yang secara tak sadar melingkupinya.

Kekuatan Kolektif Lokal

Rakyat di wilayah ini sudah saatnya memiliki kekuatan kolektif dalam upaya penyelamatan kehidupan di masa datang. Tidak lagi tergantung pada sebuah kelompok kepentingan yang hanya akan datang sesaat. Pembentukan sebuah kelembagaan di tingkat lokal, harus dilakukan berdasarkan sebuah analisis yang kuat atas kebutuhan kolektif rakyat.

Pemerintahan daerah merupakan pengelola kewilayahan yang menerima mandat dari rakyat untuk memampukan rakyat dalam pengelolaan dan keamanan sumber-sumber kehidupannya. Eksternalitas menjadi sebuah hal yang dapat menjadi tambahan, bilamana memang diperlukan. Sistem pengelolaan lingkungan hidup daerah harus menjadi bangunan yang kuat, yang dibangun berbasiskan kondisi kelokalan dengan membaca gerakan lingkungan skala global.

Tata pemerintahan lingkungan hidup sudah saatnya terbangun dengan sebuah kepemimpinan lingkungan yang tangguh. Kepekaan pemerintah dalam melihat permasalahan lingkungan hidup, bukan lagi berdasarkan asas isu ataupun trend yang dibawa oleh pihak luar. Kelembagaan

pengelolaan lingkungan hidup yang kokoh menjadi sebuah kebutuhan mendasar jangka panjang bagi wilayah ini.

Banyak rakyat negeri ini yang cukup mapan dan cerdas dalam melakukan upaya penyelamatan lingkungan, yang bukan sekedar sebuah kegenitan atas sebuah trend global lingkungan hidup. Ruang-ruang kreasi aspiratif menjadi sebuah hal yang layak dibuka seluas-luasnya. Negeri ini menjadi merdeka karena kekuatan rakyat, dan untuk itu menjadi penting untuk tetap berpegang pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan pihak eksternal yang cenderung hanya akan mengarahkan pemerintah pada jurang kesesatan.

Enam puluh dua tahun Proklamasi dikumandangkan. Rangkaian kata yang bukan semata sebuah puisi pengantar tidur. Kedaulatan negeri ini sangat tergantung pada pemimpin yang berpihak pada rakyat. Kepentingan jangka panjang harus menjadi cara pandang bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi rakyatnya. Tegakkan kepala, bergandangan tangan, bangun kehidupan negeri ini dengan kekuatan mandiri rakyat. Usir segala bentuk penjajahan baru dalam segala bentuknya!

Di Antara Akasia Bukit Soeharto

12. 20. 2007

Pesawat yang aku tumpangi mulai terbang merendah. Pramugari mengumumkan sesaat lagi pesawat akan mendarat. Aku masih mencoba mencermati kalimat demi kalimat dalam majalah Economics yang bercerita tentang bagaimana dunia di tahun 2008. Seminggu sudah aku berada di pulau wisata yang sedang menggelar perhelatan dunia untuk perubahan iklim.

Tak lama, aku sudah berada di ruang kedatangan Sepinggang, Kota Minyak Balikpapan. Sambil menanti tas yang aku bawa tiba di tempat pengambilan bagasi, aku menyaksikan wajah-wajah letih penumpang pesawat, yang harus terlalu lama menunggu di bandara akibat pesawat terlalu terlambat untuk terbang.

Tas hitamku aku tarik dari ban berjalan. Menuju pintu keluar. Para pengemudi taksi dan tukang ojek berbaur dengan para penjemput. Aku berjalan menuju kursi, hingga seseorang menawarkan harga untuk mengantarku ke Samarinda. Aku tahu bahwa ia hanyalah seorang calo untuk kemudian memfasilitasi aku bertemu dengan seorang sopir mobil yang membawaku ke Samarinda. Aku menyetujui harga yang ditawarkan.

Dijaknya aku bertemu dengan sopir mobil itu. Namanya Pak Tiar. Ia mempunyai dua orang anak, yang salah satunya adalah seorang kartunis. Aku melihat Pak Tiar menyerahkan satu lembar dua puluh ribuan kepada calo tadi. Aku berjalan menuju mobil hitam Pak Tiar.

Baru saja keluar dari pintu gerbang bandara, Pak Tiar berteriak kepada sekumpulan orang yang sedang makan bersama di atas rerumputan di luar gerbang. "Hoi.. ngapain lagi". Pak Tiar kemudian berujar padaku, "Mereka biasanya berkelahi. Nggak tahu juga kenapa mereka suka seperti itu. Padahal nggak ada untungnya juga". Aku masih menanggapi dengan dingin. Aku mencoba mengumpulkan nyawaku yang masih setengah setelah penerbangan membosankan karena terlalu lama menunggu dan berbagai komplain kepada manager penerbangan.

"Kamu yang kemarin menjadi pembicara di Panti Asuhan itu kan?"

tanya Pak Tiar

"Yang kapan ya pak?"

"Tentang lingkungan, waktu itu"

"Iya pak"

“Ya, saat itu aku mengantarkan anggotamu”

Aku tersenyum mendengar kata anggota. Bukan bermakna sebagai anggota sebenarnya. Hanya ungkapan bagi orang yang bersama. Pak Tiar mulai bercerita tentang banyak hal. “Istirahat saja, biar besok tidak cape lagi. Besok ada acara lagi kan?” ungkapnya.

Namun matakuku belum juga mau tertutup. Letih badan tak membuatku menjadi terlelap. Pak Tiar memberhentikan mobilnya pada sebuah warung. “Mau beli air mineral dulu, biar nggak haus di jalan” ungkapnya padaku.

Aku pun ikut turun. Membeli sebotol minuman teh dalam botol dan sebotol air mineral. Pak Tiar juga membeli sebotol air mineral.

Kami melanjutkan perjalanan. Pak Tiar menceritakan berbagai hal yang pernah ia lalui. Menjadi sopir bagi banyak orang, mulai dari pekerja perusahaan pupuk terbesar di Kaltim, hingga saat mengantarkan seorang perwira militer.

Pak Tiar bercerita tentang ketakutan negeri ini terhadap Malaysia, tentang kondisi pendidikan, tambang yang lebih merusak dibandingkan dengan illegal logging, hingga pemerintahan yang korup. “Saya tidak pernah mau memilih saat pemilu” ujarnya. “Saat ini para pemimpin tidak ada yang berpihak bagi kepentingan rakyat, semua hanya demi kepentingan partai. Setelah dia menang, pasti harus menyettor untuk partai. Itulah yang bikin mereka harus korupsi”.

Korupsi negeri ini di mata Pak Tiar merupakan sebuah hal yang sistemik. Karena gaji yang tidak memadai, tidak adanya penghargaan yang baik bagi pekerja, hingga kepentingan partai yang menuntut para pemimpin daerah harus menyisihkan uang untuk partai yang mengantarkannya duduk sebagai pemimpin wilayah ataupun anggota DPRD. “Kalo korupsi dikit ya nggak apa-apalah, asal nggak semuanya dikorupsi”, lanjutnya.

Pak Tiar, lelaki berkumis yang kakeknya pernah tinggal di sepanjang pesisir Berau hingga Muara Badak ini terus saja menguraikan banyak cerita. Tentang ketidakbanggaan banyak orang terhadap Bahasa Indonesia, hingga tentang kelapa yang sulit tumbuh di Muara Badak.

Menurutnya, harusnya bangsa ini bangga dengan bahasa Indonesia dan bukan sekedar mempelajari bahasa Indonesia dengan sebuah hal yang rumit, namun lebih pada bagaimana mempraktekkan Bahasa Indonesia dalam keseharian. Banyak buku yang berbahasa asing harusnya diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, agar semakin banyak anak negeri

yang menguasai pengetahuan yang berkembang di luar, bukan dengan memaksa anak Indonesia untuk belajar bahasa asing. “Saya benci betul ketika sekolah memaksakan Bahasa Inggris bagi siswanya, apalagi kalau sekarang, bahasa Mandarin juga dipaksakan. Saya semakin lebih benci”. Bahasa bagi Pak Tiar menunjukkan sebuah keberanian anak negeri. Bukan sekedar alat komunikasi, namun lebih menjadi sebuah posisi tawar kekuatan anak negeri.

Sistem pemilu di negeri ini merupakan hal yang harus diubah juga, menurut Pak Tiar. “Harusnya kita memilih pemimpin yang tidak melalui partai. Supaya setelah dipilih, mereka tidak hanya membela kepentingan partai, tapi lebih membela kepentingan rakyat. Kalau sistemnya sudah begitu, baru saya mau ikut memilih.”

Aku terus mencoba menahan kantuk sambil mendengar kata demi kata yang meluncur dari bibir Pak Tiar. Sesekali aku menyaksikan rombongan truk besar yang menuju selatan. Beberapa kali juga kami berpapasan dengan truk pengangkut tandan buah sawit.

“Sistem pendidikan saat ini tidak jelas. Tahu semuanya tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa”, ungkap Pak Tiar

“Mengapa begitu pak”

“Iya, coba saja liat, tidak pernah ada pengetahuan yang tuntas yang diberikan di sekolah. Matematika-nya, IPA-nya, dan semuanya lah. Memang ada kejuruan, tapi itu malah dianggap tidak membanggakan.”

Pendidikan bagi Pak Tiar merupakan hal penting yang harus segera diubah. Agar rakyat negeri ini tak sekedar tahu, namun harus memiliki keahlian yang utuh dalam satu hal. Pendidikan bukan semata memberikan pengetahuan yang beragam tanpa pendalaman terhadap satu bidang ilmu. Pak Tiar beranggapan menjadi penting agar keahlian yang tuntas dimiliki oleh siswa, sehingga dapat menjadi sangat ahli ketika menyelesaikan pendidikannya.

Kami melalui deretan warung di tengah Bukit Soeharto. Lampu-lampu berwarna putih menerangi jalan. Kawanku pernah menyampaikan bahwa mesin lampu yang digunakan warung tersebut diberikan saat seorang calon bupati berkampanye. Truk-truk besar parkir di tepi jalan.

“Kalau saya, tak terlalu masalah dengan illegal logging. Hutan tak begitu hancur dengan illegal logging. Tapi coba lihat, kalau ada tambang. Nggak ada yang tersisa.” Pak Tiar melanjutkan cakupannya.

Tambang memang sungguh mengoyak permukaan bumi. Hamparan hijau dalam sesaat dapat berganti warna menjadi coklat, menjadi hitam dan

menjadi coklat lagi. Satu setengah juta hektar lahan di Kaltim telah diberikan kepada pengusaha pertambangan, belum termasuk perusahaan yang memperoleh ijin dari pemerintah pusat. Perusahaan perkebunan pun telah memperoleh hampir tiga juta hektar lahan untuk menjadi milik mereka. Aku selalu berucap pada kawan-kawanku yang sedang belajar pertanian, “Tak ada lagi lahan kalian untuk bertani. Hanya setengah juta hektar yang disediakan pemerintah untuk lahan pertanian.”

Seratus lima puluh lima kilometer, dengan beragam celoteh Pak Tiar tentang negeri ini, menjadikan aku semakin yakin bahwa banyak generasi negeri ini yang ingin sebuah perubahan cepat di negeri ini. Menantikan seorang pemimpin yang kharismatik dan berpihak pada rakyat. Kejenuhan telah melanda banyak orang, mulai dari ketidakdisiplinan akan waktu, hingga korupsi yang terstruktur, menjadikan banyak rakyat negeri ini yang semakin lelah dan menjadi pasrah akan masa datang.

Pak Tiar masih punya mimpi. Menyekolahkan seorang anaknya yang kartunis. “Biar tersalurkan bakatnya”, ujarnya. Anaknya hingga sekarang sudah semakin jarang meminta uang jajan. Hasil membuat gambar telah menjadi penghasilan sendiri baginya. Anak Pak Tiar pasti akan jadi seorang penggambar hebat satu waktu nanti, karena Pak Tiar punya semangat kuat untuk mewujudkannya.

Akasia di tepi jalan sepanjang Bukit Soeharto semakin menua, sudah saatnya dipanen. Negeri ini pun telah semakin renta, dengan kepemimpinan yang tak pernah memberikan sebuah asa bagi rakyat. Generasi mudah bangsa ini, saatnya kembali bangkit, sebagaimana tahun 1908. Tahun 2008, akan jadi sebuah tahun kebangkitan bagi generasi muda negeri ini. Yang muda yang memimpin, dan bukan sekedar pemuda yang telah terlalu tua untuk disebut pemuda.

Negeri ini harus bangkit. Anak negeri harus menegakkan pandangannya. Menatap sebuah masa datang yang lebih membahagiakan bagi rakyat. Tidak ada lagi ketakutan yang harus dipelihara. Berpikir, berbuat, mempercepat dan memperluas gerak langkah. Negeri ini tak akan sanggup lagi menunggu. Saatnya perubahan cepat dilakukan!

Hutan Bukan Untuk Kesejahteraan Rakyat

12. 20. 2007 - 618 dilihat

Pertemuan Para Pihak dalam Konvensi Perubahan Iklim baru saja usai. Perhelatan akbar tersebut tidak terlalu banyak memberikan sebuah perubahan nyata yang berarti bagi perbaikan kondisi iklim dunia. Pemanasan global akan semakin cepat meningkatnya. Amerika Serikat, sebagai “raja emisi dunia” menjadi penghambat kesepakatan negara dunia lainnya untuk berbuat yang terbaik bagi bumi.

Kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 20-30% pada tahun 2020 juga tak diperoleh. Skema-skema yang ditawarkan oleh Indonesia melalui skema Reduced Emission from Degradation and Deforestation pun hanya akan dilalui melalui skema sukarela. Amerika Serikat malah menggalang dukungan untuk membuat jalan baru diluar skema yang ditawarkan oleh para pihak konvensi perubahan iklim.

Kelompok organisasi masyarakat sipil Indonesia yang menggabungkan diri dalam Civil Social Forum (CSF) pun memiliki pandangan berbeda di dalam ruang-ruang dikususnya. Kelompok yang sangat dekat dengan pemerintahan memandang CSF harus mendukung delegasi Indonesia yang memperjuangkan skema REDD dalam ruang konferensi. Sementara, kelompok lain memandang terlalu banyak skema yang nantinya akan merugikan Indonesia dan rakyat Indonesia.

Dalam satu kesempatan, setelah terjadi deadlock perundingan skema REDD, kelompok pendukung Delegasi Republik Indonesia (DeRI) bahkan “memanfaatkan” aksi-aksi CSF sebagai sebuah tekanan di luar ruang konferensi. Begitu kuatnya keinginan kelompok yang berharap keuntungan dari skema REDD, maupun skema perdagangan karbon lainnya, menjadi warna tersendiri pada konferensi Bali tersebut.

Mungkin tidak banyak yang akan menyadari dampak dari sebuah kesepakatan yang dibuat oleh DeRI dalam ruang-ruang pertemuan. Publik bisa jadi akan melihat sebuah arah kebaikan dengan skema perdagangan karbon maupun REDD, karena akan ada aliran dana ke negara-negara pemilik hutan. Namun lebih jauh dari itu, ada beragam skenario yang akan menyengsarakan rakyat yang berada di dalam dan sekitar hutan.

Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya, sangat memanfaatkan konferensi untuk memperkuat pundi-pundi penguasaan keuangan dunia. Skema Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang

ditawarkan Bank Dunia, lebih pada menjadi tumpukan utang baru bagi negara-negara pemilik hutan. Keuntungan yang sangat besar akan diraih oleh Bank Dunia. Pernyataan Presiden Bank Dunia, Robert B Zoellick, bahwa deforestasi dan degradasi hutan tropis di Brasil dan Indonesia menyumbang 70-80 persen emisi di negara berkembang atau 20 persen dari emisi gas-gas rumah kaca total, merupakan sebuah tuduhan yang tidak beralasan. Pernyataan tersebut hanyalah untuk melanggengkan proyek utang Bank Dunia melalui skema REDD yang dilakukan bersama-sama dengan lembaga konservasi internasional.

Lembaga konservasi internasional pun sangat jelas mencari remah-remah peluang diantara pertemuan CoP UNFCCC di Bali. Beberapa lembaga yang berlabelkan konservasi melakukan negosiasi dengan para calon pembeli karbon dari berbagai negara. Dari sebuah keinginan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur Papua dan Bupati Malinau, ditangkap sebagai sebuah bisnis karbon yang bisa dijual. Sebuah lembaga konservasi internasional, yang sebelumnya tidak memiliki program perdagangan karbon di Indonesia pun tiba-tiba menyatakan memiliki program perdagangan karbon. Lembaga Konservasi Internasional tersebut juga menggunakan perusahaan perdagangan karbon, yang terkadang diketuai juga oleh ketua Lembaga Konservasi Internasional.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian daerah akan memperoleh keuntungan dari skema perdagangan karbon? Dari berbagai pengalaman sebelumnya terlihat bahwa daerah yang “menjual” karbon dari kawasannya hanya akan memperoleh 10-30% dari angka penjualan karbon, selebihnya akan diambil oleh broker perdagangan karbon maupun lembaga konservasi. Bahkan biaya yang dikeluarkan penjual karbon akan jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diraih, terutama untuk kepentingan memperoleh pengakuan dari pembeli karbon.

Kesejahteraan rakyat yang diharapkan diperoleh dari skema penyelamatan hutan dan dana karbon, pada berbagai pengalaman telah terbukti tidak terwujud. Bahkan sebagian besar rakyat yang berada di dalam dan sekitar hutan, dipaksa untuk menyingkir dari kawasan hutan yang dijual karbonnya, karena dipandang sebagai komponen yang akan mengurangi kuantitas karbon yang dapat diperdagangkan.

Penyingkiran komunitas lokal/ada tersebut menjadikan hutan bukan lagi untuk kesejahteraan rakyat. Hutan dipandang sebagai sebuah komoditi baru yang hanya akan diperuntukkan bagi pendapatan negara ataupun pendapatan daerah. Sementara itu, keuntungan besar hanya akan diraih oleh para perusahaan broker karbon ataupun lembaga

konservasi internasional.

Bila saja ada komitmen kuat dari para pimpinan daerah untuk menyelamatkan hutan, kesejahteraan rakyat akan dapat tercapai dengan baik, dimana peran pemerintah adalah sebagai fasilitator bagi komunitas lokal/adat untuk mengembangkan ekonominya secara mandiri. Akses komunitas lokal/adat terhadap hutan harus tetap dimiliki oleh komunitas tersebut. Skema REDD dan skema perdagangan karbon lainnya hanya akan menghilangkan akses komunitas lokal/adat terhadap hutan tempat berkehidupannya.

Menyelamatkan warga dunia tidak harus dengan menghilangkan sumber kehidupan bagi rakyat di tingkat lokal. Pemerintah dan komponen masyarakat sipil lainnya harus mampu lebih cerdas dan memposisikan diri untuk berpihak pada kepentingan komunitas lokal/adat. Meraih keuntungan diantara penderitaan berkelanjutan rakyat, tak akan menjadikan hidup lebih tenang.

Seriuskah Dunia Mengatasi Perubahan Iklim?

12. 10. 2007

185 negara dari berbagai belahan dunia sedang melakukan pertemuan para pihak negara-negara yang menyetujui kerangka kerja perubahan iklim di Bali. Amerika Serikat, negara yang belum melakukan ratifikasi Protokol Kyoto, yang juga merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia juga hadir dalam pertemuan tersebut. Australia, yang baru saja melakukan ratifikasi Protokol Kyoto, menambah jumlah negara yang menyetujui bekerja bersama untuk penyelamatan bumi dari pemanasan global dan perubahan iklim.

Walaupun tanpa Amerika Serikat, jumlah negara yang menyetujui pemberlakuan Protokol Kyoto telah melebihi jumlah 55% dan juga telah melebihi angka 55% dari jumlah prakiraan emisi yang dihasilkan dari negara-negara di dunia. Kondisi tersebut menjadikan Konvensi untuk mengatasi perubahan iklim telah menjadi hukum internasional, yang harus diakui oleh seluruh negara di permukaan bumi.

Mencermati apa yang terjadi pada tahapan-tahapan pertemuan paska Protokol Kyoto, sangat terlihat kepentingan negara-negara industri sangat kuat diintervensikan terhadap hasil pertemuan. Termasuk dengan pertemuan para pihak yang sedang berlangsung di Bali pada akhir tahun 2007 ini. Skema Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) menjadi sebuah hal baru yang diajukan, sebagai tambahan dari skema yang telah ada sebelumnya, sebagai sebuah jalan untuk mengatasi pemanasan global akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca.

Negara yang terdaftar di Annex 1 Konvensi Perubahan Iklim sebenarnya diwajibkan untuk melakukan aksi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di masing-masing negara sebesar 5,2% dari emisi yang dihasilkan pada tahun 1990. Pada artikel dalam Konvensi Perubahan Iklim juga dimuat alternatif mekanisme untuk mengatasi pemanasan global, yaitu dengan melakukan "perdagangan karbon", dimana negara Annex 1 dapat membeli karbon dari negara yang melakukan aksi reforestasi dan aforestasi ataupun yang melakukan penurunan emisi dengan mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism).

Saat ini, Amerika Serikat juga sedang menggalang negara-negara dunia untuk membangun sebuah skema baru diluar kesepakatan dalam Konvensi Perubahan Iklim. Masih belum tergambar dengan jelas apa

yang akan ditawarkan oleh Amerika Serikat, namun upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan sebuah pengalihan perhatian negara-negara dunia terhadap aksi yang seharusnya dilakukan oleh negara penghasil emisi gas rumah kaca dan tidak inginnya Amerika Serikat melakukan penurunan emisi gas rumah kaca dari negaranya, karena kekhawatiran terjadinya kekacauan terhadap industri dalam negeri mereka.

Kekhawatiran berikutnya dari Amerika Serikat adalah dengan semakin tumbuh pesatnya sektor industri di Asia, terutama di Asia Timur, yang telah menjadi pesaing utama terhadap keberadaan industri di Amerika Serikat dan Eropa. Amerika Serikat juga sangat takut dengan peralihan kekuasaan ekonomi dunia dari belahan utara ke belahan selatan.

Melihat gejala dan kecenderungan yang ada saat ini, maka keseriusan dunia untuk mengatasi pemanasan global akibat perubahan iklim patut dipertanyakan. Bila sebagian besar negara Annex 1 lebih memilih untuk melakukan perdagangan karbon dibandingkan dengan melakukan aksi penurunan emisi di negara masing-masing, maka dapat dipastikan tidak akan pernah terjadi penurunan emisi gas rumah kaca. Kondisi ini juga telah digambarkan dari kondisi saat ini, dimana telah terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer lebih dari 20% bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1990, sebagai sebuah titik dasar perhitungan emisi gas rumah kaca.

Pada skema perdagangan karbon sendiri terdapat beberapa kelemahan, terutama terhadap negara-negara penjual karbon. Negara penjual karbon akan berada pada kondisi yang tidak diuntungkan, dimana biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat emisi karbon (certified emission reduction) yang besarnya bisa mencapai hingga 70% dari harga karbon yang dipedagangkan. Peraih keuntungan terbesar adalah para broker karbon, yang sebagian besar saat ini dikuasai oleh negara-negara Annex 1. Artinya, tidak ada sebuah keadilan dalam kehidupan yang berada dalam satu atmosfer ini.

Dalam pengalaman penerapan skema aforestasi dan reforestasi di Amerika Selatan dan Afrika, ditemukan berbagai dampak yang diperoleh komunitas lokal/adat. Sebagian besar lahan-lahan berkehidupan (termasuk lahan adat) bagi komunitas lokal/adat diambil paksa oleh perusahaan yang melakukan skema perdagangan karbon. Proses yang dilakukan pun sebagian besar dilalui dengan persetujuan yang tidak menganut prinsip persetujuan tanpa paksaan, diutamakan dan diinformasikan. Terjadi distorsi terhadap informasi yang diterima oleh komunitas lokal/adat.

Ketidakadilan lainnya dalam proses perdagangan karbon adalah para pihak yang menjual karbon, tidak memperoleh harga yang sebenarnya, karena sebagian besar perdagangan dilakukan oleh para broker. Dalam kasus rencana Pemerintah Kabupaten Malinau yang akan memperdagangkan karbon untuk skema REDD pada kawasan hutan lindung seluas 325.041,6 hektar melalui PT Global Eco Rescue yang dibantu oleh Borneo Tropical Rainforest Foundation misalnya, harga yang diberikan untuk setiap tahun dalam setiap hektar luasan hanyalah satu dolar. Padahal harga untuk setiap hektar luasan dalam setiap tahun dapat mencapai 20-30 dolar. Artinya terjadi pengambilan keuntungan yang sangat besar oleh pihak perusahaan yang memperdagangkan karbon.

Upaya penyelamatan kehidupan dunia dari pemanasan global akibat perubahan iklim dapat dilakukan bila seluruh negara, termasuk Amerika Serikat memang memiliki niat untuk memperpanjang proses kehidupan di permukaan bumi. Tak akan pernah ada kehidupan yang berlangsung lebih nyaman selain di bumi. Dan bila ingin tetap memperoleh kehidupan berkelanjutan, maka saatnya negara Annex 1 melakukan aksi nyata dengan melakukan penurunan emisi gas rumah kaca dari industri, dan tidak melalui skema perdagangan karbon, implementasi bersama ataupun mekanisme pembangunan bersih. Bagi negara non-Annex 1, saatnya untuk mengadopsi sistem kelola komunitas lokal, yang telah terbukti mampu menciptakan iklim mikro yang lebih baik dan ramah terhadap ekologi, serta menopang perekonomian rakyat.

Pemanasan Global dan Obral Karbon

12. 5. 2007 - 4,589 dilihat

Pertemuan para pihak UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) di Bali pada tanggal 3-14 Desember 2007 menjadi perhatian banyak pihak di belahan dunia. Hajatan yang menghabiskan dana Rp 115 miliar dan US\$ 3 juta tersebut dihadiri oleh hampir 10 ribu orang dari 185 negara.

Pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim telah menyedot perhatian dunia. Kenaikan suhu udara yang kemudian menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan manusia di muka bumi telah menjadi keresahan banyak pihak. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) menyebutkan bahwa bila tidak dilakukan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca maka 75-250 juta penduduk di Afrika akan menghadapi krisis air di tahun 2020. Kelaparan yang meluas akan terjadi di Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Indonesia pun akan menghadapi kehilangan sekitar dua ribu pulau kecil akibat kenaikan permukaan air laut. Bencana banjir dan kekeringan menjadi ancaman.

Perjalanan Protokol Kyoto

Protokol Kyoto merupakan sebuah kesepakatan yang merupakan kelanjutan dari berbagai kesepakatan penyelamatan bumi, telah menjadi sebuah titik awal upaya mengatasi pemanasan global. Protokol Kyoto telah memperoleh kekuatan hukum internasional sejak 16 Februari 2005, saat Rusia menjadi negara ke-55 yang meratifikasi protokol ini sekaligus memenuhi syarat 55 persen total emisi dari negara maju. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17/2004.

Hingga tahun 2006, 161 negara di dunia yang meratifikasi protokol ini, kecuali Amerika Serikat dan Australia yang menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK). Bersama dengan pertemuan Bali, Australia melakukan ratifikasi protokol tersebut, dan akan menjadi bagian dari protokol pada bulan Maret 2008. Protokol Kyoto mewajibkan sejumlah negara maju yang masuk dalam daftar Annex I untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari perkembangan industri dan aktivitas pembangunan di negaranya.

Dalam tahap pertama, antara tahun 2008 hingga 2012, negara maju itu wajib menurunkan emisi GRK-nya, dan ditargetkan pada akhir 2012

terjadi penurunan emisi hingga 5,2 persen dari tingkat emisi pada tahun 1990. Emil Salim menyatakan Protokol Kyoto telah terbukti gagal menurunkan emisi gas rumah kaca dunia. Hal ini juga diungkapkan oleh IPCC bahwa pada tahun 2004 terjadi kenaikan 20% emisi gas rumah kaca dari emisi pada tahun 1990.

Untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca, Protokol Kyoto dilengkapi dengan mekanisme lentur yang menjadi bagian dari protokol tersebut. Termasuk dalam mekanisme lentur Protokol Kyoto tersebut adalah perdagangan emisi (emission trading), penerapan bersama (joint implementation) dan mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism).

Pertarungan di Bali

Negara-negara pemilik hutan mengajukan opsi baru, yaitu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reduction Emission from Deforestation and Degradation). Pemerintah Indonesia sendiri yakin akan memperoleh dana hingga US\$ 3,75 miliar (Rp 33,75 triliun) per tahun dari negara-negara maju melalui skema REDD tersebut. Dana dari negara maju diperkirakan bisa mencapai US\$ 20-30 miliar per tahun untuk program adaptasi di seluruh dunia, dengan asumsi setiap hektar hutan dalam setiap tahunnya dihargai 10 dollar Amerika.

REDD sendiri tidak membawa dampak secara langsung dan segera, karena pencemaran masih akan terus bergerak naik seiring dengan itu. WALHI menyatakan bahwa skema REDD telah mengecilkan fungsi ekosistem hutan, yakni hanya sebagai penyerap karbondioksida sahaja (carbon sinks). Selain itu, skema REDD juga akan membatasi akses dan partisipasi masyarakat lokal terhadap hutan, setelah hutan berubah menjadi global common goods, serta akan mengaburkan (menyulitkan) proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan kehutanan, mengingat kesanggupan mereka (penjahat kehutanan) memenuhi kewajibannya untuk membayar (willingness to pay) sesuai skema yang ditawarkan REDD

Pertemuan Bali juga memperbincangkan adaptation fund, yaitu pendanaan yang diperuntukkan bagi negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim untuk melakukan kegiatan adaptasi. Dana berasal dari 2% penjualan CER (Certified Emission Reduction) serta sumber-sumber lain yang belum teridentifikasi dengan jelas. Namun hingga kini masih belum ada kesepakatan mengenai lembaga mana yang akan mengelola dana tersebut.

Pertemuan Bali adalah ruang pertarungan negara utara (industri)

dengan negara selatan (berkembang). Negara industri tetap akan memproduksi emisi gas rumah kaca yang menjadi sumber pemanasan global, sementara negara pemilik hutan tropis berada pada posisi ditekan akibat deforestasi yang disebabkan juga oleh negara industri.

Obral Karbon

Sementara pertemuan Bali berlangsung, kelompok-kelompok perantara perdagangan (broker) karbon menantikan hasil dari pertemuan tersebut. Banyaknya dana yang akan bertaburan dalam skema perdagangan karbon, menjadikan para pedagang karbon akan meraup keuntungan yang sangat besar. Presiden Direktur EcoSecurities, Bruce Usher, memperkirakan hingga 2012 permintaan karbon kredit akan mencapai 3,36 miliar ton, sementara sisi penawaran berdasarkan proyek yang terdaftar 2 miliar ton dengan total nilai kredit karbon yang bisa diraup US\$ 250 juta atau setara Rp 23,37 triliun.

Data lain menyebutkan, besaran nilai pasar untuk tahun 2006 bagi perdagangan kredit karbon adalah sekitar US\$ 24 miliar. Nilai yang sangat tidak kecil tersebut diperkirakan akan tumbuh menjadi US\$100 miliar pada tahun 2010. Jepang sendiri telah menyediakan dana lingkungan hidup 690 miliar yen atau sekitar Rp 5,175 triliun untuk menghadapi pemanasan global.

Kabupaten Malinau dan Global Eco Rescue Ltd telah menginisiasi kerjasama proyek perdagangan karbon di areal seluas 325.041,6 hektar, yaitu di 3 hutan lindung di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur, yaitu Pasilan Tabah Hilir Sungai Sembakung, Long Ketrok dan Gunung Laung - Gunung Belayan. Pemkab Malinau akan memasukkan kawasan hutan lindung ke pasar karbon sukarela (voluntary carbon market). Di media, Bupati Malinau, Marthin Billa, menyatakan bahwa melalui perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 8 November 2007 tersebut daerahnya mendapatkan dana penjagaan hutan sebanyak 325.000 Euro atau setara Rp 4,5 miliar per tahun (kurang lebih setara dengan US\$ 1 per hektar setiap tahun). Senyatanya, perdagangan karbon dengan cara tersebut dalam kondisi ideal bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Memang hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum menetapkan harga "jual" karbon. Harga di pasar internasional sangat bervariasi dari US\$ 5-40 setiap ton dan sangat tergantung pada kesepakatan internasional. Kemampuan hutan tanaman menyerap karbon berkisar 24 ton karbon per hektar setiap tahun, hutan alam berpotensi menyerap 200-300 ton karbon per hektar setiap tahun, sementara di India, sebuah kawasan kering dan hutan campuran dapat menyerap karbon 3,4 ton per hektar setiap tahun.

Menurut data Civil Society Organization on Forestry Governance and Climate Change, untuk mendapatkan proyek REDD terdapat biaya operasional yang dibebankan kepada negara pemilik hutan tropis mencapai 30%-40%, artinya hanya 60%-70% dari total dana yang akan diterima negara penerima program tersebut. Bahkan potongan biaya operasional itu bisa mencapai 90%. Contoh saja Kosta Rika yang melakukan mekanisme REDD dengan negara-negara Uni Eropa, hanya memperoleh 10 persen dari total dana karena biaya operasional.

Dari beberapa perhitungan di atas, maka sebenarnya harga yang ditawarkan oleh Global Eco Rescue kepada Pemkab Malinau merupakan harga yang sangat rendah dalam sebuah perhitungan perdagangan karbon. Bila sudah demikian, siapa yang sebenarnya akan diuntungkan dari sebuah perdagangan karbon?

Ancaman Terhadap Kehidupan

Mekanisme perdagangan karbon juga mengancam kehidupan komunitas lokal. Ancaman terhadap masyarakat asli dan petani amat buruk, penghancuran dan hilangnya akses terhadap hutan akan menghancurkan penghidupan mereka. Forum Internasional Masyarakat Asli yang Pertama (The First International Forum Of Indigenous Peoples on Climate Change) menyatakan sinks (penyerapan) dalam mekanisme CDM akan mengandung strategi skala dunia dalam rangka pengambilalihan tanah-tanah. Pengusiran masyarakat oleh tentara atas nama perdagangan karbon, sudah terjadi di Uganda.

Konflik horisontal juga kemungkinan akan terjadi beriringan dengan dilakukannya skema perdagangan karbon. Selain juga akan semakin banyak penguasaan lahan oleh kelompok tertentu, yang akan semakin mengurangi luasan kawasan produktif komunitas lokal. Sementara itu, skema perdagangan karbon tak akan menjadi jawaban terhadap pemanasan global. Negara industri tetap saja akan menghasilkan emisi gas rumah kaca dengan sangat tinggi ke atmosfer yang pada gilirannya akan menghadirkan bencana ekologi dan semakin meluasnya penyebaran penyakit.

Pemanasan global harus dihadapi bukan semata dengan memuluskan mekanisme perdagangan karbon. Negara-negara industri harus ditekan untuk melakukan penurunan emisi dari industri di negara mereka. Bukan dengan melakukan perdagangan karbon dan hanya menyalahkan negara pemilik hutan tropis yang tersisa. Ancaman terhadap kehidupan akibat pemanasan global dapat diatasi bila negara-negara industri bersikap lebih adil terhadap proses berkehidupan.

Fatamorgana Penyelamatan Bumi

12. 2. 2007 - 977 dilihat

79 juta pohon sedang ditanam di berbagai wilayah di Indonesia, 10 juta pohon diantaranya ditanam oleh organisasi perempuan. Gerakan menanam telah menjadi sebuah trend baru dalam upaya mengangkat popularitas di mata publik. Padahal sejak tahun 2001, Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi (DAK-DR) telah dikururkan pemerintah untuk upaya rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis. Dua tahun berikutnya Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH) dicetuskan, dengan target menghijaukan 3 juta hektar lahan kritis dengan biaya triliunan rupiah.

Sebuah fenomena yang menarik menjelang berlangsungnya pertemuan para negara pihak (CoP) untuk isu perubahan iklim (climate change) di Bali pada tanggal 3-14 Desember 2007. Lebih dari 8.000 orang akan berkumpul di Bali guna membahas agenda dunia untuk menurunkan pemanasan global (global warming) dengan berbagai kepentingan yang dibawa. Walau juga, Presiden Amerika Serikat, sebagai negara yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, baru saja menyatakan bahwa AS tidak akan meratifikasi Protokol Kyoto, yang merupakan perjanjian internasional untuk mengatasi perubahan iklim.

Konversi Hutan Berkelanjutan

Diantara gerakan menanam yang dilakukan dan dilakukan oleh Presiden RI beserta para menteri, dengan dukungan dari pelaku usaha, terdapat sebuah fenomena berbeda. Saat ini, proses-proses pengalihan fungsi (konversi) hutan menjadi bentuk lainnya semakin kerap terjadi. Dari tahun ke tahun, luasan hutan alam Indonesia terus berkurang cepat. Hutan tanaman pun tak pernah bertambah secara nyata.

Proses pengurangan keberadaan hutan yang terjadi sebagian besar menjadi perkebunan besar, pertambangan, hutan tanaman, pusat industri dan perumahan mewah. Begitu mudah perijinan dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten-kota. Sejak ditetapkannya kewenangan pemerintah daerah yang lebih, saat itu pulalah perijinan perubahan fungsi hutan semakin royal diberikan.

Di Kaltim, terdapat 4,3 juta hektar lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan dan 2,1 juta hektar lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan. Laju pengurangan kawasan hutan mencapai 350 ribu

hektar setiap tahunnya. Tidak kurang dari 2,5 juta hektar telah diberikan bagi perkebunan besar kelapa sawit, dimana baru seluas 187 ribu hektar yang berproduksi. Tidak kurang dari 1,59 juta hektar yang ijinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah bagi 509 perusahaan, belum termasuk perijinan PKP2B yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 8,1 juta hektar bagi perusahaan hutan (6,4 juta hektar HPH (88 perusahaan) dan 1,7 juta hektar HTI (25 perusahaan).

Begitu luasnya lahan yang dialihfungsikan oleh pemerintah, hingga kemudian lahan-lahan perladangan, pertanian dan perikanan semakin menyempit. Di tahun 2005, hanya sekitar 141 ribu hektar lahan pertanian yang melakukan pemanenan. Hingga kemudian tidak lagi menjadi pertanyaan mengapa kebutuhan beras bagi Kaltim perlu dipasok dari luar Kaltim.

Penyelamatan Hutan Jalan di Tempat

Upaya-upaya penyelamatan hutan bukan pula tak ada. Mulai dari proyek bernilai sangat besar untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, hingga penegakkan hukum terhadap pelaku pembalakan haram. Namun dalam pelaksanaannya, masih sering ditemui ketidakseriusan dalam proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.

Dari pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di Kaltim sejak tahun 2001-2004, telah dialokasikan dana 790 miliar rupiah dengan wilayah sasaran tidak lebih dari 90 ribu hektar. Dalam sebuah evaluasi yang dilakukan, tingkat keberhasilan berkisar dari angka 0-60 dalam skala 100. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sebuah prestasi yang membanggakan dalam upaya mengurangi lahan kritis.

Sementara itu, penegakan hukum terhadap pembalakan haram juga harus bekerja lebih keras lagi. Kasus-kasus yang diselesaikan di tingkat hukum hanyalah kasus-kasus kelas 1-4 meter kubik kayu, atau yang pelakunya hanya kelompok masyarakat kecil. Sementara, kasus-kasus peredaran kayu yang merusak hutan skala besar dan dilakukan oleh perusahaan ataupun kelompok pemodal, masih sangat jauh dari jerat hukum. Permainan antara aparat penegak hukum dengan pelaku pembalakan haram sangat ditunjukkan dengan diperiksanya pasukan aparat penegak hukum di perbatasan karena diduga terlibat dalam konspirasi perdagangan kayu haram.

Bencana Ekologi Mengancam Kehidupan

Kejadian-kejadian bencana ekologi semakin kerap terjadi, beringan dengan semakin berkurangnya lahan berhutan. Bila pada dekade

sebelumnya kejadian banjir dapat diprediksi dalam satu rotasi 5-10 tahun sekali, saat ini pun bencana ekologi berupa banjir dapat diprediksi 2-3 kali dalam setahun. Kekeringan yang biasanya terjadi dalam rotasi 6-9 tahun sekali, saat ini diprediksi terjadi dalam kurun waktu 2-3 tahun sekali. Sebuah perubahan yang tidak hanya disebabkan oleh pemanasan global, namun lebih pada hilangnya kawasan berhutan di sebuah wilayah.

Bencana ekologi yang semakin kerap terjadi inipun telah merusak sebuah pola berkehidupan rakyat saat ini. Kemiskinan tidak lagi semata disebabkan oleh proses pengilangan paksa lahan berkehidupan, namun juga akibat hilangnya penyangga kehidupan berupa hutan.

Sungai-sungai, sebagai sumber kehidupan pun semakin banyak yang tercemari. Begitu banyak akumulasi bahan pencemar yang mengalir di sungai-sungai tempat berkehidupan rakyat. Dari erosi hingga limbah kimia ataupun sekedar jatuhnya batubara dari ponton, telah mempengaruhi kualitas air sungai di berbagai wilayah.

Tak Mungkin Hanya Dengan Tanganku

Upaya penyelamatan bumi, tak mungkin bisa dilakukan hanya oleh rakyat. Pemerintah harus juga memiliki sebuah sikap tegas dalam upaya penyelamatan bumi. Sering berlindungnya pemerintah di balik sebuah pembagian lahan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), menjadikan semakin banyak kawasan hutan yang berkurang dan kekritisan lahan semakin meningkat.

Silaunya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan devisa negara, telah menjadikan kebutaan dalam menampung investasi yang masuk. Padahal bila aparat pemerintah lebih cerdas, dukungan pemerintah terhadap hasil hutan non kayu, pertanian dan perikanan, serta perkebunan rakyat akan lebih memberikan efek ekonomi yang lebih nyata, termasuk terhadap peningkatan PAD maupun devisa.

Gerakan menanam mungkin menjadi sebuah kegiatan yang baik. Namun menjadi sebuah fatamorgana bila tidak dibarengi oleh keinginan untuk memberikan ruang lebih luas bagi hutan, maka gerakan menanam yang dilakukan tak akan berarti apa-apa. Pemerintah harus juga menghentikan perijinan baru yang melakukan pembukaan lahan dalam skala besar (lebih dari 100 hektar). Selain juga harus melakukan audit lingkungan hidup terhadap perijinan eksploitatif yang telah diberikan sebelumnya.

<http://alien.adefadli.hijaubiru.org>

Menyelamatkan bumi, menyelamatkan kehidupan makhluk di permukaan bumi, tak mungkin dilakukan hanya dengan tanganku. Saatnya berpikir, bertindak dan berbuat yang baik bagi sesama, dengan memberikan sebuah keadilan kehidupan bagi makhluk yang hidup di permukaan bumi. Bumi, bukan hanya bagi segelintir orang. Bumi bagi semua!

BLOG: Kelahiran Generasi Menulis

11. 16. 2007 - 1,167 dilihat

Mungkin tak banyak yang membayangkan apa yang terjadi hari ini. Begitu cepatnya aliran informasi dapat terjadi dari dan ke belahan dunia yang berbeda. Dalam beberapa detik saja, seseorang yang berada di wilayah selatan dapat mengetahui kejadian di wilayah utara, demikian pula sebaliknya.

Fenomena perkembangan teknologi informasi telah memacu otak untuk dapat bekerja lebih cepat dengan hujan informasi. Pada wilayah yang telah memiliki jejaring maya melalui teknologi informasi dan komunikasi, peran informasi cetak semakin berkurang. Hanya dengan sebuah perangkat telepon selular ataupun komputer yang terhubung internet, segala informasi dapat diperoleh.

Berkembangnya Jejaring Maya

Satu dekade lalu, masih tak banyak yang memperbincangkan informasi di dunia maya. Di saat teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas. Kota Samarinda di Kalimantan Timur saat itu masih sangat memiliki keterbatasan agar warganya dapat mengakses informasi, walau sekedar dari sebuah surat elektronik.

Pertumbuhan yang begitu cepat, telah menjadikan tumbuhnya lebih banyak informasi informal dari warga. Telah begitu banyak peristiwa yang dengan cepat dapat dikomunikasikan dengan wilayah lain negeri ini. Diskusi melalui surat elektronik (mailing list) mulai menjadi sebuah media komunikasi yang penting.

Warung internet pun mulai berkembang. Dari satu-dua hingga saat ini pada sebuah jalan utama di kota dapat ditemui lebih dari tiga warung internet. Walau kemudian di Kota Samarinda tak jua hadir penyedia layanan internet yang baru. Dalam perkembangannya kemudian, di instansi pemerintah dan pendidikan, mulai tersedia jejaring internet yang melayani kalangan mereka.

Pertemuan di Dunia Maya

Interaksi sosial yang ada saat ini telah melalui tahapan metamorfosa yang panjang. Mulai dari semakin mudah dan murah layanan selular, yang menjadikan setiap orang telah semakin mudah menjalin komunikasi. Di sisi jaringan internet, dengan tumbuhnya layanan

internet, mulai dari layanan instant, akses data cepat via kabel yang murah, hingga teknologi layanan data melalui telepon seluler, telah menghadirkan sebuah sistem sosial baru bagi warga.

Bila dahulu setiap kali perkenalan selalu dimulai pada pertemuan langsung, lalu kemudian bertanya tentang nomor telepon tetap (fixed line) ataupun nomor telepon seluler. Saat ini perkenalan dimulai dari pertemuan di jejaring maya. Diskusi melalui email (mailing list) ataupun pertautan dalam sebuah jejaring sosial internet (semisal melalui friendster.com ataupun multiply.com) telah mempertemukan warga kota di dunia maya. Bahkan pertemuan juga terjadi dengan penduduk di belahan bumi lainnya.

Dalam pertemuan darat pun tak lagi hanya sekedar bertanya tentang nomor telepon ataupun nomor telepon seluler, namun juga sering diikuti dengan pertanyaan alamat surat elektronik (email) ataupun kontak di jejaring sosial internet.

Fenomena Blog

Dalam dua tahun terakhir, sejak layanan internet semakin tersedia lebih mudah, pertemuan di dunia maya juga didahului dengan penjelajahan pada laman (website) pribadi yang menceritakan pengalaman keseharian (diary) dalam bentuk blog. Pertumbuhan penulis blog di berbagai wilayah negeri ini semakin meningkat pesat, seiring dengan ketersediaan tempat gratis dan semakin mudahnya untuk membuat blog.

Bila pada fase sebelumnya untuk membuat sebuah laman pribadi membutuhkan keahlian untuk menuliskan baris demi baris dengan tag HTML, saat ini tanpa keahlian menulis program pun, seseorang telah dapat membuat laman pribadi. Bahkan pada beberapa telepon seluler telah menyediakan ruang untuk membuat laman pribadi melalui telepon seluler.

Pertumbuhan blog juga semakin cepat seiring dengan ketersediaan akses internet dan ketersediaan layanan gratis yang semakin beragam. Mulai dari layanan blogger.com, wordpress.com hingga yang disediakan di negeri melalui situs-situs komunitas yang disediakan oleh kalangan pebisnis dalam negeri. Hingga saat ini, sebuah pertemuan individu tak lagi hanya menanyakan nomor telepon seluler ataupun email, namun juga menanyakan alamat blog.

Kelahirkan Generasi Menulis

Bila keluhan yang sering kali terungkap terhadap anak negeri ini adalah ketiadaan sebuah dokumentasi tertulis akan sesuatu, maka saat ini begitu banyak dokumentasi yang dilakukan oleh individu-individu terhadap peristiwa di sekitarnya. Blog telah menjadi sebuah media bagi banyak orang sebagai sebuah dokumentasi pribadi dan menuliskan apa yang menjadi pengamatan keseharian terhadap proses berkehidupan yang terjadi.

Blog juga menjadikan lebih banyak penulis di negeri ini. Tak hanya sekedar menuliskan perasaan ataupun pengalaman harian, juga respon terhadap kejadian di sekitar. Blog merupakan media baru generasi negeri untuk menuliskan apa saja, yang pada satu dekade sebelumnya tak pernah terbayangkan akan terwujudkan. Blog, bagi sebagian kecil orang juga telah menjadi sebuah pekerjaan baru, bukan hanya sekedar pelampiasan kesenangan (hobby).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan begitu banyaknya penulis baru di dunia maya. Hal ini juga merupakan sebuah awal dari kelahiran jurnalisme rakyat (citizen journalism), yang akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Etika dan aturan di dunia maya pun berkembang untuk melingkupi pertemuan di dunia maya.

Negeri ini akan semakin kaya dengan begitu banyaknya transkrip yang dihasilkan oleh para penulis blog (blogger). Sebuah sejarah akan dapat tertuliskan dengan lebih baik dengan bersumberkan begitu banyak penulis. Tak juga mengkhawatirkan terjadinya perbedaan dalam sebuah catatan kesejarahan. Sumber yang beragam dari para penulis blog juga akan melatih pembacanya untuk dapat melakukan analisis kritis-obyektif dalam memandang sebuah persoalan kehidupan.

Blog telah hadir sebagai sebuah interaksi sosio-kultur baru, yang merupakan pelengkap interaksi sosio-kultur di dunia nyata. Blog telah melahirkan generasi menulis. Dari Blog akan hadir sebuah sejarah baru di negeri ini. Mulailah nge-blog!

Tuna Wisma di Tanah Kelahiran

11. 4. 2007 - 608 dilihat

Tanggal 5 November telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Tak seperti Hari Lingkungan Hidup dan Hari Bumi, hari tersebut tidak diperingati oleh banyak kalangan. Bahkan lebih cenderung dilupakan oleh kalangan pemerintah yang telah membuat penetapannya.

Puspa dan satwa langka (dan dilindungi) selalu digunakan oleh berbagai pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota sebagai maskot kebanggaan daerah. Untuk acara pekan olahraga nasional (PON) yang akan diselenggarakan di Kaltim tahun depan, juga menggunakan tiga satwa langka sebagai maskot, yaitu orangutan, pesut dan burung enggang (rangkong). Sayangnya penggunaan satwa (maupun puspa) sebagai maskot, tidak diikuti oleh upaya konkrit perlindungan habitat sebagai rumah berkehidupan bagi puspa dan satwa.

Kekayaan Keragaman Hayati Kalimantan

Kalimantan sangat kaya akan keragaman hayati. Kalimantan memiliki lebih dari 3.000 pohon, termasuk 267 jenis Dipterocarpaceae, lebih dari 2.000 jenis angrek dan lebih dari 1.000 jenis pakis, lebih dari 146 jenis rotan, dan pusat distribusi karnivora kantung semar (*Nepenthes* sp). Kalimantan Timur tercatat memiliki 133 jenis mamalia atau merupakan 60 % dari jumlah mamalia yang ada di Kalimantan yang jumlahnya mencapai 22 jenis. 11 jenis primata yang ada Kalimantan dapat ditemui di Kalimantan Timur.

Di Kalimantan tercatat sebanyak 141 jenis katak yang termasuk ke dalam 6 famili, 9 famili bangsa Lacertilia, 7 famili bangsa Chelonia serta 133 jenis ular darat. Sementara dari 7 jenis penyu yang ada di dunia, 2 jenis diantaranya sering ditemukan di Kaltim, yaitu jenis penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*).

Kehadiran keragaman hayati di Kalimantan tersebut didukung oleh keberadaan beragam ekosistem yang saat ini sudah semakin terancam keberadaannya. Setidaknya ada 6 ekosistem yang terancam punah di tanah Kalimantan, yaitu Ekosistem Karst, Ekosistem Hutan Kerangas, Ekosistem Mangrove, Ekosistem Rawa Gambut, Ekosistem Dipterocarp Dataran Rendah dan Ekosistem Hutan Berkabut.

Tuna Wisma Akibat Ekspansi Industri

Begitu banyaknya perijinan bagi industri yang menguasai lahan secara luas, telah menjadikan pupsa dan satwa langka, bahkan endemik Kalimantan, menjadi tuna wisma (kehilangan tempat hidup) di tanah kelahirannya.

Bapedalda Kaltim mencatat terdapat 179 ijin lokasi yang telah diberikan bagi perkebunan besar swasta dengan luas 1.622.887,12 ha, dan 76 ijin usaha perkebunan seluas 690.686,48 ha, serta 34 hak guna usaha (HGU) bagi perkebunan besar swasta dengan luas 373.191,53 ha. Jumlah perusahaan HPH yang tersisa di Kaltim sebanyak 36 perusahaan dengan luas areal 3.857.655 ha dan perusahaan HTI sebanyak 18 perusahaan yang terdiri dari 4 HTI Pulp, 7 HTI Pertukangan dan 7 HTI Transmigrasi dengan total luas areal 779.367 ha.

Di sektor pertambangan, hingga tahun 2006 Dinas Pertambangan Kaltim mencatat terdapat 509 ijin kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten-kota, baik ijin penyelidikan umum, eksplorasi maupun eksploitasi, dengan luasan mencapai 1.598.883,80 ha. Bahkan di Kota Samarinda ijin kuasa pertambangan yang diberikan telah melebihi 30% dari luasan kota Samarinda. Bapedalda Kaltim menyatakan bahwa setidaknya terdapat 130 perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kaltim, di luar pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Begitu banyaknya perijinan yang mengeruk kekayaan alam Kaltim, secara tidak langsung telah menghilangkan rumah kehidupan bagi pupsa dan satwa Kaltim, termasuk pesut, orangutan dan burung enggang. Pada beberapa kawasan, ekosistem kerangas yang merupakan rumah bagi kantong semar, juga harus berganti dengan tanaman kelapa sawit. BPDAS Mahakam-Berau menyebutkan terdapat setidaknya 6.402.472 ha lahan kritis di Kaltim dan Bapedalda Kaltim menyatakan 164.057 ha kawasan mangrove Kaltim telah hilang.

Dalam rencana pembangunan Kaltim, Pemprov Kaltim bahkan menargetkan luasan perkebunan besar kelapa sawit hingga 5,4 juta ha. Ini berarti akan semakin banyak pupsa dan satwa, termasuk yang langka dan endemik Kalimantan, akan kehilangan rumah kehidupan mereka. Hingga wajar saja bila penampungan satwa di pusat rehabilitasi dan reintroduksi tak mampu memberikan kamarnya yang layak karena kelebihan muatan, hingga beberapa ekor orangutan harus mati setiap tahunnya.

Berbuat Baik Bagi Satwa Akan Memberikan Kebaikan Bagi Manusia

Dalam sebuah keseimbangan kehidupan di permukaan bumi, sudah selayaknya manusia memberikan sebuah tempat yang layak bagi makhluk hidup lain untuk dapat berkehidupan dengan lebih baik secara bersama. UNEP, organisasi PBB untuk lingkungan hidup, dalam laporannya yang baru dikeluarkan bulan kemarin menyatakan bahwa manusia telah gagal melakukan pengelolaan kehidupan di permukaan bumi.

Memberikan kehidupan yang lebih baik bagi puspa dan satwa akan berdampak pada kehidupan yang lebih baik bagi manusia di sekitarnya. Permasalahan kemiskinan akan terjawab, serta bencana ekologi tak akan lagi menghantui perasaan masyarakat. Kerusakan rumah bagi puspa dan satwa akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan manusia di masa kini dan masa datang.

Pemerintah sebagai pelayan publik yang menjalankan tata pemerintahan sudah selayaknya mengatur distribusi lahan yang adil bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Penataan ruang dalam bentuk Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi-Kabupaten-Kota, harusnya telah memberikan ruang kehidupan yang layak bagi puspa dan satwa yang menjadi maskot kebanggaan wilayahnya. Termasuk dengan memberikan ruang ekspresi dan berkehidupan yang lebih baik bagi komunitas lokal yang telah menjalin interaksi ekologi dengan alam kehidupan di sekitarnya.

Fungsi pemerintah sebagai pengatur, sudah sewajarnya dilakukan dengan tidak hanya berpihak pada kepentingan investasi yang menguasai kawasan luas bagi kepentingan segelintir kelompok. Pemerintah harus lebih memberikan layanan bagi pengembangan ekonomi rakyat yang berbasiskan pada pengelolaan hasil hutan, perladangan dan pertanian dengan memberikan dukungan berupa sarana transportasi, industri hilir, peningkatan kapasitas manusia dan teknologi, serta pembiayaan kredit berbunga rendah tanpa jaminan.

Sudah sangat sering didengungkan pernyataan “Bumi ini cukup bagi kehidupan seluruh makhluk di atasnya, namun takkan pernah cukup bagi makhluk yang serakah”. BEBSiC memandang sudah saatnya manusia menjadi pemimpin yang baik bagi makhluk lain di permukaan bumi dan pemerintah berkewajiban untuk melahirkan hukum dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama, tak hanya kekayaan bagi kelompok kecil semata.

Di Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tahun ini, akan lebih baik bila kita melakukan refleksi terhadap pola berkehidupan. Apakah telah

sangat baik memberikan ruang hidup bagi makhluk lain atautkah kita telah berbuat buruk bagi sesama dan makhluk lain. Cinta puspa dan satwa juga bukan ditunjukkan dengan memelihara satwa di dalam kandang atau mengambil puspa dari alam. Berikanlah kebebasan bagi puspa dan satwa untuk tetap berkehidupan di alam bebas, sebagaimana manusia memiliki kebebasan berkehidupan.

Menuju Dunia Datar

10. 28. 2007 - 469 dilihat

Pergerakan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah membawa makhluk di permukaan bumi menuju sebuah dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang tak lagi asing dalam sebuah percakapan keseharian, merupakan sebuah hal yang didorongkan oleh negara-negara utara untuk menuju pelepasan batas-batas aktivitas kehidupan dalam batas-batas negara.

Sistem ekonomi dunia yang saat ini sangat dikendalikan oleh kepentingan kapital negara utara, telah menjadikan seolah tak ada lagi batas di antara negara. Di sisi lain, negara-negara selatan yang belum kokoh pondasi perekonomiannya, cenderung tercengkeram oleh kepentingan negara industri.

Sebuah dunia datar tanpa batas, tak akan mampu dicegah. Sebuah sistem baru tatanan kehidupan manusia akan dilahirkan, dari interaksi antar manusia yang saat ini tersekat dalam batasan negara. Namun menjadi penting untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang berkeadilan dan tanpa penindasan, disaat dunia datar terwujudkan.

Sebuah Pintu Perubahan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sebuah pintu menuju dunia datar. Begitu cepatnya perkembangan TIK di dunia industri, telah menggiring sebuah mekanisme sosial manusia saat ini di dunia. Tanpa perlu waktu yang lama, perjumpaan dapat dilakukan. Hanya sebuah nilai (etik) yang menjadi pembatas dalam pengembangan sistem kehidupan yang menggunakan TIK.

Indonesia, sebagai sebuah wilayah yang dianugerahi kelimpahan kekayaan alam, tak akan menerima manfaat apapun, disaat dunia datar terwujud. Kendali ekonomi pasar yang begitu mencengkeram negeri ini, telah menjadikan keping emas sebagai sebuah kuasa atas segalanya. Kekuatan modal dan negara industri telah berupaya menjadi penguasa baru dalam dunia datar. Kekuatan uang hanya akan bisa dipatahkan oleh sebuah solidaritas dari negara-negara selatan yang merupakan negara berlimpa kekayaan alam.

TIK merupakan salah satu hal yang kemudian harus dikuasai oleh generasi Kaltim di masa datang. Wajar saja bila kemudian kelompok pegiat TIK Kaltim bermimpi untuk mendorong kelahiran lembah

silicon (sebuah istilah bagi pusat industri TIK) di sebuah tempat di Kaltim, karena bila India telah mampu melakukan, mengapa negeri ini tak mampu mewujudkannya.

Kekuatan Dunia Maya

Dunia maya, sebuah sebutan bagi interaksi manusia dan mesin dalam sebuah dunia yang tak terwujud melalui TIK, memiliki sebuah kekuatan tersendiri dalam mendorong sebuah perubahan menuju dunia datar yang berkeadilan. Sebagian besar solidaritas antar kelompok masyarakat telah terdorong melalui interaksi di dunia maya. Banyak gagasan yang bermunculan dari uraian ungkapan yang tanpa batas.

Aksi-aksi dunia nyata saat ini telah dengan mudah diketahui oleh belahan dunia lainnya dalam waktu yang tak terlalu lama, bahkan negara pun takkan mampu mengendalikannya, karena TIK merupakan salah satu jalan dunia tanpa batas negara. Komunitas dunia maya pun berkembang dengan sangat cepat, yang bahkan sebuah industri mencoba membangun sebuah kehidupan kedua (second live) di jejaring maya, yang juga melakukan berbagai aktivitas kehidupan, termasuk transaksi ekonomi dan sosial.

Peran dan kekuatan dunia maya telah menunjukkan salah satu posisinya tersendiri dalam kehidupan manusia saat ini. Bila pada masa lalu, harus melakukan lari marathon terlebih dahulu untuk mengabarkan sebuah pesan penting, saat ini hanya dengan sepersekian detik, ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia akan mengetahui sebuah pesan.

Dunia maya, merupakan sebuah kekuatan sosio-kultur baru dalam kehidupan masa datang. Bila saja generasi negeri ini tak mampu membangun kapasitasnya, maka suatu waktu akan menjadi sebuah generasi yang dilupakan dalam berkehidupan di permukaan bumi. Pertarungan akan menjadi lebih keras dan kompetitif, dan hanya kelompok yang kuat yang akan mampu mempertahankan peradabannya di dunia datar.

Pertarungan Gagasan di Dunia Maya

Blog, merupakan sebuah alat untuk menuangkan gagasan dan hasil kerja otak melalui dunia maya. Berjuta blog telah tumbuh dan berkembang di dunia. Lebih dari 150 ribu blogger (penulis blog) telah hadir di negeri ini. Miliaran gagasan telah lahir dan berinteraksi di jejaring maya. Beberapa diantaranya menjadi sesuatu di kehidupan hari ini. Beberapa jejaring blog terbangun dalam sebuah semangat kebersamaan dan keinginan bersama untuk melakukan perubahan yang

lebih baik pada peradaban dunia datar di kemudian hari.

Blogger dunia telah bersatu melalui Hari Aksi Blog (blog action day) yang dilakukan setiap tanggal 15 Oktober. Satu isu, berjuta gagasan untuk perbaikan sebuah kehidupan manusia. Di tahun ini, dengan mengangkat isu lingkungan hidup, telah pula menjadi sebuah hal yang didukung oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu United Nation for Environment Program (UNEP).

Sementara itu, para blogger Indonesia berpesta pada 27 Oktober di sebuah tempat yang bukan murah. Kelompok pemodal pun ikut serta bermain peran di dalamnya. Blog telah pula menjadi sebuah alat bagi kelompok kepentingan yang tetap ingin menjadi penguasa dunia datar melalui keping emas. Dengan sebuah dalih mempertemukan gagasan di dunia nyata, para pelontar gagasan di dunia maya telah melupakan arti penting jejaring kebersamaan dunia maya.

Kedua kondisi tersebut menjadikan blog sebagai sebuah pertarungan gagasan di dunia maya. Yang oleh kelompok pemodal juga dijadikan sebagai arena menguatkan cakarnya menjelang peradaban baru. Sementara bagi kelompok lain, blog merupakan sebuah bangunan solidaritas baru bagi sebuah peradaban yang lebih berkeadilan bagi seluruh makhluk di permukaan bumi.

Mempersiapkan Anak Negeri di Dunia Datar

Globalisasi yang telah masuk dalam berbagai sendi kehidupan di negeri ini sekarang, tak mungkin untuk ditolak. Dari sejak bangun tidur, hingga tidur lagi, bahkan di saat bermimpi, globalisasi telah menjadi sebuah “hantu”. Bila saja “roh jahat” yang menguasai globalisasi, maka akan semakin banyak komunitas yang hanya akan tercatat dalam sebuah buku sejarah di museum.

Anak negeri, harus dibangun kekuatan dan kapasitasnya dalam mempersiapkan berbagai sendi kehidupan dalam menghadapi dunia datar. Namun, peran pemerintah hari ini menjadi penting agar anak negeri tak harus terhempas dalam cengkeraman “setan” globalisasi yang tak memiliki etika kehidupan.

Dalam fase antara, pemerintah harus mulai mendukung dan mempercepat penguatan kapasitas anak negeri dalam penguasaan TIK. Anak negeri sudah harus mampu berada di belahan dunia lain dalam waktu yang singkat dan murah. Anak negeri tak harus duduk manis di tepi sungai yang menghitam sambil berkhayal sedang mengirimi sebuah email bagi seorang kawan di negeri antah berantah.

Pemerintah sudah selayaknya membangun sebuah peta jalan (road map) untuk mempersiapkan generasi berikutnya di negeri ini agar mampu bertarung di dunia datar, demi memperjuangkan sebuah keadilan kehidupan. Dukungan terhadap ketersediaan TIK yang aksesable menjadi hal sederhana yang dapat dilakukan.

Sistem pendidikan yang terbaik dan gratis yang didukung dengan layanan kesehatan yang baik dan gratis, menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kurikulum pembelajaran yang memacu kerja-kerja logika otak harus kembali ditumbuhkan sejak seorang anak mulai mengenal aksara. Dialektika antar manusia, alam dan sejarah kehidupan sudah saatnya dikenal lebih dini oleh anak negeri.

Perubahan pasti terjadi. Perubahan akan menjadi baik bagi kehidupan generasi berikutnya bila memang diinginkan untuk sebuah kebaikan bersama. Perubahan akan menjadi penghancuran sebuah komunitas, bila dikuasai oleh “setan” dunia. Pilihannya ada pada pelayan publik negeri ini, berdiam diri dengan perubahan atau mempersiapkan generasi negeri ini untuk bertarung menuju sebuah peradaban yang berkeadilan pada dunia datar tanpa batas.

Belajar Kehutanan Kok Harus ke Jepang

10. 17. 2007 - 670 dilihat

Tribun Kaltim (17/10) memberitakan bahwa Komisi II DPRD Propinsi Kalimantan Timur akan belajar kehutanan ke Jepang pada tanggal 21-26 Oktober 2007. Para anggota parlemen tersebut akan melakukan kunjungan ke perusahaan kayu, pengelolaan hasil hutan non kayu dan belajar rehabilitasi hutan di negeri yang pernah menjajah tanah air ini.

Cukup ironis melihat fenomena yang terjadi pada anggota parlemen. Di tengah menurunnya minat belajar kehutanan pada kalangan generasi muda di seluruh Indonesia, para anggota parlemen juga hanya yakin pada negara lain untuk belajar kehutanan. Bila ditilik lebih jauh, Kaltim memiliki begitu banyak pengetahuan dan pengalaman pengelolaan hutan yang sangat luar biasa. Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda memiliki Fakultas Kehutanan terbaik di Indonesia, bahkan di Asia, termasuk telah menghasilkan puluhan ribu kajian hutan tropis dan pengalaman uji lapangan yang sangat panjang.

SDM Kehutanan Yang Terabaikan

Unmul, hingga saat ini telah menghasilkan ribuan sarjana kehutanan yang memiliki potensi luar biasa dalam melakukan pengelolaan hutan tropis Kaltim. Beberapa bahkan telah menjadi anggota parlemen di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota di Kaltim. Pada instansi teknis kehutanan pemerintah pun, sebagian besar merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Kehutanan Unmul.

Runtuhnya industri kehutanan pada masa krisis ekonomi, telah menjadikan begitu banyak SDM Kehutanan yang memilih untuk beraktivitas pada ruang kehidupan yang berbeda. Tidak jelasnya komitmen penyelenggara negara terhadap arah pembangunan kehutanan, telah pula menambah deretan panjang tidak beraktivitasnya SDM kehutanan di Kaltim.

Isu kehancuran hutan, termasuk illegal logging yang semakin menguat pun, telah menjadikan sebagian besar pihak sangat enggan dalam berusaha di bidang kehutanan. Sistem pengelolaan kehutanan saat ini, telah sangat menjauhkan potensi SDM kehutanan dari bidang aplikasinya. Bahkan sebagian besar usaha kehutanan hari ini tidak dikelola oleh SDM kehutanan itu sendiri.

Bertaburannya Guru Besar Kehutanan di Kaltim

Unmul, sebagai sebuah perguruan tinggi yang memfokuskan bidang keilmuan pada hutan tropis basah memiliki sederet guru besar, yang tidak hanya dikenal di Indonesia, namun juga sangat terkenal di kalangan kehutanan dunia. Beberapa diantaranya bahkan telah menjadi dosen tamu pada beberapa universitas di Eropa dan juga Jepang.

Baru sebulan yang lalu saya bertemu dengan seorang dosen Fakultas Kehutanan Unmul, yang ahli dalam perhitungan perencanaan pengelolaan hutan. Beliau dengan bangga mengatakan, “Akhirnya hasil kajian yang telah dilakukan bertahun-tahun di Fakultas Kehutanan Unmul telah masuk dalam SK Menteri Kehutanan untuk perhitungan pengelolaan kayu di perusahaan kehutanan Indonesia. Walaupun saya tidak paham mengapa para pembuat kebijakan tersebut sangat sukar mengerti tentang apa yang kami sampaikan. Atau memang karena mereka tidak ingin mengerti ya?”

Sementara itu, beberapa guru besar kehutanan juga bertaburan di Unmul. Terdapat ahli agroforestry dan hasil hutan non kayu, perencanaan kehutanan, ekolabel dan sertifikasi, pembalakan ramah lingkungan, silvikultur (budidaya) hutan alam tropis Indonesia, pengelolaan mangrove, teknologi industri pulp dan kertas yang juga penemu teknologi minim limbah pencemar, sosiologi kehutanan, hingga pada kajian pengikatan karbon pada pepohonan.

Beberapa dosen Fakultas Kehutanan Unmul bahkan telah menjadi dosen tamu pada berbagai universitas ternama di Eropa dan Jepang. Seorang dosen juga telah bekerja sama dengan perusahaan jamu terkenal di negeri ini untuk temuan kimia obat-obatan hutan. Di bidang keanekaragaman hayati, beberapa dosen juga telah memiliki nama di tingkat nasional maupun internasional, serta seorang diantaranya baru saja kembali dari Jepang setelah mempresentasikan hasil kajiannya berkaitan mamalia kecil di Kaltim.

Komunitas Lokal Sangat Ahli Dalam Mengelola Hutan

Komunitas lokal di Kaltim sangat terkenal di Indonesia dan kalangan internasional sebagai ahli pengelola hutan, yang juga menerapkan prinsip kelestarian hutan. Komunitas di Mulus, Hutan Lindung Gunung Lumut Kabupaten Paser, telah diakui oleh pemerintah kabupaten sebagai kelompok masyarakat yang sangat arif dalam mengelola hutan mereka. Kerusakan hutan telah mampu dicegah di kawasan tersebut.

Kelompok masyarakat di DAS Kedang Pahu Kutai Barat, telah sangat lama mengembangkan kebun rotan hingga pemasaran hasil rotan dan

kerajinan rotan. Perkumpulan Petani dan Pengrajin Rotan telah menjadi tempat belajar berbagai petani rotan di wilayah lain di Indonesia. Hanya saja mereka selalu terkalahkan oleh kebijakan pemerintah yang sangat tidak berpihak pada petani dan pengrajin rotan.

Kelompok masyarakat lokal di Malinau dan Nunukan pun merupakan ahli dalam konservasi hutan. Begitu banyak peneliti internasional yang belajar pada komunitas lokal di wilayah tersebut, sehingga dihasilkan berbagai disertasi, tesis dan skripsi dari hasil interaksi peneliti dengan komunitas tersebut. Sebuah kawasan bahkan telah memperoleh penghargaan pelestari lingkungan di negeri ini.

Seorang warga Nunukan bahkan telah melakukan penanaman Ulin (*Eusideroxylon zwageri* Teijsm. & Binn.) hingga seluas lebih dari 400 hektar. Seorang warga Kutai Kartanegara telah berhasil menanam damar yang menghijaukan sebuah perbukitan di dekat pusat kabupaten. Seorang lainnya di sekitar areal tambang batubara telah melakukan penanaman jati lokal yang luas. Mereka semua berujar, “Kami menanam ini, karena kami khawatir suatu waktu anak-cucu kami tak punya kayu untuk membangun rumah.”

Komunitas lokal di Kaltim sangat mampu melakukan pengelolaan hutan di kawasan mereka. Pemanfaatan hasil hutan yang meningkatkan perekonomian mereka juga telah diaplikasikan selama puluhan tahun. Perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat masihlah sangat minim terhadap upaya-upaya yang telah mereka lakukan. Bahkan beberapa kebijakan pemerintah telah pula menghilangkan interaksi komunitas lokal dengan hutan yang selama ini mereka kelola.

Belajar Kehutanan Tidak Harus ke Jepang

Bila melihat catatan di atas, maka menjadi sebuah pertanyaan bagi saya sebagai salah satu warga Kaltim, “Belajar kehutanan kok harus ke Jepang?”. Para anggota parlemen harusnya tidak menghabiskan anggaran rakyat dalam APBD untuk berjalan-jalan ke Jepang. Begitu berlimpahnya pengetahuan dan pengalaman kehutanan di tanah Kaltim ini, harusnya dapat menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi para anggota parlemen, untuk kemudian dapat menjadi sebuah acuan dalam pembuatan kebijakan kehutanan di daerah.

Cara belajar yang baik untuk anggota parlemen adalah datang kepada akademisi kehutanan yang ada di Unmul, yang telah melakukan rangkaian kajian panjang dalam pengelolaan hutan, termasuk hasil hutan non kayu, rehabilitasi dan reboisasi, reklamasi, hingga dalam hal industri pengolahan hasil hutan. Selain itu, para anggota parlemen

lebih baik untuk belajar kehutanan pada komunitas lokal yang telah mengaplikasikan pengelolaan hutan lestari dengan pemanfaatan hasil hutan non kayu, sehingga mampu menyerap hambatan dan impian komunitas lokal dalam menjaga kelestarian hutan Kaltim dan meningkatkan perekonomian lokalnya.

Degradasi hutan sudah semakin cepat terjadi. 6,4 juta hektar lahan di Kaltim merupakan lahan kritis. 950 hektar hutan hilang setiap harinya atau setengah hektar hutan hilang setiap menitnya. Pengelolaan hutan masa datang di Kaltim bukan dengan mendatangkan investor. Prof Maman Sutisna dalam berbagai pertemuan menyatakan, “Masa depan hutan Kaltim adalah hutan yang dikelola oleh rakyat. Kalau tidak, maka kehancuran hutan akan terus terjadi.”

Setelah memperoleh kemenangan individu melawan hawa nafsu pribadi, maka sudah saatnya para anggota parlemen melakukan perjuangan untuk melawan ketidakadilan bagi rakyat Kaltim yang selama ini masih selalu terjadi. Janji untuk berjuang bagi kesejahteraan rakyat yang pernah terucap sesaat sebelum duduk di kursi parlemen sudah saatnya untuk ditunaikan. Sebab bila tidak terpenuhi saat ini, akan sangat sukar untuk mempertanggungjawabkannya pada sebuah pengadilan tanpa pembela di kemudian hari kelak.

[Blog Action Day] Krisis Kepemimpinan Lingkungan Hidup

10. 15. 2007 - 865 dilihat

Nobel perdamaian baru saja diumumkan. Tahun ini yang memperoleh adalah Al Gore, mantan wakil Presiden Amerika Serikat yang sangat intens mengkampanyekan bahaya perubahan iklim, bersama dengan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah organisasi yang melakukan kajian dan perluasan pengetahuan perubahan iklim. Bagi sebagian kalangan ini dipandang sebagai telah dijadikannya isu lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim dan pemanasan global sebagai sebuah isu penting di dunia, terutama bagi perdamaian dunia.

Pada akhir tahun ini pula, di Bali akan berlangsung pertemuan para pihak negara-negara yang meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim. Kalangan organisasi non pemerintah pun tak ketinggalan untuk melangsungkan kegiatan di sela-sela pertemuan. Hampir seluruh dunia akan mengirimkan perwakilannya di pertemuan Bali mendatang. Indonesia sendiri telah memiliki agenda agar diadopsinya konsep pengurangan emisi dengan melakukan perlindungan hutan, dengan harapan agar diperoleh kompensasi dari negara penyumbang emisi di atmosfer kepada negara penjaga hutan. Indonesia bahkan telah melakukan pertemuan pendahuluan dengan negara-negara pemilik hutan, dan Indonesia menjadi pemimpin pertemuan tersebut.

Bila melihat rangkaian kejadian yang ada di tahun ini, maka terlihat sebuah kebangkitan kecil bagi gerakan lingkungan hidup di dunia, dan juga di berbagai tempat di negeri ini. Sebuah harapan kecil muncul ketika menyaksikan semakin banyak yang peduli dan bergerak bagi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Walaupun masih menyisakan sebuah pertanyaan apakah benar ada keberpihakan pengelola pemerintahan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi rakyat?

Pengabaian Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan

Bila melihat pola yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, maka akan sangat disaksikan ketimpangan keberpihakan pembangunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Sangat minimnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup, baik yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup beserta dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah, maupun yang dikelola oleh masing-masing institusi teknis

lainnya, menunjukkan bahwa hingga saat ini keberpihakan pembangunan masih sangat minim terhadap permasalahan lingkungan hidup.

Padahal bila menilik lima tahun terakhir, maka akan sangat dapat disaksikan semakin seringnya terjadi bencana ekologi, baik banjir, kekeringan, maupun tanah longsor, yang telah menelan begitu banyak korban harta maupun manusia. Bencana ekologi tersebut juga telah menghadirkan begitu meluasnya kemiskinan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat lokal.

Di sisi lain, pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten-kota, semakin royal memberikan perijinan kepada industri ekstraktif, tanpa pernah memperhitungkan dampak ekologi yang akan timbul dari pemberian ijin. Setelah otonomi daerah digulirkan, pemerintah kabupaten sangat banyak mengeluarkan perijinan hak pengusahaan hutan skala kecil, tanpa pernah melakukan pengawasan, hingga perijinan dikuasai oleh sekelompok kecil orang dan menyisakan harapan lahan tak berpeponan. Pada tahun berikutnya, pemerintah kabupaten-kota juga kembali mengeluarkan begitu banyak perijinan untuk kuasa pertambangan, yang lagi-lagi tak pernah memperhatikan analisis dampak lingkungan hidup.

Di Provinsi Kalimantan Timur, hingga tahun 2006 telah dikeluarkan ijin kuasa pertambangan sebanyak 509 ijin dengan luas mencapai 1,6 juta ha. Untuk perkebunan skala luas, pemerintah telah mengeluarkan perijinan sejumlah lebih dari 150 ijin untuk luasan 2,9 juta ha. Sementara itu, masih terdapat berbagai perijinan pertambangan, usaha kehutanan dan hutan tanaman dari pemerintah pusat, yang membagi habis kawasan daratan Kaltim.

Fatamorgana Keberpihakan Lingkungan Hidup Dalam Politik

Saat masa pemilihan kepala daerah maupun dewan perwakilan rakyat, baik daerah maupun pusat, sangat kental isu-isu pemberantasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, serta kepedulian terhadap kelompok marginal dan lingkungan hidup dikumandangkan. Slogan kampanye selalu meneriakan keberpihakan pada hal-hal yang menjadi kebutuhan kehidupan masyarakat. Namun ketika kemudian kedudukan telah diraih, satu persatu janji kampanye dilupakan.

Sistem politik negeri ini yang masih mengagungkan partai politik sangat berperan untuk melihat arah keberpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Pada Pemilu tahun 2004, hanya ada satu partai yang

secara tegas menuangkan keberpihakannya pada lingkungan hidup dalam platform partainya, sementara yang lainnya sangat remang-remang. Sebuah angin segar bagi lingkungan hidup juga semakin kencang, ketika tahun lalu sebuah partai politik mendeklarasikan partainya sebagai partai hijau. Namun masih belum terlalu jelas apa yang menjadi program partai sehingga menjadi hijau.

Partai Politik yang memiliki peran sangat kuat dalam perjalanan roda pemerintahan, selama ini sangat menggantungkan modal politiknya dari kelompok-kelompok pemodal, yang sebagian besar berbasis pada industri ekstraktif sumberdaya alam. Maka kemudian, ketika para wakilnya duduk di parlemen dan eksekutif, maka sangat terlihat keberpihakan kebijakan pembangunan yang tidak memperdulikan kepentingan lingkungan hidup. Kecuali bila suatu masa calon independen dimungkinkan, maka bukan tidak mungkin ada sebuah pertarungan baru dalam kebijakan pembangunan, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Kepemimpinan Lingkungan Hidup Yang Kuat Bagi Negeri

Indonesia, ditengah begitu banyak bencana ekologi yang melanda, sangat membutuhkan kepemimpinan yang kuat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Visi dan cara pandang pemimpin “pelayan publik” di negeri ini terhadap lingkungan hidup sangat dibutuhkan. Termasuk keberpihakan terhadap kelompok marginal dan pengupayaan pendidikan dan kesehatan berkualitas dan murah bagi rakyat.

Kepemimpinan yang kuat tersebut juga diharapkan akan mampu menjadi pendorong gerbong perubahan kualitas kehidupan rakyat di masa mendatang. Kebangkitan motivasi untuk menghasilkan inovasi dan kreatifitas anak negeri menjadi tumbuh berkembang seiring dengan adanya kepemimpinan yang dipercaya. Mekanisme kontrol, akuntabilitas dan transparansi pun diharapkan hadir dengan adanya pemimpin yang memiliki visi tegas dalam memperjuangkan nasib rakyat di masa mendatang.

Negeri ini telah sangat compang-camping akibat begitu banyaknya kekayaan alamnya yang digadaikan kepada kelompok pemodal (asing). Begitu banyak kekayaan negeri ini yang sudah tak lagi dimiliki negeri ini. Hingga hutang luar negeri pun tak akan lagi mampu terbayarkan hingga generasi kesembilan. Seorang pemimpin yang baik bagi negeri ini adalah yang mampu membangkitkan sistem kelola sumberdaya alam berbasis komunitas lokal yang telah terbukti memiliki kearifan terhadap alam dan lingkungan kehidupannya.

Menanti Kelahiran Pemimpin Masa Depan

Hari ini, begitu banyak yang menantikan seorang pemimpin masa depan bangsa ini. Walau hanya dalam mimpi, karena kualitas pendidikan telah menjadikan sebagian besar anak negeri ini sebagai robot intelektual yang hanya bisa menjadi pekerja, bukan lagi sebagai pemikir kritis dan inovatif. Namun hal tersebut bukan tidak mungkin terjadi. Mulai dari kelompok-kelompok kecil yang kian membesar, akan ada waktu kelahiran pemimpin negeri ini yang akan berada di barisan rakyat.

Perjalanan panjang hingga saatnya tiba sangat penting untuk diisi dengan sebuah gairah kehidupan dengan berpihak terhadap kepentingan kebutuhan dasar rakyat. Memperluas pola-pola pendidikan kritis, hingga melahirkan inovator baru pada generasi muda hari ini. Biarlah waktu terus berlalu. Detik demi detik berdetak penuh makna. Hingga satu waktu bangkitnya sebuah kejayaan Indonesia dengan seorang pemimpin yang bergandengan tangan pada rakyat, bukan tunduk pada pemodal.

Negeri ini kaya dan berdaulat. Begitu banyak rakyat negeri ini yang telah jenuh dengan kemiskinan dan kesengsaraan. Bila tidak memulai berpikir tentang perubahan negeri ini, maka perubahan itu tak akan pernah terjadi. Rakyat negeri sudah saatnya bersatu. Bangunlah kelompok-kelompok diskusi kritis. Bersarekatlah dalam keyakinan dan keikhlasan. Hingga satu waktu, akan bersama untuk berlawanan dengan keberanian!

**) tulisan ini merupakan bagian dari Hari Aksi Blog tentang Lingkungan Hidup tahun 2007*

konten yang menguap

09. 8. 2007 - 247 dilihat

informasi telah menjadi sebuah kebutuhan primer bagi setiap makhluk sosial. membaca berita pagi hari di sebuah surat kabar harian, mendengarkan penyiar radio memaparkan kondisi kota hari ini, hingga menyaksikan siaran televisi untuk menggugah kerja otak di setiap detiknya. informasi pun telah pula menjadi regulasi tak tersadaran dalam kerja-kerja labirin pemikiran.

dalam menghasilkan sebuah informasi, sangat dinantikan kehadiran data dan pengelolaan informasi. kurangnya data yang dimiliki dalam memori isi kepala dan tidak terlatihnya kerja prosesor di alam pikir dalam mengolah data, menghasilkan hampanya informasi yang disajikan.

teknologi informasi telah hadir dengan kemajuan pesatnya. website bertaburan di dunia maya. blog, sebuah catatan kecil dari setiap makhluk sosial telah pula mengisi ruang maya tersebut. sayangnya, tak begitu banyak informasi yang tersajikan dengan cepat dikarenakan ketiadaan keinginan untuk berbagi informasi.

sebuah website ataupun blog, sebagian besar baru mampu terbaharukan bila ada cukup waktu untuk membuat rangkaian kata. seorang penulis pernah mengungkapkan “otak kita perlu dilatih untuk mengolah kata menjadi kalimat, dan dapat dilakukan dengan membuat tulisan selama lima menit di pagi hari. agar lebih mampu menghadirkan kata, maka menjadi penting untuk membaca, mengamati dan melakukan diskusi, lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan”.

permasalahan klasik yang sering diungkap adalah ketidakmampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi saat ini. padahal, teknologi informasi semakin menyediakan alat yang semakin memudahkan setiap makhluk sosial untuk bersosialisasi di dunia maya. tidak harus memiliki sebuah kemampuan yang sangat ahli sekalipun, setiap makhluk sosial akan mampu menampilkan sebuah kalimat secara langsung di dunia maya.

kecenderungan berikutnya adalah tidak terkelolanya data dan informasi yang dimiliki dengan sebuah struktur yang mudah dan memudahkan. ketika teknologi informasi masih baru dilahirkan, mekanisme pengarsipan secara manual sebenarnya telah mulai membangun sebuah mekanisme yang memudahkan dalam pengelolaan data dan informasi.

namun kemudian ketika era digital mulai berkembang, ternyata tak begitu banyak yang mencoba menerapkan mekanisme memudahkan dalam pengarsipan dilakukan.

seorang yang telah belajar cukup dalam tentang teknologi informasi pun lebih cenderung tidak melakukan mekanisme pengarsipan yang cukup baik. ini dapat dilihat dari sebuah hal yang sederhana, semisal penyusunan folder ataupun penamaan sebuah file. sebuah hal yang sebenarnya tak pernah diberikan pengetahuannya saat mengikuti pembelajaran teknologi informasi sekalipun.

informasi yang dimaknai sebagai konten, menjadi sangat sulit dihadirkan dalam waktu cepat. menyerahkan seluruhnya pada teknologi, menjadikan hilangnya unsur sosial dalam interaksi makhluk sosial di dunia maya. menjadi penting kemudian adalah untuk kembali menghadirkan nilai sosial dalam sebuah dunia yang telah memberangus nilai sosial dalam konteks interaksi fisik.

sebuah aktivitas yang menarik didorongkan dalam mengikuti laju perkembangan teknologi di dunia informasi adalah untuk mulai kembali menumbuhkan sebuah ikatan sosial dalam pengelolaan informasi. berpondasikan pada kebutuhan informasi bagi setiap makhluk sosial, diharapkan mampu kembali menghadirkan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal di kemudian hari. saling belajar, saling berbagi, dan saling berinteraksi, menjadi sebuah kebutuhan sekunder dalam mendukung pemenuhan kebutuhan primer makhluk sosial berupa informasi. [070908]

Pengelolaan DAS Karang Mumus Kota Samarinda

08. 11. 2007 - 2,008 dilihat

A. Latar Belakang

Kota Samarinda, Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, merupakan kota yang dibelah oleh Sungai Mahakam memiliki luas 71.800 ha. Sejak beberapa tahun terakhir, Kota Samarinda selalu menghadapi permasalahan banjir yang melanda sebagian besar wilayah kotanya. Wilayah yang mengalami sebagian besar berada di wilayah DAS Karang Mumus.

Permasalahan banjir yang kian kerap terjadi di Kota Samarinda, tidaklah terlepas dari penggunaan ruang kota untuk berbagai kepentingan. Pada tahun 2004 tercatat 579.933 jiwa penduduk yang mendiami kota. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan tumbuhnya industri menambah beban alam kota yang pada akhirnya menjadi bencana. Pada setiap tahunnya tidak kurang dari tiga kali kejadian banjir melanda kota.

Perkembangan kota tersebut secara nyata telah mengurangi kawasan resapan air dan kawasan hutan. Hingga saat ini kawasan yang ditetapkan sebagai hutan kota Samarinda hanya 1,05% (691,11 ha) dari luasan kota. Sementara itu, sebagian besar kawasan rawa telah menjadi kawasan pengembangan perumahan dan industri, sehingga rawa yang tersisa di kota semakin mengecil.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan sebuah perencanaan yang berperspektif ekologis dan mendukung pembangunan kota untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di masa datang. Beberapa tawaran gagasan akan disajikan dalam paper ini dengan harapan dapat menjadi sebuah alternatif model pengelolaan kota Samarinda, khususnya pada wilayah DAS Karang Mumus.

B. Gambaran Umum DAS Karang Mumus

Secara administratif, DAS Karang Mumus melintasi kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Terdapat beberapa sub DAS, yaitu Sub DAS Siring, Jayamulyo (Tanah Merah), Pampang, Karang Mumus Ulu (Lubang Putang), Karang Mumus Ilir, dan Karang Mumus Tengah. Luas DAS Karang Mumus 36.527,73 ha yang terletak pada posisi $0^{\circ}19'28''$ - $0^{\circ}26'45''$ LS dan $117^{\circ}12'06''$ - $117^{\circ}12'24''$ BT

° 15' 15" BT.

Pada kawasan hulu DAS Karang Mumus, sebagian besar didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian petani dan pedagang. Sedangkan profesi penduduk lainnya pada DAS Karang Mumus adalah karyawan, pegawai negeri sipil, pertukangan dan profesi lainnya. Pada tahun 2000, tingkat pendapatan rata-rata penduduk berkisar antara Rp 482.858 - Rp 909.867 dengan tingkat pengeluaran rata-rata antara Rp 324.889 - Rp 739.800. (PPLH Unmul, 2000)

DAS Karang Mumus merupakan prioritas urutan pertama DAS kritis di Kaltim. BPDAS Mahakam Berau (2004) menyatakan, luas lahan kritis di Kota Samarinda mencapai 32.705 ha, sedangkan yang potensial kritis mencapai luasan 9.141 ha. Luas lahan kritis tersebut yang terluas berada pada kawasan Samarinda Utara (9.106 ha) yang merupakan kawasan DAS Karang Mumus.

C. Identifikasi Permasalahan pada DAS Karang Mumus

Permasalahan yang ada pada kawasan DAS Karang Mumus adalah:

1. Belum adanya status hukum untuk kawasan lindung dan daerah penyangga di dari Kota Samarinda, kecuali untuk Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
2. Peralihan fungsi lahan (rawa dan hutan sekunder) menjadi kawasan permukiman dan industri
3. Pendangkalan aliran sungai dan drainase
4. Adanya kawasan pertambangan pada kawasan hulu DAS yang berkontribusi terhadap erosi dan sedimentasi, serta peningkatan aliran air permukaan.
5. Padatnya pemukiman pada bagian hilir DAS di sepanjang bantaran sungai
6. Lemahnya pengawasan pembangunan bangunan baru
7. Tidak dijadikannya Rencana Tata Ruang Kota sebagai acuan dalam pengembangan kawasan

D. Pengelolaan DAS Karang Mumus

Dari kondisi dan permasalahan di atas, maka dalam upaya pengelolaan DAS Karang Mumus dapat dilakukan upaya-upaya yang dibagi menjadi tiga kawasan pengelolaan, yaitu kawasan hilir, tengah dan hulu.

Supriadi (2007) menyampaikan bahwa pada tahun 2011 kota Samarinda memerlukan hutan kota seluas 19.875,72 ha (27,68% dari luas kota). Dengan kondisi saat ini dimana Samarinda hanya memiliki hutan kota

seluas 691,11 ha, maka diperlukan penambahan hutan kota seluas 19.184,61 ha. Walaupun luasan yang menjadi kewajiban dalam PP No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota adalah 10% dari luas kota, namun bagi kepentingan ekologis kota, maka diperlukan luasan hutan kota sekurangnya 30% dari luas kota. Alternatif perluasan hutan kota dapat dilakukan dengan mewajibkan warga kota untuk menanam pohon (tanaman keras) di setiap pekarangan dan/atau pembuatan sumur resapan pada kawasan padat permukiman.

Selain perluasan hutan kota, kawasan rawa yang merupakan kawasan penting dalam fungsi hidrologis menjadi penting untuk dipertahankan dan/atau diperluas. Khatuddin (2003) menyatakan bahwa ukuran rawa buatan disarankan 2,2-4,0 meter persegi untuk setiap orang untuk aliran horisontal yang menghasilkan pembersihan air. Sedangkan untuk aliran vertikal dibutuhkan rawa buatan dengan luas 1 meter persegi setiap orang. Pembuatan rawa dilakukan secara kolektif dalam setiap wilayah kelurahan yang ada.

Adapun pengelolaan jangka pendek pada DAS Karang Mumus adalah sebagai berikut:

1. Kawasan hilir DAS Karang Mumus dilakukan upaya-upaya:
 - Perbaikan (meliputi pelebaran dan pendalaman) drainase dan aliran Sungai Karang Mumus beserta dengan anak-anak Sungai Karang Mumus
 - Pengerukan aliran sungai
 - Pemindahan penduduk di bantaran sungai dengan tetap memperhatikan keadilan sosial bagi penduduk yang dipindahkan, terutama terhadap ketersediaan fasilitas pendukung di lokasi baru
 - Penetapan kewajiban pembuatan sumur resapan pada setiap bangunan
2. Pada kawasan tengah DAS Karang Mumus dilakukan upaya-upaya:
 - Perlindungan rawa serta pembangunan rawa buatan
 - Penetapan kewajiban pembuatan sumur resapan pada setiap bangunan
 - Pembuatan kanal terbatas, dengan memperhatikan kondisi hidrologi pada kawasan yang dibangun
3. Sedangkan untuk kawasan hulu DAS Karang Mumus, dilakukan upaya-upaya:
 - Perlindungan kawasan hutan tersisa
 - Pengembalian fungsi Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul sebagai hutan pendidikan, dan

- bukan semata tempat wisata
- Pencabutan perijinan pertambangan (batubara, galian C)
 - Pengembangan pertanian dan perkebunan oleh kelompok tani

Pengelolaan jangka panjang pada DAS Karang Mumus meliputi:

1. Penataan ruang DAS Karang Mumus dengan menetapkan 30% kawasan DAS sebagai kawasan dilindungi, dalam bentuk sempadan sungai, rawa, hutan kota, hutan pendidikan, ruang terbuka hijau.
2. Pengembangan permukiman dan gedung perkantoran secara vertikal
3. Pengawasan terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Kota Samarinda

E. Penutup

DAS Karang Mumus merupakan salah satu ruang kehidupan bagi masyarakat kota Samarinda. Kawasan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan kota, namun juga masih menyisakan bencana ekologi bila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik.

Sebuah perencanaan pengelolaan akan dapat dikatakan berhasil apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Kota Samarinda sudah selayaknya memulai untuk berdisiplin untuk mengelola kota, agar tak terjadi permasalahan banjir lagi di Kota Samarinda.

Perebutan Ruang: Kepentingan Rakyat vs Investasi

08. 10. 2007 - 538 dilihat

Indonesia telah memerdekakan dirinya pada 62 tahun yang lalu. Lagu kebangsaan pun masih jua menjadi sebuah perdebatan. Pembangunan cita-cita negeri ini untuk menuju kesejahteraan bersama dan perdamaian abadi, masih sangat jauh dalam mewujudkannya. Telah begitu banyak pula aliran modal yang bergerak di negeri ini untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Gerakan ekonomi kerakyatan sebagai urat nadi pembangunan, masih belum tersentuh secara nyata.

Pengembangan infrastruktur transportasi, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta tata pemerintahan yang bersih, masih dalam fase pengembangan. Otonomi daerah yang diharapkan menjadi sebuah agenda untuk mempercepat capaian cita-cita kemerdekaan, sepertinya telah memilih jalan lain untuk memfasilitasi keberlanjutan kehidupan segelintir orang, yang bernama investor.

Pada beberapa wilayah di Kaltim, bahkan investor telah mengambil alih peran-peran negara yang dijalankan oleh pemerintah. Pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan serta sarana transportasi selalu dipenuhi oleh investor. Sehingga kemudian tidak salah bila pelayan publik (pemerintah) saat ini sangat berpasrahkan diri untuk menyerahkan kebutuhan rakyat pada investasi.

Peluang kerja yang semakin menyempit pun selalu menjadi sebuah kampanye abadi untuk kepentingan keberlanjutan investasi di berbagai wilayah. Nilai peningkatan ekonomi dari investasi menjadi sebuah acuan bagi tingkat keberhasilan pembangunan. Pemerataan kesejahteraan melalui agenda pembangunan tak pernah menjadi sebuah ukuran terhadap kelayakan keberlanjutan kepemimpinan pelayan publik.

Wilayah daratan, perairan dan laut sejak sebelum kemerdekaan telah menjadi sebuah wilayah berkehidupan bagi berbagai komunitas di atasnya, baik terhadap manusia maupun puspa-satwa. Pada masa kerajaan masih berkuasa di negeri ini, ruang-ruang berkehidupan mulai dilingkupi oleh pengaturan, dengan harapan tidak terjadi sebuah konflik dalam memanfaatkan ruang. Ketika kemudian negeri ini memproklamasikan kemerdekaannya, maka kemudian pemerintah, sebagai pelayan publik, mulai mengadopsi pengaturan-pengaturan yang telah ada dengan melakukan modifikasi berdasarkan kondisi kekinian.

Konflik perebutan ruang terlihat tidak pernah terjadi dalam masa rejim orde baru, yang menghamba kepada kepentingan konglomerat, pemodal asing dan lembaga keuangan internasional. Secara perlahan wilayah produktif rakyat beralih penguasaan. Hak pengusahaan hutan diberikan secara besar-besaran kepada kroni penguasa. Pengusaha asing dengan leluasa mengeruk kekayaan mineral dan migas negeri ini, dengan syarat memberikan sebagian keuntungannya pada kroni penguasa. Lahan-lahan produktif yang menjadi sumber kehidupan rakyat harus tergusur. Bahkan juga dilakukan penghilangan identitas komunitas lokal atas adat yang selama ini melingkupi kehidupannya.

Ketika kemudian rejim orde baru runtuh, secercah harapan hadir. Rakyat sangat berharap terjadi perubahan mendasar di negeri ini. Namun apa yang diharapkan sangat jauh dari kenyataan yang diterima hari ini. Telah satu dekade sejak keruntuhan rejim tidak pernah terjadi sebuah perubahan di tingkat rakyat. Kemiskinan tetap terjadi. Biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal. Transportasi pun masih menjadi sebuah hambatan bagi pengembangan ekonomi lokal.

Masa otonomi daerah yang setengah hati kemudian malah melahirkan rejim-rejim penindas lokal. Pelayan publik (pemerintah) di daerah malah menjadi penguasa baru. Segala hal yang pernah terjadi di masa orde baru masih saja berlangsung dalam skala lokal. Penguasaan lahan skala luas oleh pemodal, pengerukan kekayaan alam, hingga penggusuran wilayah sumber kehidupan tetap saja terjadi. Rakyat tidak pernah dilayani untuk mengembangkan potensi lokalnya. Tawaran yang diberikan hanyalah, menerima investasi dan menggadaikan lahan-lahan produktif rakyat.

Di Kaltim, sejak pemerintah mencanangkan kebijakan pengembangan satu juta hektar perkebunan kelapa sawit, maka sebagian besar lahan di Kaltim beralih penguasaan kepada pengusaha. Hingga tahun ini tidak kurang dari 2,5 juta hektar perijinan perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan. Namun hanya sekitar 187 ribu hektar yang baru terkelola dengan baik, sementara baru berkisar 350 ribu hektar yang memiliki hak guna usaha (HGU). Selebihnya tetap menjadi lahan terlantar setelah kayu-kayu di atasnya dihabiskan untuk menambah kekayaan pengusaha.

Di sektor pertambangan, pemerintah sangat royal untuk memberikan perijinan kuasa pertambangan (KP) kepada pengusaha batubara. Jumlah tersebut menambah banyak jumlah perijinan yang juga diberikan oleh pemerintah pusat kepada pengusaha melalui perijinan PKP2B. Hal yang terjadi kemudian adalah digusurnya persawahan, perladangan dan perkebunan rakyat yang berada di areal perijinan.

Selain juga terjadi penghilangan terhadap sebagian kawasan-kawasan yang telah dilindungi oleh hukum negeri ini, seperti hutan lindung, taman hutan raya dan taman nasional.

Perkebunan rakyat yang selama ini menopang perekonomian negeri ini disaat terjadi krisis ekonomi secara perlahan pun dipaksa menghilang. Fasilitas pelayanan publik (pemerintah) terhadap keberlanjutan pengembangan perkebunan rakyat sangat minim. Tidak dialokasikannya anggaran pemerintah untuk pembangunan dan perbaikan jalan, tidak disediakannya tenaga penyuluh yang berkomitmen dan berkualitas, serta tidak pernah diberikannya fasilitas pengolahan pasca panen dan pemasaran, menjadikan perkebunan rakyat kian tahun semakin berkurang luasannya.

Kondisi tersebut kemudian menciptakan kesenjangan baru di era otonomi daerah. Sebagian kecil komunitas lokal kemudian menambah jumlah pengangguran di pusat perekonomian dan perkotaan, sementara sebagian lainnya tetap berusaha bertahan hidup diantara desakan kepentingan investasi yang suatu saat akan menggusur mereka.

Perkebunan ruang akan tetap dan terus berlangsung. Keberpihakan pemerintah sebagai pelayanan rakyat sudah saatnya diwujudkan dalam bentuk pembelaan terhadap kepentingan komunitas lokal. Penguatan ekonomi kerakyatan tidak akan pernah dapat terbangun bila pemerintah selalu mengemis kepada investor. Investor juga tidak akan pernah mau berbaik hati kepada rakyat setelah berhasil melakukan pengurusan lahan berkehidupan rakyat. Corporate Social Responsibility (CSR) bukanlah sebuah hal yang didambakan rakyat negeri ini.

Pemerintah sebagai pelayanan rakyat serta pengembalian amanah kemerdekaan negeri ini, sudah selayaknya menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat di wilayahnya. Anggaran pembangunan bukan lagi saatnya difokuskan pada pusat-pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian (perkotaan). Sudah menjadi penting untuk memberikan perhatian lebih kepada wilayah-wilayah perkampungan. Sudah cukup banyak anggaran negara ini yang dihabiskan oleh pelayanan publik dan petualang politik untuk berfoya-foya. Saat ini, menjelang 62 tahun kemerdekaan negeri ini, saatnya bagi rakyat benar-benar menikmati kemerdekaan dengan kesejahteraan. [070808]

Hutan Kaltim Menuju Fase Ke gelap an

08. 9. 2007 - 692 dilihat

Hutan Kaltim kian kritis. 6,4 juta hektar lahan kritis tersebar di wilayah ini. Hamparan pohon dipterocarpaceae secara perlahan akan menghilang. Pembalakan haram berkelanjutan masih saja terjadi dengan menelikung lemahnya penegakan hukum. Pemberian ijin investasi terus terjadi yang pada akhirnya mengakumulasikan hilangnya sumber kehidupan bagi komunitas lokal.

Diantara berita suram kehutanan yang terlalu banyak masalah, sumberdaya manusia sektor kehutanan pun kian berkurang. Setelah ditutupnya Sekolah Kehutanan Menengah Atas beberapa tahun yang lalu, berbagai perguruan tinggi yang menggeluti bidang kehutanan pun kian kesulitan mencari mahasiswanya. Hampir tiga tahun ini Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, sebuah fakultas kehutanan terbaik di Indonesia bahkan di Asia, menerima jumlah mahasiswa yang semakin sedikit jumlahnya. Deretan guru besar kehutanan internasional yang membagi ilmunya di fakultas tersebut, bukan menjadi sebuah magnet penarik minat para pelajar yang melanjutkan studinya di perguruan tinggi.

Hutan Kaltim yang memiliki peran penting bagi kehidupan ekonomi dunia serta telah menopang kehidupan komunitas lokal selama ini akan mengalami keterpurukannya. Dalam berbagai pertemuan, selalu terungkap bahwa permasalahan kehutanan tidaklah lepas dari permasalahan ketersediaan sumberdaya manusia yang baik jumlah dan kualitasnya. Walau kemudian tidak juga dapat menutup mata bahwa permasalahan kehutanan tidak pernah terlepas dari permasalahan kepentingan politik.

Lahirnya sebuah anggapan bahwa sektor kehutanan tak lagi mampu menjadi penopang ekonomi bangsa juga turut menurunkan minat anak negeri untuk memperdalam ilmu pengetahuan di bidang kehutanan saat ini. Terpuruknya industri kehutanan yang dibangun atas kerapuhan investasi menjadi salah satu pemicu lahirnya anggapan kelamnya masa depan sektor ini. Kondisi tersebut kemudian melahirkan opini publik bahwa masa depan pekerja sektor kehutanan menjadi sebuah hal yang tidak menjanjikan.

Di luar permasalahan opini publik tersebut, terdapat permasalahan internal pendidikan sektor kehutanan yang juga belum beranjak dari sebuah keilmuan kehutanan masa lalu yang hanya berorientasi pada

hasil hutan kayu semata. Walaupun telah tersedia pengetahuan sosial kehutanan serta pengetahuan pengelolaan hasil hutan non kayu, namun informasi tersebut masih belum mampu diserap oleh publik.

Lembaga pendidikan kehutanan masih belum mampu menterjemahkan perubahan cara pandang pengelolaan hutan masa datang kepada publik. Dengan begitu banyaknya guru besar kehutanan yang secara kapasitas telah diakui oleh masyarakat internasional, masih belum cukup banyak dilakukan pendaratan pengetahuan kepada publik lokal maupun nasional.

Kurikulum pendidikan sektor kehutanan pun menjadi penting untuk dikaji ulang. Pertanyaan pertama adalah apakah kurikulum pendidikan sarjana kehutanan telah menjadi sebuah jawaban terhadap kebutuhan profesi kehutanan di masa datang? Apakah juga kurikulum tersebut mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mandiri di masa datang? Apakah proses pembelajarannya cukup mampu untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif? Pertanyaan inilah yang penting diberikan jawabannya oleh pengelola pendidikan sektor kehutanan.

Kegelisahan utama ketika semakin berkurangnya jumlah sumberdaya manusia sektor kehutanan adalah semakin berkurangnya tenaga profesional yang akan cakap dalam melakukan pengelolaan hutan di Kaltim dan di Indonesia. Padahal tantangan sektor kehutanan di masa datang semakin berkembang dan menekan keberadaan hutan yang berkualitas bagi kehidupan masyarakat di dalam ekosistemnya.

Selain permasalahan kuantitas sumberdaya manusia sektor kehutanan, juga akan sangat diperlukan sumberdaya manusia sektor kehutanan yang berkualitas. Tenaga-tenaga profesional kehutanan yang berkualitas dan inovatif sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga keberadaan hutan sebagai sumber kehidupan di wilayah ini. Pengelolaan hutan dan kehutanan Kaltim masa datang akan sangat bergantung bagaimana sumberdaya manusia sektor kehutanan mampu melakukan pengelolaan.

Fase kejayaan sektor kehutanan bagi sebagian orang mungkin telah berakhir. Namun bagi rimbawan negeri ini, kejayaan sektor kehutanan akan tetap hadir sepanjang manusia masih ada. Upaya perbaikan hutan (rehabilitasi dan reboisasi) sangat membutuhkan tenaga kehutanan profesional. Pengelolaan kawasan dilindungi dan konservasi pun membutuhkan keahlian khusus kehutanan. Pemanfaatan hasil hutan non kayu yang lebih optimal juga sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang kreatif dan inovatif. Sebuah tantangan besar bagi lembaga pendidikan kehutanan untuk memberikan jawaban terhadap kebutuhan tersebut.

Hutan Kaltim akan menuju kegelapan bilamana lembaga pendidikan kehutanan, termasuk Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dan perguruan tinggi lainnya, tidak mampu untuk menghasilkan rimbawan berkualitas yang profesional dan inovatif. Degradasi hutan akan semakin berkelanjutan bilamana lembaga pendidikan kehutanan tidak mampu mendaratkan permasalahan kehutanan kepada publik yang lebih luas. Bila ini terjadi, maka kehidupan di Kaltim juga akan sangat terganggu dan bukan tidak mungkin akan semakin kerap terjadi bencana ekologi di berbagai wilayah di negeri ini.

Lembaga pendidikan kehutanan, termasuk Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, sudah saatnya untuk memasuki ranah publik dan politik sumberdaya alam, khususnya kehutanan, agar hutan Kaltim dapat tetap lestari dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Kaltim. Bukan lagi waktunya untuk senantiasa nyaman di balik tempurung. Tridharma perguruan tinggi sudah selayaknya dimaknai sebagai sebuah kontribusi perguruan tinggi terhadap kepentingan publik. Hal ini dapat dimulai dengan melakukan publikasi reguler hasil-hasil penelitian dan kajian, serta dengan melahirkan teknologi baru dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, khususnya hasil hutan non kayu.

Hutan merupakan sumber kehidupan, namun ia akan menuju fase kegelapan. Manusia telah diberi amanah untuk mengelolanya bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Lembaga pendidikan kehutanan merupakan kawah chandradimuka bagi lahirnya rimbawan profesional dan inovatif. Bila tidak saat ini melakukan perubahan mendasar, maka tidak akan pernah tercapai cita-cita negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bukan lagi penting untuk mempertahankan arogansi sektoral, namun menjadi penting bagi lembaga pendidikan untuk lebih ramah terhadap kepentingan publik yang lebih banyak. Bagi kawan-kawan muda, tentukan pilihan untuk berkontribusi bagi negeri ini, dengan tetap bersama menjaga keberadaan hutan dan melakukan pengelolaan yang lebih bijak terhadap sumberdaya alam yang dianugerahkan bagi negeri ini. Bila tidak sekarang, kapan lagi ! [070808]

INVESTASI: Benarkah Bagi Kesejahteraan Rakyat?

08. 4. 2007 - 936 dilihat

Indonesia baru saja melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Korea Selatan untuk kerjasama investasi. Tidak kurang dari Rp 80 triliun akan diinvestasikan oleh Korea Selatan untuk industri kelapa sawit, batubara dan semen, yang salah satu wilayahnya adalah di Kaltim. Ini bukan merupakan perjanjian kerjasama pertama yang akan masuk di Kaltim. Sebelumnya China juga telah membuat MoU dengan Indonesia, dengan salah satu wilayahnya kerjasamanya adalah di Kaltim.

Melihat besaran nilai investasi yang akan masuk, memang bukan sebuah angka yang kecil. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim saja sangat jauh angkanya dibandingkan dengan nilai investasi yang akan masuk tersebut. Bahkan bila digabungkan dengan seluruh APBD Kabupaten-Kota di Kaltim. Sungguh sebuah kenikmatan seandainya saja investasi benar-benar bagi kesejahteraan rakyat.

Lemahnya Pengawasan Terhadap Perilaku Investor

Keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pelayan publik telah menjadikan investasi lebih banyak melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya merugikan komunitas lokal di kawasan yang diserahkan kepada investor. Perilaku investor yang tidak mempedulikan kepentingan kebutuhan dasar komunitas lokal telah mendorong terjadinya pemiskinan secara struktural pada wilayah tersebut. Kawasan kelola komunitas pun secara perlahan harus beralih kepemilikan, yang pada gilirannya menghadirkan krisis pangan dan krisis identitas.

Ketika kemudian terjadi pencemaran dan konflik sosial, baru kemudian pemerintah akan disibukkan untuk melakukan penanganan dampak. Kondisi ini kemudian juga menjadi sebuah beban baru bagi pemerintah, sehingga aspek pelayanan kepada publik menjadi terabaikan. Pemerintah hari ini masih memiliki sebuah cara berpikir untuk lebih berpihak kepada investor dibandingkan kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk menjadi pelayan publik.

Hal lain yang juga menjadi penting adalah perilaku investor yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya telah menjadikan pemenuhan kebutuhan jangka panjang bagi Kaltim sendiri menjadi terabaikan.

Krisis energi listrik, minyak goreng, bahan bakar gas, hingga habisnya persediaan pangan di tingkat lokal merupakan sebuah dampak dari perilaku eksploitatif (dan rakus) dari para investor.

Investasi dan Krisis Ekologis

Masuknya investasi di sebuah wilayah, apalagi bila berasal dari China dan Korea, sebenarnya bukan sebuah kabar baik bagi kondisi ekologis di Kaltim. Karakteristik lahan dan tanah di Kaltim yang unik, menjadikannya sangat sensitif terhadap terjadinya bencana ekologi berupa banjir, longsor dan kekeringan. Sudah bukan menjadi sebuah informasi aneh lagi bagi rakyat Kaltim di beberapa daerah, bahwa kejadian banjir dan kekeringan telah semakin meningkat jumlah kejadian dan besaran dampaknya.

Dalam setiap tahunnya, wilayah-wilayah di sekitar kawasan yang dibuka untuk perkebunan besar kelapa sawit serta pertambangan akan mengalami banjir lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun. Juga terjadinya kekeringan pada wilayah aliran air, termasuk sumur yang selama ini menjadi sumber air bersih bagi rakyat menjadi kian mengering. Semakin sukar bagi rakyat di sekitar wilayah perkebunan besar dan pertambangan untuk dapat hidup lebih nyaman sebagaimana sebelumnya. Pengeluaran keuangan setiap rumah tangga juga semakin meningkat.

Pengalaman di berbagai wilayah lain di Indonesia, ketika investasi mulai masuk pada sektor perkebunan besar dan pertambangan, yang terjadi kemudian adalah pemerintah semakin harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk menangani dampak ekologis, termasuk juga dampak perubahan negatif sosio-kultur, pada wilayah-wilayah sekitar kawasan investasi.

Hilangnya Sumber Kehidupan

Peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai sebuah jargon yang selalu diungkapkan oleh pemerintah dalam setiap kali membuka peluang investasi, hingga saat ini masih sangat tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh komunitas lokal. Yang terjadi malah semakin tidak sejahteranya rakyat di kawasan investasi. Bahkan lebih jauh, konflik sosial semakin sering terjadi di berbagai wilayah investasi.

Ketika Pemkab Kutai Timur menyatakan bahwa potensi bahan baku bagi pabrik semen dari Gunung Sekerat, Kaliorang-Bengalon, sangat melimpah, maka yang terbayang bagi sebagian masyarakat adalah semakin banyaknya peluang bekerja di pabrik semen. Namun

kenyataannya terdapat sebuah dampak yang jauh lebih besar terhadap hilangnya sumber kehidupan bagi rakyat di sekitar Gunung Sekerat. Hingga saat ini rakyat di seluruh kampung di sekitar Gunung Sekerat sangat menggantungkan ketersediaan air bersih dan air untuk pertanian dari keberadaan gunung tersebut. Kemudian bilasaja gunung tersebut ditambang untuk kepentingan pabrik semen, maka bukan tidak mungkin krisis pangan dan krisis kehidupan akan terjadi di kampung-kampung di sekitarnya.

Demikian pula ketika perkebunan kelapa sawit mulai melakukan pembersihan lahan (land clearing), maka yang terjadi adalah hilangnya cadangan air tanah yang berdampak pada semakin keringnya sumur-sumur sumber air bersih bagi rakyat di kawasan tersebut. Bahkan perkebunan besar di banyak tempat di Kaltim juga telah melakukan penggusuran terhadap kubur adat, kebun buah dan rotan komunitas, serta perkampungan. Sementara itu, tawaran pekerjaan yang selalu dijanjikan kepada komunitas tersebut sangat jarang sekali diwujudkan, karena alasan tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan.

Hal lain yang juga terjadi pada kawasan sekitar pertambangan batubara adalah tidak lagi adanya air bersih bagi rakyat, termasuk hilangnya persawahan/perladangan hanya karena tanaman yang ditanam harus mati perlahan akibat tak ada air, dan walaupun tersedia hanyalah air asam tambang.

Mencari Investasi Yang Berpihak Pada Rakyat

Perilaku investor, apalagi bila berasal dari China dan Korea Selatan, sangatlah tidak berpihak bagi kepentingan rakyat, apalagi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Sangat jelas terlihat bahwa negara China dan Korea Selatan tidak memiliki sebuah aturan yang tegas terhadap keberpihakan kepada lingkungan hidup dan kehidupan komunitas lokal. Gambaran ini sangat semakin jelas ketika kemudian negara China sangat tidak peduli terhadap kayu pembalakan haram (destructive logging) yang masuk ke negara mereka, termasuk juga ketika batubara yang diimpor mereka berasal dari kawasan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan tatanan sosial-budaya komunitas lokal.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun pola investasi yang benar-benar bagi kesejahteraan rakyat. Bahkan sudah seharusnya perekonomian rakyat dibangun dengan bersumber dari rakyat itu sendiri, serta bukan berharap dari investor, apalagi investor asing. Negeri ini diproklamasikan kemerdekaannya untuk mewujudkan cita-cita bebas dari penjajahan, termasuk penjajahan ekonomi, serta untuk

membangun kesejahteraan bersama, dan bukan hanya bagi kesejahteraan segelintir orang.

Ekonomi kerakyatan yang selalu didengungkan, selama ini tidak pernah dibangun secara serius dan benar oleh pemerintah. Komoditas pertanian dan perkebunan yang dihasilkan oleh komunitas lokal sangat tidak terfasilitasi industri hilirnya, sehingga secara perlahan ditinggalkan dan diabaikan, hingga suatu waktu digusur secara paksa demi kepentingan investasi.

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik ini sudah selayaknya dimaknai sebagai sebuah perubahan cepat dan pembebasan negeri ini dari penjajahan ekonomi baru yang telah cukup lama difasilitasi oleh pemerintah. Sendi-sendi ekonomi rakyat harus kembali digerakkan dengan melindungi kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan rakyat, dan tidak menyerahkan lahan-lahan produktif di propinsi ini kepada kepentingan investasi asing. Mari bersama-sama menikmati sebuah KEMERDEKAAN yang sebenarnya.

Tata Ruang Kaltim Harus Berperspektif Ekologis

07. 22. 2007 - 1,538 dilihat

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas daratan 19.884.117 hektar dengan wilayah laut seluas 1.021.657 hektar. Dari hasil paduserasi tahun 1999, Kalimantan Timur memiliki kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) seluas 5.170.784,60 hektar, kawasan budidaya kehutanan (KBK) seluas 9.774.753,19 hektar, hutan lindung 2.816.319,73 hektar, cagar alam 1.478.367,79 hektar, taman hutan raya 71.099,80 hektar, Taman Nasional 204.399,06 hektar, hutan produksi 25.786,38 hektar. Hamparan hutan yang didominasi oleh hutan dipterocarpaceae, yang saat ini sebagian besar telah mengalami degradasi.

Tipe hutan di Kalimantan mencakup hutan bakau, hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar, hutan kerangas, hutan Dipterocarpaceae dataran rendah, hutan kayu besi (ulin), hutan pada batu kapur dan tanah ultra basa, hutan bukit Dipterocarpaceae dan beberapa formasi hutan pegunungan. Kalimantan memiliki lebih dari 3.000 pohon, termasuk 267 jenis Dipterocarpaceae, lebih dari 2.000 jenis anggrek dan lebih dari 1.000 jenis pakis, lebih dari 146 jenis rotan, dan pusat distribusi karnivora kantung semar (*Nepenthes* sp).

Di Kalimantan Timur tercatat memiliki 133 jenis mamalia atau merupakan 60 % dari jumlah mamalia yang ada di Kalimantan yang jumlahnya mencapai 222 jenis. Dari 222 jenis mamalia tersebut Kalimantan memiliki 44 jenis mamalia endemik. Semua jenis primata Kalimantan ada di Kalimantan Timur, yaitu 11 jenis dari 5 famili. Kalimantan juga memiliki 479 jenis burung (termasuk burung migrasi), 37 jenis diantaranya merupakan burung endemik Kalimantan, 141 jenis katak yang termasuk ke dalam 6 famili, 9 famili bangsa Lacertilia, 7 famili bangsa Chelonia serta 133 jenis ular darat.

Pada berbagai wilayah Kaltim terdapat ekosistem yang jarang, terancam atau hampir punah. Ekosistem tersebut antara lain: Ekosistem Karst, Ekosistem Hutan Kerangas, Ekosistem Mangrove, Ekosistem Rawa Gambut, Ekosistem Dipterocarp Dataran Rendah (<100 mdpl), serta Ekosistem Hutan Berkabut (Cloud Mountain Forest/Pringet) (>1.500 mdpl).

Sebuah hal yang juga menjadikan kawasan Kalimantan merupakan kawasan khas adalah tidak memiliki tanah-tanah vulkanik yang subur. Sistem pertanian memiliki beberapa kendala, yaitu kesuburan tanah rendah, erosi tanah, tegangan mineral, serbuan gulma yang merusak,

kegagalan sistem pengairan, bahaya banjir yang semakin meningkat, penggambaran, pencemaran oleh zat kimia, kehilangan pengendali alami bagi serangga, perluasan dan industri daerah perkotaan.

Sementara itu, melihat peta tutupan lahan hutan di dataran rendah Kalimantan yang sudah terfragmentasi terdapat kecenderungan hutan yang masih berada dalam kondisi baik berada di daerah dataran tinggi yang tersebar luas disepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hutan disini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dimana setidaknya terdapat 40 - 50 % jenis flora dan fauna yang hanya dapat ditemui di Kalimantan. Fungsi penting yang dimainkan oleh daerah ini adalah fungsi sebagai “menara air” bagi pulau Kalimantan dimana kawasan ini setidaknya mengalir sumber air bagi 14 dari 20 sungai utama di Pulau Borneo. Sungai Mahakam merupakan sungai besar yang hulunya berada dan airnya berasal dari kawasan dataran tinggi.

Berbagai aktivitas pembangunan hingga saat ini telah berkontribusi pada hilangnya berbagai keanekaragaman hayati dari wilayah ini. Sebagian besar kawasan hutan telah berubah menjadi hamparan lahan kritis. Tidak salah kemudian Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam-Berau (BPDAS Mahakam-Berau) menyatakan bahwa lahan kritis di Kalimantan Timur telah mencapai luasan 6.402.471 hektar yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, pembalakan haram, serta pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepentingan sektor lainnya. Setiap tahunnya tidak kurang dari 350.000 hektar hutan yang terdegradasi di berbagai wilayah di provinsi ini.

Provinsi Kaltim sangat royal dalam memberikan pemberian perijinan bagi pengambilan kekayaan alam yang ada di Kaltim. Tidak kurang dari 2,5 juta ha telah diberikan bagi perkebunan besar kelapa sawit (terdapat tidak kurang 145 perkebunan besar swasta dengan luas 1,8 juta ha memperoleh ijin dari Bupati/Walikota, dimana 34 perusahaan dengan luas 380 ribu hektar telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU), dan baru seluas 187 ribu hektar yang berproduksi), 1,5 juta ha bagi pertambangan, 8,1 juta ha bagi perusahaan hutan (6,4 juta ha HPH (88 perusahaan) dan 1,7 juta ha HTI (25 perusahaan)). Sementara luas lahan pertanian kian menurun, yaitu hanya sekitar 141 ribu ha yang panen pada tahun 2005. Dalam berbagai kesempatan Pemprov Kaltim bahkan menyatakan bahwa perkebunan besar kelapa sawit akan terus ditambah hingga luasan 3,5 - 5 juta ha di wilayah Kaltim.

Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada terjadinya bencana ekologis, seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan semakin kerap terjadi di berbagai kawasan di Kalimantan Timur. Hingga pada bulan Mei-Juni 2007, berbagai kawasan di Kutai Barat, Kutai Kartanegara,

Kutai Timur dan Berau mengalami peristiwa bencana banjir yang sangat luas dengan waktu yang lebih lama dibandingkan kejadian banjir pada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, sistem pengelolaan kekayaan alam yang dilakukan oleh komunitas lokal kian tergerus oleh masuknya perusahaan-perusahaan yang memutuskan rantai perladangan gilir-balik yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh sebagian komunitas lokal/adat. Perladangan gilir-balik merupakan hasil eksperimen jangka panjang oleh komunitas lokal/adat di berbagai wilayah di Kaltim harus bertarung dengan pembukaan hutan untuk kepentingan industri kayu, kelapa sawit, hingga batubara dan bahan mineral galian lainnya, serta industri migas. Kearifan lokal yang telah diakui oleh masyarakat internasional secara perlahan hanya menyisakan ritual budaya yang tak lagi bermakna bagi kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupannya. Hutan, bagi masyarakat Kalimantan Timur telah menjadi penopang kehidupan. Kelompok-kelompok masyarakat lokal/adat memiliki interaksi yang kuat terhadap hutan sebagai sumber kehidupan dan lahan berkehidupan.

Komoditi madu, rotan, serta produk-produk pertanian dan perkebunan rakyat, hingga saat ini tidak pernah terfasilitasi dengan baik oleh pelayan publik (pemerintah). Bahkan beberapa kawasan produktif rakyat sebagian besar telah beralih kepada kepemilikan pemodal besar. Seperti yang terjadi di Kertabuana, Kutai Kartanegara, dimana sawah produktif masyarakat harus berganti dengan pertambangan batubara, kebun karet dan rotan rakyat di berbagai wilayah di Kutai Barat, Kutai Timur hingga Berau harus mengalah dengan kepentingan perkebunan besar kelapa sawit, hingga kawasan karst yang merupakan sumber air bersih komunitas di Kaliorang, Kutai Timur yang sedang terancam akan diserahkan pemerintah kepada perusahaan semen.

Secara substansi, di dalam RTRWP Kaltim yang akan disahkan dalam bentuk perda, sudah saatnya meletakkan kawasan-kawasan yang merupakan kawasan dilindungi bagi kepentingan keberlanjutan kehidupan komunitas lokal/adat serta rakyat Kaltim, dalam hal ini sekurang-kurangnya adalah:

1. Kawasan dilindungi bagi kehidupan (sosial-ekonomi-budaya) komunitas lokal/adat, seperti kawasan kebun rotan, kawasan pohon madu, kawasan air garam (sopon), kawasan tradisional pertanian-perladangan, kawasan subsisten (obat-obatan, kayu bakar, dan lainnya), kawasan penting bagi budaya komunitas (kubur, wilayah ritual, dan lainnya), serta kawasan-kawasan lain yang proses penentuannya dilakukan oleh komunitas lokal/adat masing-masing;

2. Kawasan dilindungi untuk fungsi ekologis, seperti kawasan untuk penyedia air bersih, kawasan pengendali banjir, kawasan untuk mengurangi erosi-sedimentasi di perairan, serta kawasan perlindungan dari bencana ekologis;
3. Kawasan dilindungi bagi keberlanjutan kehidupan flora-fauna, seperti kawasan migrasi fauna, kawasan habitat asli bagi flora-fauna endemik, ekosistem unik dan kritis, dan lainnya yang dapat diidentifikasi bersama dengan peneliti lokal.

Menjadi penting bagi Pemprov Kaltim beserta DPRD Kaltim untuk mewujudkan Kaltim yang lebih ramah bagi rakyatnya, terhindar dari bencana ekologi, serta benar-benar dapat memfasilitasi peningkatan kesejahteraan rakyat secara lebih nyata. RTRWP Kaltim yang diharapkan menjadi sebuah dokumen publik sebagai pegangan arah pembangunan berdasarkan keruangan, haruslah benar-benar berpihak pada rakyat. Bukan lagi saatnya pemerintah berlomba-lomba memfasilitasi kepentingan investasi yang pada akhirnya hanya melahirkan kesengsaraan bagi rakyat. Negeri ini kaya dan dapat memberikan kemakmuran, bila saja pemerintah, sebagai pelayan publik, benar-benar menunjukkan keikhlasan dan kejujurannya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi sesama.

Agar Tak Memetakan Ruang Dalam Gelap

07. 20. 2007 - 582 dilihat

Konflik keruangan yang seringkali terjadi di berbagai wilayah di negeri ini masih akan terjadi. Tumpang tindih kawasan, baik antara kawasan yang dikelola oleh komunitas lokal/adat dengan kawasan yang diberikan ijin oleh pemerintah kepada pengusaha, maupun antara ijin usaha, selalu dipandang sebagai sebuah permasalahan dalam berbagai pertemuan. Namun hingga saat ini tak pernah juga ditemui sebuah jalan alternatif menuju penyelesaian konflik keruangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta 13 pemerintah kabupaten-kota di Kalimantan Timur telah menyelesaikan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang akan digunakan sebagai acuan proses pembangunan di masa mendatang. RTRWP merupakan sebuah dokumen penting untuk melihat arah pembangunan wilayah di masa mendatang, agar benar-benar dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan negeri ini.

Pemerintah RI pada tanggal 26 April 2007 telah mengesahkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang tentang pentingnya penataan ruang menjadikan perlunya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Roh yang dihembuskan dalam undang-undang tersebut kemudian sangat tidak terlihat dalam proses penyusunan RTRWP Kaltim. Proses penyusunan RTRWP Kaltim yang sangat tertutup dan hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah. Hingga saat ini masih belum jelas terpapar tentang RTRWP Kaltim itu sendiri bagi rakyat di Kaltim. Keterlibatan masyarakat sangat tidak terlihat dalam proses penyusunan tata ruang Kaltim, akan menjadikan rakyat Kaltim kembali sebagai tamu di tanahnya sendiri.

Peran Rakyat Dalam Tata Ruang

Bila merujuk pada UU No. 26/2007, maka penataan ruang harus dilaksanakan berdasarkan asas: keterpaduan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan, serta;

akuntabilitas.

Peran rakyat dalam tata ruang sebenarnya sudah dibuka dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam pasal 60-66 UU No. 26/2007 sangat jelas diatur mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang. UU tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang serta pelibatan dalam penyusunan tata ruang, serta pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sayangnya kemudian Pemerintah masih belum membuka ruang keterlibatan publik dalam penyusunan rencana tata ruang.

Konflik keruangan yang selama ini terjadi, telah dipahami oleh berbagai pihak sebagai sebuah konflik yang berawal dari tidak dilibatkannya rakyat dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah. Pertarungan kepentingan keberlanjutan kehidupan komunitas lokal dengan kepentingan pemodal (yang kemudian dianggap lebih benar oleh pemerintah akibat telah sesuai tata ruang) akan terus terjadi bilasaja pemerintah tidak membuka ruang bagi publik dalam proses penyusunan tata ruang wilayah.

Pemprov Kaltim hingga saat Rancangan Perda RTRWP Kaltim disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) untuk menuju pengesahan, tidak pernah melakukan proses-proses konsultasi publik, apalagi untuk membuka Raperda RTRWP Kaltim kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi-informasi. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa hingga hari ini Pemprov Kaltim telah memetakan ruang dalam gelap.

Tak Sukar Membuka Ruang Bagi Rakyat

Pemerintah sebagai pelayan publik yang menjalankan roda pemerintahan dan menjaga nafas pembangunan, sebenarnya tak terlalu sukar untuk memberikan ruang bagi publik untuk terlibat dalam setiap tahapan penataan ruang. Sejak penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang, harusnya pemerintah telah memberikan ruang seluasnya bagi publik untuk terlibat aktif.

Ketakutan pemerintah akan terlalu lamanya proses bila rakyat terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang sangatlah tidak beralasan. Pemerintah Kota Balikpapan bahkan melakukan proses konsultasi publik di setiap kecamatan untuk menyerap masukan dari publik terhadap rencana tata ruang kotanya. Namun hal ini tidak diikuti oleh pemerintah kabupaten-kota lainnya di Kaltim. Bilasaja proses ini

dilakukan secara bersama, maka Pemerintah Propinsi Kaltim tidak akan terlalu sukar untuk melakukan penjaringan partisipasi publik terhadap rencana tata ruang yang sedang disusun.

Sudah selayaknya pemerintah membuka ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam proses penyusunan rencana tata ruang, maupun terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang di masa mendatang. Bila saja pemerintah memberikan ruang ini, maka konflik ruang yang selama ini selalu menjadi permasalahan penting dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dapat berkurangan.

Agar Tak Memetakan Ruang Dalam Gelap

RTRWP Kaltim haruslah menjadi sebuah gambaran bagi pencapaian kesejahteraan rakyat Kaltim, dan bukan semata bagi kepentingan pelayan publik (pemerintah) maupun pemodal (pengusaha) semata. Dalam tahapan prosesnya, sudah keharusan bagi pemerintah untuk melakukan proses konsultasi publik ke tingkat terdekat dengan komunitas lokal/adat, bukan semata dilakukan di ibukota propinsi (Samarinda) maupun di ibukota kabupaten/kota lainnya di Kaltim.

Pemerintah, termasuk DPRD Kaltim, harus menyediakan ruang khusus bagi rakyat untuk mengetahui RTRWP Kaltim yang sedang dibuat, sebelum kemudian disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) dalam sidang paripurna DPRD Kaltim. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat Kaltim dalam memberikan masukan terhadap RTRWP Kaltim yang akan disahkan menjadi perda akan sangat bermanfaat bagi masa depan Kaltim dan rakyatnya. Selain itu, proses tersebut juga sangat sesuai dengan amanat UUD RI, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Proses penyusunan RTRWP Kaltim yang telah melibatkan rakyat, diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bersama, baik oleh Pemerintah sebagai pelayan publik, Pengusaha sebagai pengguna lahan sementara, serta dapat dipatuhi bersama oleh rakyat. Rakyat pun pada akhirnya dapat turut aktif dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. RTRWP Kaltim di masa datang diharapkan bukanlah hanya semata sebuah dokumen yang akan dilihat setiap lima tahun ataupun dua puluh tahun, namun menjadi sebuah dokumen publik yang dapat terus menjadi acuan dalam proses pemberian perijinan bagi pemodal yang akan berinvestasi di wilayah Kaltim.

Bila Pemerintah tetap saja tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk

terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang, maka rakyat harus merebut haknya. Sudah saatnya rakyat merebut hak-hak rakyat yang selama ini tidak pernah diberikan oleh pelayan publik (pemerintah). Bukan lagi waktunya rakyat hanya berdiam diri, duduk dan menantikan penggusuran dan penghilangan sumber kehidupannya atas nama kepentingan investasi dan pembangunan yang (katanya) dilindungi oleh hukum negeri ini. Bagi rakyat negeri yang (katanya) kaya akan sumberdaya alam ini, sekarang saatnya bersatu, berserikat dan berlawanan!

Pemanasan Global, Bencana Ekologi dan Krisis Pangan

05. 30. 2007 - 2,373 dilihat

Suhu kota Samarinda setiap tahun kian meningkat. Mungkin tak terlalu banyak yang merasakan sebuah perubahan peningkatan suhu yang ada di lingkungannya, hanya karena peningkatan suhu berlangsung secara perlahan. Di lain sisi, kejadian banjir di berbagai wilayah Kalimantan Timur semakin meningkat intensitasnya. Para peneliti sebagian menyatakan bahwa peningkatan suhu merupakan sebuah akibat dari semakin perubahan ekosistem dunia dan juga perubahan pada lapisan atmosfer yang melingkupi bumi.

Pemanasan global, yang dapat dimaknai sebagai kejadian meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan Bumi. Dalam sejarahnya, planet Bumi telah menghangat (dan juga mendingin) berkali-kali selama 4,65 milyar tahun sejarahnya. Hingga kini Bumi menghadapi pemanasan yang cepat, yang oleh para ilmuwan dianggap disebabkan aktifitas manusia.

Terdapat berbagai penyebab yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global tersebut. Penyebab utama pemanasan ini adalah pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, yang melepas karbondioksida dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Ketika atmosfer semakin kaya akan gas-gas rumah kaca ini, ia semakin menjadi insulator yang menahan lebih banyak panas dari Matahari yang dipancarkan ke Bumi.

Meningkatnya Bencana Ekologi

Bencana ekologi kian semakin sering terjadi di berbagai belahan di dunia. Kejadian banjir, kekeringan dan longsor telah menjadi berita harian. Dalam setiap tahunnya, berbagai daerah di Kaltim mengalami tiga kali kejadian banjir. Bahkan di tahun ini, kejadian banjir telah menjadi sebuah kejadian yang sangat luar biasa dibandingkan tahun sebelumnya, karena telah terjadi dalam waktu yang lebih lama dan wilayah kejadian yang lebih luas.

Sementara di sebagian wilayah lain di Indonesia tengah mengalami kekeringan berkepanjangan. Tanah-tanah merekah dan tak cukup baik untuk diusahakan sebagai lahan pertanian. Krisis air bersih juga melanda wilayah-wilayah tersebut.

Sebuah fenomena yang sebenarnya telah diprediksi sebelumnya. Akibat pemanasan global, beberapa daerah dengan iklim yang hangat akan menerima curah hujan yang lebih tinggi, tetapi tanah juga akan lebih cepat kering. Kekeringan tanah ini akan merusak tanaman bahkan menghancurkan suplai makanan di beberapa tempat di dunia. Hewan dan tanaman akan bermigrasi ke arah kutub yang lebih dingin dan spesies yang tidak mampu berpindah akan musnah.

Krisis Pangan Yang Tak Diatasi

Di perkotaan, sebagian masyarakat mulai merasakan keresahannya dengan semakin meningkatnya harga produk-produk pangan. Harga minyak goreng yang melambung hingga harga beras yang mencekik setiap keluarga di negeri ini. Operasi pasar selalu dilakukan sebagai jawaban singkat atas krisis yang dialami rakyat negeri ini.

Iklim dan cuaca yang sudah tidak mampu lagi diprediksi keberadaannya menjadikan sebagian besar lahan pertanian produktif tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat negeri ini. Banjir dan kekeringan telah menghadirkan kegagalan panen. Petani semakin terpuruk diantara relung keterpurukan negeri saat ini.

Semakin meluasnya perijinan yang diberikan kepada industri ekstraktif dan industri besar dan luas oleh pemerintah juga sangat berkontribusi terhadap terjadinya krisis pangan. Lahan-lahan produktif rakyat secara paksa dialihkelolakan kepada pemodal-pemodal besar dengan dalih untuk menopang ekonomi makro negeri. Perluasan lapangan kerja dan kepastian investasi menjadi sebuah slogan yang diangkat untuk melakukan penggusuran lahan produktif rakyat.

Agresifnya pemerintah dalam berpihak pada investasi juga telah secara nyata menghadirkan kejadian bencana ekologi di berbagai wilayah di negeri ini. Banjir dan kekeringan juga tidak hanya semata disebabkan akibat pemanasan global, namun lebih disebabkan pada hancurnya tatanan ekosistem sebuah kawasan akibat pembukaan hutan, rawa, kerangas dan pegunungan kapur bagi kepentingan industri.

Memilih Berdiam Atau Melakukan Sesuatu

Ada dua pilihan bagi rakyat negeri ini. Berdiam diri menyaksikan penghancuran ekosistem berkelanjutan ataukah mengambil langkah-langkah nyata dalam mengatasi krisis kehidupan di masa mendatang. Kejadian bencana ekologi dan krisis pangan harusnya menjadi sebuah pembelajaran yang baik bagi penciptaan sistem berkehidupan yang lebih baik.

Rakyat sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap alam dan ekosistemnya, serta memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah gerak negeri ini, sudah selayaknya mengambil alih kedaulatan yang selama ini diambil paksa oleh segelintir pihak yang menamakan dirinya pemerintah.

Posisi pemerintah yang harusnya menjadi pelayan publik harus benar-benar diwujudkan. Tidak semata melakukan pendekatan kepada rakyat pada masa-masa kampanye pemilihan anggota legislatif atau kepala daerah, namun lebih jauh dari itu, pemerintah dan pihak lainnya harus berada dalam membela kepentingan rakyat.

Bersatu dan berdaulat atas sumber-sumber kehidupan harus menjadi kerangka pikir rakyat dalam menjalani kehidupan. Melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan proses-proses penghancuran ekologi yang tengah berlangsung di sekitarnya menjadi sebuah keharusan. Tidak memilih berdiam diri dan menjadi anak manis yang menikmati segala krisis yang sedang berlangsung.

Krisis pangan, krisis air bersih, hingga berbagai krisis lainnya, bila tidak dilakukan upaya sistematis secepatnya, akan berbuah pada sebuah pertarungan kehidupan, baik secara horisontal maupun secara vertikal. Kembali lagi, rakyat yang akan menjadi korban. Sementara kelompok-kelompok kepentingan lain akan dengan mudah untuk melarikan diri dari pertarungan yang berlangsung dan mencari tempat lain untuk berkehidupan.

Pemanasan global, bencana ekologi dan krisis pangan bukanlah sebuah permasalahan yang dapat diserahkan kepada waktu untuk menyelesaikannya. Rakyat dapat menentukan pilihan, berdiam diri atau melakukan sesuatu!

Menelisik Keberpihakan Konservasi

05. 28. 2007 - 1,102 dilihat

Konservasi telah menjadi sebuah kata yang selalu didengungkan ketika kejadian bencana ekologi semakin intens pada berbagai wilayah di negeri ini. Konservasi kerap kali diidentikan dengan upaya perlindungan terhadap sebuah kawasan maupun terhadap spesies. Pemerintah pun kemudian merespon dengan memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan konservasi yang tengah dilakukan.

Terlalu sedikit yang mencoba menggali lebih dalam terhadap para pihak yang tengah bermain dalam isu konservasi. Kepentingan apa yang tengah dikedepankan dalam konteks konservasi di negeri ini. Apakah kemudian benar ketika slogan konservasi selalu berbunyi “Konservasi untuk kesejahteraan masyarakat”?

Menilik kegiatan konservasi yang tengah berlangsung di Kalimantan Timur, akan menemukan sebuah fenomena konservasi klasik yang berkaca pada awal kali konservasi dimulakan di Amerika Serikat dengan menetapkan kawasan Yellowstone sebagai sebuah kawasan konservasi.

Pada perjalanannya, konflik di kawasan konservasi selalu terjadi. Dalam setiap kawasan yang telah ditetapkan sebagai taman nasional di Indonesia, ditemukan berbagai permasalahan, mulai dari permasalahan pembalakan haram (illegal logging), perambahan hingga perburuan satwa dilindungi. Posisi rakyat selalu diangkat sebagai permasalahan utama dalam kawasan konservasi. Padahal lebih banyak permasalahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemodal di kawasan konservasi, semisal pertambangan di kawasan lindung, pengalihan fungsi lahan untuk kepentingan industri, hingga pembangunan jalan yang melintasi kawasan taman nasional.

Sementara itu, lembaga konservasi internasional dan juga pekerjanya yang beraktivitas di Kaltim, tidak juga memiliki pemahaman yang cukup tentang konservasi. Terbukti dengan perilaku yang tidak layak terhadap satwa, membawa Anggrek Hitam yang dilindungi untuk kepentingan pribadi dengan dalih akan melakukan pameran, hingga kematian berkelanjutan orangutan di pusat rehabilitasi.

Konservasi Itu Sebuah Bisnis

Konservasi saat ini telah menjadi sebuah bisnis. Walaupun berdasarkan catatan, hanya \$0,56 yang dikururkan setiap hektar dalam setiap

tahunnya bagi kawasan taman nasional di Indonesia, senyatanya pada tahun 2006 telah terdapat \$38,01 juta yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendanaan konservasi dan \$53,37 juta yang telah dikeluarkan oleh lembaga non pemerintah dan donor internasional.

Mekanisme bisnis konservasi baru akan terlihat pada fase setelah 5 tahun sebuah lembaga konservasi (internasional) melakukan aktivitas di sebuah kawasan konservasi. Isu ekowisata (ecotourism) diangkat sebagai bungkus dari aktivitas bisnis yang ingin dilakukan. Di Taman Nasional Komodo, beberapa tahun lalu dibentuk sebuah perusahaan bernama PT Putri Naga Komodo yang sahamnya sebagian dimiliki oleh lembaga konservasi internasional (The Nature Conservancy) yang kemudian juga memperoleh utang dari lembaga keuangan internasional (International Finance Institutions) untuk menguatkan permodalannya. Sementara kelompok-kelompok nelayan lokal “dipaksa” untuk mencari wilayah tangkapan lainnya yang semakin jauh dari tempat berkehidupannya.

Di Kalimantan Timur, sebuah lembaga rehabilitasi dan reintroduksi orangutan, secara perlahan membeli hektar demi hektar lahan hingga mencapai luas 1.700 hektar untuk kepentingan rehabilitasi orangutan, yang kemudian juga membangun sebuah penginapan mewah yang dapat menyaksikan orangutan di kawasan tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah untuk pendanaan konservasi orangutan.

Pada beberapa pulau-pulau kecil di Kaltim, beberapa pihak asing juga mulai membangun penginapan di pulau untuk kepentingan wisata laut. Investasi yang masuk sangat tidak mampu diawasi oleh pemerintah sehingga kemudian negosiasi yang berlangsung adalah langsung antara pemilik lahan di pulau dengan investor, yang kemudian juga melakukan klaim atas kawasan pantai, sehingga nelayan juga harus semakin jauh dari wilayah tangkapannya.

Pada wilayah lain, desa wisata konservasi dijadikan sebuah ikon. Kepentingan konservasi dikedepankan dengan sebuah slogan “untuk kesejahteraan rakyat). Peneliti kemudian keluar masuk di kawasan konservasi tanpa pernah melakukan pemindahan pengetahuan kepada komunitas lokal. Wisata seolah menjadi satu-satunya kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal di dalam kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi.

Menelusuri Aliran Dana Konservasi

Begitu banyak dana yang berlabelkan konservasi yang masuk di wilayah ini. Bahkan ada sebuah lembaga yang juga mengaku berlabel konservasi

berani menjanjikan kepada pemerintah kabupaten di Kalimantan Timur untuk mendukung konservasi di wilayah tersebut, dengan catatan pemerintah kabupaten bersedia melakukan kerjasama dengan lembaga tersebut. Ketika dilakukan penelusuran terhadap lembaga tersebut secara informal oleh pejabat pemerintah pusat, ditemukan ketidakjelasan keberadaan lembaga tersebut di kantor pusatnya di Eropa.

Beberapa lembaga konservasi internasional juga menerima pendanaan dari perusahaan perminyakan dan perikanan yang besar di internasional. Jargon yang diangkat adalah sebagai sebuah bukti kepedulian perusahaan. Kenyataan yang ditemui adalah pendanaan diberikan untuk kepentingan meredam konflik di tingkat masyarakat dan juga untuk penguasaan sebuah wilayah konsesi untuk kepentingan eksploitasi kekayaan alam di masa mendatang.

Aliran dana konservasi yang masuk di Kaltim pun, sebagian besar diperuntukkan bagi peneliti dan pekerja konservasi asing. Icon “konservasi untuk kesejahteraan masyarakat” seolah terbantahkan dengan kecilnya alokasi pendanaan bagi mendukung aktivitas di tingkat masyarakat di kawasan konservasi. Lembaga konservasi yang memperoleh aliran dana konservasi hanya mengalokasikan 0-15% pendanaan bagi kepentingan masyarakat.

Program kerja yang dilakukan oleh lembaga konservasi sebagian besar adalah pertemuan di hotel berbintang, studi banding ke luar negeri, pemberian penghargaan bagi pejabat pemerintah, hingga membiayai peneliti-peneliti asing yang tidak pernah jelas hasil penelitiannya.

Pemerintah sendiri juga tidak memiliki kemampuan pengawasan terhadap penggunaan pendanaan konservasi. Mekanisme keterbukaan pendanaan yang harusnya dilakukan dalam aliran dana konservasi tidak pernah dilakukan. Bahkan pemerintah sendiri sangat sukar untuk mampu mengakses alokasi pendanaan dan besaran pendanaan yang telah beredar di wilayahnya.

Konsesi Konservasi Untuk Penguasaan Kekayaan Alam

Lembaga konservasi internasional terlihat sebagai lembaga yang sangat baik di tingkat publik. Kepentingan generasi mendatang selalu dikemukakan. Senyatanya secara perlahan lembaga konservasi internasional melakukan penguasaan terhadap sebuah kawasan konservasi. Lihat saja apa yang telah terjadi di berbagai taman nasional dan kawasan lindung di negeri ini, dimana pejabat pemerintah harus tunduk pada pekerja di lembaga konservasi internasional. Segala yang

diucapkan oleh pekerja lembaga konservasi seolah telah menjadi titah, karena mereka menjanjikan kucuran uang bagi pendanaan program konservasi.

Bila menilik apa yang terjadi di Amerika Serikat, sebagai negara yang pertama kali melahirkan istilah konservasi, lembaga konservasi internasional melakukan pembelian lahan dengan dalih untuk kepentingan konservasi satwa. Pada perjalanannya kemudian kawasan-kawasan tersebut dialihkan untuk kepentingan perumahan mewah dan juga untuk dieksploitasi kekayaan alamnya.

Di Kaltim sendiri, lembaga konservasi internasional selalu berusaha untuk memiliki konsesi konservasi. Isu konservasi selalu dikedepankan kepada pejabat pemerintah maupun kepada publik ketika niatan tersebut diungkapkan agar memperoleh dukungan. Namun dibalik semua itu, ada kepentingan lain yang sedang dimainkan. Pendanaan besar yang berasal dari perusahaan distributor produk kayu terbesar di Amerika Serikat menjadikan penguasaan kawasan lebih pada bagaimana menjamin ketersediaan bagi pasokan kayu bagi Amerika Serikat.

Selain juga, pendanaan yang bersumber pada perusahaan migas internasional, semakin memperjelas bahwa penguasaan kawasan konservasi tidaklah untuk menjamin kesejahteraan komunitas lokal, namun lebih pada menjamin keberlangsungan produksi perusahaan migas. Belum lagi ternyata terjadi konflik kepentingan di dalam manajemen lembaga konservasi internasional, dimana pimpinan tingginya juga bekerja sebagai pejabat penting di perusahaan industri eksploitatif.

Untuk mengurangi konflik di tingkat pemerintah, kemudian lembaga konservasi internasional juga memberikan “upah” ataupun mempekerjakan secara langsung pegawai Departemen Kehutanan sebagai staf di lembaga konservasi, yang ketika telah pensiun kemudian direkrut sebagai pejabat penting di lembaga konservasi.

Bagaimana Seharusnya Keberpihakan Konservasi?

Telah begitu banyak hasil kajian yang menyatakan bahwa komunitas adat/lokal telah memiliki sistem pengelolaan kawasan yang bila dikomparasi dengan definisi konservasi, sangat berpihak pada kepentingan konservasi. Namun kemudian tidak pernah dilakukan perlindungan terhadap sistem lokal tersebut. Hanya beberapa kawasan di negeri ini yang telah memperoleh perlindungan penuh dari negara terhadap sistem lokal yang mereka anut.

Konservasi, bila memang benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat lokal, haruslah mengeluarkan begitu banyak sumberdaya bagi perlindungan terhadap sistem lokal. Bukan dengan mendeklarasikan sebuah kawasan, memfasilitasi peneliti asing ataupun mengajak studi banding. Namun lebih pada itu, bagaimana kemudian sistem lokal mampu dikelola oleh komunitas demi kepentingan inter dan antar generasi di dalam komunitas mereka.

Departemen Kehutanan harus menarik semua staf mereka yang sedang bekerja di lembaga konservasi internasional dan kemudian melakukan pengumpulan pendanaan konservasi internasional yang masuk di negeri ini untuk kemudian dialokasikan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat di kawasan konservasi. Pemerintah juga harus segera melakukan audit terhadap lembaga konservasi internasional dan melakukan pelarangan terhadap aktivitas langsung yang dilakukan oleh lembaga konservasi internasional di berbagai wilayah di negeri ini.

Pemerintah harus kembali mewujudkan fungsi pelayan bagi publik. Bagaimana kemudian kepentingan publik difasilitasi dan didukung dalam sebuah kerangka pikir keberlanjutan kehidupan inter dan antar generasi.

Konservasi merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang telah dimiliki oleh komunitas lokal. Kesejahteraan komunitas lokal hanya akan bisa tercapai bilamana berbagai pihak melakukan dukungan terhadap pola relasi sosial-ekologi yang telah berkembang di tingkat lokal, dan tidak dengan memaksakan sebuah terminologi baru dalam komunitas tersebut. Melindungi sebuah kawasan dan jenis flora-fauna adalah bagi kepentingan kualitas kehidupan generasi saat ini yang lebih baik.

pembangunan berkelanjutan

05. 22. 2007 - 1,575 dilihat

kata pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sering kali didengar ketika berbicara tentang kelestarian lingkungan hidup. bagi pelayan publik, kata pembangunan berkelanjutan seolah merupakan jawaban bagi kehancuran ekologis alam negeri. pekerja NGO internasional pun selalu mengedepankan kata-kata tersebut dalam setiap kampanye dan proses lobby yang dilakukan.

sangat tidak pernah ditelaah lebih jauh berkaitan kelahiran kata pembangunan berkelanjutan. dalam sebuah penelusuran singkat, pembangunan berkelanjutan lahir sebagai sebuah konsep setelah terjadi re-kalkulasi sumberdaya di negara-negara industri. mereka melihat akan terjadi krisis bahan baku industri bila tidak mempersiapkan sebuah skenario baru dalam mencukupkan keberadaan bahan baku untuk menghidupkan industri mereka.

bila pada fase kolonialisme sumberdaya alam yang diambil dari negeri ini lebih pada rempah-rempah dan obat-obatan untuk mengatasi bencana penyakit di negara-negara utara, pada fase pasca perang dunia kedua, penjajahan harus tetap dilakukan dalam konteks ketersediaan bahan baku industri di negara-negara utara. namun bila mereka tetap menggunakan cara-cara lama dalam menjajah akan semakin tumbuh perlawanan yang lebih besar terhadap mereka, maka kemudian dilahirkanlah mekanisme penjajahan ekonomi melalui penguasaan kapital.

dalam perkembangannya, penguasaan secara kapital juga mengalami berbagai hambatan dan perlawanan yang cukup kuat. lalu kemudian, dilahirkanlah konsep pembangunan berkelanjutan untuk meredam perlawanan-perlawanan yang terjadi dan akan terjadi. pembangunan berkelanjutan dikedepankan seolah-olah menjadi sebuah negara sasaran berperspektif lingkungan hidup. negara yang 'dijajah' pun tak akan merasakan sedang berada dalam sebuah arena penjajahan. secara perlahan namun pasti, sumberdaya alam mereka beralih ke negara industri.

kemiskinan kemudian mencuat di negara-negara selatan. lalu lahirlah inisiatif MDGs (millennium development goals) yang juga seolah-olah memberikan perhatian terhadap permasalahan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga. sementara itu, cengkeraman negara industri bersama dengan kelompok pemodal semakin kuat menancapkan

kukunya di negara-negara penyedia sumberdaya.

industri di negara-negara penyedia sumberdaya tidak pernah dikembangkan, terutama industri-industri hilir. aliran modal ditahan untuk pengembangan hal tersebut. tidak pernah ada investasi besar yang masuk untuk menopang industri hilir. seluruh industri yang dikembangkan secara pesat adalah industri ekstraktif dan industri hulu.

penjajahan juga berlanjut dengan dijadikannya negara sumberdaya sebagai pasar dari barang-barang yang diproduksi oleh negara industri. aliran mata uang kembali menguat pada negara-negara industri, yang sebagian dikembalikan ke negara penyedia sumberdaya dalam bentuk pinjaman (loan) yang disertai dengan hibah (grant) agar seolah-olah ada kebaikan yang telah diperbuat oleh negara industri.

negeri ini sudah seharusnya sadar akan kejadian-kejadian bencana yang terus terjadi, sebagai sebuah peringatan atas telah terjadinya eksploitasi berlebihan atas sumberdaya alamnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku negara industri. pelayan publiknya harus segera bangun dari mimpi panjangnya agar tak terus berada dalam ruang keterpurukan. namun entah kapan mereka akan terbangun. bila tak jua terbangun, maka rakyat harus segera membangunkannya, bila tidak ingin segalanya terlambat, saat rumah telah hanyut oleh banjir.

politik konservasi

05. 13. 2007 - 1,254 dilihat

Indonesia yang memiliki Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam seluas 23.214.626,57 hektar, dimana sebagian besarnya merupakan Taman Nasional. Konsep pengelolaan Taman Nasional sangat sentralistik dan kerap mengabaikan keberadaan masyarakat adat/lokal yang justru telah hidup di kawasan-kawasan tersebut secara turun-temurun, dari generasi ke generasi. Hal inilah yang menjadi titik terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan konservasi dan kepentingan rakyat.

Untuk pengelolaan kawasan konservasi, seperti taman nasional, cagar alam, taman buru, hutan wisata dan hutan lindung, dilakukan pengelolaan oleh pemerintah melalui unit pelaksana teknis sebagai perwakilan pemerintah di lapangan. Sebagian lokasi kawasan konservasi juga dikelola bersama dengan lembaga konservasi internasional. Hingga saat ini pengelolaan hutan konservasi masih sangat jauh dari sisi pengelolaan hutan oleh rakyat, karena pengertian konservasi sebagai kawasan yang steril dari masyarakat masih menjadi pegangan pemerintah dalam pengelolaan hutan. Kondisi tersebut mengakibatkan seringnya terjadi konflik antara rakyat dengan pengelola kawasan, misalnya di Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Kutai, Taman Nasional Lore Lindu, Taman Nasional Rawa Aopa Watumoai, Taman Nasional Gunung Halimun, dan beberapa kawasan konservasi lainnya di Indonesia (WALHI, 2003). Dalam tahun 2006, TAPAL (Jaringan Advokasi Pembela Aktivis dan Lingkungan) mencatat telah terjadi kekerasan terhadap sedikitnya 50 aktivis lingkungan dan masyarakat berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam selama 2006. (Tempo Interaktif, 2007)

Di tingkat Propinsi dan Kabupaten, konservasi seolah-olah diabaikan. Dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinyatakan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuan konservasi adalah untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, dimana merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Sementara di dalam UU No. 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus, termasuk di dalamnya kawasan cagar budaya dan taman nasional.

Kompleksitas, ketidakjelasan serta ketidakpastian tata pengelolaan yang berujung konflik sumber daya alam dan manusia makin kerap terjadi di taman nasional. Tidak hanya meningkat dalam hitungan jumlah peristiwa yang terjadi, tetapi juga makin variatif dalam perkembangan modus maupun korban. Mulai dari peristiwa: penyerobotan dan konversi lahan, pembalakan liar, penangkapan spesies yang dilindungi, hingga kebakaran hutan yang berujung pada gangguan perekonomian dan punahnya sumber daya hayati. Kejadian ini tidak sekedar berdampak lokal, tetapi juga dirasakan efeknya dalam skala regional bahkan internasional. (WWF Indonesia, 2006)

Pengelolaan konservasi sendiri tidaklah terlepas dari keinginan daerah untuk melakukannya. Di Kalimantan Timur terdapat 2.533.015,77 hektar hutan lindung dan 1.823.649,96 hektar hutan suaka alam dan wisata. (BAPPEDA Kaltim, 2006). Terdapat dua taman nasional (Taman Nasional Kutai dan Taman Nasional Kayan Mentarang) seluas 1.559.129,00 hektar, 3 cagar alam (CA Kersik Luway, CA Teluk Adang-Teluk Apar, CA Sangkulirang) seluas 114.400,70 hektar, dan 1 taman hutan raya (Tahura Bukit Soeharto) seluas 61.250,00 hektar.

Dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Pasir telah mendeklarasikan dirinya sebagai kabupaten konservasi (KaltimPost, 2006). Dalam misinya, Kabupaten Pasir bertekad mewujudkan Kabupaten Konservasi dengan tujuan menjadikan Kabupaten Pasir sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati. Sedangkan sasaran tersebut adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (pasir.go.id, diakses 23 Februari 2007)

Kabupaten Kutai Timur telah pula mendeklarasikan Kawasan Lindung Wehea sebagai kawasan konservasi dan wisata. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menginvestasikan dana Rp 2,4 miliar dalam dua tahun terakhir. (Kompas, 2006) The Nature Conservancy bahkan telah memberikan penghargaan kepada Riza Indra Riadi, Kepala Dinas Lingkungan Kutai Timur, berkaitan dengan memprakarsai pembentukan Badan Pengelola hutan lindung di Wehea dan Huliwa, mengusulkan

alokasi anggaran untuk konservasi baik tingkat daerah maupun provinsi, mendorong dikeluarkannya ratifikasi Perda untuk menjadikan kawasan konservasi Karst dan acap datang dengan berbagai cara inovatif untuk menggalang dana bagi manajemen kolaboratif hutan dari kalangan pengusaha di Kalimantan Timur. (Nurhayati, 2007)

Dalam upaya konservasi di Kalimantan Timur, telah pula hadir lembaga konservasi internasional, yaitu World Wildlife Fund for Nature (WWF) yang bekerja dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, The Nature Conservancy (TNC) yang bekerja di Kabupaten Berau dan Kutai Timur, Turtle Foundation yang bekerja di Pulau Sangalaki Kecamatan Derawan Kabupaten Berau, Center for International Forestry Research (CIFOR) yang bekerja di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Pasir, dan TropenBos International yang bekerja di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Pasir.

Juga sebelumnya pernah hadir Lembaga Kerjasama Internasional Natural Resources Management Program (NRMP) yang didanai oleh USAID yang bekerja di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan dan Proyek Pesisir/USAID yang bekerja di Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Sementara juga akan bekerja di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau adalah Borneo Tropical Rainforest Foundation (BTRF).

Dari berbagai aktivitas pengelolaan konservasi di Kalimantan Timur hingga saat ini masih penting dipertanyakan tingkat kinerjanya. Bahkan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur masih mempertanyakan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap program konservasi di Kalimantan Timur. Semenjak dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah seringkali terjadi kegagalan para pelaksana di lapangan dalam menghadapi belum jelasnya batasan kewenangan kelola konservasi sumber daya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Belum lagi jika, klausul peraturan di UU No 5 Tahun 1990 dan UU No 32 Tahun 2004 itu dipersandingkan dengan perangkat perundang-undangan lainnya. Seringkali terjadi duplikasi, tumpang-tindih dan bahkan juga saling ketidakcocokan dengan kondisi real saat ini. Hal itu antara lain dikarenakan belum selarasnya klausul-klausul di dalam berbagai peraturan yang ada serta dinamika perubahan sosial yang terjadi. (Dinas Kehutanan, 2007; WWF Indonesia, 2006)

Bagiamanakah sebenarnya wujud politik konservasi di Kalimantan Timur? Kepentingan mana saja yang sedang bermain? Bagaimana kepentingan tersebut bermain? Masih harus digali untuk menemukan

sebuah jawab.

kemiskinan bahasa: sms, blog dan belajar pada alam

05. 1. 2007 - 1,144 dilihat

“Komisi Ujian Negara (State Examination Commission) menyatakan bahwa teknologi komunikasi telah mengikis kemampuan menulis remaja di Irlandia”. Demikian sebuah artikel yang dimuat oleh sebuah media online. Kemampuan menulis para pelajar memiliki kecenderungan mengarah pada kemiskinan bahasa. Kebiasaan menggunakan layanan pesan singkat (SMS) menjadikan terbangunnya kerja otak yang singkat dalam mengurai kalimat yang digunakan.

Tidak hanya terjadi di Irlandia. Seorang dosen di sebuah perguruan tinggi pun kerap mengeluhkan terlalu singkatnya jawaban yang dituliskan oleh para mahasiswa saat menjawab pertanyaan yang diberikan. Bisa jadi dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki, atau mungkin saja terjadi karena miskinnya bahasa yang dimiliki, akibat terbiasa menggunakan layanan pesan singkat. Pada beberapa kelompok pelajar dan mahasiswa juga ditemukan keengganan untuk berdiskusi dan juga membaca.

Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei, akan lebih bermakna bilasaja para pihak dan pelaku pendidikan mencoba mengurai lebih jauh berkaitan dengan semakin banyaknya para pelajar dan mahasiswa yang enggan mengeluarkan gagasannya. Mencoba membedah ulang kurikulum dan metodologi pembelajaran, diharapkan akan melahirkan sebuah perubahan yang nyata di masa datang terhadap kualitas anak negeri yang dihasilkan dari bangku pendidikan formal.

SMS dan Blog

Layanan pesan singkat (SMS) telah menjadi barang biasa dalam setiap ruang kehidupan. Setiap pelajar dan mahasiswa sudah tidak menjadikannya barang yang mewah lagi. Ditambah dengan layanan CM (call me) menjadikannya sebagai sebuah kemudahan yang dirasakan saat ini. Walaupun belum dikaji lebih mendalam, namun dari hasil penelitian yang dilakukan di Irlandia menjadi sebuah gambaran umum terhadap kondisi yang terjadi di berbagai kawasan di dunia. Percepatan perkembangan teknologi informasi telah menjadikannya sebagai faktor pendorong hilangnya kemampuan berbahasa pelajar dan mahasiswa.

Namun tidak sepenuhnya teknologi informasi menjadi sebuah pendorong kemunduran kemampuan kerja otak. Blog (diari online)

merupakan sebuah alat sederhana yang telah menjadi media mengeluarkan kerja-kerja otak dalam bentuk tertulis. Sebagian besar pengguna internet pastilah telah memiliki blog, mulai dari yang sangat sederhana hingga yang memiliki tampilan sangat menarik, dari yang gratis hingga yang rela menggaji staf khusus untuk mengelolanya.

Blog merupakan sebuah jawaban terhadap kemiskinan bahasa yang dimiliki oleh pelajar dan mahasiswa. Dalam dunia ini, para guru dan kalangan pendidik lainnya juga dapat membangun sebuah jejaring pengetahuan yang berlimpah. Dari bertukar resep makanan, cerita keseharian, hingga analisis yang tajam dan hasil-hasil kajian, tersajikan dalam dunia maya melalui blog. Bila saja para pelajar dan mahasiswa memiliki fasilitas internet murah berkualitas, tentunya akan lebih banyak dihasilkan para pelajar dan mahasiswa cerdas dan kreatif yang menjadi pondasi perkembangan bangsa ini selanjutnya.

Pola pendidikan yang mengejar nilai semata harus secara perlahan digeser kepada sebuah pendidikan yang membangun kecerdasan kritis pada peserta didik. Selain juga, penting untuk mendorong terbangunnya motivasi dan kreatifitas peserta didik dalam mencipta gagasan-gagasan baru yang diharapkan menjadi sebuah kontribusi dalam proses berkehidupan. Kemiskinan berbahasa tentunya tak akan lagi ada, seandainya saja kebiasaan menulis di dunia blog telah menjadi sebuah budaya bagi pelajar dan mahasiswa.

Dengan kebiasaan menulis blog dan berinteraksi di dunia maya, akan juga menghadirkan budaya membaca bagi pelakunya. Dari sebuah blog akan terpenuhi juga sebuah pendorongan kebiasaan membaca bagi generasi bangsa. Blog akan mendorong sebuah kekayaan bahasa bagi para pelajar dan mahasiswa, termasuk juga kepada pengguna dunia maya.

Belajar Pada Alam

Bila bagi pelajar dan mahasiswa yang memperoleh kemewahan internet murah berkualitas, maka bagi kelompok pelajar dan mahasiswa yang berada jauh dari jangkauan jejaring maya dapat menggunakan media alam sebagai sebuah media belajar dan melatih daya pikir untuk menuju kecerdasan kritis dan kreatif. Alam sangat menyajikan begitu banyak pengetahuan bagi siapa saja yang ingin belajar padanya.

Hingga saat ini, kurikulum yang disediakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Lembaga Pendidikan di Indonesia telah menjauhkan pelajar dan mahasiswa dari alam sekitarnya. Tuntutan untuk memperoleh nilai yang tinggi dan standar kelulusan ujian nasional,

telah menjadikan para guru berpacu hanya untuk melatih para peserta didik untuk menjawab soal-soal yang tersaji pada selembar kertas. Semakin tak ada waktu untuk mencoba menggunakan alam sebagai sebuah media pembelajaran.

Kondisi yang memprihatinkan lainnya adalah media pembelajaran pada alam yang diberi label pendidikan lingkungan hidup juga telah terjebak ke dalam sebuah keinginan untuk menghasilkan sebuah mata ajaran khusus dalam muatan lokal, serta menghadirkan buku-buku bergambar benda di alam, sebagai sebuah media belajar. Eksplorasi gagasan di alam telah terkikis dari praktek-praktek yang dilakukan oleh pegiat pendidikan lingkungan hidup. Interaksi dengan alam semakin berkurang, karena kemudian para guru yang mengelola mata ajaran pendidikan lingkungan hidup kembali disibukkan dengan membuka-buka buku dan memberi penilaian bagi peserta didik, tanpa sempat menjadikan alam sebagai sebuah arena menggali pengetahuan.

Hari Pendidikan Nasional: Saatnya Memastikan Pendidikan Gratis Berkualitas

Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya, selalu diperingati dalam sebuah upacara ataupun peringatan berlabel seremonial. Ada harapan yang sangat besar agar pada setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional, diperoleh kepastian bahwa biaya pendidikan semakin murah dan menuju gratis dengan kualitas pendidik dan materi pendidikan yang semakin meningkat.

Tergirangnya arah pendidikan pada penciptaan tenaga kerja bagi industri, telah menjadikan pendidikan mengesampingkan kreatifitas dan ruang kreasi peserta didik. Hari Pendidikan Nasional harusnya mampu untuk mengembalikan arah pendidikan kepada jalan menuju cita-cita besar bangsa ini, mencerdaskan anak negeri untuk sebuah kemakmuran bersama. Hari Pendidikan Nasional, jadikanlah sebagai sebuah titik perubahan. Agar di masa datang diperoleh sebuah kehidupan yang lebih baik, dalam kesejahteraan dan kesejukan alam yang dikelola dengan lebih bijak.

MENGATASI BANJIR SAMARINDA: Jalan Lain Menuju Surga

04. 24. 2007 - 2,577 dilihat

Mencermati permasalahan banjir di Kota Samarinda, tentulah bukan semata permasalahan budaya membuang sampah di sembarang tempat. Ada berbagai hal yang lebih dalam yang perlu diperhatikan dalam melihat permasalahan banjir di Kota Samarinda.

Karakteristik umum banjir Kota Samarinda adalah sebagian besar disebabkan karena aliran alam (sungai ataupun anak sungai) telah semakin dipaksa menyempit, tempat penyerapan air (rawa, danau) yang semakin tiada dan pepohonan yang semakin sedikit.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting dan mendesak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Kawasan Lindung Lokal

Sudah sepatutnya DPRD Kota Samarinda bersama dengan Pemerintah Kota Samarinda membuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi kawasan-kawasan yang bernilai penting bagi ekologi maupun sosio-kultural warga Kota Samarinda.

Perda Kawasan Lindung Lokal tersebut melindungi kawasan-kawasan rawa yang tersisa, kawasan perbukitan kapur, serta kawasan mangrove di wilayah Kota Samarinda. Usulan lokasi (sementara) untuk rawa adalah pada wilayah Jl Inpres, Jl Belatuk, Jl Banggeris, Jl A Wahab Syahrani. Untuk lokasi mangrove adalah sepanjang tepi Mahakam, mulai dari Jembatan Mahakam hingga Jl Slamet Riyadi (depan Depot Pertamina).

2. Perketat Pembangunan Perumahan

Dalam pemberian pembangunan perumahan kepada developer, wajib mensyaratkan untuk menyisakan 30% dari luas kawasannya untuk tetap sebagai Ruang Terbuka Hijau, dimana separuhnya harus diperuntukkan bagi pepohonan. Demikian pula dalam jalan-jalan, wajib untuk ditanami pepohonan. Selain itu, untuk setiap bangunan yang dibangun, wajib memiliki sumur resapan (ataupun bio-pori) dengan volume dan jumlah yang disesuaikan dengan luasan atap bangunan.

Dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib menambahkan prasyarat untuk membuat sumur resapan (ataupun bio-pori) dengan volume dan jumlah yang disesuaikan dengan luasan atap bangunan,

pada setiap IMB yang akan diberikan. Lebih disarankan untuk membangun dengan model panggung, dimana pada bagian tanah tidak dilapisi lagi dengan semen. Dan untuk kepentingan jalan di areal rumah/bangunan, menggunakan paving-block berpori. Prasyarat berikutnya adalah kewajiban menanam 6 (enam) batang pohon untuk setiap rumah/bangunan, dan bukan semata taman. Yang dimaksud pohon adalah tumbuhan berkayu yang dapat memiliki diameter lebih dari 10 cm.

3. Perlindungan Kawasan Persawahan dan Kebun Rakyat

Sudah menjadi penting bagi Pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap areal Persawahan dan Kebun Rakyat, baik dari pengambilalihan paksa maupun dari bencana ekologi. Kawasan hulu dari persawahan dan kebun rakyat sudah selayaknya dilindungi. Hal ini menjadi penting, terutama untuk menopang kebutuhan bahan pokok warga kota. Misalnya saja di kawasan Handil Bhakti, selalu terjadi banjir setiap tahun yang merendam persawahan akibat perubahan lahan di kawasan lebih hulunya.

4. Perluasan Kawasan Berpepohonan

Samarinda membutuhkan kawasan berpepohonan yang lebih luas. Kawasan ini termasuk di dalamnya adalah hutan kota, kawasan ruang terbuka hijau, lahan pekarangan rumah dan perkantoran berpepohonan, dan kawasan pusat perbelanjaan dengan pepohonan.

Dari hasil kajian Supriadi (2006) ditunjukkan bahwa kebutuhan hutan bagi Kota Samarinda di tahun 2011 adalah seluas 19.875,72 hektar (27,68% dari luas kota). Melihat kondisi saat ini, maka Kota Samarinda memiliki kekurangan 19.184,61 hektar.

Namun hal yang masih penting diperhatikan dalam penentuan lokasi hutan kota adalah letak dan luasan pada setiap sub DAS, sehingga terdistribusi dengan baik dan dapat berfungsi dengan optimal.

5. Pengelolaan Drainase

Pengelolaan drainase tidaklah semata untuk memelihara selokan ataupun saluran air. Namun lebih jauh daripada itu, sungai-sungai (alam) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai sungai alam, harusnya dapat tetap dipertahankan keberadaannya dengan tidak menutup aliran sungai yang telah ada. Hal yang telah terjadi semisal sungai alam yang telah ditutup akibat pembangunan Lembuswana Mal. Sementara dua buah anak sungai Karang Mumus juga akan ditutup untuk kepentingan pembangunan Bandara Samarinda di Sungai Siring.

6. Pencabutan Perijinan Pertambangan

Pertambahan telah dengan sangat nyata merugikan bagi kepentingan ekologi dan sosial-ekonomi rakyat. Pembukaan batubara di berbagai kawasan Samarinda telah menunjukkan arah yang tidak baik bagi kepentingan warga kota di masa mendatang. Sudah bukan waktunya lagi pemerintah berpihak kepada pemodal. Saat ini sudah saatnya pemerintah membangun keberpihakan kepada warga. Sesaat lagi, sistem politik akan bertumpu pada warga, dimana uang bukan lagi kuasa.

7. Penghentian Pembangunan Bandara Samarinda di Sungai Siring

Bandara Samarinda di Sungai Siring secara nyata tidak layak ditinjau dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Walaupun kemudian Komisi AMDAL Propinsi Kalimantan Timur menyatakan telah lulus AMDAL, namun bila dikaji lebih dalam lagi, senyatanya proses kajian AMDAL TIDAK PERNAH DILAKUKAN oleh Konsultan AMDAL. Akan ada dua anak sungai Karang Mumus yang dipotong, Hutan Pendidikan dan Kebun Botani Unmul akan terganggu, demikian pula terhadap kawasan-kawasan sekitarnya. Maka untuk Bandara Samarinda di Sungai Siring, akan lebih baik dibatalkan.

Bila terlalu sulit untuk mewujudkan gagasan di atas, ada sebuah tawaran solusi alternatif yang mungkin akan lebih menarik, dimana Pemerintah Kota Samarinda harus mendesign ulang sarana transportasi kota menjadi sistem transportasi perairan, yaitu dengan merubah jalan-jalan kota menjadi kanal-kanal yang juga merupakan jawaban atas semakin mengecilnya ruang bagi air di kota.

Namun, bila saja Pemerintah Kota Samarinda telah berhasil mengatasi permasalahan banjir di Kota Samarinda, maka ini adalah jalan lain menuju surga (dunia).

Kartini di Hari BUMI

04. 21. 2007 - 950 dilihat

Kartini, nama seorang perempuan yang sangat dikenal dalam sebuah emansipasi kelompok perempuan. Setiap tahunnya diperingati dengan berbagai arena perlombaan, mulai perlombaan memasak bagi lelaki, perlombaan berbusana kebaya, hingga sekedar perlombaan yang menghadirkan keriaan sesaat. Berbagai kantor pun mewajibkan karyawan perempuannya untuk mengenakan pakaian kebaya, pakaian yang dikenakan Kartini pada masanya. Seorang artis perempuan dalam sebuah acara talkshow di sebuah stasiun televisi mengatakan “Kalau dulu Kartini menggunakan rok mini, pastilah saat ini busana yang akan dipakai juga rok mini”.

Bukan masalah busana yang akan coba diangkat dalam tulisan ini, namun lebih jauh pada gagasan yang pernah dilahirkan oleh seorang Kartini melalui surat-suratnya yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah kumpulan tulisan “Habislah Gelap Terbitlah Terang”. Begitu banyak kritik yang dilontarkan oleh seorang Kartini, termasuk juga ungkapan kepekaan sosial yang beliau coba sampaikan melalui tulisan beliau.

Menghilangnya Pemikiran Kartini

Saat ini, sebuah lontaran pemikiran yang pernah disampaikan oleh Kartini seakan tersapu oleh sehelai baju bernama kebaya. Keinginan seorang Kartini untuk mensetarakan diri dalam berbagai ruang kehidupan, berganti dengan semata sebuah kata “emansipasi” yang dimaknai hanya semata pada kemampuan perempuan melakukan pekerjaan lelaki. Surat-surat Kartini tak lagi banyak dibaca dalam setiap tahun diperingatinya Hari Kartini.

Sebagian besar surat Kartini berisi keluhan dan gugatan termasuk menyangkut budaya yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya untuk sebuah kemandirian dalam menentukan tujuan, memilih cara, melakukan aktivitas, yang dilakukan dalam kebersamaan, dengan bingkai keyakinan, kebijaksanaan, keindahan, kemanusiaan dan cinta tanah air. Kartini juga mengungkap pandangannya bahwa “agama yang seharusnya justru mempersatukan semua manusia, sejak berabad-abad menjadi pangkal perselisihan dan perpecahan, pangkal pertumpahan darah yang sangat ngeri. Orang-orang seibu-sebapa ancam-mengancam berhadap-

hadapan, karena berlainan cara mengabdikan kepada Tuhan yang Esa dan Yang Sama.”

Kartini juga tak sekedar memperbincangkan posisi kelompok perempuan, namun lebih dari itu, Kartini mengangkat permasalahan penindasan yang terjadi di sekitarnya. Kartini melihat perjuangan perempuan agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Upaya Kartini untuk mewujudkan cita-citanya bagi kelompok perempuan pun harus diwujudkan dengan menerima jalan yang selama ini menjadi bagian dari kritiknya, “poligami”.

Kartini, Perempuan dan Pembangunan

Memaknai sebuah perjuangan Kartini di saat sekarang, haruslah kembali melihat pada sebuah kondisi yang tengah terjadi. Posisi perempuan dalam lingkungan kehidupan sepertinya enggan beranjak dari ruang “penjara”nya. Telah banyak perempuan yang bekerja di sektor yang selama ini hanya dilakukan oleh kaum lelaki, namun bukan ini semata yang menjadi pemikiran oleh seorang Kartini pada masanya. Masih terlalu banyak kelompok minoritas (perempuan dan lelaki) yang harus menerima diskriminasi dalam menjalani ruang kehidupan.

Proses pembangunan negeri ini yang mengejar angka pertumbuhan telah memperbesar gurita penguasaan oleh kelompok kecil. Aset-aset alam yang harusnya menjadi sumber penghidupan bagi komunitas lokal, secara cepat beralih ke tangan-tangan kelompok kecil pemerintah yang berselingkuh dengan pemodal. Perlahan namun pasti, semakin banyak anak negeri ini yang jauh dari meningkatnya pengetahuan mereka, karena pendidikan dan kesehatan menjadi barang yang sangat mewah.

Andai saja Kartini hidup di masa kini, tentunya beliau akan sangat sedih bila yang semakin sering diperbincangkan hanyalah model pakaian, sepatu, tas ataupun telepon genggam terbaru. Sementara masih sangat banyak anak negeri yang tak menyentuh nasi hanya karena tempatnya berladang dan bersawah harus digantikan oleh tambang dan perkebunan (kelapa sawit) yang maha luas. Masih teramat banyak anak negeri yang menantikan tetesan air hujan untuk sekedar melepas dahaga karena sungai dan danau telah tercemari.

Keinginan pelayan publik (pemerintah) negeri ini yang sangat kuat terhadap angka pertumbuhan, telah menjadikan sektor ekonomi rakyat semakin terpuruk. Walaupun sejarah telah mencatat, keruntuhan ekonomi negeri ini beberapa tahun lalu telah ditopang oleh ekonomi rakyat agar tak terpuruk ke jurang yang lebih dalam.

Kartini di Hari Bumi

Satu hari setelah memperingati hari Kartini, penduduk dunia merayakan Hari BUMI. Sebuah momentum perenungan terhadap kondisi bumi yang kian hari kian memprihatinkan. Pemanasan global telah mencemaskan kelompok peneliti, karena diyakini telah mencairkan lapisan es di belahan utara, dan secara perlahan menaikkan tinggi air permukaan. Ketidakpastian iklim pun terjadi, bencana banjir dan kekeringan menjadi sebuah fenomena yang kian menakutkan.

Kelompok perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap ancaman dampak pemanasan global yang terus berlangsung. Tingginya emisi zat pencemar yang dihasilkan oleh industri, terutama di negara belahan utara, telah mengakumulasi dan memaksa atmosfer membuka diri dari radiasi matahari yang merubah sistem kehidupan. Perjanjian internasional pun enggan disetujui oleh Amerika Serikat, sebagai negara penghasil emisi pencemar yang sangat tinggi di bumi ini. Keangkuhannya hanya akan mempercepat kematian bumi.

Sementara itu, negara-negara selatan dipaksa untuk tetap mempertahankan hutannya. Lembaga Konservasi Internasional dari negara utara-pun hilir mudik dengan dana yang tidak sedikit berkunjung dan membuat aktivitas di negara-negara selatan. Namun hingga saat ini, tidaklah terlihat hasil yang menggembirakan. Selain perut-perut pekerjanya yang semakin membesar, proses pengrusakan atmosfer oleh negara utara tetap saja berlangsung, dan pula pengrusakan hutan di negara-negara selatan semakin cepat akibat permintaan kayu dari negara-negara utara.

Kartini mungkin tak pernah akan mengerti tentang Hari BUMI. Namun andai saja Kartini hidup di masa saat ini, tentunya bukan semata menulis surat tentang kungkungan budaya ataupun minimnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi kaum perempuan negerinya. Kartini mungkin saja akan menuliskan tentang limbah industri, pembalakan haram, hingga tercemarnya laut akibat limbah tambang. Atau bisa jadi Kartini hanya menuliskan sajak-sajak kesedihan perempuan dan anak-anak di negerinya yang harus menerima beban lebih besar akibat kehancuran ekologi yang diakibatkan begitu banyaknya penguasaan aset alam oleh pemodal asing.

Kartini, tidak akan begitu bangga terhadap perempuan yang hanya sibuk mematut diri di depan cermin untuk memastikan dirinya akan menang dalam perlombaan berbusana kebaya. Kartini akan lebih

bangga bilasaja perempuan negeri ini bergandengan tangan untuk mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas di setiap pelosok negeri. Kartini juga akan lebih bangga bila bangsa ini berhenti memberikan ruang bagi perusak lingkungan hidup. Kartini akan sangat bangga bila bangsa ini mandiri dan memiliki rakyat yang tak lagi sedih karena selalu tergusur.

Kartini di HARI BUMI, sudah saatnya bersatu melawan pengrusak ekologi dan menghilangkan penindasan di atas permukaan BUMI.

Tobat

04. 19. 2007 - 332 dilihat

Di antara ruang hijau yang tersisa di sebuah kota kayu, seorang kawan bertanya “Mungkinkah mereka yang dulunya melakukan pengrusakan lingkungan hidup, saat kemudian mereka bertobat?” Sebuah pertanyaan ini bukan pertama kali aku dengar. Sering dan berulang. Dosa-dosa yang telah diperbuat perusahaan pengrusak ekologi dan sosial-kultur komunitas lokal seolah dapat terhapus oleh sebuah pernyataan tobat.

Perjalanan panjang proses advokasi lingkungan hidup untuk mendorong sebuah perbaikan dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup, memiliki sebuah ruang yang telah memperkenankan sebuah tobat pengrusak lingkungan hidup. Corporate Social Responsibility (CSR) digulirkan dan diharapkan menjadi sebuah arena pertobatan dari perusahaan yang telah dengan sengaja melakukan pengrusakan ekologi dan sosio-kultur komunitas lokal.

Dana yang terlihat tidak sedikit mengalir. Pembangunan gedung sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya dikumandangkan dalam gambar-gambar yang indah, buah karya seorang fotografer ternama di jagad. Bantuan air bersih beserta galon-galon besar berwarna jingga menghiasi sudut perkampungan yang terlanda krisis air bersih setelah kedatangan sebuah perusahaan. Beasiswa dan pelayanan kesehatan diagungkan sebagai wadah menggantikan hilangnya “apotek besar” bernama hutan dan sungai.

Aku mencoba meletakkan tanda positif dalam ruang kepalaku. Berpikir positif akan sebuah niat baik. “Mereka bisa bertobat dan tidak akan melakukannya lagi” Perlahan, perjalanan waktu mengungkapkan kembali sebuah hal yang inginnya ditolak dalam ruang pikir. “TELAH BERTOBAT”. Sebuah tulisan besar menempel di sela papan nama berukuran sangat besar di depan kantor perusahaan itu. Aku mencoba mengitari pagar besi yang menjadi pembatas antara perusahaan dengan rumah kawanku. Sebuah aliran air yang tak deras berwarna hitam pekat dan berbau sangat busuk berada di depan pandanganku. “Inilah tobat mereka”. Sebuah label besar, bendera berwarna hijau, namun tetap saja membagikan cairan bencana bagi manusia dan kehidupan lain di sekitarnya.

“Berilah kesempatan untuk bertobat” ujar kawan yang lain, “mereka pasti mau bertobat lagi”. Perputaran waktu akan terus bergerak. Tobat pertama telah diberikan, namun tak jua tobat itu berwujud dalam

tindaknya. Berbagai penghargaan ramah lingkungan serta beragam label hijau telah diberikan oleh berbagai lembaga yang tidak hanya berlevel lokal, namun hingga nasional dan internasional. “Lihat.. mereka kan sudah dapat pengakuan bahwa mereka sudah tobat”.

Tobat itu harus kembali diberikan. Walau secara perlahan aliran hitam pekat berbau sangat busuk itu terus mengalir. Perlahan menuju ke celah-celah aliran sungai yang setiap harinya digunakan kawanku untuk membersihkan badan. Sebagian cairan lainnya mengalir ke celah tanah, masuk ke aliran air di dalam tanah, menuju sumur-sumur tempat kawanku mengambil air untuk kebutuhan minum dan memasak makan menjelang sore hari.

Berpikir positif. Kepalaaku terus mencoba bertahan agar memperoleh tanda dua garis silang berpangkalan itu. “Mungkin saja mereka sedang berupaya untuk tobat”. Namun sukar sekali aku memperolehnya. Yang beredar di dasar kepala hanyalah aliran air hitam pekat berbau sangat busuk itu. Yang tetes demi tetesnya telah masuk dalam tubuh anak-anak kecil yang sedang bermain bola di tepian sungai.

Mungkin aku yang harus tobat. Tobat untuk mengatakan bahwa mereka mungkin bertobat. Tobat meyakini bahwa seorang penjahat lingkungan hidup itu pasti akan bisa bertobat. Tobat. Tak mampu lagi ruang pikirku bergerak. Aliran darah semakin lamban bergerak. Detak jantungku melemah. Tobat.

[070419]

:: *diantara tanya dalam ruang sebuah pertobatan*

IPDN: Kekerasan - Kekejaman?

04. 16. 2007 - 1,106 dilihat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sebuah metamorfosa dari APDN dan STPDN, telah berada di ujung tanduk. Lontaran amarah mengarah pada seluruh yang berlabelkan IPDN. Bahkan ada yang membuat singkatan baru menjadi Institut Penganiayaan Dalam Negeri. Kejadian yang tidak hanya sekali telah menjadikan semua mata di negeri ini (yang memiliki akses terhadap informasi) tertuju pada sebuah kampus di Jatinangor. Bubar sepertinya kata yang selalu diumbar.

Kekerasan dan kekejaman, sepertinya dua kata yang telah menjadi satu. Lalu apakah hanya terjadi di IPDN. Lalu ketika terjadi di sebuah institusi kemudian institusi tersebut harus dibubarkan. Dalam celoteh lalu, kekerasan tak hanya terjadi di IPDN (atau STPDN). Bahkan seorang guru sekolah dasar pernah melakukan kekerasan terhadap siswanya yang berakibat pada trauma psikis pada siswa, lalu apakah sekolah dasar juga harus dibubarkan? Kemudian ketika polisi melakukan kekerasan terhadap demonstran, apakah kepolisian juga harus dibubarkan?

Kekerasan yang disertai kekejaman, selalu hadir di negeri ini. Di saat negeri tak pernah memberikan sebuah ruang yang tepat bagi rakyat dalam mewujudkan pikirnya. Tekanan psikis yang begitu kuat dalam menghadapi kehidupan telah mematri sebuah ketidaknyamanan berpikir dalam berbagai anak bangsa. Harga BBM yang melambung, listrik yang byar-pet, air yang tak lagi jernih, hutan tak ada lagi, penggusuran, dan banyak hal lagi, telah mengakumulasi dalam perjalanan berkehidupan di negeri ini. Lalu pertanyaannya, apakah negara ini harus bubar?

Memberitakan kekerasan yang berlebihan akan menimbulkan kekerasan baru. Saat ini bisa jadi para alumni dan praja IPDN bahkan IPDNmania telah memperoleh label "orang jahat" ataupun orang kejam oleh publik (yang punya akses terhadap informasi). Kekerasan tak akan terhentikan, karena kekerasan hanya akan berbalas dengan kekerasan. Media harus lebih cerdas dalam memberitakan, dengan tak hanya berpihak pada pemodal maupun membangkitkan amarah anak negeri. Bukan untuk membatasi ruang kreasi, namun negeri ini memang sedang sakit, tidak perlu menjadi lebih disakiti.

Apakah tak ada jalan lain? Kekerasan dan kekejaman akan mampu hilang disaat kesejahteraan anak negeri telah tercukupkan. Saat aset-aset alam negeri ini kembali dikelola anak negeri. Tak dijual kepada

kepentingan pemodal (asing) ataupun pada sekelompok kecil orang yang saat ini juga menjadi juragan media. Yang harus dilawan tidak sekedar kekerasan yang kejam di sebuah kampus bernama IPDN. Masih lebih banyak kekejaman yang sangat keras yang dilakukan oleh pemodal (asing) yang bersenggama dengan aparat birokrasi (yang bukan lulusan IPDN/STPDN). Lihatlah Teluk Buyat, Freeport, Batu Hijau, Ligang Bigung, Sidoarjo, dan berbagai wilayah lain di negeri ini. Telah berapa banyak anak negeri yang harus meninggal akibat kekejaman yang dilakukan? Telah berapa banyak anak negeri yang akhirnya harus memilih menjadi budak karena tak ada lagi lahan untuk berkehidupan.

IPDN hanyalah sebuah wujud birokrasi yang dipelihara oleh sebuah tangan yang tersembunyi. Kekerasan, kekejaman, seks bebas, hingga narkoba bukanlah berlaku pada seluruh komponen di dalamnya. Mengeneralisasi sebuah label sama halnya dengan melakukan kekerasan baru yang lebih kejam. Apakah ketika mereka yang hari ini mengatakan IPDN sebagai sebuah arena kekejaman tidak sedang melakukan hal yang sama bagi saudara di sekitarnya? Entahlah....

Pada media, sebuah berita akan lebih dapat mencerdaskan anak bangsa bila menampilkan sebuah kondisi obyektif dari berita tersebut. Bukan sekedar menyusu pada pemodal (media) atau sekedar memompa amarah anak negeri. Kekerasan di media televisi hari ini telah pula menciptakan kelahiran kekerasan-kekerasan baru di komunitas yang dapat mengaksesnya. Sinetron berlabel Setantron, hingga infotainment tak mendidik. Apa yang negeri ini sedang ingin wujudkan?

energi: efisiensi atau rekalkulasi?

04. 16. 2007 - 547 dilihat

Perusahaan (publik) listrik negara (PLN) di Kota Kayu telah menerima cemooh dari pelanggannya. Dua kantor loket pembayaran listrik harus hancur berantakan, akibat lemparan batu. Pelaku belum ditemukan, namun dipastikan pelaku merasa kecewa akibat semakin rutusnya byar-pet dilakukan oleh PLN, bahkan di luar jadwal yang telah dibuat oleh PLN sendiri.

Pada saat menghubungi nomor telepon 123 (sebuah layanan gangguan PLN), disampaikan oleh petugas bahwa keadaan byar-pet di propinsi ini bisa berlangsung hingga awal 2008, bahkan masih belum bisa dipastikan kestabilan dari pasokan daya listriknya. Sementara itu, PLN sendiri masih terus menghabiskan anggaran untuk pembelian mesin baru, pemeliharaan, bahkan masih sering mengeluh tentang menipisnya ketersediaan bahan baku (gas).

Kampanye 1722 dan menaikkan suhu pendingin ruang hingga tidak terlalu dingin nampaknya dipandang sebagai sebuah pilihan sesaat oleh managerial PLN. Bila melihat neraca beban listrik yang dihasilkan dari pembangkit, terlihat bahwa kapasitas pembangkit masih berada di atas realisasi beban. Sebuah pertanyaan besar tersisa, ada apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam perusahaan negara ini? Apakah ada kesengajaan agar memiliki alasan untuk menaikkan tarif dasar listrik? Ataukah memang ingin membangkitkan jumlah kejadian kebakaran dan diikuti dengan meningkatkan amarah pelanggan?

Efisiensi yang digembar-gemborkan juga ternyata bukanlah dapat dilaksanakan dengan benar. Sektor industri dan pemerintahan tetap saja melakukan pemborosan energi. Dari papan reklame hingga kerlap-kerlip lampu kota, bukan hanya menghabiskan energi listrik yang tidak sedikit, namun juga telah menghabiskan anggaran dana publik (APBD) yang tidak sedikit. Hal yang memprihatinkan justru muncul dengan dimatikannya lampu penerangan jalan, yang justru sangat diperlukan oleh publik.

Rekalkulasi sumberdaya, sudah seharusnya dilakukan oleh pelayan publik negeri ini, termasuk oleh perusahaan negara yang bergerak di sektor energi. Sumberdaya minyak, gas dan mineral carbon telah secara perlahan namun pasti dihabiskan untuk kepentingan ekspor, dimana tidak juga memberikan manfaat yang cukup nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun tetap saja, pemerintah sepertinya enggan

bergeming dari kondisi krisis saat ini. Bila saja energi yang tersedia di kalkulasi, termasuk dengan cadangan sumber energi yang dimiliki, tentunya negeri ini tak akan pernah melewati fase krisis energi seperti saat ini. Mumpung belum terlambat, akan lebih baik bila pemerintah segera melakukan moratorium ekspor sumberdaya energi, dan melakukan penghitungan ulang (re-kalkulasi) potensi, kebutuhan dan sisa untuk diekspor.

Cara pandang terhadap energi hijau juga harus ditata ulang dalam pikiran pelayan publik (pemerintah). Melihat biodiesel sebagai alternatif yang harus dikedepannya seperti halnya telah membawa pemerintah ke arah keterpurukan baru bangsa ini. Sumber-sumber energi yang hijau sebenarnya ada pada energi angin, gelombang laut, panas bumi dan air. Inisiatif mikro hidro yang telah dilakukan secara mandiri oleh beberapa komunitas harusnya dapat memperoleh apresiasi yang cukup besar oleh pemerintah. Bagaimana kemudian komunitas lain dapat menerapkan di wilayahnya, inilah yang menjadi tugas penting pemerintah. Bila kebutuhan energi listrik telah dapat terpenuhi, tentunya ekonomi rakyat akan segera bangkit dengan sendirinya.

Di lain hal, kegetolan pemerintah untuk menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir seolah menunjukkan bahwa pemerintah telah lupa dengan kejadian Chernobyl, dimana teknologi selalu ada celah lemahnya. Lebih dari satu generasi hilang dalam kawasan tersebut akibat ledakan dahsyat dari energi nuklir yang tak terkendalikan. Haruskah kembali rakyat yang menjadi korban atas pemuasan intelektualitas semu kalangan birokrasi korup?

Energi listrik, bukan harus berpikir mengefisienskannya. Namun lebih penting bagaimana kemudian sumber-sumber energi dapat terfasilitasi untuk menghasilkan energi yang bermanfaat bagi publik. Arah pendidikan keterampilan anak negeri harus kembali diarahkan pada penemuan inovatif pemanfaatan energi alam. Bisa jadi suatu waktu Indonesia akan berdagang energi listrik kepada negara lain, karena telah mampu membangun satuan unit pembangkit kecil skala kecil yang dapat dikelola secara mandiri, sehingga PLN tak perlu repot lagi harus memperbaiki loket pembayarannya yang dirusak oleh pelanggan yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan.

Apa Mungkin Menjadi Bangsa Mandiri?

04. 11. 2007 - 253 dilihat

Konservasi Hutan atau pengalihan fungsi hutan kepada fungsi lainnya, semisal perkebunan dan pertambangan telah dilarang oleh Menteri Kehutanan. Sebuah inisiatif yang sangat terlambat, namun perlu disambut dengan baik. Bila benar bahwa dari 23 juta hektar lahan hutan di Indonesia yang dialihfungsikan baru dikelola sekitar 2 juta hektar, maka sebenarnya ini telah menjadi sebuah pengakuan bahwa selama ini terjadi ketidakmampuan pengelolaan kawasan oleh pemerintah. Di Kalimantan Timur sendiri, dari 2,5 juta hektar lahan yang diberikan perijinannya untuk perkebunan besar kelapa sawit, baru mampu tertanami seluas 350 ribu hektar.

Arah pengembangan pengelolaan aset-aset alam di negara ini sepertinya tidak akan pernah terbenahi secara lebih baik. Kelahiran Undang-undang tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam sangat tidak pernah dinantikan oleh pemerintahan saat ini. Bencana ekologi yang telah terjadi masih belum jua mampu menyadarkan akan pentingnya merubah cara pandang dalam mengelola alam.

Orientasi mengejar pendapatan negara telah membuyarkan impian tentang kesejahteraan rakyat. Percepatan proses pembangunan yang ditopangkan pada percepatan masuknya investasi asing dan memperkuat sektor industri besar yang dikuasai oleh pemodal, malah akan menghadirkan sebuah disinsentif bagi kesejahteraan rakyat. Secara perlahan, sistem kehidupan komunitas lokal di negeri ini digeser ke arah ketergantungan akan produk industri dan melepaskannya dari ketergantungan dengan alam kehidupan di sekitarnya.

Kelahiran UU Penanaman Modal di tahun ini, menjadi sebuah tanda tanya besar, disaat negeri ini masih menganut paham Pancasila dan memegang teguh Undang-Undang Dasar-nya. Lihat saja bagaimana sebuah ijin Hak Guna Usaha yang dapat berjalan hingga 95 tahun, Hak Guna Bangunan hingga 80 tahun dan Hak Pakai hingga 70 tahun, yang secara jelas akan menjadikan negeri ini tidak lagi dimiliki oleh anak negerinya. Bahkan tidak adanya nasionalisasi industri serta perlindungan penuh terhadap modal asing menambah deretan panjang catatan terjualnya negeri ini kepada pihak asing.

Bila kembali pada pelarangan konversi hutan, masih sangat ditemukan sebuah bias yang nyata. Dari 143 juta hektar lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan, saat ini baru ditunjuk 109 juta hektar dan baru ditata

batas tidak lebih dari 10% dari luasannya. Sementara semakin banyak industri pertambangan dan perkebunan besar yang juga dikeluarkan perizinannya di atas kawasan yang sama. Bahkan lebih ironisnya, di saat industri ekstraktif telah menghabiskan kawasan hutan, tidak ada tindakan tegas dari negeri ini bilamana tidak dilakukan pengembalian fungsi tanah dan hutan sebagaimana semula, bahkan malah ditambah bonus dengan ditinggalkannya limbah beracun di wilayah tersebut.

Masih mungkin kita berbangga dengan kekayaan negeri ini yang katanya menghasilkan devisa cukup besar. Namun masih cukup harus bersedih bila tersajikan data bahwa semakin meningkat kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Hal ini juga diikuti dengan semakin rutinnya kunjungan bencana ekologi (banjir, longsor dan kekeringan) di berbagai kawasan yang sebelumnya sangat jarang terjadi.

Nilai kerugian material yang diderita rakyat jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Bahkan bisa jadi telah semakin banyak pendapatan negara yang beralih kepada pendapatan individu pelayan publik ataupun sekelompok kepentingan yang merasa memegang kekuasaan di negeri ini.

Sudah cukup seharusnya derita yang diterima rakyat yang harusnya dilayani oleh pemerintah. Secara perlahan namun pasti, lahan-lahan produktif rakyat harus dialihkan ke arah sebuah ketergantungan kepada industri. Pengangguran semakin meningkat seiring dengan tiadanya lahan-lahan pertanian lagi. Kemiskinan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan industri pertambangan dan perkebunan besar. Rakyat negeri ini dipaksa menjadi pekerja.

Sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan dari meja ke meja sangatlah tidak mampu memberikan pelayanan yang baik bagi rakyat. Tidak dilibatkannya elemen akar rumput dalam proses-proses perencanaan pembangunan, secara perlahan telah menghasilkan sebuah carut-marut pelaksanaan pembangunan. Korupsi semakin menguat dalam sebuah proses negosiasi antara kepentingan pemodal dengan pemerintah, saat proses penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan setiap tahunnya.

Pendidikan, yang harusnya mampu membangun sebuah kecerdasan kritis di tingkat rakyat, masih diarahkan untuk mencetak robot-robot intelektual, dimana ketika muncul sebuah ketidaksamaan dalam cara berpikir, maka akan segera menjadi bagian yang disingkirkan. Universitas yang harusnya menjadi sebuah lembaga penghasil pengetahuan dan teknologi yang berpihak pada rakyat, semakin

dikungkung dengan menjadikannya sebagai sebuah mesin penghasil penindas baru bagi rakyat, yang hanya boleh berpihak pada modal.

Sementara itu, pemenuhan gizi dan standar kesehatan rakyat semakin dijauhkan. Sistem kesehatan dan pemenuhan gizi secara tradisional secara perlahan digeser menjadi sebuah ketidakpercayaan pada sistem kosmis yang berlaku di sekitarnya. Harus mempercayakan kesehatan kepada kedokteran modern, sementara di belahan negeri lain sedang berlomba-berlomba "mencuri" pengetahuan kesehatan tradisional dari negeri ini. Lahan-lahan hutan yang menjadi "apotek raksasa" bagi komunitas lokal telah berganti dengan satu jenis tanaman seragam dalam hamparan yang luas serta kolam limbah raksasa.

Bangsa ini harus menjadi bangsa mandiri, ini yang selalu dikedepankan saat negeri ini ingin dimerdekakan di pertengahan abad lalu. Tidak tergantung dengan modal asing, kekuatan ekonomi rakyat harus dikedepankan, hingga pengakuan terhadap sistem pengetahuan tradisional.

Bangsa ini negeri agraris dan maritim. Yang menopangkan kehidupannya pada sektor pertanian dan perikanan rakyat. Tapi kini kita dapat menyaksikan begitu banyaknya petani yang tak memiliki sawah dan ladang karena lahan pertanian harus digantikan dengan hutan tanaman industri, perkebunan besar dan pertambangan. Semakin banyak nelayan yang tak dapat lagi mencari ikan karena diusir dari daerah tangkapan ikan yang kini sudah dikuasai oleh kaum modal. Sementara wisatawan berdatangan untuk sekedar menyaksikan dua sisi tegas yang berbeda, keindahan alam dan kemiskinan di sekitarnya.

Indonesia, bukan sekedar milik sekelompok orang. Negeri ini harus menjadi negeri yang mandiri. Sebuah perubahan cepat dan mendasar menjadi penting dilakukan. Kesadaran kritis rakyat bukan harus dibelenggu. Saat ini kita harus memilih. Berdiam diri, ikut menjadi robot intelektual atautkah bergerak untuk menuju sebuah kemerdekaan yang sejati dan menjadi bangsa yang mandiri dalam ruang kesejahteraan.

Bahasa Menunjukkan Siapa?

04. 9. 2007 - 317 dilihat

“Bahasa menunjukkan bangsa”. Kalimat ini sudah sangat dikenal pada lapisan generasi terdahulu. Mungkin ini juga yang menjadikan pada sekitar pertengahan tahun 1990-an dilakukan peng-Indonesia-an berbagai merek dagang, nama toko, hingga nama manusia di negeri ini. Namun hal ini tidak juga bertahan lama. Dalam sekejap, kembali bermunculan penggunaan bahasa yang bukan bahasa Indonesia dalam berbagai sudut pandang.

Dalam perkembangan berikutnya, sejak disediakannya ruang muatan lokal bagi lembaga pendidikan, maka sebagian besar mengalokasikan muatan lokal pada bahasa internasional (bahasa Inggris) dibandingkan dengan mengalokasikan bagi bahasa daerah. Sangat berbeda dengan fase sebelumnya, dimana muatan lokal sebagian besar diisi oleh pendidikan keterampilan dan juga pendidikan bahasa daerah.

Sebenarnya tak ada yang salah dengan sebuah kondisi yang tengah bergerak saat ini. Arus globalisasi diterima dalam sudut pandang bahasa semata. Pertarungan global yang tengah dimainkan oleh “dalang”, globalisasi sangat tidak mungkin menjadikan negeri ini mampu berada di tengah arena pertarungan. Bukan sekedar pesimistik semata, namun kenyataannya sebuah pondasi yang kuat tidak pernah di bangun di negeri ini dalam menghadapinya.

Memilih untuk mengisolasi diri sementara waktu untuk kemudian masuk ke arena pertarungan adalah jalan yang paling layak bagi negeri ini. Dalam fase ini, negeri ini harus menata kembali sistem pelahiran sumberdaya manusia yang berkualitas dengan merata di setiap sudut negeri. Pendidikan dan kesehatan gratis menjadi sebuah program utama dari setiap gerak pelayan publik.

Ditambah dengan sebuah pengalihbahasaan hasil-hasil temuan, kajian, dan penelitian yang dilakukan oleh negara lain, ke dalam bahasa negeri ini. Untuk kemudian menjadi sebuah buku gratis yang tersedia di berbagai perpustakaan sekolah maupun perpustakaan publik. Dalam fase ini juga dilakukan peningkatan kualitas pendidik dengan menggunakan metodologi pendidikan kritis dan kreatif bagi siswa.

Dalam fase ini juga dilakukan proses penguatan sektor kesehatan negeri. Penguatan lahan-lahan produktif pangan di segala wilayah negeri, fasilitasi pemasaran produk pertanian rakyat, hingga dengan

membangun unit pengolahan skala mikro untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian. Selain itu, obat-obatan dikembangkan dengan sumberdaya lokal, misalnya dengan penguatan tumbuhan obat hutan sebagai alat bantu kesehatan bagi komunitas.

Dari sektor lainnya, semisal tambang, perkebunan dan kehutanan, negeri ini harus berani mengatakan stop ekspor. Segala hasil sumberdaya alam dikhususkan bagi kepentingan rakyat negeri, bukan bagi kepentingan ekspor. Secara perlahan dibangun mekanisme perdagangan yang berkeadilan dengan negara-negara yang bersepeham dengan hal tersebut. Juga tidak melakukan proses perdagangan dengan negara-negara yang selama ini melakukan penjajahan fisik dan ekonomi terhadap negeri ini.

Koalisi selatan-selatan dapat kembali diperkuat dengan menggunakan jalur Timur Tengah dan Amerika Latin. Kepentingan yang sama dari negara-negara miskin didorong untuk membangun sebuah koalisi yang kuat dalam rangka penguatan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan anak negeri.

Dari sebuah bahasa menuju sebuah perlawanan internasional terhadap kepentingan segelintir kelompok yang rakus akan kekayaan alam negeri ini. Kepentingan nasionalisme haruslah dipandang tidak hanya sekedar meletakkan lambang negara ini di saku baju, namun lebih daripada itu, adalah untuk membangun solidaritas sosial sesama anak negeri dan solidaritas bagi anak negeri-negeri yang tertindas.

Kembali kepermasalahan bahasa, dengan beragamnya bahasa yang ada di negeri ini, dan telah disepakatinya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, maka sudah selayaknya bila negeri ini menyajikan pengetahuan-pengetahuan yang berkembang di permukaan bumi dalam bahasa nasional negeri ini. Bukan dengan memaksa anak negeri untuk belajar bahasa yang entah hingga kapan akan mampu dikuasai.

Negeri ini kaya, namun tak akan pernah cukup untuk mensejahterakan seluruh anak negeri, bila saja cengkeraman kepentingan “drakula”, masih saja menancap di negeri ini. Saatnya negeri ini memilih untuk kembali menjadi bangsa yang disegani di dunia sebagaimana pernah diceritakan dalam sejarah kerajaan nusantara atau menjadi bangsa yang tunduk pada kepentingan asing.

Jejak Ekologi Yang Tak Pernah Lagi Di(per)hitung(kan)

03. 17. 2007 - 768 dilihat

Kejadian bencana ekologi yang melanda negeri ini telah menjadikan meningkatnya anggaran belanja negara dan anggaran belanja rakyat. Nilai yang tidak sebanding dengan sebuah pendapatan negara yang didapat dari upaya eksploitasi yang berkontribusi pada bencana ekologi. Negeri ini akan segera menuju kebangkrutan bila defisit ekologi tidak tertangani dengan segera.

Jejak ekologi, sebutan sederhana bagi ecological footprint, merupakan satu sistem yang mengukur seberapa banyak tanah dan air yang diperlukan populasi manusia untuk menghasilkan sumber yang mereka habiskan dan menyerap limbah yang dihasilkannya. Jejak ekologi tak pernah lagi menjadi sebuah acuan negara dalam proses pembangunan dengan melihat neraca aset-aset alam (ekologi). Pada tahun 2001, dunia telah mengalami defisit dalam neraca ekologi, yang pada saat yang sama Indonesia masih memiliki surplus ekologi. Namun melihat trend kecenderungan yang ada, terlihat jelas bahwa Indonesia sedang menuju defisit ekologi, dimana terjadi penurunan kapasitas biologi setiap tahun.

Berdasarkan perhitungan para ahli, saat ini diperlukan waktu satu tahun dua bulan untuk bumi dalam melakukan regenerasi apa yang dikonsumsi penduduk dunia dalam satu tahun. Ini menunjukkan telah semakin dekat kehilangan sumberdaya pendukung kehidupan akibat ketidakseimbangan konsumsi manusia dibanding dengan kemampuan alam untuk menyediakan sumberdaya.

Hilangnya Sumberdaya

Greenpeace baru saja mendaftarkan Indonesia agar diakui sebagai pemegang rekor dunia dalam percepatan pengurangan luasan hutan. Bila Departemen Kehutanan melaporkan telah terjadi kehilangan hutan 3,8 juta hektar setiap tahunnya pada tahun 2000 hingga tahun 2003, maka bisa jadi saat ini kehilangan hutan setiap tahunnya semakin berkurang, yaitu berkisar 2,9 - 3,1 juta hektar setiap tahun, namun bukan berarti luasan hutan yang tersisa masih akan mampu mendukung kehidupan manusia di dalam dan sekitarnya.

Percepatan hutan tanaman industri, perkebunan besar dan pertambangan, secara nyata telah menghilangkan lahan berpepohonan

(hutan) secara meluas dengan sangat cepat. Bila pada masa 1967-1989 kebakaran hutan lebih disebabkan karena alam, maka pada era 1990 hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan yang meluas lebih disebabkan oleh pembukaan lahan untuk hutan tanaman industri dan perkebunan besar. Kondisi ini menjadikan semakin cepatnya terjadi pengurangan luasan hutan Indonesia.

Di wilayah perairan (danau, sungai dan lautan), semakin meningkatnya limbah-limbah industri telah memicu semakin berkurangnya ikan dan biota perairan lainnya yang selama ini menunjang kehidupan manusia. Air asam tambang beserta dengan cairan kimia yang dipergunakan dalam proses pertambangan, perkebunan besar dan hutan tanaman industri telah pula menambah ketidaknyamanan ikan untuk tetap bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Ditambah dengan industri bubur kertas dan kertas, beserta industri pengolahan lainnya, yang belum memiliki unit pengolahan limbah yang baik, semakin memperparah kondisi ekosistem perairan.

Sementara itu, pada lahan produktif pertanian, perkebunan rakyat dan perikanan, luasan lahannya semakin menyempit akibat penguasaan tunggal oleh kelompok pemodal atas nama proses pembangunan. Baik untuk kepentingan perumahan mewah, pertambangan, perkebunan besar, kehutanan maupun kepentingan wisata. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan sebagian besar sumber pangan harus dipenuhi dari wilayah lain, termasuk dengan melakukan impor.

Meningkatnya Konsumsi

Di sisi pengguna, semakin tingginya konsumsi dari manusia diakibatkan terjangan kepentingan industri, dimana setiap melangkahkan kaki tak akan mampu lagi melepaskan diri dari iklan dan advertising yang membujuk untuk terus melakukan konsumsi secara berlebih. Gaya hidup manusia digiring ke arah konsumerisme. Semakin banyak pula menggunakan produk yang tidak diperlukan, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah barang yang tak tergunakan (sampah).

Lebih parah lagi, sistem yang dibangun dalam proses pembangunan juga tak pernah memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Misal saja teknologi nir-kertas hingga saat ini masih harus kalah bersaing dengan penggunaan sistem kerja yang menggunakan banyak kertas. Mulai dari selebar kertas disposisi (rujukan) hingga mekanisme perijinan yang menghabiskan berjuta ton kertas setiap tahunnya, yang akan berimbas pada semakin meningkatnya penebangan pepohonan di kawasan hutan.

Penggiringan gaya hidup lainnya adalah dengan menghilangkan

transportasi publik massal dan memberikan ruang yang luas kepada publik untuk memperoleh kendaraan pribadi secara mudah, walau menjadi tak murah. Perusahaan penyedia alat transportasi berbahan bakar sangat difasilitasi untuk bisa hadir di negeri ini, sementara alat transportasi publik massal tidak pernah disiapkan untuk menjadi lebih baik. Selain meningkatkan kebutuhan akan bahan pembuat alat transportasi, kondisi ini juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan bahan bakar fosil.

Menata Jejak Yang Tertinggal

Ketika tak ada lagi air bersih, ikan di sungai, padi di sawah, hingga tak ada lagi buah-buahan di pepohonan, mungkin baru akan menyadarkan penghuni bumi saat ini untuk tidak berbuat yang merugikan bagi alam. Bahkan pelayan publik (pemerintah) mungkin belum juga akan tersadarkan, hingga tidak ada lagi rakyat yang akan dilayaninya karena kelaparan, keracunan dan bencana ekologi.

Bila tidak dilakukan upaya perbaikan dalam memanfaatkan aset alam saat ini, maka bisa jadi penghancuran kehidupan akan terjadi lebih cepat dari yang terbayangkan. Perlombaan untuk bertahan hidup akan terjadi. Persengketaan antar bukan lagi masalah kebanggaan semata, namun hanya demi memperebutkan setetes air bersih untuk diminum, sebutir beras untuk ditanak ataupun demi selembar tissue untuk menyeka keringat.

Etika kehidupan harus kembali dikedepankan dalam ruang bijak terhadap alam. Agar kemudian alam tak lagi memusuhi kehidupan manusia. Agar alam mampu menyediakan kebutuhan seluruh manusia. Juga bagi alam agar mampu terus beregenerasi dengan lebih baik.

Pemerintah sebagai pelayan publik harus mampu menterjemahkan etika kehidupan dalam ruang hukum dan kebijakan yang berpihak pada keadilan ekologi. Tidak lagi menghadirkan hukum dan kebijakan yang berpihak pada sekelompok kepentingan (rakus) yang tak akan pernah puas dengan dua buah bukit emas yang telah dimilikinya. Saatnya melakukan transformasi kehidupan dengan belajar pada alam dan berbagi pada sesama. [070317]

Konspirasi Penghancuran Hutan

03. 10. 2007 - 767 dilihat

Pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan, tengah gencar-gencarnya mempromosikan program percepatan pembangunan hutan tanaman industri. Berbagai kebijakan mulai dikeluarkan sejak beberapa tahun lalu. Sebuah asa yang diberikan adalah bagi perbaikan kondisi hutan negeri ini yang telah terdegradasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar hutan.

Perwakilan pengusaha kehutanan di Kaltim menyatakan di Kaltim saat ini tercatat 22 HPHTI, terdiri 17 HTI Pertukangan, 3 HTI Trans, dan 2 HTI Pulp. Namun hanya 15 HPHTI yang mengajukan penanaman karena masih terkendala pendanaan. Juga kendala lain dihadapi antara lain masalah kebijakan perijinan dan juga kualitas produk plywood dari HTI yang lebih rendah.

Bila ingin mencatat kelakuan pengusaha hutan di negeri ini, maka akan dapat disaksikan begitu besarnya dana reboisasi yang tertunggak oleh pengusaha kehutanan. Sebelum tahun 1997, pemerintah memberikan pinjaman dana reboisasi 2,4 triliun rupiah kepada 92 perusahaan HTI patungan yang terdiri dari pinjaman dengan bunga nol persen 1,13 triliun rupiah, penyertaan modal pemerintah melalui perusahaan negara di bidang kehutanan 960 miliar rupiah, serta pinjaman dengan bunga komersial 318 miliar rupiah. Sementara data Departemen Kehutanan menyebutkan, jumlah pokok pinjaman dana reboisasi mencapai 1,4 triliun rupiah, dan hingga 30 September 2005 baru dikembalikan 383,4 miliar rupiah. Hingga September 2006, jumlah utang dana reboisasi yang belum dikembalikan mencapai 1,05 triliun rupiah.

Pada bulan Juni 2006, ICW dan Greenomics menyatakan bahwa dari pinjaman dengan bunga 0%, PT Inhutani I menunggak 39,06549 miliar rupiah, PT Inhutani V sebesar 28,85639 miliar rupiah, PT ITCI Hutani Manunggal sebesar 92,65213 miliar rupiah, PT Adindo Hutani Lestari sebesar 41,83574 miliar rupiah, PT Kiani Hutani Lestari sebesar 27,73377 miliar rupiah, PT Tanjung Redeb Hutani 80,92306 miliar rupiah dan PT Surya Hutani Jaya sebesar 82,36098 miliar rupiah. Dan untuk bunga komersil, PT Surya Hutani Jaya menunggak 82,90673 miliar rupiah, PT Kiani Hutani Lestari sebesar 24,0455 miliar rupiah PT Musi Hutan Persada sebesar 30,7172 miliar rupiah, dan PT Aceh Nusa Indrapuri sebesar 40,9481 miliar rupiah. Ini baru daftar perusahaan yang menunggak lebih besar dari 20 miliar rupiah.

Dari sisi pinjaman keuangan yang selama ini telah difasilitasi oleh pelayan publik telah menunjukkan permasalahan yang kronis. Namun rupanya Departemen Kehutanan masih terus berkonspirasi dengan memberikan penjadwalan ulang pembayaran utang dan juga memiliki keinginan untuk penghapusan utang para pengusaha HTI. Sebuah kerugian bagi negeri ini yang sangat besar bila hal ini terwujud.

Sementara dari sisi pelaksanaan penanaman pada hutan tanaman industri, sangat tersajikan minimnya keberhasilan penanaman yang dilakukan. Walau hanya menggunakan jenis yang cepat tumbuh, semisal akasia (*Acacia mangium*) ataupun sengon (*Falcataria mollucana*), namun senyatanya masih sangat sempit lahan yang telah tertanami, sementara dalam proses pembangunan HTI telah pula menghabiskan areal hutan alam yang sangat luas.

Berdasarkan statistik kehutanan tahun 2005, dari perijinan yang diberikan seluas 5.734.980 hektar kepada pengusaha HTI, baru 3.416.131,09 hektar yang dinyatakan telah dilakukan penanaman. Areal terluas yang belum dilakukan penanaman adalah HTI untuk penyediaan bahan baku pulp. Kondisi luasan tersebut belum dilakukan verifikasi di lapangan berkaitan dengan kepastian pertumbuhan tanaman dan juga kegagalan penanaman dari beragam faktor yang mempengaruhinya.

Kegagalan HTI yang hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi menyeluruh, telah pula dilanjutkan dengan program percepatan pembangunan HTI oleh Departemen Kehutanan. Bahkan ditambah dengan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, yang hingga saat ini masih sangat tidak jelas konsep yang akan digulirkan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, dana reboisasi untuk hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat pada tahun 2007 dialokasikan sebesar 10,3 triliun rupiah. Dana tersebut akan dikelola oleh Badan Layanan Umum Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan dan disalurkan ke BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan kelompok tani yang bergerak di sektor kehutanan dengan skema sebagai dana bergulir. Ini merupakan sebuah jawaban pemerintah terhadap permasalahan pendanaan oleh pengusaha. Walaupun sebenarnya akan semakin menjadi sebuah tanya ketika sebuah kelompok usaha tidak memiliki modal dan ingin melakukan usaha, maka senyatanya pemerintah hanya akan memperapuh pondasi usaha, yang suatu saat akan kembali mengalami kegagalannya.

Sanksi yang diberikan terhadap kegagalan dari pelaksanaan hutan tanaman industri hanyalah sanksi administratif. Tidak dikenakannya

sanksi pidana dalam hal ini telah menjadikan semakin cepatnya degradasi hutan akibat program hutan tanaman industri. Ditambah dengan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan perijinan yang telah diberikan akan menambah deretan panjang kehancuran hutan yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah.

Janji kesejahteraan bagi rakyat negeri ini akan semakin jauh dari harapan. Proses percepatan pembangunan HTI yang dilakukan pemerintah akan lebih memprioritaskan kepada pelaku usaha kehutanan yang selama ini juga belum pernah dilakukan penilaian secara utuh terhadap kinerjanya. Konspirasi penghancuran hutan akan terus berlangsung dalam ruang perselingkuhan antara kepentingan pemodal dengan pemerintah. Kebijakan yang dihasilkan tak akan pernah menyentuh ruang kehidupan rakyat, dan hanya memberikan kemudahan bagi kelompok pemodal.

Langkah yang selayaknya diambil oleh pelayan publik (pemerintah), khususnya di sektor kehutanan adalah dengan melakukan jeda penebangan hutan (moratorium on industrial logging). Dimana dalam tahapan-tahapan sangat penting dilakukan penghentian pemberian perijinan baru dan perpanjangan perijinan kepada perusahaan kehutanan, melakukan uji menyeluruh terhadap kinerja industri kehutanan, penataan kembali wilayah hutan termasuk permasalahan tata batas, penyelamatan hutan dengan restorasi kawasan, dan larangan sementara penebangan hutan untuk jangka waktu 3-5 tahun selama proses perbaikan menyeluruh hutan sedang dilakukan.

Jawaban terhadap pekerja kehutanan yang akan kehilangan pekerjaannya adalah dengan memberikan pilihan diantaranya kembali pada sektor pertanian, melakukan pekerjaan restorasi kawasan hutan, atau pada sektor lain yang menjadi pilihan dari pekerja, dengan didukung oleh pemerintah, baik dari sisi permodalan skala kecil maupun dalam penguatan kapasitas.

Hutan tropis kian hari kian berkurang. Sebuah upaya yang komprehensif menjadi penting dilakukan. Bila pemerintah sebagai pelayan publik selalu menguatamakan kepentingan pemodal, maka kehancuran hutan akan terus berlangsung. Seorang Guru Besar Silvikultur dari Universitas Mulawarman Samarinda pernah berujar, masa depan kehutanan di negeri ini adalah hasil hutan non kayu dan pengelolaan hutan oleh rakyat.

Krisis Pangan Buah Liberalisasi

03. 3. 2007 - 700 dilihat

Bencana yang terjadi di negeri ini, banjir dan kekeringan, telah mendera rakyat secara berkelanjutan. Krisis pangan (utamanya beras) telah pula menjadi penghias berita utama berbagai media massa. Kelaparan melingkupi berbagai wilayah negeri. Selain kemudian, ketersediaan air bersih mengikuti.

Departemen Pertanian di tahun 2006 pernah menyatakan bahwa produksi padi nasional akan surplus 109 ribu ton. Kenyataan yang dihadapi di awal tahun 2007 ini adalah terjadi defisit 852.000 ton beras. Hingga kemudian pemerintah memaksakan diri untuk mengimpor beras, yang pernah mengalami kejayaannya di negeri ini di era 90-an.

Tidak pernah dipahaminya akar permasalahan krisis pangan di negeri ini menjadikan permasalahan ketersediaan pangan tidak pernah terselesaikan. Pemahaman tentang tingkat kebutuhan pangan penduduk selalu dijawab dengan sebuah kebijakan jangka pendek dan terus mengeliminir kebutuhan kebijakan jangka panjang.

Daratan negeri ini semakin intensif untuk dibagi-bagi kepada kepentingan investasi industri ekstraktif, mulai dari pertambangan, perkebunan skala luas, hingga kehutanan. Pada akhirnya lahan-lahan produktif pertanian semakin hari semakin berkurang, selain juga semakin berkurangnya "bank pangan" komunitas lokal di dalam hutan akibat penghilangan hutan secara paksa.

Ketidakberpihakan pemerintah dan parlemen kepada kepentingan ketersediaan pangan di negeri ini sangat terlihat dari arah pembangunan dan rencana tata ruang yang dibuat. Dalam RTRWP Kaltim, tergambar bahwa luas lahan pertanian hanya dialokasikan 0,6 juta hektar dari hampir 19 juta hektar daratan propinsi kaya aset alam ini. Sementara itu, areal daratan yang diperuntukkan kepada kepentingan investasi semakin meluas. Sektor perkebunan skala besar (terutama kelapa sawit) mendominasi peruntukan lahan, diikuti dengan kepentingan kebun kayu (hutan tanaman industri) dan pertambangan.

Krisis energi yang coba diangkat sebagai permasalahan negeri, dijawab dengan sebuah pengembangan biofuel dan biodiesel, yang dilakukan dengan perluasan lahan bagi kepentingan perkebunan penyedia bahan baku biofuel dan biodiesel. Ditambah dengan peruntukan lahan bagi kepentingan pertambangan semakin mengabaikan kepentingan lahan

bagi pertanian dan perkebunan rakyat.

Belum lagi ketika pertanian dan perkebunan rakyat digantungkan kepada kebutuhan ketersediaan pupuk dan pestisida yang memicu peningkatan biaya produksi pertanian. Sementara dari sisi pasar, produk-produk pertanian dan kebun rakyat harus bersaing dengan produk-produk asing yang mengintervensi pasar lokal. Tidak ada niatan dari pemerintah dan parlemen untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan petani dan komunitas lokal dari serangan kepentingan pasar (asing) dengan dalih telah memasuki era pasar bebas.

Bila menilik apa yang terjadi di negara utara, maka bisa disaksikan begitu kuatnya pemerintah negara utara melindungi kepentingan petaninya. Dimana produk-produk dari luar negara mereka sangat dibatasi untuk dapat masuk ke pasar dalam negeri mereka. Hal yang terbalik dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dimana produk-produk asing semakin deras memasuki hampir semua pasar lokal di negeri ini.

Operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanyalah sebuah jawaban sesaat atas krisis pangan yang terjadi, dan hanya kelompok kecil (spekulan) yang akan diuntungkan dengan agenda ini. Posisi petani dan komunitas lokal akan semakin terpinggirkan ditengah pertarungan besar kepentingan politik ekonomi pemimpin negeri.

Negeri ini telah dijadikan sebagai sumber bahan baku dan pasar bagi kepentingan negara utara. Konsumerisme dibangun dengan semakin dikuasainya media massa oleh iklan, ditambah dengan tak adanya lagi jalan di negeri ini yang steril dari iklan. Sebuah gerakan terstruktur yang dilindungi oleh pemerintah demi kenyamanan pemodal. Liberalisasi telah menghasilkan krisis pangan berkelanjutan.

Proses berkehidupan di negeri ini akan lebih baik, seandainya saja pemerintah memihak pada kepentingan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar negeri ini. Proses-proses pencerdasan anak bangsa dan pensejahteraan rakyat, akan bermanfaat bila menjadi hal utama. Bukan sekedar mengejar peningkatan investasi (semu) yang pada akhirnya menghadirkan beragam persoalan ikutan.

Krisis energi dan krisis pangan yang merupakan buah krisis ekologi tidaklah lepas dari tangan tak terlihat yang sangat mencengkeram pemerintah dan parlemen di negeri ini. Nyanyian peningkatan ekonomi tidaklah menjawab sebuah tangisan kelaparan. Hiruk pikuk tarian (erotis) tidaklah menghilangkan rintihan anak negeri yang selalu disingkirkan. Jas mewah yang dibeli dari uang publik (APBN/D) tidak akan menghangatkan tidur rakyat yang tak lagi punya tempat bernaung.

Pemerintah dan parlemen sebagai pelayan publik, bangunlah dari buaian mimpi indah yang diputarkan pemodal (asing). Saatnya berpihak pada kepentingan rakyat demi keberlanjutan negeri ini.

Forum Konservasi: Memelihara Perselingkuhan Penghilangan Biodiversity

03. 3. 2007 - 519 dilihat

Forum Konservasi yang dibentuk dari hasil workshop “Sinergisme Kegiatan Konservasi di Kalimantan Timur” merupakan jalur tersembunyi yang dilakukan oleh Lembaga Konservasi Internasional (LKI) dalam memelihara perselingkuhan penghilangan biodiversity (keanekaragaman hayati) di Kalimantan Timur. Agak mengherankan memang karena senyatanya telah ada lembaga Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kaltim yang merupakan institusi di bawah Departemen Kehutanan yang bertugas untuk mengelola konservasi, namun tidak memiliki keberanian dan keseriusan dalam menjadi “leader” dalam pengelolaan konservasi di wilayah ini.

Demikian halnya dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) Kaltim, yang juga salah satu tugas pokok dan fungsinya untuk menjaga kelestarian plasma nutfah, masih belum memiliki keberanian dalam pengelolaan konservasi. Apalagi Dinas Kehutanan, yang hanya memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, memiliki keraguan yang kuat dalam memimpin kelestarian hutan di Kaltim.

Inisiatif yang datang silih berganti, yang selalu diinisiasi oleh LKI, senyatanya menunjukkan bahwa propinsi ini tidak memiliki sebuah desain besar (grand design) pengelolaan konservasi. Hingga tahun-tahun mendatang, yang akan terjadi hanyalah perselingkuhan konservasi, yang memelihara terus terjadinya penghilangan biodiversity secara berkelanjutan dan sistematis.

Penghilangan biodiversity dimaksud adalah meliputi pengambilan satwa dan puspa dilindungi dari alam, “pencurian” pengetahuan lokal melalui semakin banyaknya peneliti asing, hingga penguasaan kawasan “atas nama konservasi” yang kemudian diusahakan secara private (bisnis) oleh LKI. Belum termasuk hingga saat ini permasalahan pengambilan kayu tropis dipicu oleh mekanisme sertifikasi yang diagung-agungkan oleh LKI, demi pemenuhan kebutuhan kayu negeri asing.

Kemerdekaan yang diinisiasi oleh kelompok pemuda negeri ini bukanlah kemudian ditujukan untuk kelanggengan penguasaan negeri ini oleh kepentingan asing. LKI yang hingga saat ini menguasai sebagian besar wilayah konservasi di negeri ini, bukanlah bertujuan untuk membantu negeri ini. Lihat saja Taman Nasional Kutai yang telah sekian puluh

tahun diâ€œmasukiaâ€œ oleh LKI, saat ini ditinggalkan begitu saja setelah puluhan juta dolar digelontorkan dan setelah ratusan pengetahuan diraih oleh peneliti asing. Tak ada visi kelestarian di LKI, yang ada hanyalah bagaimana menguasai wilayah untuk kepentingan bisnis dan bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya ruang pengetahuan yang ada di wilayah tersebut.

Dalam perjalanan masuknya LKI di Kaltim, hingga saat ini sangat sukar mencari sepuluh orang dari Kaltim yang memiliki pengetahuan kuat dalam isu konservasi. Baik pada pengetahuan konservasi kawasan, konservasi spesies, maupun konservasi genetik. Yang ada hanyalah pekerja konservasi yang hanya menjadi robot (pekerja mekanik) di LKI. Ruang diskusi dan tranformasi pengetahuan yang selalu digembargemborkan LKI saat mulai masuk di sebuah wilayah, sangat jauh dari kenyataan.

Mekanisme transparansi yang juga selalu diagungkan tak pernah terwujud. Bila saja tidak ada yang menggugat, tidak akan pernah diketahui oleh para pihak di propinsi ini tentang apa saja yang tengah dilakukan oleh LKI. Hingga hari ini, siapa yang mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan di Taman Nasional Kayan Mentarang, Pulau Sangalaki, hingga yang dilakukan di pegunungan karst Kutai Timur? Bahkan masyarakat lokal yang mendampingi proses penelitian, sangat sering tidak pernah diberikan pengetahuan tambahan tentang penelitian yang sedang dilakukan.

Forum Konservasi yang dibangun, sangatlah jelas bukan merupakan kebutuhan propinsi ini. Forum Konservasi tersebut hanyalah untuk menjadi sebuah laporan pekerjaan yang dilakukan oleh LKI agar bisa terus berkelanjutan dana yang diperoleh dari para donatur. Agenda yang sebenarnya tidak pernah dipublikasikan dengan jelas oleh LKI yang ada di propinsi ini.

Kegelisahan seekor timpakul memang bukan penting bagi LKI, namun ini akan menjadi penting bagi warga di propinsi ini. Negeri ini dibangun oleh sebuah semangat kebersamaan menuju kebebasan. Peningkatan kapasitas pengetahuan warga propinsi ini menjadi sebuah hal yang penting. Bila hanya berdiam diri dan menyerah pada situasi, hal inilah yang tidak pernah diinginkan oleh pendiri negeri. Apalagi kalau harus terus menghamba pada kepentingan asing.

Propinsi Kaltim yang sangat kaya akan aset-aset alam dan pengetahuan tradisional harusnya sanggup menjadi lebih maju dibanding saat ini. Namun cengkeraman kepentingan asing yang menjanjikan keping-keping emas sesaat sepertinya telah menina-bobokan pengutamaan

<http://alien.adefadli.hijaubiru.org>

kepentingan rakyat. Haruskah pembodohan berkelanjutan terus terjadi di propinsi ini? Saatnya berpikir dan bertindak bagi kepentingan rakyat, tidak bagi kepentingan asing.

Jelajah Maya Kalimantan Timur

03. 1. 2007 - 718 dilihat

Internet, saat ini sepertinya hanya menjadi bagian bagi kelompok masyarakat menengah ke atas. Mahalnya peralatan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjelajah di dunia maya yang kaya akan informasi dan pengetahuan, menjadi sebuah hambatan utama dan pertama. Di luar itu, ternyata terdapat sebuah kondisi pensia-siaan keberadaan peralatan dan koneksi internet yang luar biasa di kalangan pemerintah. Sebuah temuan yang mengejutkan adalah keberadaan tidak kurang dari 26 komputer server yang hingga saat ini hanya tergunakan sebagian kecilnya.

Bisa jadi karena ketidaktahuan atau malah akibat dari terlalu banyaknya peralatan yang telah dimiliki, hingga tidak tahu lagi berapa banyak teknologi yang dimiliki. Hal yang menarik juga adalah ketika website Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (kaltim.go.id) tidak lagi bisa diakses karena penyedia layanan tidak diperpanjang kontraknya. Baru setelah di"gugat" oleh beberapa kalangan, tersadarkan akan pentingnya pintu gerbang propinsi ini di dunia maya. Akhirnya, dengan sebuah aktivitas "gotong royong" akhirnya bisa kembali terbuka "gerbang maya" propinsi ini, walaupun harus berpindah alamat menjadi kaltimprov.go.id. Sebuah pekerjaan yang maha dahsyat yang dilakukan oleh tim dari sebuah sekolah kejuruan TI swasta di Samarinda agar supaya gerbangnya kembali terbuka.

Dari penjelajahan hingga saat ini, bisa jadi angka yang disajikan oleh APJII sebagai sebuah gambaran kondisi negeri ini. Baru 8% penduduk negeri ini yang menggunakan internet di tahun 2006, dengan tarif internet yang masih sangat mahal. Namun telah ada sebuah arah membaik di masa datang (seandainya mampu terlaksana), dimana Konferensi Teknologi Operasional Internet Asia-Pasific (Asia-Pasific Regional Internet Conference on Operational Technology/APRICOT) yang berlangsung di Bali tanggal 26-27 Februari 2007, menghasilkan komitmen untuk membuat internet dan teknologi informasi serta komunikasi yang tersedia dan terjangkau.

Grand Design TI: Perencanaan Masa Datang Perjalanan TI di Kaltim

Dunia ini terus bergerak. Kemajuan teknologi akan semakin menghasilkan teknologi yang mudah dan murah bagi pengguna. Menjadi penting membangun kesiapan pengguna teknologi agar tak menjadi gagap terhadap teknologi yang dihasilkan, atau malah menggunakan

teknologi untuk kepentingan yang tak berguna. Bisa jadi dengan teknologi yang akan datang akan menghasilkan kejahatan terbaru pula. Inilah yang penting dibingkai di propinsi ini sebelum berlari mengikuti perkembangan jaman.

Dalam beberapa kali pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan Investasi Daerah (BPID) Kaltim, telah digulirkan wacana membuat grand design teknologi informasi (GD-TI) di Kaltim. Sebuah kelompok dari berbagai kalangan telah dirangkul untuk bahu-membahu mewujudkannya. Mulai dari pengusaha, akademisi, sekolah, hingga komunitas TI. Hanya saja masih ada pihak yang enggan menggabungkan diri karena memiliki agenda tersendiri dan terlalu sibuk dengan mainannya sendiri. Inilah sebuah tantangan awal dalam mencoba membangun kerangka kerja besar bersama di dunia teknologi informasi di Kaltim.

Dari hasil penjajakan awal, ditemukan banyak sekali celah yang harus diperbaiki dalam konteks teknologi informasi di pemerintahan dan dunia pendidikan. Sumberdaya manusia yang belum memadai, peralatan yang tidak dikelola dengan baik, penggunaan perangkat lunak (software) yang tak resmi, hingga masalah kebijakan yang masih belum mendukung secara maksimal.

GD-TI haruslah dibuat sesegera mungkin. Selain dapat menunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Kaltim tahun depan, GD-TI juga akan menjadikan sebuah pencapaian yang terukur dan terarah bagi pengembangan TI di Kaltim. Usaha awal yang sudah cukup baik, hanya saja masih penting untuk membuka keterlibatan lebih banyak pihak untuk berkontribusi pemikiran dalam penyusunan dan pelaksanaan GD-TI Kaltim.

Internet Exchange: Jalan Alternatif TI

Selain GD-IT yang menjadi penting, internet exchange yang merupakan infrastruktur fisik yang memungkinkan penyedia jasa internet (ISP) yang berbeda untuk menggunakan jalur secara bersama dengan persetujuan, menjadi kebutuhan wilayah ini, terutama juga dalam mendukung perwujudan e-government dan me-rakyatkan internet. Semakin banyak bertumbuhan ISP di Samarinda dan Balikpapan, ditambah dengan akses internet yang dimiliki Pemerintah Propinsi maupun kota, perguruan tinggi dan sekolah kejuruan, maka akan semakin memungkinkan dilahirkannya SIX (Samarinda Internet Exchange) maupun KTI (Kalimantan Timur Internet Exchange).

Keuntungan pertama adalah semakin mudahnya jejaring informasi yang

akan dibangun antar instansi pemerintah, termasuk juga terhadap kelompok perguruan tinggi dan swasta maupun masyarakat pada umumnya. Keuntungan lainnya adalah akan bisa terbangun sebuah kawah informasi yang sangat luar biasa yang dapat diakses dengan cepat dan biaya lebih murah, bila saja semangat kebersamaan dalam mewujudkannya tetap terjaga.

Kepentingan bisnis pasti akan tumbuh dalam proses perjalanannya. Menjadi penting untuk tetap terjaga sebuah roh kebersamaan di dalamnya. Pengetahuan bukanlah hanya semata milik perseorangan, pengetahuan akan lebih berarti bilamana digelontorkan pada pihak yang lebih banyak.

Jelajah Maya Kalimantan Timur

Berikutnya yang menjadi tantangan terberat adalah bagaimana masyarakat Kaltim berkehendak untuk menggunakan teknologi yang tersedia. Ketika faktor harga telah mampu ditekan serendah mungkin, apakah kemudian masyarakat Kaltim akan tergiur untuk berselancar di jagad maya?

Pertanyaan bagi penggila TI saat ini adalah ketika semakin banyak akses internet murah, bahkan gratis pada sebuah tempat, namun kemudian masih banyak kelompok yang seolah tidak tertarik dengan gunung informasi yang akan tersajikan. Benar saja bahwa hingga saat ini hanya 8% penduduk negeri yang telah mengakses internet dikarenakan faktor tarif yang masih selangit. Namun apakah kemudian akan meningkat tajam ketika tarif menjadi sangat murah?

Memasyarakatkan TI bukanlah semudah memasyarakatkan teknologi telepon genggam. Masih banyak hal yang menjadikan sebuah kesenangan yang tidak sekedar melihat situs porno ataupun ber"marketing" di dunia maya. Dunia maya harus bermanfaat secara pengetahuan bagi kehidupan keseharian masyarakat, dimana dengan keberadaannya akan terjadi peningkatan ekonomi kerakyatan hingga terbangunnya jejaring kehidupan sosial-kultural yang lebih luas. Jagad maya adalah ruang kehidupan yang berbeda, dan akan sangat berarti bila disandingkan dalam berkehidupan di negeri ini.

Pertanyaan penting bagi pelayan publik (pemerintah) dan masyarakat Kaltim adalah apakah memang dibutuhkan sebuah jejaring informasi (teknologi informasi) bagi kehidupan di Kaltim ini? Bila ya, marilah bersama mendesakkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk kembalinya domain kaltim.go.id sebagai langkah pertama. Dan kemudian menjadi penting untuk bersama membangun grand design

<http://alien.adefadli.hijaubiru.org>

teknologi informasi di Kaltim, serta dilanjutkan dengan bersama mewujudkannya.

Negeri yang Menangis

02. 28. 2007 - 299 dilihat

Kesedihan berkesinambungan tengah dihadapi negeri ini. Sebuah negeri yang berlimpah aset-aset alam yang sedang berada di tengah hampasan bencana ekologi. Nyawa sudah tak lagi berharga. Setiap jejak langkah dapat menghadirkan kematian. Penderitaan anak negeri pun bergelimpangan di setiap tapak kaki.

Bisa jadi tak ada yang salah dengan arah membangun negeri. Buah-buah pengerukan aset-aset alam telah dirasakan oleh sebagian kecil penghuni negeri. Ketimpangan perekonomian terjadi. Konglomerasi membudaya dan menguasai ruang kehidupan. Satu persatu penyangga kehidupan rakyat runtuh menghujam bumi.

Persoalan ekonomi, kelangkaan bahan pangan, tingginya biaya pendidikan dan kesehatan, penggusuran, meningkatnya pekerja seks komersial, ruang tahanan yang tak lagi mencukupi, serta rangkaian kejadian bencana ekologi, sepertinya bukan lagi saatnya diselesaikan secara parsial. Dasar utama permasalahan tak pernah disentuh oleh pemimpin negeri. Politikus tengah menari di atas tangisan negeri.

Mungkin setengah abad kemerdekaan negeri ini belum jua cukup untuk menjawab pertikaian kepentingan kelompok di negeri ini. Keinginan untuk menguasai dan menjajah sesama anak negeri masih mengikat kuat. Partai politik menjadi sebuah kendaraan nyaman menuju medan pertempuran. Media massa berkuat diantara pertarungan, demi keberlanjutan kehidupannya.

Tak banyak yang bisa dilakukan oleh rakyat, selain tetap menyibukkan dirinya dalam ruang bernegara, dan sesekali menyaksikan tayangan kekerasan, mistis dan kebodohan di televisi untuk menghibur diri. Biaya pendidikan dan kesehatan yang masih tak terjangkau menjadikan rakyat harus berlomba-lomba me-Tuhan-kan kepingan uang.

Pondasi kehidupan di negeri ini akan semakin dihancurkan atas sebuah kepentingan kelompok kecil penguasa negeri. Sementara kepentingan modal terus menguatkan cengkeramannya di setiap ruas wilayah negeri ini. Saat ini, seakan tak ada lagi celah negeri ini yang tak lagi di bawah kendali kekuatan pemodal, sebuah tangan yang tak terlihat.

Berbalik pada kesejarahan kelahiran negeri ini, begitu banyak darah dan air mata yang mengalir di anak-anak sungai dalam jalan menuju

kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Berkumpulnya para pemikir muda untuk meraih kebebasan berkreasi di negeri inipun saat menggelar persiapan kemerdekaan, saat ini telah berubah arah menjadi sebuah perkumpulan pemuda yang tanpa arah.

Hilangnya beberapa catatan kesejarahan negeri ini (yang sengaja dihilangkan) telah menjadikan arah negeri ini tak lagi pada jalan yang sejatinya. Penguasaan yang cukup kuat dari kepentingan asing, semakin tak terkendalikan. Menghamba pada kepentingan pasar telah menggeliat dalam setiap ruas sendi kehidupan.

Negeri yang menangis saat ini sudah saatnya melakukan pengembalian memori pada cita berdirinya negeri. Bukan pada penguatan terhadap sistem feodalistik, namun lebih pada bagaimana anak negeri dapat memiliki kesejahteraan dalam berkehidupan. Jaminan atas diperolehnya pendidikan yang gratis dan berkualitas, layanan kesehatan yang gratis dan berkualitas, hingga terbukanya ruang kreatifitas yang didukung oleh pelayanan publik negeri ini. Perebutan ruang kekuasaan harus semakin dikesampingkan dalam pertarungan hari esok.

Pilihan negeri ini ke depan adalah seorang pemimpin yang memiliki tiga pondasi kepemimpinan, kejujuran, kecerdasan, keberanian. Bukan lagi seorang calon yang hanya berasal dari perjalanan karir politiknya. Bukan pula pemimpin yang berasal dari dukungan kuat pemodal. Namun pemimpin yang benar-benar lahir dari rakyat negeri yang tertindas. Sudah cukup negeri ini dipimpin oleh para petualang politik yang tak pernah memperhatikan akar rumput. Saatnya rakyat yang berkuasa.

Ruang publik di negeri ini pun sudah saatnya dibuka selebar-lebarnya, yang diikuti dengan sebuah pendidikan kritis bagi rakyat. Tidak hanya menyanyikan lagu kebangsaan namun melupakan makna lagu kebangsaan. Tidak sekedar mewakili rakyat pada elite-elite lokal yang telah dikuasai oleh kepentingan penguasa dan pemodal. Mendesak saat ini adanya hukum yang melindungi ruang publik untuk beraktivitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap proses pembangunan di sekitar mereka.

Kalangan akademisi sudah saatnya kembali pada sebuah temuan-temuan konseptual untuk menjadi landasan berpikir arah negeri ini. Tidak terlalu disibukkan dengan berebut proyek-proyek karena periuk nasinya tak pernah terpenuhi. Bukan juga selalu disibukkan dengan kepentingan politik golongan tertentu untuk jaminan kehidupan. Berpikirlah untuk kembali pada mencetak anak negeri yang jujur, cerdas dan berani, tidak sekedar memiliki nilai sempurna namun tak berkualitas.

Negeri ini sedang menangis. Air mata tengah gugur satu persatu secara perlahan. Namun tangisan ini sepertinya tidak menjadi penting bagi anak negeri. Pembodohan dan heroisme selalu menjadi sebuah hiburan semu. Menghadirkan senyum yang akan hilang diterpa laparnya perut. Sudah selayaknya negeri ini bangkit dengan tidak hanya bermodal semangat.

Mereka yang hari ini selalu digusur, dikejar, ditangkap oleh unit pengamanan pemerintah hari ini dan dianggap sebagai penyakit masyarakat, harusnya tidak hanya diselesaikan dengan membangun tembok kebebasan bagi mereka. Lihatlah apa yang menjadikan mereka memilih proses kehidupannya. Berikanlah pada rakyat sebuah proses yang lebih berpihak pada kehidupan, bukan dengan menciptakan â€˜setanâ€™ yang menakutkan kehidupan rakyat.

Negeri yang menangis akan tetap menangis. Karena tak akan ada yang ingin benar-benar memiliki ketulusan untuk sesama. Pertarungan kepentingan, keinginan untuk menguasai, naluri mempertahankan kehidupan, selalu melingkupi setiap ruas negeri ini. Negeri yang menangis menantikan sebuah perubahan cepat. Negeri yang menangis menunggu datangnya pemimpin yang jujur, cerdas dan berani. Ini adalah negeri bersama, bukan negeri bagi segelintir makhluk yang bernama pemodal dan partai politik. [070228]

Perselingkuhan Konservasi

02. 24. 2007 - 741 dilihat

Inisiasi Heart of Borneo telah dideklarasikan di sela-sela pertemuan Forum Kehutanan Dunia di Bali beberapa waktu lalu. Sebagian besar pihak memandang Deklarasi Heart of Borneo sebagai sebuah upaya untuk penyelamatan jantung Borneo dan sangat bermanfaat bagi Borneo dan Indonesia. Mungkin bisa jadi benar apa yang disampaikan, namun tetap menjadi penting untuk melihat lebih dalam terhadap proses yang tengah terjadi di wilayah ini.

Kalimantan Timur merupakan propinsi yang menjadi lahan empuk bagi lembaga konservasi internasional dan lembaga kerjasama internasional. Hingga hari ini tidak kurang dari 8 lembaga konservasi internasional (LKI) hadir dengan beragam program yang semuanya bertemakan “konservasi untuk kesejahteraan masyarakat”. World Wildlife Fund for Nature (WWF) di Taman Nasional Kayan Mentarang, Center for International Research (CIFOR) di Malinau, The Nature Conservancy (TNC) di Berau dan Kutai Timur, Turtle Foundation di Berau, TropenBos International (TBI) di Malinau dan Pasir, World Education (WE) di Berau dan Kutai Timur, Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, dan pemain baru Borneo Tropical Rainforest Foundation (BTRF) di Kutai Timur dan Bulungan.

Begitu menariknya propinsi ini telah menjadikan lahan baru bagi program konservasi dunia. Mulai dari isu orangutan, penyu, kawasan taman nasional, hutan lindung, hingga pengelolaan hutan oleh komunitas lokal. Menjadi penting untuk dilihat apa yang sebenarnya telah terjadi dan dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, karena hingga saat ini Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur belum tentu mampu melakukan pengawasan dan pemantauan kinerja mereka. Dalam setiap piagam kerjasama (bila dilakukan kerjasama resmi), ada kewajiban lembaga kerjasama internasional untuk berkomitmen berkontribusi dana yang bisa mencapai US\$500.000 setiap tahun untuk Departemen Kehutanan, serta mengikutsertakan staf Departemen Kehutanan (hingga staf di daerah) untuk terlibat dalam kegiatan yang dilakukan.

Kondisi ini kemudian menjadikan terjadinya “perselingkuhan konservasi” antara pihak yang beraktivitas dengan yang harusnya menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi. Telah lebih dari 10 tahun berbagai lembaga tersebut melakukan aktivitas di Kalimantan Timur, namun tak jua ada dilakukan pemantauan dan penilaian terhadap

kinerja konservasi yang dilakukan. Sementara semakin banyak dana internasional yang mengalir (yang sebagian untuk kepentingan pekerja asing), dan semakin juga banyak “penjualan” isu konservasi di dunia internasional, dan tidak pernah jelas terjadinya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di tingkat lokal dalam pengetahuan konservasi maupun pengetahuan lainnya.

Temuan sementara hingga hari ini adalah staff Departemen Kehutanan (termasuk institusi teknisnya) semakin banyak yang menggunakan “baju” LKI tersebut. Padahal secara status masih sebagai pegawai negeri, namun dengan pendapatan berasal dari lembaga konservasi. Dengan dalih ini demi kepentingan pengawasan dan termasuk dalam piagam kerjasama, proses “perselingkuhan” menjadi sebuah proses yang legal. Bisa jadi dianggap tak ada yang salah dengan hal ini, namun bila dilihat dari sisi berbeda, bahwa kemudian akan terjadi stagnansi program konservasi Departemen Kehutanan karena dengan jumlah staff yang sudah sedikit, malah lebih banyak sibuk dengan sebuah program yang terkadang tidak merupakan agenda dari Departemen Kehutanan.

Dari sisi pelaksanaan program, cenderung dilakukan “paksaan” kepada institusi pemerintahan di daerah hingga pusat. Surat undangan yang berlabelkan Sekretariat Propinsi ataupun institusi teknis sering kali digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan workshop ataupun seminar yang merupakan program dari LKI.

Dalam sisi pemindahan pengetahuan (transfer knowledge) kepada komunitas lokal, aliran pengetahuan malah mengalir dari komunitas lokal ke peneliti asing dan bukan sebaliknya. Proses peningkatan cara berpikir dan menganalisa sebuah permasalahan pada staf yang selama ini membantu kerja-kerja yang dilakukan oleh LKI tidak pernah terjadi. Publikasi yang dihasilkan lebih diutamakan dengan berbahasa Inggris, dengan jumlah terbatas dan harga yang sangat mahal. Sangat jarang ditemukan hasil penelitian yang dicetak dalam bahasa Indonesia (apalagi dengan bahasa lokal), jumlah yang banyak, dan harga yang murah, sehingga bisa dibaca dan dipelajari oleh begitu banyaknya pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Timur.

Dalam proses yang dilakukanpun sebagian besar merupakan “paksaan” inisiatif dari LKI, bukan terbangun dari kepentingan pemerintah lokal, karena sejatinya konservasi masih belum merupakan hal penting bagi pemerintahan lokal. Dari sebuah workshop yang kadang tidak terpahami substansinya, hingga menggunakan mekanisme perwakilan komunitas lokal, serta proses partisipatif tanpa keterlibatan publik. Seringkali pihak-pihak yang dipandang kontra pemikiran secara perlahan disingkirkan dalam diskusi, karena dipandang mengganggu

proses. Inilah yang disebut proses partisipatif dan kolaboratif oleh LKI.

Lebih parahnya, terjadi “perselingkuhan” demi memuaskan pejabat pusat LKI. Sebuah surat pengantar perpindahan Anggrek Hitam pernah dikeluarkan oleh BKSDA Kaltim atas permintaan sebuah LKI dengan dalih untuk dipamerkan dalam sebuah pameran di Jakarta. Ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata pameran yang dimaksud tidak pernah dilaksanakan, dan Anggrek Hitam tersebut adalah untuk kepemilikan pribadi pejabat pusat LKI. Ironis memang, namun inilah yang bisa jadi semakin sering terjadi.

Kejadian berbeda ketika satwa (orangutan) dalam kondisi tersiksa (termasuk dibunuh), tidak ada respon keberpihakan terhadap kesejahteraan satwa (animal welfare), yang merupakan salah satu prinsip dasar konservasi, dari pekerja LKI. Yang disibukkan hanyalah menata ulang penampilan di depan publik dengan mencoba “merayu” beberapa wartawan media untuk memuat siaran pers dan aksi yang LKI lakukan. Tidak pernah dipikirkan bagaimana untuk memperbaiki pemahaman konservasi pada pekerja LKI, maupun memperbaiki prosedur standar operasi (standard operational procedure) dari kerja-kerja yang dilakukan.

Pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) terkadang terlena dengan nuansa pertemuan di hotel hingga perjalanan studi banding yang difasilitasi oleh LKI, sehingga tidak sadar akan mengeluarkan APBD untuk kepentingan sebuah badan yang dibentuk LKI, tanpa pernah melihat lebih dalam manfaatnya bagi rakyatnya yang seharusnya dilayani. Penghargaan yang diberikan oleh LKI pun semakin menambah keterlenaan kerja-kerja yang dilakukan dengan melayani kepentingan LKI dibandingkan melayani kepentingan publik.

Pertanyaan dasar harusnya muncul di awal ketika sebuah LKI tertarik beraktivitas di sebuah lokasi di Kaltim. Untuk apa mereka beraktivitas? Benarkah untuk konservasi? Benarkah untuk kepentingan global? Sebuah catatan mengungkapkannya kerja sebuah LKI (yang juga beraktivitas di Kaltim) di wilayah lain di Indonesia, ternyata adalah untuk mendirikan sebuah perusahaan wisata laut (yang sebagian investasinya dari utang dengan lembaga keuangan internasional), dengan sebelumnya program konservasi diarahkan untuk menghalau nelayan dari kawasan tersebut. Pemuasan nafsu bagi orang asing di negeri ini lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan daerah tangkapan bagi nelayan, yang akhirnya saat ini Indonesia harus mengimpor produk perikanan.

Temuan lain yang pernah dilansir oleh Washington Post, bahwa sebuah LKI (yang juga bekerja di Kaltim) setelah melakukan mekanisme “buy

an acre” pada sebuah kawasan konservasi (yang katanya) untuk pelestarian satwa, dalam beberapa waktu kemudian dialihkan untuk kepentingan perumahan (property) dan pertambangan gas. Berbeda sedikit, juga kerja yang dilakukan LKI di sektor perikanan, setelah melakukan pertemuan di hotel mewah, secara perlahan mulai berpikir mengambil alih kepemilikan konsesi, yang kemudian diperuntukkan bagi penyediaan kebutuhan kayu bagi Amerika Serikat.

Celoteh miring pasti akan hadir setelah terbacanya tulisan ini. Bahkan terkadang intimidasi dilakukan kepada penulis. Namun ini hanyalah sebuah “peringatan awal” dari penulis bagi warga negeri ini agar tak lagi terjajah atas nama konservasi. Ini juga sebagai tanggapan terhadap celoteh pekerja bawahan di LKI kepada penulis yang selalu mengeluhkan adanya benturan antara kebutuhan komunitas dengan kepentingan LKI. Telah begitu lama negeri ini membangun kemerdekaannya. Telah sangat lama kelompok pemuda membangun kebersamaan demi kemajuan anak negeri. Haruskah secara perlahan kemudian negeri ini “dijual” demi kepentingan asing? Secara perlahan LKI telah membeli lahan-lahan (baik dalam skala kecil maupun skala luas) atas nama konservasi, yang pada akhirnya adalah untuk kepentingan ekonomi negara utara dan para donatur konservasi. Haruskah penindasan terus berkelanjutan? Pilihannya sederhana, bangkit melawan atau tetap bersenggama dalam kenikmatan penindasan.

Sustainable Destructive Logging

02. 19. 2007 - 326 dilihat

Tergerak dari kegelisahan seorang akademisi terhadap illegal logging yang masih marak terjadi, termasuk tanggapan seorang praktisi pengusaha kehutanan yang menyatakan bahwa ada kabar baik dalam penanganan illegal logging, menjadikan menarik untuk mengungkap sisi berbeda dari cara pandang terhadap illegal logging.

Sustainable Destructive Logging, sebuah pengistilahan terhadap pembalakan haram yang merusak secara berkelanjutan, sepertinya lebih tepat diberikan untuk aktivitas penebangan (baik berijin maupun tidak berijin) yang merusak keberadaan hutan di negeri ini. Sustainable Forest Management (SFM) atau pengelolaan hutan secara lestari, yang pernah digaungkan di era 1997-2002, saat ini telah tak lagi menjadi bagian penting dalam melihat kondisi kehutanan hari ini, seiring dengan berakhirnya proyek yang didanai oleh Pemerintah German beberapa waktu lalu.

Penanganan pengrusakan hutan akibat aktivitas penebangan dapat dilihat dari aspek pelaku. Ada pelaku lokal, group pelaku lokal, perusahaan lokal, dan group perusahaan yang menjadi pelaku pembalakan haram. Pelaku lokal umumnya melakukan penebangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk kepentingan pribadi atau komunitasnya. Group pelaku lokal, ini yang kemudian menjadi pemasok kebutuhan kayu di lingkup lokal perkotaan. Perusahaan lokal biasanya melakukan kerjasama untuk memperdagangkan kayunya ke industri ataupun pedagang antar pulau. Dan group perusahaan, melakukan pembalakan haram dengan ijin resmi namun mengabaikan prinsip kelestarian.

Dalam sebuah perbincangan dengan seorang yang pernah menjadi pegiat lingkungan hidup, beliau katakan "Lebih baik bila group pelaku lokal itu difasilitasi untuk memperoleh areal, biar tidak terjadi kolusi, selain itu pemerintah juga akan memperoleh pendapatan dari retribusi". Ini diperkuat dengan pernyataan seorang akademisi di Kaltim yang juga bersepakat dengan hal tersebut, dan menjadi penasehat ahli bagi group pelaku lokal.

Sangat berbeda pandangan ketika melihat permasalahan illegal logging dari kacamata penegakan hukum semata. Yang dilihat kemudian hanyalah masalah perijinan dan kehilangan pendapatan daerah (ataupun pendapatan negara). Aspek ekologi dan sosial-kultural

menjadi bagian yang terabaikan. Ini yang kemudian menjadikan penting untuk kembali melihat secara utuh terhadap akar permasalahan terjadinya sustainable destructive logging. Berbagai seminar, lokakarya, workshop, hingga perbincangan warung kopi, senyatanya belum juga menjadikan permasalahan pembalakan haram menjadi tuntas, karena bukan semata masalah aksi yang harus dilakukan, namun lebih dalam dari itu, untuk apa aksi itu dilakukan.

Penebangan pohon yang dilakukan hingga saat ini senyatanya adalah bukan untuk kepentingan negeri ini. Sejak dikeluarkan UU No. 5 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan, setelah sebelumnya dilahirkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, senyatanya kepentingan penebangan pohon diberikan untuk keuntungan bangsa asing, terutama Jepang pada saat itu. Selanjutnya kemudian, kepentingan Eropa dan Amerika Serikat mengikutinya, sambil membawa serta teknologi dan juga perangkat sertifikasi dalam upaya menekan harga kayu tropis yang dijual ke negara mereka. China dan Vietnam kemudian mencoba masuk dalam pasar kayu internasional, untuk sekedar menjadi makelar dan perantara perdagangan.

Lalu pernahkah dilakukan kajian lebih lengkap terhadap kebutuhan kayu dalam negeri? Pasar domestik kayu hingga saat ini telah sangat nyaman untuk menikmati produk kayu kualitas rendah dan kayu dari penebangan tak berijin. Produk kayu kualitas terbaik diberikan kepada pasar internasional, yang sebagian hanya digunakan untuk pelapis sementara untuk proses pembangunan gedung bertingkat di negara belahan utara, atau bila menjadi bubur kertas, berakhir sebagai kertas toilet. Sementara itu, gangguan ekologi di negeri ini semakin tak berhenti, banjir, kekeringan, longsor, kebakaran lahan, sebuah imbalan yang tak sepadan.

Mencoba melihat lebih dalam terhadap praktek Sustainable Destructive Logging, senyatanya terjadi dikarenakan tingginya kesenjangan kapasitas mesin produksi dan kemampuan penebangan berijin menyediakan bahan baku. Matinya beberapa industri perikanan di berbagai kota, termasuk di Samarinda, tidak lepas dari dicabutnya sebagian tiang penyangga industri, berupa subsidi dan berbagai kemudahan lainnya bagi pengusaha industri perikanan. Ini pula yang kemudian menjadikan begitu banyaknya pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja yang tidak berkeadilan.

Akar permasalahan berikutnya adalah terjadinya kesenjangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hingga hari ini. Kemudahan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat urban, telah memantik kegelisahan masyarakat di sekitarnya. Biaya pendidikan dan

kesehatan yang masih mahal, menjadikan kelompok rakyat harus berlomba untuk membangun kesejahteraannya sendiri. Kayu, sebagai benda yang mampu menyediakan uang dengan cepat, akhirnya menjadi sebuah pilihan sesaat, tanpa pernah berpikir panjang tentang keberlanjutan generasi. Seorang chainsawman pernah berujar â€œUrusan generasi mendatang biarlah menjadi urusan mereka nanti, karena setiap generasi pasti akan punya solusi atas masalah yang akan mereka hadapi.â€œ

Perlindungan terhadap pembalok kayu tak berijin yang dilakukan oleh aparat, sehingga terjadinya kolusi berkelanjutan, juga tidak pernah lepas dari permasalahan mendasar dari kebutuhan perut dan di bawah perut. Keinginan untuk menyekolahkan anak di sekolah berkualitas, hingga menyiapkan uang untuk kelahiran anak kedua, sampai dengan semakin meningkatnya harga jual beras, menjadikan petugas yang harusnya melakukan penegakan hukum memilih untuk melanggar hukum.

Lalu apakah tidak ada solusi terhadap kondisi yang akan terus berkelanjutan ini? Begitu banyak dokumen yang telah dibuat dan tidak pernah dibaca, sepertinya bukan menjadi solusi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah cara kerja pemerintah dengan melakukan upaya pemerataan kesejahteraan rakyat, dengan tidak selalu berpikir mengejar pertumbuhan pembangunan, apalagi harus menghamba pada investor. Bangun kembali sistem ekonomi kerakyatan, yang belajar dari pemikiran ekonomi sosial dari Bung Hatta, di mana pondasi negeri akan semakin kokoh dengan sistem ekonomi komunal.

Pemerintah juga harus berhenti mengejar investor, karena hanya menghadirkan peningkatan ekonomi semu bagi bangsa ini. Kemerdekaan negeri ini bukanlah sebuah pemberian percuma dari bangsa asing, menjadi penting untuk kembali menguatkan kedaulatan rakyat atas kemerdekaannya, dengan tidak lagi mengikuti saran-saran bangsa asing, termasuk Bank Dunia dan International Monetary Fund, yang selama ini telah terbukti menjerumuskan Indonesia dalam lubang keterpurukan yang semakin dalam.

Sustainable Destructive Logging akan terus terjadi, hingga pemerintah sadar akan hal yang lebih penting dilakukan di daerah layanannya. Sustainable Destructive Logging mungkin akan menjadi sebuah bom waktu bencana ekologis di berbagai kawasan, yang tentu saja akan menghabiskan begitu banyak uang untuk memperbaikinya. Namun sebelum terlambat, akan lebih baik bila pemerintah me-refresh kerangka kerja pembangunan yang akan dilakukan. Dan bagi para akademisi, kembalilah ke dalam ruang ilmiah untuk menghadirkan

temuan baru yang aplikatif dan bermanfaat bagi rakyat, dan tidak terlalu disibukkan dengan proyek hanya karena gaji yang tak pernah mencukupi untuk bertahan hidup.

Kacang Ijo dalam Kaleng

02. 9. 2007 - 439 dilihat

“Kacang ijo dalam kaleng. Minuman kaleng yang tidak diproduksi di negeri ini, padahal negeri ini menjadi penyedia bahan baku bagi industri tersebut” demikian paparan Faisal Basri dalam Konvensi Media Massa Nasional IV yang berlangsung di Hotel Borneo, Samarinda, kemarin (8/2). Begitu banyaknya produk-produk makanan ringan, mulai dari kacang gurih, ting-ting, kumis kucing, hingga asam jawa, yang diproduksi tidak di Indonesia. Malaysia dan Vietnam telah mendirikan industri makanan ringan yang bahan bakunya sebagian besar dari Indonesia.

Kondisi yang menyeramkan bagi bangsa ini. Disaat terdapat 39,05 juta penduduk miskin, ternyata Indonesia masih menyisakan kekayaan yang dikuasai oleh pemodal asing. 70% Perbankan di Indonesia hari ini kepemilikannya tidak oleh Indonesia. Belum termasuk sektor pertambangan, perkebunan besar, hutan tanaman industri, kehutanan dan perikanan, yang senyatanya dimainkan tidak oleh rakyat Indonesia. Tak pernah disadari mungkin oleh para pemegang kekuasaan, di saat mengejar investasi yang berlebihan bagi peningkatan ekonomi tidak riil, senyatanya telah menghabiskan lahan-lahan produktif rakyat yang selama ini menjadi penopang kehidupan negeri.

Ichlasul Amal dari Dewan Pers Indonesia memaparkan bahwa hampir 90% aktivitas perekonomian dilakukan oleh kelompok mikro dan kecil. Pedagang Kaki Lima, yang hingga hari ini masih harus tergusur oleh kepentingan supermal maupun ruko, harus memasuki pertarungan ekonomi hanya demi bisa bertahan hidup hari ini. Lebih jauh ternyata, petani dan nelayan masih belum dianggap menjadi bagian penting dalam membangun pondasi ekonomi negeri. Penguasa masih hanya berkuat dengan stabilitas investasi, yang senyatanya, menurut Faisal Basri, telah menunjukkan angka negatif (penurunan) dalam dua tahun terakhir.

Bila melihat di sektor pendidikan, maka bisa jadi bahwa inilah yang harusnya menjadi sektor kunci dalam membongkar arah pemerataan kesejahteraan di negeri ini. Pendidikan hingga hari ini hanya melihat pada kompetensi industri, teknologi dan bisnis raksasa, bukan pada kompetensi menguatkan sektor pedagang kaki lima, petani dan nelayan. Sekolah menengah dan perguruan tinggi berkuat dan berlomba untuk memfasehkan siswanya dengan bahasa asing dan teknologi informasi. Bukan salah memang, namun kemudian menjadi

terlupakan bagaimana pondasi ekonomi bangsa yang sejatinya harus dihasilkan tak pernah tergarap dengan serius.

Negeri yang berlabelkan maritim dan agraris, hingga saat ini masih sangat sedikit menghasilkan teknologi sederhana yang bisa digunakan untuk menopang sektor riil rakyat. Penemuan telo (ketela) ungu melingkar oleh seorang akademisi perguruan tinggi negeri di Samarinda, mungkin hanya menjadi sebuah tulisan kecil dalam jurnal ilmiah. Bank beras lokal yang dikoleksi oleh sebuah lembaga, bisa jadi telah tak lagi bisa ditanam karena tak pernah juga dilakukan penelitian lebih lanjut untuk pemuliaannya. Hilangnya ikan patin di perairan Mahakam, bisa jadi karena telah lupa untuk mempersiapkan benih berkelanjutan bagi petani keramba.

Di luar itu, penguasaan lahan produktif (termasuk perairan produktif) oleh industri ekstraktif skala luas telah pula mengakibatkan tergerusnya budaya pertanian dan nelayan sebagian besar rakyat. Sudah saatnya berpikir ulang tentang desain pemerataan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Bagaimana sektor ekonomi riil di tingkat rakyat bisa terfasilitasi dengan baik dan bagaimana kemudian teknologi mampu mendukung pengembangan ekonomi rakyat. Bukan sebaliknya, saat teknologi malah mengeliminir dan semakin memarginalkan sektor ekonomi rakyat. Sudah waktunya berpihak pada rakyat dan tidak lagi menghamba kepada modal!

[070209]

:: *catatan kecil mengamati Konvensi Nasional Media Massa IV di Samarinda, 8 Februari 2007*

DARI MALARI HINGGA SEMANGGI: Memaknai Sebuah Perlawanan

01. 14. 2007 - 565 dilihat

15 Januari 1974. 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan, 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak dan sebagian dibakar, 144 bangunan rusak, 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Gerakan massa tak tertahankan saat mahasiswa bergerak melakukan aksi untuk melawan masuknya pemodal asing di negeri ini. In-stabilitas ekonomi menjadi sebuah pemicu keluarnya mahasiswa dari kampus menuju ke jalan.

Kejadian berulang saat tahun 1998. Mahasiswa kembali mengenakan jaket alamatnya dan berada di jalan. Meninggalkan tumpukan tugas kuliah. Beranjak dari gedung mewah yang didanai oleh utang luar negeri, tempat belajar selama ini. Satu tujuan, membangun pemerintahan yang lebih baik, dengan meneriakkan jargon "Kesejahteraan Rakyat".

Sejarah selalu berulang, walau tidak dalam sebuah lingkaran tertutup. Sejarah bergerak dalam bentuk spiral berkelanjutan. Sesaat berada di masa kenayamanan, sesaat kemudian berada di jurang keterpurukan. Mahasiswa, sebagai pihak yang dipandang independen, selalu berada di puncak memimpin publik untuk melakukan perlawanan.

Dalam pelajaran sejarah negeri ini sangat jarang sekali dikupas secara lebih mendalam apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah peristiwa sejarah. Apa yang terjadi di tahun 1965 hingga 1966 misalnya, hanya dapat diketahui dari para pelaku sejarah, sedikit pelajar dan mahasiswa yang saat itu memilih untuk berada di jalan. Di tahun 1974 pun demikian. Tak banyak yang bisa tergali dari catatan sejarah.

Bahkan lebih jauh, banyak sekali catatan samping yang harusnya dipahami oleh generasi kemudian dalam memandang gerakan rakyat. Bukan semata "heroisme" ketokohan yang harusnya terangkat. Bukan pula sekedar kenangan almamater berdarah yang harus diberi figura. Namun lebih dalam, bahwa apa yang dilakukan mahasiswa pada masanya adalah untuk melawan penindasan oleh pemimpin negeri dan melakukan perlawanan terhadap pemodal asing yang berasyik-masyuk dengan penguasa negeri.

Gelombang kelompok pemanfaat (opportunist) selalu hadir pada saat gerakan mahasiswa telah bergulir. Muncul kemudian para

â€œpahlawanâ€ yang telah bangun, setelah tertidur nyenyak di villa mewah yang dibeli dari uang belas kasihan penguasa negeri. Kelompok ini kemudian berperan seolah-olah telah berjuang keras dan berdiri di barisan terdepan, terutama untuk ikut dalam lobby dan negosiasi, sehingga kemudian berharap memperoleh kursi empuk dari penguasa negeri selanjutnya. Begitu tebal topeng kertas yang digunakan kelompok ini, dan tak pernah lagi mau tahu dengan apa yang sejatinya ingin diperjuangkan.

Melihat lebih jauh terhadap sejarah negeri ini, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kelompok intelektual negeri, yang biasanya didominasi oleh kelompok pelajar dan mahasiswa serta tidak oleh para dosen yang selalu sibuk memperkaya diri sendiri, berawal dari kacamata melihat penindasan yang dilakukan oleh kelompok penguasa terhadap rakyat negeri. Dan ketika lebih dalam terlihat, perlawanan juga terjadi untuk melawan pemodal asing yang ingin berleha-leha di negeri kaya dengan sajian tarian kesengsaraan rakyat.

Masa tahun 1900 hingga 1930, perlawanan dilakukan terhadap penguasaan VOC dan Belanda. Berikutnya di tahun 1970 hingga 1975, perlawanan dilakukan terhadap cengkeraman Jepang yang difasilitasi oleh penguasa negeri. Hingga di tahun 1990 - 1999, perlawanan dilakukan terhadap cengkeraman WorldBank, IMF dan Amerika Serikat beserta anteknya. Sebuah kondisi yang tertutupi oleh begitu mesranya penguasa negeri dengan pemodal asing, yang pada akhirnya yang hanya terlihat adalah sebuah perlawanan dari kelompok mahasiswa terhadap pemerintah negerinya.

Dari kondisi tersebut harusnya telah dapat terlihat bahwa dalam proses berkehidupan di negeri ini, setelah adanya gejolak gerakan mahasiswa, yang terjadi kemudian adalah perselingkuhan antara penguasa negeri berikutnya dengan kelompok mahasiswa pemanfaat (opportunist), yang menghasilkan kelahiran kebijakan-kebijakan yang tetap bersetuju dengan pemodal asing. Tak pernah sejarah negeri ini mencatat hal yang kedua kali apa yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Soekarno untuk menasionalisasikan aset-aset asing. Walau kemudian terjadi ketidaksiapan pemerintah saat itu, sehingga kemudian aset-aset asing harus berpindah pada kelompok pemodal dalam negeri yang kelakuannya tak beda dengan kelakuan pemodal asing.

Pasca tahun 1999, walaupun kemudian semakin banyak pihak yang mempertanyakan keberadaan WorldBank, IMF dan pemodal asing di negeri ini, pemerintah yang ada pada masa tersebut hingga masa kini malah melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kelanggengan pemodal asing. Mengejar angka pertumbuhan dan melupakan

pemerataan. Investasi seolah menjadi tuhan baru dalam menjalani proses berkehidupan di negeri ini.

Kebijakan menghadirkan tambang-tambang mineral, perkebunan skala besar, hutan tanaman industri, pabrik pulp dan kertas, hingga perusahaan perikanan dan pelayaran, tidaklah lebih hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup negara utara, dan bukan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat negeri ini. Semakin menyempitnya lahan pertanian untuk kepentingan industri yang mengatasnamakan pembangunan telah pula menghasilkan krisis pangan dan ketersediaan beras yang dipandang sebagai satu-satunya makanan pokok rakyat.

Proses transformasi penguasaan rakyat yang harusnya mulai dilakukan disaat kemenangan rakyat dikumandangkan tidak pernah terjadi. Bahkan yang terjadi malah semakin hilangnya kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupannya. Peningkatan kapasitas rakyat menjadi agenda yang tidak penting bagi parlemen dan pemerintah. Yang utama adalah stabilitas ekonomi dengan mengundang sebanyak-banyaknya investor, serta kesejahteraan keluarga pejabat negara.

Di lingkup kampus, saat ini mahasiswa telah ter-nina bobokan dengan aliran udara dari mesin pendingin yang dibeli dari proyek dana utang luar negeri. Para pejabat kampus melakukan pembungkaman terstruktur terhadap kreatifitas dan gejala pemikiran mahasiswa. Hanya berkulat dengan lembar plastik transparan yang telah membusuk dan pengetahuan-pengetahuan yang tak lagi mampu menjawab kegelisahan rakyat negeri hari ini.

Korupsi yang selama ini dipandang hanya terjadi di lingkungan pemerintah dan parlemen, sekarang pun telah terjadi pula di lingkungan kampus. Tak heran kondisi ini kemudian menjadikan semakin menyempitnya lahan parkir di sekitar gedung perkuliahan. Bukan karena tak ada lahan karena semakin banyak gedung, namun telah semakin banyaknya kendaraan roda empat model terbaru, yang didapat dari mengerat uang yang harusnya diperuntukkan bagi perbaikan kualitas intelektual dan kreatifitas calon pemimpin negeri.

Dari Malari hingga Semangi, akan menjadi lebih bermakna disaat negeri ini beranjak dari romantisme kapitalis menuju pada kedaulatan sejati rakyat negeri. Hanya kelompok intelektual yang akan mampu melahirkan perubahan. Dan hanya ada tiga pilihan: ikut menindas, bersama yang ditindas atau menjadi opportunist, bak seekor timpakul di tepi karangmumus. [070114]

BIOFUEL: Jalan Sesat Energi Hijau

01. 7. 2007 - 4,215 dilihat

Permasalahan krisis energi fosil dan lingkungan hidup global telah mengarahkan pemikiran para peneliti dan penguasa kebijakan memilih langkah untuk mengedepankan penggunaan bahan bakar hayati (Biofuel) sebagai sebuah solusi utama. Pemerintah Indonesia bahkan merespon kondisi tersebut dengan melahirkan kebijakan mendorong percepatan penyediaan biodiesel di Indonesia. Jarakisasi (pengembangan tanaman jarak secara meluas) dipandang sebagai sebuah program yang dapat memberikan jawaban atas krisis energi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Kenyataan lain menunjukkan bahwa sebuah strategi energi yang dipilih negeri ini sangatlah tidak berdasar. Ditambah dengan keinginan untuk mengembangkan energi nuklir sebagai sumber energi listrik bagi rakyat, yang senyatanya telah menyimpan bencana laten bagi generasi negeri di masa mendatang.

Tak sedikit dana yang telah dialokasikan oleh negara ini untuk mendukung ambisi pengembangan bio-energi. Bahkan para peneliti negeri ini berlomba-lomba untuk memfasilitasi keberlangsungan program pemerintah, tanpa pernah melakukan kajian yang lebih utuh terhadap akar masalah yang terjadi. Di tingkat kabupaten, bahkan telah menjadikan pengembangan biofuel sebagai sebuah program unggulan.

Bila membongkar kondisi energi negeri ini, akan ditemukan bahwa senyatanya sumber energi fosil negeri ini telah dieksploitasi tidak untuk kepentingan negeri ini, namun untuk memenuhi kepentingan negara industri di belahan utara dunia. Minyak bumi, gas alam dan batu bara telah dengan sangat mudah dikuasai oleh korporasi global, yang juga telah menjadi penguasa dari pemerintah negeri yang telah pernah memproklamasikan kemerdekaannya.

Transfer kapasitas terhadap anak negeri dan teknologi pengolahan energi fosil, yang harusnya sudah dimiliki oleh jutaan anak negeri, telah menjadi bagian yang diabaikan. Padahal sangat jelas, pendiri negeri ini telah merancang agar pada fase pembangunan negeri, aset-aset alam harusnya telah dikuasai dan dikelola, serta dimiliki oleh rakyat Indonesia, bukan oleh kepentingan korporasi global.

Krisis energi yang telah terjadi selama bertahun-tahun di negeri ini,

tidak terlepas dari pola penjajahan gaya baru yang dilancarkan oleh pemodal asing di tanah air. Masuknya perusahaan asing dan pemodal berdasarkan pada kebijakan negara, telah terbukti menciptakan keterpurukan kehidupan rakyat dan kehancuran ekologi pada berbagai wilayah di kepulauan Nusantara.

Kesalahan memandang keberadaan energi saat ini oleh pelayan publik negeri ini, dengan dibantu oleh kalangan opportunist, menjadikan pondasi kedaulatan negeri telah tergadaikan. Lebih jauh, alternatif energi yang dikembangkan pun, secara perlahan akan menggerus tatanan kultural dan penghidupan rakyat, yang pada akhirnya akan menciptakan hilangnya generasi di fase berikutnya.

Pilihan biofuel sebagai sebuah alternatif energi yang dikembangkan merupakan jalan sesat yang akan dilalui negeri ini. Beberapa kalangan bahkan menyatakan biofuel merupakan jawaban atas pertanyaan yang salah. Pembelajaran dari Brazil dan Amerika Serikat yang telah puluhan tahun mengembangkan bioethanol dari tebu dan jagung, malah memerlukan sumber energi yang jauh lebih banyak dalam proses pengolahannya, yang tentu saja sumbernya berasal dari sumber energi yang tersedia saat itu, berupa sumber energi fosil. Juga telah dibuktikan bahwa secara tidak langsung pengembangan biofuel tersebut telah memberikan tambahan gas rumah kaca di atmosfer.

Permasalahan lain yang kemudian akan timbul dalam mengembangkan biofuel di negeri ini adalah ketika ternyata pengembangan yang dilakukan adalah harus dalam skala areal yang sangat luas. Penyediaan energi bagi mobil mewah hingga industri-industri yang hingga saat ini sangat tidak jelas kontribusinya bagi kesejahteraan rakyat, akan berakibat pada semakin terpuruknya sistem kehidupan rakyat.

Pengembangan tanaman untuk energi dalam skala besar akan mengakibatkan hilangnya lahan-lahan produktif rakyat, serta hilangnya kawasan hutan. Ini telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dimana dengan beralih pada pengembangan sumber energi hayati dan penanaman lahan kritis, senyatanya dilakukan pada lahan-lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan rakyat, dan juga pada lokasi-lokasi yang sebenarnya masih memiliki kelayakan untuk disebut sebagai hutan.

Bahkan, ketika ditelisik lebih mendalam, bahwa krisis energi saat ini lebih dilihat pada kebutuhan bagi kelompok ekonomi menengah ke atas, dan bukan pada kepentingan energi kelompok masyarakat yang belum sejahtera. Sumber-sumber energi yang menjadi kebutuhan bagi kelompok komunitas lokal akhirnya harus tergantikan dengan hamparan

tanaman yang disiapkan untuk pemenuhan kebutuhan energi hayati bagi kelompok kaya. Kayu bakar menjadi semakin sulit diperoleh karena tak ada lagi hutan, hingga kemudian lahan produktif secara perlahan hilang sehingga tak dimiliki lagi kedaulatan pangan.

Butanya nurani pelayan publik negeri oleh kepentingan pemodal menjadikan jargon yang selalu diucapkan saat mencari dukungan suara publik pada masa kampanye menjadi terlupakan. Kesejahteraan rakyat, sebuah kata kunci yang selalu terdengar, pada akhirnya hanya tinggal kenangan.

Saatnya bagi kelompok-kelompok komunitas lokal untuk berdiri pada posisi kedaulatan atas sumber kehidupan, dengan tidak membiarkan terjadinya kerusakan ekologi akibat pengembangan produk tanaman tunggal (monokultur) pada kawasan luas pada lokasi dan sekitar lokasi berkehidupan. Menyerahkan tanah pada kepentingan industri monokultur untuk kepentingan energi hayati, sama saja dengan mencabut ruh kehidupan komunitas secara perlahan.

Udara, air dan tanah, juga hutan, yang selama ini telah menopang kehidupan akan rusak secara perlahan. Yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya gurun-gurun pasir baru yang sangat tidak mampu memberikan kehidupan pada generasi berikutnya.

Pilihan yang harusnya bisa diambil oleh negeri ini adalah dengan mengambil alih pengelolaan sumber-sumber energi fosil yang dikuasai oleh pemodal asing, melakukan pembatasan eksploitasi energi fosil, serta mengembangkan teknologi energi alam yang sangat melimpah, namun belum dimanfaatkan, semisal energi angin, air, dan matahari.

Penguasa kebijakan harus membenahi sistem transportasi publik, menutup industri yang boros energi, serta melakukan pengembangan-pengembangan produk yang memang benar-benar dibutuhkan bagi kehidupan rakyat. Bukan dengan mengarahkan kebangkitan konsumerisme di negeri ini.

Secara lebih lengkap, harus lebih dimaknai kembali UUD 45 dan perubahannya, bahwa kedaulatan aset alam adalah pada rakyat, bukan pada pemerintah maupun pemodal. Terminologi *good environment governance* harus dimaknai dengan lebih utuh, bukan hanya masalah lingkungan hidup yang sehat, namun lebih dalam kepada kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupannya, termasuk pada sumber-sumber energi.

Menyerahkan pengelolaan negeri ini kepada kelompok pemodal asing,

<http://alien.adefadli.hijaubiru.org>

sama saja mengembalikan negeri ini pada sebuah sistem penjajahan gaya baru, yang artinya negeri ini telah secara sadar membatalkan kemerdekaannya. Saatnya memilih, berdiam diri atau bergerak cepat untuk perubahan menuju kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, serta menjadi bangsa yang merdeka 100%. [070107]

Politik Byar-Pet

12. 1. 2006 - 376 dilihat

Kota-kota di Kalimantan Timur yang kaya akan sumber energi selalu menikmati padamnya aliran listrik. Terjadi defisit penyediaan energi listrik dari pembangkit dikarenakan kemampuan mesin pembangkit dan ketersediaan pasokan gas sebagai salah satu sumber energi pembangkit. Padahal Kaltim merupakan salah satu penghasil gas terbesar di Indonesia, selain sebagai penghasil minyak dan batubara yang juga merupakan sumber energi.

Data statistik BP mencatat bahwa Indonesia memproduksi 1,4-2,7% produksi minyak dunia dan hanya mengkonsumsi 0,3-1,5% dari konsumsi minyak dunia. Amerika Serikat, China dan Jepang merupakan pengonsumsi terbesar minyak dunia, dimana Amerika Serikat mengkonsumsi tidak kurang 20,65 juta barel atau 24,6% konsumsi dunia setiap harinya. Di sektor gas alam, Indonesia memproduksi 2,8% dari produksi gas dunia dan mengkonsumsi 1,4% dari konsumsi gas dunia. Di tahun 2005, Indonesia memproduksi 83,2 juta Toe (tonnes oil equivalent) batubara (2,3% produksi batubara dunia) dan mengkonsumsi 23,5 juta Toe (0,8% konsumsi batubara dunia). Orang Amerika mengkonsumsi energi 6 kali lebih banyak (6,5 Toe/orang/tahun) dari konsumsi rata-rata dunia (1,4 Toe/orang/tahun).

Kondisi ini diperparah dengan kondisi bahwa sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan multinasional (asing). Perusahaan nasional hanya punya porsi sekitar 14,6 persen. Data terbaru di BP Migas menyebutkan, hanya ada sekitar 20 perusahaan migas nasional yang saat ini mengelola lapangan migas di Indonesia.

Politik energi Indonesia, saat ini tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah Indonesia secara penuh. Kepentingan pemodal asing yang didukung oleh negara-negara kapitalis telah menancapkan cengkeramannya di negeri yang katanya kaya akan sumberdaya alam ini. Sementara itu, dalam Indonesia-China Forum Energy II yang berlangsung di Kota Shanghai-Republik Rakyat Cina pada Oktober 2006, Indonesia dan China menandatangani kontrak di bidang energi senilai US\$ 3,56 miliar. Ini dilakukan setelah Indonesia juga menyiapkan dana Rp 13 triliun untuk pengembangan biodiesel.

Begitu mudahnya pemerintah negeri ini memainkan permasalahan energi, termasuk untuk penyediaan energi dunia. Sementara kondisi

penyediaan energi di dalam negeri belum mampu diberikan secara lebih baik. Masih terdapat wilayah-wilayah di negeri ini yang tidak memperoleh aliran listrik maupun pasokan bahan bakar minyak. Kebijakan terus bergulir, politik tetap menari, sementara rakyat masih tak pernah merasakan nikmatnya kekayaan alam negerinya.

Arah yang tidak jelas dalam perjalanan politik energi negeri ini akan menyisakan krisis energi di masa mendatang. Diobralnya persediaan energi dalam negeri kepada negara-negara utara, secara perlahan telah menjadikan Indonesia tidak akan memiliki cadangan energi.

Kebijakan energi bio-diesel pun telah mengambil langkah yang salah. Pengembangan jarak dan kelapa sawit sebagai alternatif sumber energi dilakukan tanpa melihat potensi sumber energi yang ada di negeri ini. Indonesia memiliki potensi energi angin yang memiliki kecepatan 3-5 m/detik, namun baru mampu menjadi energi 0,5 MW, potensi energi matahari dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/meter persegi, potensi tenaga air yang diperkirakan sekitar 75.000 MW yang tersebar di 1.315 lokasi, potensi energi panas bumi 19.658 MW yang tersebar di 70 lokasi, serta energi gelombang laut yang mampu menghasilkan energi 20-70 kW/m.

Budaya latah yang menguasai kerangka pikir pemerintah, telah menggiring kelahiran kebijakan tidak bijak dalam mengelola kekayaan alam. Konversi hutan tropis basah menjadi kawasan perkebunan sawit skala besar dengan dalih penyediaan energi bio-diesel di masa datang, ternyata tidak akan mampu menggantikan peran minyak diesel saat ini. Termasuk di saat jarak pagar dipromosikan sebagai tanaman bio-diesel, yang kemudian dikembangkan secara massal, ternyata akan menghilangkan sumber energi alam yang ada di berbagai kawasan negeri ini.

Keinginan pemerintah untuk mendorong budaya hemat energi, sepertinya juga tidak dilandasi pada sebuah aras pemikiran yang bijak. Hemat energi dipandang sebagai sebuah solusi di saat kekayaan alam negeri ini ternyata mengalir tidak bagi kesejahteraan rakyat. Sudah selayaknya pemerintah merubah cara pikir, termasuk mungkin mengganti letak otak agar tak lagi di dengkul, sehingga dapat melihat dengan lebih cerdas arah kebijakan energi Indonesia.

Langkah-langkah penting yang sewajibnya diambil oleh pemerintah dalam mengelola energi negeri ini adalah dengan menghentikan eksploitasi berlebih atas minyak bumi, gas alam dan batu bara. Pemerintah juga harus segera melakukan re-kalkulasi atas cadangan sumber energi agar tetap mampu bertahan hingga ratusan tahun

mendatang. Pemerintah harus lebih berani mengambil langkah melawan terhadap korporasi yang selama ini menguasai minyak bumi, gas alam dan batu bara, termasuk untuk bertarung di peradilan internasional. Bila diperlukan, melakukan perjuangan merebut kemerdekaan sejati dilakukan bersama dengan seluruh komponen rakyat.

Langkah lain yang penting dilakukan adalah dengan mengembangkan pembangkit energi listrik skala kecil untuk luasan dan kawasan yang lebih terkonsentrasi. Pemerintah tidak harus memikirkan penyediaan energi listrik bagi industri bermodal besar. Konsentrasi kebijakan energi adalah pada penyediaan energi bagi komunitas lokal, termasuk dalam mendukung pengembangan industri rakyat. Penyediaan turbin mikro hidro bagi sebuah kampung akan lebih bermanfaat bila dibanding harus membangun pembangkit listrik tenaga air yang mengandalkan bendungan raksasa.

Pemilihan teknologi penyedia energi listrik pun harus diarahkan pada pengembangan dalam skala lokal, dimana harus ada kebijakan yang mendukung pengembangan kelompok akademis (peneliti) lokal dalam menghasilkan inovasi baru dalam menyediakan teknologi penyedia energi listrik.

Sumber energi selama ini telah menjadi sumber peperangan antar negara. Di masa mendatang, air akan menjadi pemantik peperangan. Indonesia harus lebih cerdas melihat dan mempertahankan keduanya untuk kepentingan generasi negeri. Tidak dengan mengobral kekayaan negeri ini pada kepentingan asing dan kepentingan segelintir orang (konglomerat) semata. Kekayaan negeri ini bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Negeri yang berlimpah kekayaan alam ini bisa terjerumus menjadi negeri pengemis bila tetap dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki keberanian untuk melawan kepentingan negara-negara utara, termasuk melawan kepentingan pemodal (kapitalis). Rakyat negeri sudah seharusnya tak lagi berdiam diri menyaksikan kebodohan pemimpinnya. Akademisi bukan lagi hanya berkuat dengan teori klasik di buku tuanya. Saatnya bersama menunjukkan pada masyarakat internasional bahwa Indonesia telah merdeka. dan menegakkan merah putih, bukan sekedar menempelkannya di atas saku baju.

Monokulturisme: Awal Penggurunan Kalimantan

11. 26. 2006 - 1,033 dilihat

Luas lahan kritis dan menuju kritis di Kalimantan Timur yang telah mencapai luasan 6,4 juta hektar atau 32,5% daratan akan semakin meluas apabila Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten-Kota di Kalimantan Timur tetap mengedepankan pengembangan perkebunan skala luas dengan komoditi tunggal. Pengalihan kawasan hutan tropis basah menjadi kawasan perkebunan skala luas, pertambangan dan hutan tanaman industri berimplikasi pada semakin luasnya lahan kritis dan akan meninggalkan gurun yang tak mampu lagi memberikan kehidupan bagi manusia dan satwa yang berkehidupan di atasnya.

Monokulturisme atau budaya pengembangan lahan dengan komoditas tunggal, selalu menjadi sebuah program utama dari pemerintah saat ini, dengan asumsi akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan, ternyata tidak dapat dibuktikan pada tingkat realita maupun pada tingkat kajian ilmiah.

Kondisi lahan di kawasan hutan tropis basah telah disajikan oleh alam untuk mampu memberikan kehidupan kepada makhluk di kawasan tersebut. Interaksi antara manusia, satwa dan vegetasi, beserta komponen lingkungan lainnya telah menyajikan hubungan yang saling ketergantungan. Namun ketika pemerintah, sebagai pemegang mandat pengelolaan, melakukan upaya perubahan kondisi kawasan, secara perlahan kemudian akan menyajikan hamparan lahan kritis dan gurun yang hanya akan mampu menopang sebagian kecil makhluk hidup.

Pola perakaran jenis-jenis vegetasi hutan tropis dalam tingkatan kedalaman berbeda menjadi sebuah keharusan di lahan Kalimantan Timur yang didominasi oleh jenis tanah podsolik yang miskin hara. Siklus hara dan mineral tanah dapat diserap oleh komponen vegetasi dengan kapasitas yang berbeda-beda, sehingga siklus hara dan mineral tanah tetap berkelanjutan keberadaannya.

Pola perladangan gilir balik yang dilakukan oleh komunitas lokal di Kalimantan merupakan sebuah upaya untuk tetap menjaga ketersediaan hara di dalam lapisan tanah agar tetap mampu memberikan kehidupan pada generasi selanjutnya. Pengetahuan yang dibentuk dari proses belajar dari alam ini, senyatanya telah

memberikan ruang pengetahuan yang luar biasa bagi keberlangsungan kehidupan di tanah Kalimantan. Perladangan gilir balik yang dilakukan oleh komunitas lokal, termasuk sistem tata ruang komunitas lokal, bukanlah semata untuk penguasaan atas lahan, namun lebih pada sebuah tata pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, sebagaimana yang selalu didengungkan dalam cita-cita pembangunan negeri ini.

Ketika kemudian pemerintah memberikan kawasan hutan tropis basah kepada pengusaha perkebunan, yang kemudian melakukan pembukaan lahan secara luas dengan komoditi satu jenis (monokultur), maka yang terjadi adalah pengikisan tanah dan pencucian zat hara dan mineral tanah yang secara perlahan akan menyisakan tanah tanpa hara. Pengelolaan lahan dengan monokultur juga akan menyisakan hara dan mineral tanah ke badan-badan perairan yang berimplikasi terjadinya pendangkalan di aliran perairan sekitar kawasan.

Belum termasuk disaat kawasan hutan tropis basah harus dibongkar untuk kepentingan pertambangan mineral maupun minyak dan gas, dimana terjadi perubahan bentang lahan dan struktur tanah, yang hanya akan menyisakan danau-danau besar beracun dan terjadinya perubahan secara mendadak terhadap siklus hidrologi, dan akan berimplikasi pada bencana ekologi berupa kekeringan dan banjir.

Kawasan Kaltim yang pada umumnya merupakan kawasan berbukit, hanya sedikit memiliki kawasan dengan kualitas lahan yang sangat baik. Pada kawasan yang cenderung datar, sebenarnya memiliki berbagai permasalahan apabila dilakukan perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan perkebunan skala luas. Kawasan datar ini pada umumnya berada di sempadan sungai, hutan rawa (gambut) dan hutan kerangas.

Karakteristik tanah di kawasan sempadan sungai, rawa (gambut) dan kerangas, sejatinya sangat tidak baik untuk sebuah kawasan budidaya perkebunan dan pertanian. Kawasan hutan kerangas (the heath forest) yang didominasi vegetasi *Gymnostoma nobile*, *Myrmecophytes* dan *Nepenthes* sp. Dalam bahasa Dayak Iban, kerangas berarti tanah yang tidak bisa ditumbuhi padi. Hutan kerangas umumnya didominasi oleh tanah asam yang tergenang dengan pH di bawah 4 dan memiliki kandungan liat yang sedikit. Kondisi lain pada hutan kerangas adalah ditemukannya lapisan tanah keras (batuan) yang menjadi penghambat aliran air masuk ke dalam tanah. Kawasan hutan kerangas dikategorikan IUCN (The International Union for The Conservation of Nature - World Conservation Union) dengan status vulnerable (rawan).

Pada kawasan rawa (gambut), walaupun memiliki kandungan humus yang tinggi, namun unsur hara yang tersaji pada kawasan ini sangat

sedikit dan memiliki keasaman yang tinggi. Semakin tebal gambut pada kawasan ini, semakin tidak layak untuk sebuah pengembangan budidaya tanaman, walaupun telah dilakukan pendekatan teknologi pengolahan lahan. Sebuah studi European Space Agency menemukan bahwa pada kawasan rawa (gambut) sangat berperan terhadap pengikatan karbon, dimana pada kebakaran tahun 1997-1998 jumlah carbon yang terlepas ke atmosfer dari kawasan ini mencapai hingga 2,5 miliar ton dan pada kebakaran tahun 2002-2003 berkisar antara 200 juta hingga 1 miliar ton. IUCN mengkategorikan kawasan ini sebagai kawasan critically endangered (kritis).

Sedangkan pada kawasan sempadan sungai, menjadi penting untuk tidak menjadi kawasan budidaya tanaman, dikarenakan akan mengganggu aliran sungai, dimana dapat terjadi pengikisan tanah tepi sungai bila vegetasi di atasnya menjadi hilang. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kawasan lahan datar di Kalimantan cenderung memiliki permasalahan bila dikembangkan sebagai kawasan budidaya, terkecuali untuk kawasan tertentu yang luasannya sangat sedikit di Kaltim.

Pilihan bagi pemerintah agar tidak selalu mengedepankan program monokulturisasi menjadi hal yang sangat penting. Pola agroforestry (pengelolaan lahan dengan berbagai jenis tingkatan vegetasi/polikultur) harusnya menjadi pilihan pertama. Selain tidak akan menjadikan adanya ketergantungan komunitas lokal terhadap produk pabrik berupa bibit tanaman, pupuk dan pembasmi hama, pola agroforestry juga telah dilakukan oleh komunitas lokal selama ini.

Ketahanan pangan komunitas lokal juga akan tetap terjamin bila saja pemerintah melakukan perlindungan terhadap tata ruang yang telah dibangun oleh komunitas lokal. Tata guna lahan yang dibuat dalam satu komunitas lokal selama ini telah menunjukkan jaminan terhadap keberlanjutan ekonomi, ekologi dan sosial komunitas tersebut.

Konferensi Para Pihak Sesi Keenam United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), di Havana-Kuba, yang berlangsung pada awal September 2003, yang membicarakan gurun dan penggurunan di bumi, menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya upaya bersama yang lebih konkret untuk setidaknya menahan laju penebangan hutan, dan juga penegasan bagi upaya penerapan hukum lebih keras. Penterjemahan ini dalam konteks Kaltim harusnya benar-benar tercermin dalam komitmen pemerintah propinsi dan kabupaten-kota.

Berlanjutnya kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di propinsi

yang memiliki kekayaan alam berlimpah ini sangat tergantung kepada kepentingan politik pemerintah, yang merupakan pelayan rakyat. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten-Kota, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang dilahirkan, sudah selayaknya tidak menghilangkan sumber-sumber kehidupan komunitas lokal, termasuk tidak menghilangkan sistem sosial-kultural rakyat. Pemerintah sudah seharusnya menghapus paham monokulturisme di dalam pemikirannya, menjadi paham polikulturisme (agroforestry).

Mempertegas Cita Pahlawan Negeri

11. 10. 2006 - 335 dilihat

Hari Pahlawan selalu diperingati oleh negeri ini di tanggal 10 November. Titik ini dipandang sebagai sebuah kebangkitan perjuangan di negeri ini. Menelisik dari sisi yang berbeda terhadap keberadaan Hari Pahlawan, sepertinya negeri ini hanya terbuai oleh kepentingan seremonial semata.

Heroisme atau semangat kepahlawanan yang selalu ditampilkan dalam memperingati nilai-nilai perjuangan, seolah melupakan nilai yang sebenarnya diperjuangkan oleh pendiri negeri ini. Nasionalisme kemudian dipandang sebagai sebuah simbol persatuan semata, bukan pada pencapaian cita-cita kemerdekaan negeri.

Bisa jadi hampir seluruh warga negeri ini hanya sekedar mengetahui bahwa Indonesia memiliki pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaannya. Dalam catatan sejarah, masa awal perlawanan terhadap penjajah lebih pada perebutan kekuasaan wilayah. Kemudian di perjalanannya, perlawanannya lebih dikarenakan perebutan sumberdaya alam, utamanya penguasaan lahan-lahan produktif rempah-rempah yang saat itu sangat dibutuhkan oleh negeri penjajah. Di awal abad ke-20, perjuangan negeri ini mulai diarahkan pada perjuangan kelompok berpendidikan. Organisasi kepemudaan menjadi pelopor dalam masa perjuangan ini. Nilai perjuangan lebih pada perasaan terkekangnya kreatifitas dan berbuat pada wilayahnya. Yang kemudian akhirnya mengerucut pada kepentingan politik kekuasaan.

Indonesia sebenarnya bernilai sangat strategis bagi perkembangan dunia. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang memiliki jalur-jalur laut yang strategis, menjadikan Indonesia sangat penting bagi perdagangan dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan penyuplai utama minyak bumi dan bahan-bahan mentah lainnya bagi negara-negara industri, seperti Amerika Serikat, negara Eropa dan Jepang.

Data statistik BP mencatat bahwa Indonesia memproduksi 1,4-2,7% produksi minyak dunia dan hanya mengkonsumsi 0,3-1,5% dari konsumsi minyak dunia. Amerika Serikat, China dan Jepang merupakan pengonsumsi terbesar minyak dunia, dimana Amerika Serikat mengkonsumsi tidak kurang 20,65 juta barel atau 24,6% konsumsi dunia setiap harinya. Di sektor gas alam, Indonesia memproduksi 2,8% dari produksi gas dunia dan mengkonsumsi 1,4% dari konsumsi gas dunia. Di

tahun 2005, Indonesia memproduksi 83,2 juta Toe (tonnes oil equivalent) batubara (2,3% produksi batubara dunia) dan mengkonsumsi 23,5 juta Toe (0,8% konsumsi batubara dunia). Orang Amerika mengkonsumsi energi 6 kali lebih banyak (6,5 Toe/orang/tahun) dari konsumsi rata-rata dunia (1,4 Toe/orang/tahun). Tak sebanding ternyata apa yang dihasilkan oleh negeri ini terhadap apa yang dimanfaatkan oleh negeri ini. Dari perbandingan tersebut terlihat jelas untuk siapa sebenarnya sumberdaya alam negeri ini dikeruk.

Keinginan Amerika Serikat untuk menguasai Indonesia telah diungkap di tahun 1953 oleh Presiden AS, Eisenhower. Demikian pula di tahun 1965, Richard Nixon menyerukan untuk pengeboman saturasi untuk melindungi “potensi mineral besar” Indonesia, yang kemudian dia menyatakan bahwa Indonesia merupakan hadiah terbesar Asia Tenggara”. Hal ini juga kembali ditegaskan dalam Laporan Departemen Luar Negeri AS ke Kongres di tahun 1975, yang menyebut Indonesia sebagai “lokasi yang paling berwenang secara strategis di dunia”.

Sejak awal kemerdekaan negeri ini, AS telah semakin kuat mencengkeramkan cakarnya di tanah ini. Ditambah dengan saat keran investasi asing dipaksa dibuka, maka semakin banyak perusahaan AS berada di negeri ini. Di tahun 2005, nilai investasi AS di Indonesia mencapai US\$ 10,4 miliar dan 80%-nya merupakan sektor migas.

Kuatnya cengkeraman negara asing di Indonesia, terutama AS, selain melalui investasi, juga dilakukan melalui lembaga keuangan internasional, semisal IMF (International Monetary Fund), WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) dan Bank Dunia, serta melalui lembaga kerjasama internasional dan lembaga konservasi internasional. Kepentingan AS dimainkan dengan berbagai macam dalihnya, baik untuk pengentasan kemiskinan, demokratisasi, hingga pembangunan berkelanjutan.

Penguasaan asing melalui sektor-sektor swasta, seperti pertambangan, perkebunan besar dan kehutanan dapat terlihat dengan jelas. Industri pertambangan, perkebunan besar, dan kehutanan, sebagian besar dimiliki oleh individu maupun korporasi asing. Sebagian besar aktivitas di sektor ini menimbulkan konflik sosial dan lingkungan hidup yang cenderung melanggar hak asasi manusia, semisal pengambilan paksa tanah-tanah rakyat, pencemaran lingkungan, hingga hancurnya ekosistem di kawasan perusahaan.

Dari aktivitas lembaga kerjasama internasional, tekanan asing masuk untuk mempengaruhi pembuat kebijakan lokal dengan dalih pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Secara sadar,

pembuat kebijakan lokal diarahkan untuk mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelanggengan investasi asing di kawasan tersebut. Bahkan, sebagian besar aktivitas ini bebas dari pemantauan negara dan evaluasi independen, dan walaupun dilakukan evaluasi, maka hasil evaluasinya tidak pernah dipublikasikan. Dalam setiap kegiatan lembaga kerjasama internasional, kecenderungan penggunaan expatriat yang dipasang sebagai tenaga ahli, malah terlihat sebagai lembaga penampung pengangguran pekerja asing.

Dalam aktivitas lembaga konservasi internasional, pola yang digunakan hampir serupa dengan aktivitas lembaga kerjasama internasional. Hanya saja, lembaga konservasi internasional melakukan aktivitas hingga level teknis di masyarakat, dimana dilakukan fasilitasi (pembuaian) kelompok masyarakat agar mau bermitra dengan perusahaan ataupun secara perlahan menyerahkan kawasannya untuk dikelola oleh sebuah badan pengelola, yang didalamnya telah ditanamkan pola penentuan kebijakan yang dikuasai oleh kepentingan asing. Pada kawasan Taman Nasional Komodo misalnya, lembaga konservasi internasional malah membentuk perusahaan ekowisata, yang salah satu sumber modalnya dari International Finance Corporation-WorldBank, yang pada akhirnya mengeliminir kawasan tangkapan nelayan atas nama kepentingan wisata bahari.

Tak banyak pelayan negeri (aparatur pemerintah) yang menyadari penguasaan secara perlahan oleh negara asing, khususnya AS, di tanah-air negeri ini. Dukungan kebijakan malah semakin dikuatkan melalui lahirnya peraturan perundangan sektoral yang lebih mendukung kepentingan pemodal asing di negeri ini. Belum termasuk kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pelaku asing, disertai dengan perlindungan hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Lingkar akademisi dan peneliti pun tak lepas dari kontaminasi kepentingan asing. Rekomendasi dan kajian yang dilakukan, cenderung lepas dari independensi dan memiliki arah yang jelas-jelas berpihak pada kepentingan kebutuhan negara utara. Lihat saja bagaimana perguruan tinggi negeri ini yang ditunjukkan untuk mempersiapkan "robot" pekerja industri yang tak lagi berotak dan bernurani. Segala sesuatu yang menguntungkan dan melanggengkan investasi asing, pastilah memperoleh dukungan kuat, sedangkan kepentingan kesejahteraan rakyat semakin terpinggirkan.

Penting bagi pengelola negeri ini untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dini, dimana masuknya kepentingan asing di negeri ini harusnya jangan selalu dilihat sebagai sebuah prestise (kebanggaan) semata, namun lihatlah apa yang sebenarnya sedang berlangsung dalam konteks

politik internasional. Juga sangat mendesak dilakukan audit publik yang terbuka dan independen terhadap aktivitas investasi asing, lembaga kerjasama internasional dan lembaga konservasi internasional yang beraktivitas di setiap remah tanah-air.

Di hari Pahlawan yang diperingati setiap tahunnya, nasionalisme anak negeri ini penting untuk dikembalikan kepada sebuah nilai yang coba digulirkan oleh para mereka yang diakui sebagai pahlawan negeri. Mempertahankan kedaulatan atas sumber-sumber kehidupan, termasuk mewujudkan Indonesia mandiri, merupakan dua hal utama dan penting diperjuangkan. Bukan dengan menggadaikan kekayaan negeri kepada kepentingan asing.

Sekedar Maskot PON

11. 3. 2006 - 614 dilihat

Pekan Olahraga Nasional (PON) akan digelar di Propinsi Kalimantan Timur di tahun 2008. Berbagai persiapan dilakukan, termasuk menyiapkan kehadiran tempat pertandingan yang megah, penginapan atlet, hingga menetapkan satwa yang menjadi maskot PON. Dalam satu ajang lomba, akhirnya ditetapkan tiga satwa sebagai maskot, yakni Pesut Mahakam (*Orcaella brevirostris*), Orangutan (*Pongo pygmaeus*) dan burung Enggang (*Buceros rhinoceros*). Dasar penunjukan ketiga satwa ini adalah karena dilindungi dan merupakan satwa langka, selain sebagai perlambang olahraga air, darat dan udara.

Indonesia telah menetapkan tanggal 5 November sebagai Hari Cinta Puspa Satwa Nasional. Sebuah keinginan untuk tetap adanya rasa cinta terhadap flora dan fauna di negeri ini. Tidak sekedar mengingat ataupun merindukan kehadirannya. Namun juga pada tetap menjaga keberadaannya.

Menilik komitmen Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, dimana tiga jenis satwa menjadi maskot penyelenggaraan PON mendatang, maka akan tersaji kondisi tak menyenangkan bagi satwa. Dalam sebuah rencana tata ruang wilayah propinsi (RTRWP) Kaltim yang sedang diusulkan perubahannya, terlihat sangat jelas ketidakberpihakan pemerintah propinsi terhadap kawasan-kawasan yang merupakan habitat (tempat berkehidupan) penting bagi puspa dan satwa, termasuk untuk puspa-satwa endemik dan terancam punah di Kaltim.

Kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan penyerap air dan yang memiliki kelerengan terjal pun, sebagian telah diusulkan menjadi kawasan budidaya non kehutanan, dengan dalih akan memberikan ruang lebih banyak pada usaha pertambangan, perkebunan dan kehutanan, yang selama ini tidak juga memberikan perubahan berarti bagi rakyat di Kaltim.

Pesut Mahakam, yang kawasan hidupnya berada di pertengahan sungai Mahakam dan juga ditemukan di beberapa aliran sungai di utara Kaltim, saat ini populasinya diperkirakan antara 50-70 ekor. Di tahun 1975, jumlah Pesut bisa mencapai 1.000 ekor. Penyusutan populasi ini lebih diutamakan karena hilangnya tempat hidup yang layak bagi pesut, disamping disebabkan oleh terhantam baling-baling kapal motor, tersangkut di jaring, hingga diambil secara terus-menerus oleh penyelenggara pertunjukan Pesut dari Jakarta beberapa tahun lalu.

Kawasan-kawasan hutan di sekitar habitat Pesut yang diobral kepada perusahaan besar, telah memberikan kontribusi pada perubahan kondisi habitat yang nyaman bagi Pesut untuk tetap hidup. Lambannya perkembangbiakan Pesut juga menyebabkan populasinya semakin menyusut, dikarenakan Pesut harus mencapai usia dewasa (12-14 tahun) baru akan dapat hamil yang lamanya 12-13 bulan. Usia Pesut sendiri paling lama 30 tahun.

Maskot PON lainnya, yaitu Orangutan, juga telah mengalami keterdesakan berkehidupan. Pada sebuah areal tambang batubara terbesar di Kaltim, saat ini semakin banyak Orangutan yang terpaksa eksodus ataupun dipaksa berpindah tempat, karena kawasan hidupnya akan dibongkar untuk ditambang. Kepentingan investasi telah mengalahkan arti penting satwa yang hingga saat ini populasinya semakin berkurang.

Sementara itu, program rehabilitasi dan re-introduksi satwa yang telah berjalan bertahun-tahun, hanya menyisakan catatan kematian Orangutan di Pusat Rehabilitasi dan Reintroduksi Satwa, tanpa pernah dilakukan evaluasi secara independen terhadap kinerja lembaga pengelola, yang hingga saat ini selalu ?menjual? isu Orangutan untuk sekedar memperoleh kehidupan di negeri ini. Bahkan laporan terakhir menyebutkan adanya ketidakcakapan staf teknis pengelola, yang kemudian dengan sengaja membunuh Orangutan yang sedang dalam proses rehabilitasi.

Isu Orangutan sendiri telah digunakan oleh hampir seluruh lembaga konservasi internasional di Indonesia, termasuk yang beraktifitas di Kaltim. Miliaran dollar mengalir untuk program pelestarian Orangutan. Sementara, habitat Orangutan semakin sempit, populasi Orangutan semakin sedikit, sementara aliran dana untuk Orangutan tetap mengalir deras.

Maskot PON lainnya, burung Enggang juga merupakan salah satu satwa identitas budaya masyarakat Dayak. Kehidupan sehari-hari burung Enggang ini pun digambarkan dalam tari Kancet Lasan. Komunitas burung Enggang saat ini semakin sukar memperoleh pepohonan tinggi untuk sekedar hinggap ataupun menjadi tempat bersarang. Pepohonan ditebang untuk pemenuhan industri kayu dan memuaskan kebutuhan negara utara.

Keberadaan burung Enggang inipun semakin terancam dengan semakin banyaknya kawasan-kawasan yang diserahkan pada industri ekstraktif, yang secara langsung kemudian menyebabkan hilangnya tempat tinggal

dan tempat burung Enggang mencari makan.

Satu jenis satwa lagi, yang beruntung tidak menjadi maskot PON namun merupakan satwa endemik Kalimantan, saat ini juga semakin tergusur oleh kepentingan industri migas dan pertambangan besar. Bekantan (*Nasalis larvatus*) atau sering disebut Monyet Belanda, merupakan satwa endemik Kalimantan yang sangat rentan bertahan ditengah pertarungan kehidupan. Hilangnya pepohonan di ekosistem mangrove dan rawa, secara perlahan menggeser keberadaan satwa ini.

Bekantan adalah satwa yang dilindungi semenjak jaman kolonial Belanda yaitu pada tahun 1931 melalui *Dierenbeschermings Ordonantie* (UU Perlindungan Binatang Liar: *Staatblad* tahun 1931 No. 134) dan *Dierenbeschermings Verordening* (Peraturan Perlindungan Binatang Liar tahun 1931 dan tahun 1935) sampai kepada UU No. 5 tahun 1990. Satwa ini juga dilindungi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hutan dan Ekosistemnya serta SK Menteri Kehutanan RI No. 301/Kpts-II/1991.

Pada tahun 1987, MacKinnon menduga populasi bekantan di Indonesia pada saat itu berjumlah 260.950 ekor, dengan kepadatan 25 ekor per km², serta populasi yang berada di kawasan konservasi diduga 25.625 ekor. Sebagian besar habitat Bekantan berada di wilayah-wilayah lahan basah, terutama mangrove, yang diantaranya adalah kawasan pesisir dan sempadan sungai besar di Kaltim. Kondisi-kondisi habitat yang semakin memprihatinkan saat ini telah menjadikan populasi Bekantan semakin berkurang di alam.

Keberadaan satwa, termasuk puspa (flora), yang endemik dan terancam punah di Kaltim harusnya menjadi perhatian penting pemerintah, disaat satwa tersebut dinobatkan sebagai sebuah maskot pekan olahraga nasional yang akan diselenggarakan di propinsi ini. Perlindungan terhadap kawasan-kawasan berkehidupan bagi puspa-satwa tersebut penting dilakukan dengan berkesungguhan, dengan tidak melakukan pengusuran terhadap komunitas lokal yang selama ini memiliki kearifan dalam mengelola keberadaan puspa-satwa di sekitar mereka. Perlindungan ekosistem yang bernilai penting secara sosial-ekologi, termasuk restorasi kawasan wajib menjadi agenda pemerintah di tahun mendatang. Keberpihakan pemerintah terhadap komunitas lokal, keberadaan satwa endemik, serta kelestarian lingkungan hidup mestinya ditunjukkan secara nyata dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan, dan bukan hanya dalam pernyataan politik semata. Orangutan, Pesut Mahakam, burung Enggang, (dan juga Bekantan), harusnya bukan hanya sekedar maskot PON.

Agar Ayam Tak Mati di Lumbung Padi

10. 27. 2006 - 279 dilihat

Bagai ayam mati di lumbung padi. Pepatah ini cukup bertalian dengan kondisi yang diterima rakyat Kalimantan Timur. Melimpahnya kekayaan alam, baik di daratan maupun di perairan, hingga saat ini masih belum mampu membawa kepada sebuah kehidupan yang menyenangkan. Krisis energi listrik, bencana banjir dan kekeringan, hingga tergusurnya lahan pertanian produktif demi kepentingan pengusaha, masih menjadi pemandangan keseharian di kehidupan.

Wakil Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu menyatakan dari luasan 5,24 juta hektar areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) di Kaltim, hanya seluas 0,6 juta hektar lagi untuk pengembangan kegiatan usaha pertanian dan 0,61 juta hektar diperuntukkan bagi pengembangan usaha perkebunan lainnya, sementara sisanya untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Sangat terlihat jelas arah kepentingan pembangunan propinsi Kaltim saat ini. Ketahanan pangan menjadi hal yang tak penting bagi pemerintah.

Pangan merupakan sebuah kebutuhan utama bagi kehidupan manusia. Ketersediaan pangan menjadi sebuah isu penting di negeri yang pernah berswasembada pada dekade lalu. Kerawanan pangan pernah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Hilangnya budaya bertani di tingkat komunitas lokal yang terjadi akibat gesekan budaya dan tekanan kebutuhan hidup. Sistem ketahanan pangan lokal yang selama ini menjadi sebuah penyangga sistem berkehidupan, secara perlahan berganti dengan sebuah keinginan konsumtif yang dibentuk secara sengaja oleh kelompok kepentingan yang datang berkunjung.

Ketahanan pangan sebenarnya merupakan amanat UU No. 7/1996 tentang Pangan, yang diperkuat dengan Pasal PP No. 68/2002 tentang Ketahanan Pangan. Dijelaskan bahwa untuk mewujudkan penyediaan pangan pemerintah harus: (1) mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; (2) mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan; (3) mengembangkan teknologi produksi pangan; (4) mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan, serta; (5) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Indonesia pernah membentuk Dewan Ketahanan Pangan, berdasarkan Keppres Nomor 132 tahun 2001, dimana Dewan Ketahanan Pangan ini bertugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan di

bidang ketahanan pangan nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan; serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional. Hal serupa diperintahkan untuk dibentuk di tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten. Namun sepertinya keberadaan Dewan Ketahanan Pangan ini tidak pernah terdengar. Mungkin ini dikarenakan Ketua Dewan Ketahanan Pangan adalah Presiden dan Ketua Harian adalah Menteri Pertanian. Bahkan untuk tingkat propinsi ataupun kabupaten, malah tak pernah diketahui keberadaannya.

Meski diakui bahwa kebijakan pangan yang ada tersebut sangat bias Pulau Jawa, namun setidaknya pemerintah propinsi maupun kabupaten dapat lebih tegas untuk memahami tentang lahan produktif rakyat, yang selama ini menjadi sumber pangan bagi komunitas lokal termasuk hingga di tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal utama dan penting dilakukan adalah untuk tetap mempertahankan keberadaan lahan produktif rakyat. Ironisnya adalah Pemerintah Kabupaten dan/atau Propinsi, secara sendiri maupun bersama melakukan penghilangan lahan-lahan produktif pangan rakyat untuk kepentingan pertambangan, perkebunan besar, dan hutan tanaman industri.

Nampaknya, kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada kepentingan investasi akan tetap berlanjut. Ini ditunjukkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang yang memberikan ruang kemudahan bagi investor untuk menancapkan cakarnya di negeri ini. Belum termasuk subsidi yang diberikan oleh negara kepada investor, semisal kemudahan perolehan kawasan, kredit tanpa jaminan dan bunga rendah, hingga pengabaian kewajiban kelayakan usaha.

Sementara terhadap kepentingan ketahanan pangan, pemerintah hanya mengalokasikan sedikit energinya agar rakyat tetap dapat berkehidupan. Kondisi inilah yang berakibat pada pemerintah mengambil jalan yang salah dengan mengimpor beras dan komoditi pangan lainnya. Ketiadaan lahan pertanian, ditambah dengan belum lepasnya petani dari ketergantungan terhadap produk pabrik (buah revolusi hijau), menjadikan kelompok petani dan peladang harus berjuang keras (sendiri) untuk dapat keluar dari keterpurukannya.

Sajian kompensasi lahan yang diberikan oleh pengusaha dengan bersandar pada kebijakan pemerintah, juga secara perlahan telah menggerus tatanan budaya pangan lokal, selain juga semakin mempercepat hilangnya lahan produktif pangan. Belum termasuk pada pengambilan paksa lahan produktif oleh pengusaha dengan bantuan aparat pemerintah dan aparat keamanan, dengan dalih menjaga keamanan investasi.

Sangat bodoh pemerintah selama ini yang telah menggantungkan nasib perut rakyatnya di tangan segelintir kelompok yang bernama pengusaha. Padahal sudah terbukti, di masa krisis ekonomi, kelompok-kelompok ekonomi rakyat-lah yang mempercepat pulihnya kembali sistem perekonomian negeri ini. Sementara kelompok pengusaha masih harus diinfus oleh pemerintah untuk bisa kembali, itupun dengan mengalihkan tanggung jawabnya kepada negara.

Ketahanan pangan harusnya sudah menjadi bagian yang penting di negeri ini. Semakin sempitnya lahan untuk bertani dan berladang, hilangnya benih tanaman pangan lokal, hingga hancurnya sistem ketahanan pangan lokal, harus menjadi hal yang penting bagi pemerintah, juga bagi kelompok masyarakat lainnya, termasuk akademisi. Bagaimana untuk tetap bisa melindungi dan membangkitkan kembali sistem ketahanan pangan lokal, harus masuk dalam agenda penting dan utama pembangunan propinsi ini.

Pemerintah Propinsi beserta pemerintah kabupaten-kota di Kaltim sudah saatnya harus mengarahkan kerangka berpikirnya pada pemenuhan kebutuhan lokal, tidak sekedar mengejar target angka pertumbuhan semata. Berpihak pada kepentingan investasi adalah langkah awal untuk menuju kesengsaraan. Berada di posisi rakyat merupakan jalan panjang karir politik pemimpin daerah. Tidak sekedar pemanis bibir (lip services), namun dalam kerangka lebih besar dalam membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Pemerintah juga harus melahirkan kebijakan untuk melindungi kawasan produktif rakyat, utamanya lahan pertanian (perladangan), serta lahan cadangan pangan dan kawasan budaya-religi lokal, supaya komunitas lokal akan tetap mampu bertahan di tengah pertarungan ekonomi global. Agar ayam tak mati di lumbung padi!

Lingkungan Hidup dan Utang Pebisnis

09. 23. 2006 - 846 dilihat

Permasalahan lingkungan hidup sepertinya enggan beranjak dari negeri kaya sumberdaya alam dan manusia ini. Pembakaran hutan dan lahan, pencemaran sungai dan perairan, pembalakan haram hingga bencana ekologi masih saja terjadi. Berbagai komitmen terucap dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelayan publik (pemerintah), pembuat kebijakan (parlemen), pemodal (pengusaha), hingga kalangan kelompok masyarakat sipil.

Di sisi lain, kemiskinan dan pengangguran terbuka menjadi isu yang seolah kontra terhadap keinginan untuk melakukan pencegahan pengrusakan lingkungan hidup. Isu pembangunan perkebunan besar kelapa sawit, beserta berbagai pendirian industri baru di hamparan daratan dan perairan Indonesia, yang katanya bertujuan untuk menurunkan jumlah pengangguran dan buruh migran, seolah berlawanan dengan keinginan kalangan penyayang alam untuk tetap tersedianya kawasan ekologis yang baik bagi komunitas lokal.

Di dalam pidato kenegaraan Presiden RI di depan DPR RI tanggal 16 Agustus 2006, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi, dan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk rakyat miskin agar dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Namun dalam pidato kenegaraan tersebut hanya disebutkan pengembangan energi alternatif sebagai langkah untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Hilangnya sumber-sumber kehidupan komunitas lokal sebagai dampak dari rusaknya kawasan hutan juga akan memicu terjadinya pengrusakan ekosistem yang lebih luas. Berubahnya budaya lokal dalam pengelolaan kekayaan alam lebih banyak dipicu akibat tekanan dari masuknya investasi di sebuah kawasan. Tidak adanya keamanan dalam mengelola ladang, sawah dan sumber pangan lainnya mendorong terjadinya urbanisasi dan transmigrasi, yang pada akhirnya menjadi sebuah permasalahan sosial baru di kawasan lain.

Federasi Serikat Petani Indonesia menyampaikan bahwa pada 1993 jumlah petani gurem sebanyak 10,9 juta meningkat menjadi 13,7 juta pada 2003, dan penguasaan tanah rata-rata petani yang pada 1993 hanya 0,5 ha susut menjadi 0,3 ha pada 2003. Sementara Koalisi Anti Utang menyatakan sampai dengan bulan Maret 2006 jumlah orang

miskin di Indonesia telah mencapai 39,05 juta orang atau 17,75 persen dari keseluruhan populasi rakyat Indonesia, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2006 telah mencapai 10,4 persen yang lebih tinggi dibanding keadaan bulan Februari tahun 2005 yang sebesar 10,3 persen.

Solusi yang diberikan pemerintah dengan membuka keran kemudahan investasi, malah menjadikan jurang ketimpangan ekonomi semakin tinggi. Peluang kerja dan kesejahteraan rakyat, khususnya komunitas lokal tidak pula hadir seiring dengan hadirnya berbagai perusahaan di sekitar mereka. Pekerja yang didatangkan dari kawasan luar, dengan dalih lemahnya kapasitas yang dimiliki komunitas lokal, telah pula menghadirkan benih-benih konflik sosial di masa datang. Padahal perkebunan besar dan industri kehutanan hanya mengisi angka 3% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia, sementara hampir 40-60% rakyat Indonesia sangat menggantungkan kehidupannya terhadap keberadaan sawah, ladang dan hutan.

Belum termasuk pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan yang sebagian besar modalnya berasal dari perbankan Indonesia. Misalnya saja, utang Raja Garuda Mas, perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri, pulp dan kertas, telah mencapai USD 1,455 miliar atau sekitar Rp 12 triliun. Sementara kenyataannya perusahaan ini masih terus melakukan konversi kawasan hutan menjadi lahan kritis, terindikasi melakukan pembakaran, serta menghadirkan kesengsaraan bagi komunitas di kawasan pengusahaannya.

Selama bertahun-tahun pemerintah telah memberikan subsidi yang mencapai miliaran dollar kepada pengusaha industri kehutanan di Indonesia. Subsidi diberikan dalam bentuk royalti yang rendah, hibah tunai dan pinjaman bebas bunga serta syarat-syarat yang lunak bagi pembayaran kembali pinjaman yang diberikan oleh bank-bank milik pemerintah, keringanan pajak yang longgar, termasuk pembebasan pajak selama periode tertentu, dan pembebasan bea masuk.

CIFOR dalam laporannya menyatakan, subsidi paling besar kepada konglomerat kehutanan Indonesia adalah dihapuskannya hutang yang dinikmati oleh industri kehutanan. Antara tahun 1999 dan 2001, BPPN telah mengambil alih Rp. 21,7 triliun kredit macet yang berhubungan dengan kegiatan kehutanan. BPPN juga mengambil alih aset dari dua konglomerat terbesar di sektor kehutanan sebagai jaminan pembayaran kembali kredit sebesar US\$4,9 miliar. Selain hal diatas, BPPN telah mengambil alih aset senilai Rp. 23 triliun dari Kelompok Sinar Mas. Namun BPPN tidak mampu menagih hutang itu, dan sekurang-kurangnya

70% dari nilai total dihapuskan, yang merugikan negara sebesar lebih dari US\$2,1 miliar. Sementara pengeluaran pajak hutan diperkirakan telah merugikan negara sekitar US\$1,5 miliar per tahun dalam bentuk pendapatan yang hilang.

Pemerintah dan kalangan Perbankan di negeri ini sudah sepatutnya mulai patuh terhadap kebijakan yang dibuatnya. Penilaian kinerja perusahaan (Proper) terkait dengan lingkungan hidup yang menjadi program tahunan Kementerian Lingkungan Hidup harusnya dapat berpengaruh pada kualitas kredit perusahaan. Bank sebagai debitur dapat menurunkan kualitas kredit bagi perusahaan berperingkat buruk. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum menyebutkan aspek lingkungan hidup menjadi salah satu faktor di dalam penilaian kredit. Bank Indonesia juga telah sepakat menggunakan proper KLH dalam melakukan penilaian.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP, juga menyampaikan tentang kepastian pemenuhan upaya pengelolaan lingkungan hidup dari debitur. Karena bila tidak, maka bukan tidak mungkin Bank yang tidak mentaati edaran tersebut dapat menjadi bagian bank bermasalah yang akhirnya harus kembali menjadi beban rakyat. Bank harus berhati-hati untuk memberikan kredit kepada debitur yang dikategorikan tidak ramah lingkungan. Pemberian kredit kepada debitur yang tidak ramah lingkungan mempunyai dampak risiko legal seperti timbulnya tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga terhadap debitur sehingga cash flow perusahaan kacau karena ada biaya ekstra.

Belajar dari pengalaman masa lalu, disaat krisis ekonomi menghantam Indonesia, sektor-sektor ekonomi rakyat mampu bertahan dan menopang perekonomian nasional. Selama masa krisis 1997-1998, persentase rumah tangga di desa-desa hutan yang menerima pendapatan tunai dari hutan meningkat dari 23,3% menjadi 32,9%. Namun hingga saat ini ekonomi kerakyatan masih belum mampu berpacu dengan waktu dan belum mampu bersaing dengan kepentingan pemodal besar.

Keberpihakan pemerintah dan perbankan harusnya sudah mulai berubah, dari berada di posisi pengusaha menjadi berada di posisi komunitas lokal. Melihat permasalahan lebih dalam terhadap kondisi pemiskinan dan pengangguran, menjadi penting dilakukan. Aksesibilitas (baik transportasi maupun permodalan) sebagai prasyarat pengembangan ekonomi kerakyatan harusnya bukan lagi menjadi pernyataan semata. Pemerintah harus bertanggung gugat terhadap hal

tersebut, dikarenakan rakyat telah melaksanakan kewajibannya terhadap negara.

Juga pemerintah tidak perlu berpasrah diri untuk menyerahkan pengelolaan kekayaan alam negerinya kepada pemodal asing maupun konglomerat nasional-lokal. Dengan dalih membangun sarana transportasi, yang senyatanya malah menghabiskan sumber-sumber kehidupan (termasuk lahan produktif pangan) komunitas lokal. Saat ini sudah tidak masanya untuk berpikir tentang pertumbuhan. Pemerataan pembangunan, sebagai amanat berdirinya negara ini, wajib diterjemahkan pada berbagai aktivitas yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara bagi Perbankan, sudah selayaknya berpihak pada kepentingan ekonomi lokal dengan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen lokal, bukan memberikan yang terbaik hanya kepada pengusaha yang bertopeng kemunafikan. Pengrusakan lingkungan hidup saat ini sebagian juga merupakan kontribusi dari sektor perbankan yang tidak taat terhadap kebijakan perbankan, sehingga tetap memberikan pinjaman kepada pengusaha yang sudah terlalu banyak meminjam dan kepada pengusaha yang melakukan pengrusakan lingkungan hidup.

Kenyataan saat ini, yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Indonesia sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur diri sendiri. Penjajahan melalui kekuatan ekonomi tengah terjadi di berbagai wilayah di negeri ini. Kalau tidak saat ini yang masih merasa rakyat Indonesia bangkit, maka bukan tidak mungkin kesengsaraan berkelanjutan akan tetap dirasakan rakyat Indonesia. [060923]

Dari Monokulturisme Menuju Ecocide

09. 15. 2006 - 151 dilihat

Kelapa sawit saat ini telah menjadi tanaman primadona berbagai pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. 4,7 juta hektar daratan propinsi ini akan dikembangkan sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit dari luasan 5,24 juta hektar areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Sementara hanya seluas 0,61 juta hektar diperuntukkan bagi pengembangan usaha perkebunan lainnya dan 0,6 juta hektar lagi untuk pengembangan kegiatan usaha pertanian.

Terbuainya para pemegang kebijakan di propinsi ini pada komoditas kelapa sawit akibat gencarnya negeri jiran Malaysia mengelola komoditas kelapa sawit, yang saat ini malah telah mengurangi pembukaan kawasannya untuk perkebunan kelapa sawit dan beralih kepada pengembangan hutan tanaman. Sementara Indonesia selalu bercita-cita menjadi yang terdepan dalam penyedia crude palm oil (CPO) maupun produk hulu dari kelapa sawit.

Monokulturisme, atau disebut sebagai pengembangan komoditi tunggal dalam kawasan luas di satu wilayah, sepertinya telah mendarah daging di otak para pelayan publik. Seolah-olah dengan melakukan pengembangan komoditi tunggal, maka akan menjawab permasalahan aksesibilitas, kesejahteraan dan layanan publik lainnya.

Bila ingin belajar dari pengalaman masa lalu, terlihat jelas kegagalan program kelapa sawit di Kaltim. Mulai dari belum tertanamnya areal yang telah diberikan ijin kebun setelah ditebang habis kayunya, hingga tergusurnya kawasan kehidupan komunitas lokal akibat pembukaan perkebunan besar. Belum termasuk dampak lingkungan yang terjadi setelah dibukanya areal kebun dan pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit. Ecocide atau pemusnahan massal terhadap sumber kehidupan (ekosistem) mulai terjadi di beberapa wilayah propinsi ini.

Dalam Rapat Paripurna Ke-7 Sidang Tahunan MPR tanggal 7 Agustus 2003, pimpinan MPR saat itu menyampaikan bahwa sebagian pemimpin dan rakyat kita dewasa ini sesungguhnya sedang melakukan ecocide atau membunuh lingkungan alam, antara lain dengan merusak hampir-hampir total hutan-hutan kita. Hal ini menunjukkan telah diakuinya kejadian ecocide di negeri ini. Lebih lanjut disampaikan juga bila tidak segera dihentikan, pada 2020 seluruh hutan kita akan menjadi padang ilalang dengan segala implikasinya. Khasanah flora dan fauna Indonesia, termasuk keragaman aneka unggas akan punah untuk selamanya.

Kejadian akan tetap berulang, walaupun kata telah terucap. Bahkan lebih menyakitkan disaat sebuah janji diucap saat memulai memegang amanah jabatan, ternyata tak pernah menjadi ingatan terdalam di otak pelayan publik negeri ini. Menjadi lupa merupakan sebuah hal yang mudah dilakukan. Sebagai pelayan publik, mementingkan kepentingan segelintir kelompok dan membiarkan terjadinya kesengsaraan bagi sebagian besar kelompok komunitas lokal yang mencoba bertahan berkehidupan diantara alam yang semakin cepat kehilangan daya dukungnya.

Ketika kemudian wacana biodiesel mengemuka di Indonesia, berlomba-lombalah kemudian keinginan untuk mengembangkan tanaman jarak pagar, yang kabarnya akan mampu menggantikan sumber energi yang selama ini. Program jarak-isasi menjadi trend diantara program sawitisasi. Lahan-lahan produktif komunitas berganti dengan komoditi tunggal yang menjadi keinginan pemerintah. Krisis pangan yang pernah terjadi di Yakohimo-Papua, bukan tidak mungkin akan terjadi di berbagai wilayah propinsi ini. Di saat tak ada lagi lahan untuk membuka ladang, disaat tergiur dengan komoditi tunggal, disaat itulah ketahanan ekonomi lokal akan runtuh dengan sangat cepat.

Posisi pemerintah sebagai pelayan publik, saat ini lebih menjadi pelayan investasi. Keping uang yang seolah dikucurkan oleh investor menjadikan pemimpin daerah buta mata dan buta hati. Jeritan kebutuhan publik tak lagi terdengar. Yang diutamakan hanyalah kepentingan investasi yang saat ini merupakan penajahan gaya baru yang sesungguhnya telah diskenariokan sejak Indonesia semakin menguat di tataran internasional beberapa tahun setelah memerdekakan diri. Pola investasi yang tidak adil bagi Indonesia, telah menjadi lokomotif lupa kolektif di kalangan pemerintah. Hembusan janji pun dipandang sebagai sebuah realita, dimana senyatanya tidak pernah ada investor yang benar-benar berhasil memakmurkan komunitas lokal.

Investasi pengembangan monokultur hanya akan menguntungkan pihak investor. Sementara komunitas lokal akan mengalami ecocide. Sebuah kondisi yang difasilitasi oleh pemerintahan saat ini. Hingga kejadian lumpur Lapindo, bukan tidak mungkin akan terjadi di tanah borneo ini.

Monokulturisme telah menjadi sebuah paham pemerintah semakin menguat atas dukungan dari kelompok investasi. Belum termasuk dukungan lembaga keuangan lokal, nasional maupun internasional, yang selalu mengejar perputaran modal agar membanjirkan keuntungan melimpah bagi kelompoknya.

Mengubah cara pandang berbagai pihak di negeri ini menjadi penting agar ecocide tidak segera terjadi. Pemusnahan sumber kehidupan rakyat akan berdampak pada kehancuran negara, dikarenakan yang menjadi pondasi negara adalah kekuatan rakyat, sebagaimana di saat memerdekakan diri di masa lalu, Indonesia dibangun atas solidaritas ekonomi dan sosial kelompok-kelompok rakyat, bukan oleh kelompok kepentingan.

Langkah penting yang harus diambil oleh berbagai pihak di Kaltim adalah untuk sesegera mungkin mendesak pemerintah agar melakukan refleksi atas proses pembangunan wilayah ini, menjadikan free-prior informed consent (persetujuan tanpa paksaan, diinformasikan, didahulukan) sebagai sebuah alat verifikasi investasi, dan mengakui dan mengutamakan kawasan kelola rakyat sebagai sumber kehidupan komunitas, serta memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan dan aksesibilitas ekonomi rakyat.

Ecocide akan semakin cepat terjadi disaat pemerintah lebih berorientasi pada pengembangan perkebunan besar monokultur daripada mengembangkan komoditas beragam-lokal yang selama ini telah memberikan kehidupan bagi komunitas lokal. Pelayanan yang baik kepada rakyat akan memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan akan mempercepat proses pemerataan kesejahteraan di negeri ini. Bagi pemerintah, saat inilah saat yang tepat untuk memilih apakah akan menjadi pembunuh atautkah menjadi fasilitator yang baik bagi publik.

Kemerdekaan Hanya Milik Segelintir Rakyat

08. 22. 2006 - 527 dilihat

61 tahun Indonesia memerdekakan dirinya. Sejarah yang tercatat dalam publikasi negeri ini mengumandangkan nilai-nilai perjuangan dan patriotisme pada generasi bangsa. Lebih banyak sejarah yang belum tercatat ataupun sengaja tidak dicatatkan, agar anak negeri tak memahami pondasi kemerdekaan negerinya.

Peringatan hari kemerdekaan negeri ini dihiasi dengan bendera merah putih, umbul-umbul dan beraneka perlombaan serta pertandingan. Panjang pinang, makan kerupuk, lari karung, hingga gigit koin. Pada beberapa wilayah menggelar pertandingan olah raga sepak bola, volley, hingga tarik tambang. Nilai perjuangan yang katanya sedang dibangkitkan.

Merujuk pada sejarah bangsa, sebagian besar perlawanan terjadi adalah akibat dari perebutan sumber kehidupan dan wilayah kekuasaan. Pertempuran terjadi antara elit kerajaan ataupun kesultanan dengan para penjajah. Perlawanan terorganisir baru bangkit di awal abad ke-20, setelah pendidikan masuk ke berbagai kelompok pemuda di negeri ini.

Peristiwa Rengasdeklok menjadi sebuah catatan tersendiri dari merdekanya negeri ini. Dibawanya Ir Soekarno untuk kemudian didorong untuk memproklamasikan kemerdekaan oleh kelompok pemuda. Sayang sekali, buku sejarah tak cukup baik mencatat kronologis peristiwa Rengasdeklok, termasuk tokoh pemuda yang saat itu telah berpikir cepat untuk membebaskan negeri dari penjajahan.

61 tahun perjalanan kemerdekaan negeri ini diikuti dengan berbagai peristiwa yang terkadang kurang menyenangkan. Penjajahan dan pertempuran masih tetap berlangsung diantara aroma kebebasan. Sistem pemerintahan yang belum stabil, dikarenakan belum mapannya pondasi bangsa yang ingin dibangun, menjadikan belum tertatanya arah negeri ini.

Nilai dasar yang ditanamkan oleh pemikir negeri saat itu adalah sebuah nilai ketuhanan, kebersamaan, solidaritas ekonomi, komunalisme dan permusyawaratan. Tak banyak yang memahami dalam kerangka membangun negeri ini. Sistem Pancasila belum mampu menjawab berbagai pemikiran yang berbeda yang ada. Belum lagi, tekanan dari negara lain, yang selalu berupaya menguasai negeri ini.

Penguasaan penuh oleh pemimpin negeri akhirnya menjadi sebuah konflik di tingkat rakyat. Hingga terjadi berbagai pergulatan politik maupun fisik. Rakyat kembali menjadi korban. Ketika berganti pemimpin, tak jua terjadi perbaikan negeri ini. Ekonomi negeri ini dikuasai oleh asing melalui skema investasi dan utang luar negeri. Indonesia semakin jauh dari akar kemerdekaannya.

Sistem ekonomi negeri yang mengejar angka pertumbuhan, semakin menjadikan Indonesia tergiring ke arah jurang kehancurannya. Merdeka secara perkataan, tidak merdeka dalam pengelolaan negerinya. Sumber-sumber kekayaan negeri yang menghidupi sebagian besar rakyat dikuasai oleh investasi asing. Lihat saja kerakusan perusahaan tambang besar di negeri ini. Emas, tembaga, hingga platina dikuras habis dari perut bumi negeri ini dan dibawa ke luar dari Indonesia, dengan menyisakan limbah yang mengancam kehidupan rakyatnya.

Tidak hanya ini yang terjadi. Dikarenakan semakin kuatnya sistem ekonomi modal menguasai sendi bangsa, menjadikan lahirnya kelompok opportunist di negeri ini. Pemodal lokal berkolaborasi dengan konsorsium pemodal asing, mulai merangsek dan merusak kehidupan rakyat yang harusnya bisa lebih sejahtera hari ini. Pertambangan, perkebunan besar, pengusahaan hutan, perikanan hingga konservasi, hampir sebagian besar dikuasai oleh asing ataupun kolaborasi asing dengan pemodal lokal. Sementara, semakin banyak rakyat yang harus tergusur ataupun dihilangkan sumber kehidupannya, hingga harus berharap dari jatuhnya keajaiban agar bisa lebih baik.

Arah pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan, bukan pemerataan ini, juga pada akhirnya mendorong proses fasilitasi pembangunan di area-area ekonomi semu semata. Sektor ekonomi rakyat semakin terpuruk dan berjuang dengan kemampuan sendiri untuk bisa bertahan. Fasilitas transportasi yang harusnya disediakan oleh pemerintah, tak pernah terwujudkan. Malah ketika ini ada, pemerintah menyerahkannya pada investasi yang akhirnya malah memperparah kondisi rakyat.

Pendidikan masih sangat jauh tertinggal. Investasi di bidang ini menjadi bagian yang tidak penting. Anggaran 20% sektor pendidikan hanya menyentuh pada wilayah perkotaan, sementara semakin banyak potensi rakyat yang tidak berkembang di wilayah-wilayah jauh dari pusat pemerintahan belum terbangun secara optimal. Mulai dari kesejahteraan pendidik, fasilitas belajar, hingga pemahaman kurikulum, menjadikan pendidikan di kawasan kampung masih sangat jauh dari berkembangnya. Standarisasi pendidikan secara nasional juga

menumbuhkan kesenjangan pengetahuan. Padahal, lebih banyak pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh generasi negeri ini bila saja belajar dari alam sekitarnya.

Di sektor kesehatan, penggunaan obat-obat tradisional semakin tergerus oleh kepentingan bisnis obat pelaku kesehatan. Menjauhkan rakyat dari kedekatannya dengan alam menjadikan semakin hilangnya pengetahuan lokal tentang kesehatan. Padahal jauh sebelum teknologi kedokteran berkembang, pengobatan lokal masih mampu mengatasi permasalahan kesehatan rakyat. Belum lagi masuknya bisnis farmasi ke wilayah obat tradisional akan menjadikan hilangnya persediaan obat di alam karena eksploitasi, semisal buah merah, sarang semut dan pasak bumi.

Tiga hal penting yang harusnya bisa difasilitasi oleh pemerintah saat ini, setelah 61 tahun Indonesia memerdekakan dirinya adalah untuk mempermudah aksesibilitas ekonomi rakyat, menguatkan pendidikan lokal, serta melindungi sistem kesehatan tradisional. Menghentikan investasi besar (dan asing) serta menghentikan utang luar negeri, akan sangat membantu berkembangnya sistem ekonomi Indonesia yang selama ini dicoba dikenal sebagai sistem ekonomi Pancasila. Berdiri di atas kaki sendiri, harusnya menjadi makna dari kemerdekaan. Bukan sekedar untuk sebuah nilai merah darah dan putih tulang. Juga bukan hanya sekedar sebuah perlombaan bernilai perjuangan. Namun lebih dari itu. Kemerdekaan negeri ini harus dikembalikan pada kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupannya. Dan ini hanya akan bisa diraih dengan sebuah solidaritas sosial dan ekonomi dari rakyat negeri ini.

Sudah selayaknya pemimpin negeri ini berkaca pada kubangan lumpur Lapindo ataupun pada sungai yang semakin tak layak untuk sebuah kehidupan. Berpikir bukan untuk diri sendiri, namun bagi sesama. Kemerdekaan adalah sebuah pembebasan. Kemerdekaan merupakan sebuah kedaulatan. Kemerdekaan tidak untuk segelintir rakyat negeri ini. 61 tahun Indonesia merdeka, tak penting pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Hadirkanlah pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat di negeri yang (katanya) kaya akan sumberdaya alam ini. Belajarlah pada alam dan berbagilah pada sesama.

Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah

08. 21. 2006 - 5,557 dilihat

“Hari Selasa depan aku tidak ingin masuk sekolah. Gurunya kejam. Masa aku tadi dipukul di kelas cuma karena salah membaca.” Demikian ungkapan seorang siswa kelas 2 sekolah dasar di kota Samarinda. Kekerasan dalam proses belajar-mengajar hingga hari ini masih belum bisa dihentikan. Pemahaman dan kapasitas guru yang kurang, menjadikan siswa sebagai sasaran amarah. Belum termasuk tekanan kehidupan guru yang keras.

Bila melihat pada pasal 28 (2) Konvensi tentang Hak-hak Anak disebutkan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak. Lebih lanjut pasal 37 (a) menyatakan tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Tindakan penegakan disiplin ataupun peningkatan daya serap anak, harusnya tidak dilakukan dengan kekerasan. Apa yang dibacakan oleh Ms. Gabriela Azurduy Arrieta (Bolivia) dan Ms. Audrey Chenyut (Monaco) pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Special Session untuk Anak tanggal 8 Mei 2002 harusnya dimaknai lebih mendalam oleh pelaku pendidikan di negeri ini. Salah satu yang pesannya bahwa pentingnya persamaan kesempatan dan akses kepada pendidikan berkualitas yang bebas biaya dan diwajibkan, serta lingkungan sekolah yang memungkinkan anak merasa bahagia dan senang untuk belajar.

Lebih jauh, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Dr Seto Mulyadi menyatakan bahwa sekitar 80 hingga 90 persen anak-anak di Indonesia masih belum mendapatkan hak pendidikan, karena arti sebenarnya pendidikan itu adalah hak, bukan suatu kewajiban. Berjuta anak Indonesia yang ke sekolah karena terpaksa, mendapatkan suasana sekolah yang tidak asyik, dan tidak menyenangkan, padahal belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan.

Kondisi sistem pendidikan negeri ini yang carut-marut menjadikan semakin banyak tindakan kriminal, kekerasan dan pelanggaran hak asasi yang terjadi. Korupsi yang membudaya, bukan hanya masalah moralitas, tapi lebih pada bahwa pendidikan belum berhasil membangun generasi cerdas dan kreatif.

Kekerasan guru terhadap siswa sangat berdampak pada perkembangan psikologis anak. Keengganan anak untuk terus belajar mata pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru akan berbuah pada tidak bertambahnya pengetahuan anak terhadap mata pembelajaran tersebut. Selain juga, traumatik berkelanjutan akan tercipta pada jiwa anak.

Proses pembelajaran cerdas dan kreatif yang masih belum dimiliki oleh para guru, juga tidak lepas dari peran lembaga pencetak guru yang cenderung statis dan tidak bergerak mengikuti perkembangan pengetahuan. Sejak sistem Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) digunakan hingga kurikulum 2004 dan kurikulum 2006, baru sebagian kecil guru yang menerapkan proses belajar siswa yang cerdas dan kreatif. Minimnya penggunaan alam sebagai media belajar merupakan sebuah indikator sederhana dari miskinnya kapasitas seorang guru. Belajar secara monoton di dalam kelas berlangsung secara berkelanjutan, pada akhirnya membuahakan generasi statis, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kehancuran negeri ini.

Silih bergantinya kurikulum dalam waktu singkat, merupakan salah satu aspek kegagalan pendidikan. Belum terimplementasikannya suatu kurikulum hingga kegagalan perbaikan kurikulum merupakan beban baru bagi siswa. Termasuk ketika sistem ujian nasional diberlakukan, yang menjadikan ketidakjujuran sebagai sebuah bagian dari proses belajar mengajar.

Kekerasan menjadi sebuah pilihan beberapa guru, dikarenakan tingginya beban pengetahuan yang harus dipindahkan ke siswa. Keterbatasan ruang kreasi pun terkadang menjadi sebuah hambatan tersendiri dalam proses belajar mengajar. Pemahaman substansi pendidikan telah sangat jauh ditinggalkan oleh guru sebagai pendidik.

Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2006 yang bertemakan “Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia” dengan subtema “Anak Indonesia Sehat, Cerdas, Bercita Cita Tinggi, Berahklak Mulia” bisa jadi hanya sekedar slogan semu. Penerimaan dalam berbagai sektor kehidupan telah sangat jauh dari apa yang tertulis. Ini terlihat jelas dari sistem pendidikan yang diberlakukan di negeri ini.

Langkah penting sudah seharusnya diambil oleh Dewan Pendidikan Kota maupun Dinas Pendidikan Kota, untuk sesegera mungkin melakukan pengawasan terhadap pelaku pendidikan, khususnya perilaku kekerasan oleh guru di dalam ruang kelas. Kualitas guru serta kapasitas guru, terutama dalam hal metodologi pembelajaran, bukan hanya dibiarkan menjadi statis. Selain juga untuk sesegera mungkin meningkatkan

kesejahteraan guru. Walau sebenarnya, guru bukanlah harus menjadi sebuah profesi, namun guru merupakan sebuah ruang pengabdian.

Lebih penting bagi orang tua siswa untuk berani bersuara. Berdialog dengan anak untuk memantau perkembangannya. Termasuk disaat semakin banyaknya pungutan di sekolah dalam berbagai bentuknya. Bila tak ada suara dari orang tua siswa, maka bukan tidak mungkin Komite Sekolah (yang pada umumnya diisi oleh pejabat pemerintah dan pengusaha) akan memberlakukan pungutan yang tidak wajar di sebuah sekolah. Juga ketika masih kerap terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah, maka sudah selayaknya membuat pengaduan kepada institusi teknis (Dinas Pendidikan), maupun kepada pihak penegak hukum (bila telah dianggap sangat tidak wajar), agar pendidikan menjadi lebih baik di masa datang.

Parodi Negeri Bencana

07. 18. 2006 - 422 dilihat

Mungkin sangat layak bila Indonesia disebut sebagai NEGERI BENCANA. Rangkaian kejadian bencana tak henti terjadi di berbagai wilayah di negeri ini. Gempa, tsunami, banjir, kekeringan, pencemaran lingkungan hidup hingga aliran lumpur panas. Peristiwa yang silih berganti terjadi ini masih belum mampu juga menyihir pemegang kebijakan negeri untuk segera bercermin dan melakukan aktivitas yang akan mampu mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian materil.

Dalam sebuah teori pengelolaan bencana, telah sangat jelas bahwa penting dilakukan berbagai tindakan, mulai dari perencanaan, pencegahan, tanggap darurat, kesiap-siagaan, peringatan dini hingga melakukan evaluasi untuk perbaikan sistem yang dibangun. Bukan masalah teknologi yang belum dimiliki oleh negeri ini, namun lebih pada ketidakpekaan pemerintah dalam melakukan sebuah tindakan.

Hujan bantuan yang membasahi bumi Nanggroe Aceh Darussalam masih juga belum mampu menjadikan kebangkitan sebuah sistem pengelolaan bencana yang lebih baik. Yang terjadi kemudian adalah wisata bencana dan bisnis bencana. Hilir mudiknya warga negara asing dengan label sedang membawa program rehabilitasi dan rekonstruksi, telah membawa pergeseran identitas lokal di kawasan tersebut. Hingga kemudian, semakin banyak aliran dana yang tidak berdasarkan kebutuhan lokal komunitas di NAD.

Agak berbeda ketika Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami hal yang hampir serupa. Solidaritas sosial terbangun cukup kuat, sehingga pemerintah di Yogyakarta berani untuk mengatakan tidak bagi pinjaman luar negeri yang seolah ingin membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayahnya. Antar komunitas di tingkat lokal berbuat bersama untuk menata ulang kawasan yang terporak-porandakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Walau tidak dipungkiri, pemerintah pusat masih terkesan sangat lamban dalam memberikan respon terhadap bencana.

Baru beberapa hari yang lalu (18/7), gempa dan tsunami kembali terjadi di kawasan selatan Jawa Barat. Jumlah korban jiwa memang tak sebanyak di NAD maupun Yogyakarta-Jateng. Kembali kata koordinasi dan sistem informasi masih jauh dari yang diharapkan. Ketika bencana semakin berkelanjutan terjadi, hal yang menjadi penting bagi Indonesia saat ini adalah sistem peringatan dini serta pengetahuan kesiapsiagaan

dan tanggap darurat di kawasan rawan bencana.

Bila saja benar apa yang diungkapkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), bahwa 87% kawasan Indonesia adalah kawasan rawan bencana, maka secara nasional pemerintah harus sesegera mungkin membangun sistem peringatan dini yang dapat menghubungkan tingkat lokal hingga nasional, serta penting pula meletakkan pengetahuan dan kapasitas pengelolaan bencana di berbagai lapisan rakyat.

Indonesia sebenarnya memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dan berlebih. Terbukti dengan kemenangan tim Indonesia pada Olimpiade Fisika baru-baru ini. Juga ketika dua orang warga Indonesia menjadi pemenang dalam kompetisi pemrograman komputer yang diadakan oleh Google beberapa waktu lalu. Dan masih begitu banyak bertebaran para ahli di negeri ini yang terkadang malah dipergunakan oleh negara lain, karena tak pernah diberikan tempat oleh pemerintah. Ini pula yang mungkin menyebabkan seorang Onno Purbo, yang pernah menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung, harus terus berjibaku untuk sekedar membangun sistem komunikasi murah bernama VOiP Rakyat.

Yang dibangun oleh pemerintah kemudian hanya sistem kekeluargaan, sehingga hanya yang menjadi keluarga pejabat pemerintah yang dapat memberikan perannya bagi proses pembangunan di negeri ini. Kepentingan kapital sangat kental menguasai sendi-sendi arah pembangunan negeri ini. Kepentingan publik yang harusnya dilayani oleh negara pun akhirnya hanya dikuasai oleh kelompok pemodal yang hanya bermodalkan dengkul.

Seandainya saja pemerintah mau berlapang dada untuk memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas, dengan membangun sebuah solidaritas sosial, maka bukan tidak mungkin biaya pembangunan akan semakin lebih sedikit. Telah semakin banyak tumbuh kelompok-kelompok relawan di negeri ini yang terbangun dari sebuah solidaritas.

Dalam mengelola bencana, kalau saja pemerintah bersedia menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh tim Olimpiade Fisika, tim Olimpiade Matematika (yang gagal berangkat ke arena pertandingan), para pegiat teknologi informasi, kelompok peduli lingkungan, kelompok relawan, kependuan dan berbagai pihak lainnya, tentunya akan dapat sangat membantu proses pengelolaan bencana di negeri ini. Bagaimana sistem peringatan dini bisa dibangun, penyebaran pengetahuan bencana bisa berlangsung lebih cepat, hingga tanggap darurat yang terkoordinasi dan terkelola dengan lebih baik. Dan yang

terpenting, tidak menggunakan biaya yang sangat besar dan menggunakan utang luar negeri.

Potensi lokal yang selama ini belum pernah dilirik oleh pemerintah telah terus berkembang di tingkat rakyat. Aksi-aksi solidaritas saat bencana terjadi membuktikan bahwa sebenarnya masih tersisa semangat saling membantu di tingkat rakyat. Tergantung bagaimana pemerintah bisa menguatkan semangat yang ada, bukan dengan semakin membangun ketidakpercayaan publik terhadap sistem saat ini.

Tak terlalu sukar untuk memulainya. Pemerintah hanya perlu menyediakan sebuah ruang bagi publik untuk berkreasi, dan disertai dengan menghilangkan berbagai kebijakan yang selama ini menghambat ruang kreatifitas publik. Secara alamiah akan terseleksi pihak-pihak yang sebenarnya ingin bekerja bersama. Kelompok yang ingin berbisnis atas nama bencana akan segera mundur secara perlahan.

Bila saja pemerintah Indonesia masih belum mau untuk mewujudkan hal ini, karena terlalu sibuk mempersiapkan diri menghadapi pertarungan politik berikutnya, akan lebih baik bila pemerintah kabupaten-kota untuk memulainya. Fungsi fasilitasi pemerintah akan lebih dikedepankan dalam hal ini. Melakukan proses-proses perencanaan bersama, hingga melakukan proses pengawasan dan evaluasi secara bersama pula. Perlahan namun dengan sebuah kepastian.

Mungkin ini hanya sebuah mimpi. Namun lebih baik bila masih mempunyai mimpi. Karena saat ini semakin banyak rakyat yang tidak lagi bisa bermimpi, karena tak lagi mampu untuk tidur tenang akibat bencana yang mengancam. Bahkan hampir 30% penduduk negeri ini harus tidur dengan perut tak terisi, hanya karena lahan sumber pangannya digusur untuk kepentingan pertambangan, perkebunan dan industri besar. Sementara sebagian lainnya telah menjadi robot pekerja hasil cetakan pabrik bernama sekolah dan perguruan tinggi yang telah menjadi sebuah bisnis pendidikan dengan kurikulum yang hanya memuaskan nafsu pemodal. Beruntunglah bagi mereka yang masih punya mimpi agar negeri ini menjadi negeri madani. Atau lebih baik bila kita nonton bareng “Parodi Negeri Bencana”.

Hak Rakyat Atas Lingkungan Hidup

07. 18. 2006 - 1,175 dilihat

Terdapat tidak kurang 25 juta pengungsi akibat krisis lingkungan hidup di seluruh dunia. Dalam konferensi perubahan iklim dunia pada tahun 2002 di Maroko disebutkan bahwa keadaan genting dari planet Bumi sekarang ini disebabkan oleh konsumsi berlebihan, bukan oleh 80% penduduk miskin di 2/3 belahan bumi, tetapi oleh 20% penduduk kaya yang mengkonsumsi 86% dari seluruh sumber alam dunia.

Semakin banyaknya jumlah nyawa manusia yang hilang akibat bencana ekologis yang terjadi di negeri ini. Sejak 1998 hingga 2003, tak kurang dari 600 kejadian bencana akibat kerusakan lingkungan hidup terjadi di Indonesia yang menewaskan lebih dari 2.500 orang dan kerugian material mencapai 300 miliar rupiah. Dalam dua tahun terakhir saja, terjadi tidak kurang tiga kali kejadian bencana banjir setiap tahunnya di berbagai wilayah di Indonesia. Banjir di Sinjai, Barito Utara hingga Kutai Barat dan Kutai Timur semakin menjadikan rakyat harus menikmati bencana. Ironisnya, berbagai kejadian bencana di negeri yang terlimpahi kekayaan alam ini, sepertinya masih belum menjadikan permasalahan kerusakan lingkungan hidup (ekologi) menjadi agenda yang penting dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Di sisi lain, teknologi dan ilmu pengetahuan dipandang masih mampu untuk mencegah terjadinya kematian akibat bencana ekologi yang terjadi. Teknologi dan pengetahuan lokal mengalami penghilangan secara sistematis dengan tidak diakuinya hukum adat, serta pengetahuan dan kebudayaan lokal dalam setiap ruang kehidupan bernegara. Edward Goldsmith mengungkapkan pengrusakan lingkungan alam di negara-negara dunia ketiga berjalan beriringan dengan pengrusakan cara hidup pedesaan tradisional yang umumnya mencukupi diri sendiri.

Ridha Saleh, Deputy Direktur WALHI, dalam bukunya ?Ecocide: Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia? menyatakan bahwa gejala eksploitasi yang massif terhadap sumberdaya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan pengrusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari ecocide. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarah pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi.

Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar dan kawasan industri lainnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obat-obatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh kepentingan sekelompok orang. Sungai-sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering. Udara negeri ini semakin tak sehat untuk dihirup, sehingga tak salah ketika Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Jakarta membuat baliho ?Selamat Datang di Kota Polusi?.

Manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, dimana sangat erat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Sejak dilahirkan, manusia telah diberikan hak atas lingkungan hidup meliputi hak-hak dasar manusia, prinsip keadilan lingkungan hidup dan akses yang adil terhadap sumber kehidupan. Interaksi antara manusia dengan alamnya merupakan sebuah ritual kehidupan yang tak mungkin bisa terpisahkan hingga akhir jaman. Menghilangnya ikatan sosial antara manusia dengan lingkungan hidup sekitarnya, telah menjadikan semakin tingginya amarah yang dimiliki manusia, sehingga peperangan atas nama perdamaian semakin sering terjadi.

Rakyat, sebagai pemberi mandat kepada pemerintah, sudah selayaknya memahami hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Hak atas lingkungan hidup telah tersirat dari pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 12(b) Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Deklarasi Hak atas Pembangunan Agenda 21 dan Piagam tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara. Di dalam perangkat kebijakan, amandemen kedua UUD 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan ?setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lebih jauh, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) menyatakan ?setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat? dan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 ayat (1) ?setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat?.

Menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dasar rakyat. Sifat eksploitatif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengejar pendapatan pemerintah selama ini telah menjadikan rakyat kehilangan hak atas lingkungan hidup yang merupakan hak asasi rakyat. Pemberian perijinan kepada pengusaha yang mengabaikan prinsip-prinsip lingkungan hidup telah menghasilkan

hamparan lahan kritis serta sungai yang mengering dan tercemar. Sementara, peningkatan pendapatan pemerintah tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar kawasan yang dikuras kekayaan alamnya.

Pola-pola pemanfaatan kekayaan alam oleh komunitas lokal di berbagai wilayah di Indonesia, selama ini telah diakui mampu untuk menyeimbangkan fungsi sosial, ekonomi dan ekologis suatu kawasan. Hanya saja, ketika pemerintah terbutakan oleh kepentingan pemodal semata, menjadikan aliran ekonomi kerakyatan yang terbangun selama ini tak terlihat jelas. Krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia sebenarnya telah menunjukkan bahwa lebih dari 65% sistem perekonomian yang mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi adalah sistem perekonomian kerakyatan, disaat perekonomian yang dibangun oleh pengusaha besar mengalami keruntuhannya.

Sangat disayangkan bila saja pola-pola ekonomi lokal, yang disertai dengan pola pengelolaan kekayaan alam oleh komunitas lokal, harus menghilang dikarenakan desakan kepentingan investasi dan kepentingan global. Pondasi negeri yang katanya berbasiskan agraris dan maritim ini semakin keropos dan tergerus. Kekayaan alam hanya akan dinikmati oleh sekelompok kecil orang yang rakus. Rakyat akan semakin sengsara di lumbung padinya yang tak lagi bisa terisi karena tak ada lagi air untuk mengairi areal persawahannya.

Hal lain yang terjadi selama ini, penguasaan hutan dan lahan, baik oleh investasi maupun oleh lembaga konservasi internasional, telah pula menggerus hukum adat beserta pengetahuan lokal yang ada di dalamnya. Pemaksaan kepentingan global di tingkat lokal cenderung mengabaikan kaidah persetujuan tanpa paksaan.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan ruang kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Pemerintah merupakan pelayan rakyat, bukan menjadi penguasa atas kekayaan negeri ini. Kebijakan negara sudah selayaknya melindungi hukum lokal yang menjunjung prinsip keadilan ekonomi, sosial dan ekologi. Selain juga dukungan terhadap sistem perekonomian lokal yang harus dikokohkan oleh pemerintah. Investasi penting, namun lebih penting menguatkan investasi lokal dan pelayanan terhadap ekonomi lokal agar mampu bersaing di tingkat global, bukan sebaliknya.

Tentunya rakyat di negeri bencana ini tidak ingin apa yang terjadi di Pulau Paskah, sebuah pulau di Samudera Pasifik, akan terjadi di kepulauan nusantara. Hilangnya pepohonan di pulau tersebut telah menjadikan hilangnya lapisan unsur hara, berkurangnya sumber air

tawar, hingga mengakibatkan menurunnya jumlah manusia yang dapat hidup di pulau tersebut, hanya akibat dari egoisme sekelompok orang yang ingin menunjukkan kekuasaannya. Saatnya rakyat menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan kepada pemerintah. [060717]

Pendidikan itu Hak, bukan Kewajiban !

06. 8. 2006 - 3,726 dilihat

Diantara perdebatan tentang sebuah moral di negeri ini, ada hal yang hingga saat ini hanya pada tingkat wacana, yakni PENDIDIKAN GRATIS BERKUALITAS. Walau sudah diamanatkan dalam UUD RI bahwa Pemerintah harus melakukan upaya-upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, namun hingga saat ini masih sangat sedikit dukungan nyata pemerintah yang diberikan, baik dalam hal kebijakan maupun pendanaan.

Semakin seringnya guru bantu melakukan aksi agar dapat tetap bekerja sebagai guru, semakin banyaknya tayangan sekolah rusak dalam berbagai media, hingga bermunculannya gejala magis di beberapa sekolah dalam bulan terakhir, memperkuat penggejalaan bahwa pendidikan ternyata masih diabaikan.

Pendidikan itu Bisnis!

Saat ini, baik sekolah negeri (yang harusnya didanai oleh pemerintah) maupun sekolah swasta, bahkan hingga ke tingkat perguruan tinggi dan lembaga pendidikan non-formal, telah menawarkan kualitas pendidikan dengan disetarakan pada biaya pendidikan. Untuk sebuah sekolah plus setingkat SLTP saja, tidak kurang dibutuhkan biaya setara dengan pendidikan S2 di perguruan tinggi negeri.

Di sekolah negeri, dengan dalih ketiadaan biaya, semakin banyak gedung-gedung sekolah yang dibiarkan rubuh. Juga ketika angka ketidakilulusan semakin tinggi disaat ujian nasional, maka ketiadaan fasilitas pembelajaran menjadi sebuah alasan berulang.

Berbeda pada perguruan tinggi negeri, di saat pergeseran kebijakan perguruan tinggi yang akan mem-badan hukum milik negara-kan, menjadikan komersialisasi pendidikan semakin meningkat. Kualitas pendidik dan kurikulum pendidikan tidak pernah lagi diperhatikan. Malah semakin meningkat penggejalaan sebuah perguruan tinggi menjadi sebuah super mall yang menyediakan beragam gelar keserjanaan maupun gelar magister.

Pendidikan Berkualitas itu Tidak Penting!

Arah pendidikan saat ini, sebagian besarnya menjerumuskan beragam

sumberdaya manusia negeri ini ke arah penyeragaman dan menjadikan robot. Lingkar-lingkar kreatifitas dan daya pikir kritis telah dimatikan secara struktural. Kurikulum pendidikan dibuat untuk pemenuhan lapangan pekerjaan, yang sebagiannya adalah bernuansa penggerusan kekayaan alam.

Bidang-bidang pendidikan yang dipandang tidak lagi memiliki prospek pekerjaan semakin dijauhi. Keterampilan spesialis dan teknis menjadi sebuah primadona baru dalam dunia pendidikan saat ini. Keterampilan generalis dan kepemimpinan mulai termatikan di pendidikan formal, malah saat ini dikuasai oleh pelaksana pendidikan non-formal, yang sudah tentu tidak dengan biaya murah.

Kurikulum sebagai urat nadi kualitas lulusan sekolah maupun perguruan tinggi, sangat cepat berganti tanpa pernah dilakukan evaluasi menyeluruh berkaitan dengan kualitas yang dihasilkan. Kurikulum hanya sebuah efek mekanis yang akan menghasilkan otak mampu dikontrol dari satu titik, tanpa memberikan ruang berkembangnya kemampuan berpikir. Hanya 1% bagian otak yang digunakan dalam proses belajar di sekolah maupun di perguruan tinggi di Indonesia saat ini.

Pendidikan itu Kewajiban: Awal Kehancuran!

Penggiringan pendidikan anak negeri ke jurang kehancuran bermula pada meletakkan pendidikan sebagai sebuah kewajiban, sehingga tertancapkanlah pemikiran di seluruh keluarga di negeri ini bahwa pendidikan itu wajib. Dengan semakin banyaknya pihak yang berkewajiban menjalani proses pendidikan formal, maka ini menjadikan pendidikan sebagai sebuah arena bisnis. Bila saja penyedia jasa pendidikan semakin sedikit, maka penyedia jasa pendidikan dapat dengan berdasarkan keinginan sendiri untuk menentukan besarnya imbal jasa yang diberikan. Inilah awal sebuah bisnis pendidikan yang menjadikan pendidikan itu mahal.

Program wajib belajar 9 tahun pun menjadikan wilayah pendidikan dipaksakan ada, tanpa pernah memandang kualitas. Pendidikan pun kemudian dipandang sebagai sebuah kerangkeng baru bagi anak-anak, dikarenakan pola-pola pengajaran menjadi diseragamkan sepanjang kepulauan Nusantara ini. Pengembangan kurikulum dan pola pembelajaran kelokalan menjadi sangat sukar berkembang.

Kualitas pengajar pun dipaksakan untuk meningkat dengan sebuah kewajiban gelar kesarjanaan untuk mengajar. Padahal tidak ada hubungan yang erat antara gelar kesarjanaan dengan kualitas pengajar.

Kualitas pengajar hanya akan bisa dihasilkan dari sebuah proses pembelajaran kritis dan kreatif para pengajar saat melakukan interaksi dengan siswa dan alam sekitarnya.

Pendidikan itu Hak!

Pendidikan adalah hak. Negara, dalam hal ini pemerintah, berkewajiban untuk memenuhi hak dari setiap anak di negeri ini. Meletakkan pendidikan sebagai hak, memberikan sebuah beban bagi pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi penerima hak. Kualitas pendidikan, bukan hanya kuantitasnya, wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Meletakkan pendidikan sebagai sebuah hak, ini juga memosisikan pendidikan sebagai sebuah kebutuhan bersama. Pendidikan bukan menjadi sebuah perdagangan jasa, namun menjadi sebuah solidaritas pemenuhan hak berkehidupan. Pemerintah sudah saatnya mengembalikan roh pendidikan pada wilayah asasi manusia. Pengaturan terhadap pengembangan bisnis pendidikan, penguatan kualitas lembaga pendidikan formal, serta membuka peluang keberagaman kurikulum menjadi mendesak untuk dilaksanakan.

Pendidikan sebagai sebuah hak, juga harus ditempatkan pada kebebasan berekspresi bagi anak dalam menjalani proses pendidikan. Tidak memisahkan dunia anak pada sebuah kotak tertutup bernama sekolah, serta menjadikan alam sekitar sebagai wahana pendidikan, merupakan sebuah hal yang menarik untuk terus dikembangkan.

Program-program Bantuan Operasional Sekolah, Komite Sekolah, hingga Kurikulum Berbasis Kompetensi, harus diperbaiki dengan mengedepankan komitmen baru, bahwa pendidikan adalah hak, bukan kewajiban. Skema ujian nasional pun harus diberangus agar para pendidik di berbagai wilayah negeri tidak berlomba melakukan penipuan berkelanjutan. Tumbuhkan kebersamaan membangun generasi negeri dengan menyatakan "PENDIDIKAN ITU HAK". [060608]

SATWA: Sebuah Etalase Bisnis

06. 7. 2006 - 664 dilihat

Satwa liar, telah dua dekade terakhir menjadi sebuah isu yang selalu diangkat oleh lembaga konservasi internasional yang bekerja di Indonesia. Orangutan, Gajah, hingga Harimau Sumatera, merupakan sebuah icon permasalahan konservasi dan kelestarian lingkungan. Sementara, dari tahun ke tahun tingkat pengrusakan hutan bukan semakin berkurang, malah semakin meningkat. Tidak kurang dari 4,1 juta hektar hutan, yang merupakan wilayah kehidupan komunitas lokal dan satwa, setiap tahunnya mengalami kerusakan. Bencana banjir, longsor dan kekeringan merupakan salah satu akibat langsung yang dirasakan manusia di sekitarnya.

Program pelestarian satwa semakin meningkat disaat pandangan masyarakat dunia dapat dipengaruhi dengan kegenitan dan lucunya seekor satwa. Sebagian besar lembaga yang bekerja di isu konservasi pun kemudian menggunakan satwa sebagai icon kegiatan. Menarik perhatian publik, utamanya negara utara, dilakukan dengan melakukan promosi (kampanye) satwa.

Orangutan (*Pongo pygmaeus*) dan Beruang (*Helarctus malayanus*) merupakan dua icon satwa yang selalu dibawa dalam setiap aktivitas kampanye maupun penggalangan dana di negara utara, agar lembaga konservasi dapat tetap bekerja untuk isu konservasi. Salah satu lembaga konservasi internasional pun pernah bersama Departemen Kehutanan di tahun 2000 menyusun dokumen rencana aksi orangutan, yang kemudian tidak terlalu banyak lagi diketahui oleh pekerja-pekerja yang (katanya) melakukan upaya penyelamatan satwa tersebut.

Bekerja dalam menyelamatkan satwa tidaklah dapat dilakukan dengan dana sedikit. Inilah asumsi yang dikemukakan oleh para pekerja maupun peneliti asing bidang konservasi di Indonesia. Lihat saja dana sebuah pusat rehabilitasi dan reintroduksi orangutan di Kaltim yang dari tahun 2000-2005 memerlukan dana 100 miliar rupiah, meliputi 21 miliar rupiah untuk sarana bangunan dan 79 miliar rupiah untuk operasional pekerjaan, yang saat ini mengandangkan 248 ekor orangutan dan 53 ekor beruang. Sebuah dana yang jauh lebih besar dibandingkan dana bantuan langsung tunai penduduk miskin Kaltim.

Sebuah kejutan kemudian dihadirkan oleh Departemen Kehutanan melalui Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Pada tanggal 19 April 2006, melalui surat Dirjen PHKA No. S 417/IV-KKH/2006,

Dephut memutuskan hubungan kerjasama dengan Gibbon Foundation, sebuah lembaga yang dikelola oleh seorang Belanda yang menjadi warga negara Indonesia. Tanggapan berbagai orang mengenai pemutusan hubungan kerjasama ini menjadi beragam.

Dalam siaran persnya, Dirjen PHKA melihat adanya kegiatan-kegiatan, sikap dan berbagai komentar Gibbon Foundation yang sudah melampaui batas-batas ruang lingkup kerjasama. Ditjen PHKA juga melihat Gibbon Foundation melakukan tindakan di luar wewenangnya sebagai mitra kerja, seperti melakukan fungsi pengawasan, bahkan mengawasi Ditjen PHKA. Kondisi tersebut telah menyebabkan timbulnya kesenjangan komunikasi antara Ditjen PHKA dan Gibbon Foundation yang menimbulkan saling tidak percaya dan tidak menghargai antara kedua belah pihak.

Bila mencermati proses pemutusan kerjasama ini, ada hal yang perlu diperdalam. Upaya pemutusan kerjasama ini, didorongkan oleh Gibbon Foundation, melalui desakan suratnya No. 001/TGF/III/2006 tanggal 1 Maret 2006 yang mendesak PHKA untuk membatalkan kerjasama kemitraan secepatnya. Pada tanggal 7 April 2006 melalui surat No. 004/TGF/IV/2006 Gibbon Foundation kembali mendesak PHKA untuk segera memutuskan hubungan kerjasama, bahkan disertai dengan tekanan bahwa apabila dalam waktu dua minggu belum ada tanggapan, maka PHKA dianggap setuju dengan pemutusan hubungan kerjasama ini. Tanda tanya disisakan dari putusnya hubungan kerjasama antara PHKA dengan Gibbon Foundation.

Ungkapan Chandra Boer (7/6), bahwa semakin banyaknya satwa yang dikandangan, juga menunjukkan bukti kemunduran upaya penyelamatan satwa. Apalagi bila melihat habitat satwa yang semakin hilang akibat perkebunan besar, pertambangan dan perusahaan kehutanan. Perhatian terhadap habitat oleh lembaga konservasi internasional, hanya lebih pada sebuah kampanye. Sebuah slogan kampanye yang mengangkat bahwa setiap menitnya hutan hilang seluas 6 kali lapangan sepak bola, bisa jadi bukan meningkatkan kedekatan publik terhadap upaya penyelamatan, namun malah menggiatkan penghilangan hutan untuk lapangan sepak bola, sebagai sebuah olah raga banyak orang di negeri ini.

Jauh dibalik ini, banyak hal yang belum terungkap. Upaya penyelamatan satwa, khususnya orangutan, yang telah menghabiskan dana miliaran rupiah, hingga saat ini hanya menyisakan kematian 11-22 ekor orangutan setiap bulannya di pusat rehabilitasi dan reintroduksi satwa. Dengan dilaporkan bahwa satwa mati akibat penyakit sebelum satwa tersebut masuk ke pusat reintroduksi. Namun, indikasi kematian

satwa akibat salah kelola di pusat reintroduksi dan rehabilitasi, menjadi lebih kuat bila membongkar data medis satwa dimaksud. Juga ketika sebuah pernyataan dokter hewan yang menangani satwa, bahwa saat ini mereka telah menemukan formulasi obat yang lebih baik untuk jenis penyakit Hepatitis. Hal ini menguatkan dugaan indikasi telah terjadinya upaya pencarian obat untuk jenis penyakit tertentu dengan menggunakan satwa orngutan sebagai sarana uji coba.

Pemutusan hubungan kerjasama antara Dirjen PHKA dengan Gibbon Foundation ini masih perlu ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi independen terhadap kinerja Gibbon Foundation, termasuk pihak yang didanai oleh Gibbon Foundation selama ini, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan hingga saat ini. Ada gejala pemutusan hubungan ini lebih pada pelepasan tanggung gugat Gibbon Foundation terhadap kegiatan yang selama ini dilakukan. Semakin berkurangnya sumber dana yang selama ini memberikan kehidupan bagi Gibbon Foundation, diduga menjadi sebuah alasan utama dan pertama dari pemilik Gibbon untuk melepaskan kerjasama. Selain pula, semakin banyak kegagalan yang dilakukan oleh penerima dana Gibbon Foundation dalam melakukan penyelamatan satwa.

Kasus lain, di Taman Nasional Komodo, dengan dalih pelestarian satwa komodo, The Nature Conservancy, sebuah perusahaan konservasi dari Amerika Serikat, membentuk perusahaan PT Putri Naga Komodo, dengan sumber pendanaan dari lembaga kredit (utang) internasional, mengelola kepulauan Komodo. Di kawasan tersebut kemudian aktivitas nelayan untuk mencari kehidupan semakin dibatasi. Nelayan dipaksa untuk beralih sumber kehidupan. Melihat pengalaman lepasnya Sipadan-Ligitan, bukan tidak mungkin suatu saat Kepulauan Derawan suatu saat akan pula tidak lagi dimiliki oleh Indonesia, dikarenakan dengan sebuah dalih konservasi, kemudian berdirilah perusahaan-perusahaan berlabel wisata dan konservasi, yang kemudian meminggirkan nelayan dari kehidupannya.

Mencermati upaya-upaya konservasi yang dilakukan di Indonesia saat ini, sudah saatnya menjadikan pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Kehutanan, menjadi lebih selektif dalam melakukan upaya kerjasama konservasi. Sesegera mungkin melakukan audit independen dan terbuka terhadap aktivitas lembaga (dan perusahaan) konservasi internasional yang bekerja di Indonesia. Ini menjadi penting sebelum kemudian, semakin banyak keanekaragaman hayati yang ?dicuri? melalui hak pemilikan (termasuk paten) oleh makhluk asing di negeri yang (katanya) kaya ini.

Penyelamatan satwa, hingga saat ini hanya menjadi sebuah etalase

<http://alien.adefadli.hijaubiru.org>

bisnis bagi peneliti asing dan lembaga konservasi internasional. Manfaat bagi publik negeri yang dijadikan obyek kegiatan pun hingga saat ini sangat tidak sebanding. Satwa di Indonesia, berikut kawasan hutannya, saat ini terus ?diperdagangkan? demi kemakmuran segelintir makhluk asing, yang di negerinya pun terus melakukan pengrusakan di atas permukaan bumi dan terus melakukan pembunuhan satwa. Saatnya rakyat Indonesia menentukan arah negerinya sendiri. [060607]

Menyerah Pada Sistem

05. 31. 2006 - 477 dilihat

Dalam berpikir sistem tidak untuk menyerah pada sistem, namun ketika melihat sistem yang ada saat ini, menjadikan kita menyerah pada sistem (Pengajar Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan)

Menyerah pada sistem, terkadang ini menjadi sebuah pilihan yang diambil ketika melihat kondisi kekinian negeri ini. Carut marutnya tata pemerintahan telah menjadikan sebagian besar anak negeri menjadi putus harapan. Ditambah dengan tidak menjadi pentingnya lingkungan hidup sebagai sebuah sumber kehidupan, membangun ketiadaan pilihan dalam melakukan sesuatu.

Sikap pasrah yang coba diajukan dalam proses pembelajaran telah menjadikan akan semakin banyaknya pihak-pihak yang mengikuti arus dalam sistem. Demikian pula ketika seorang yang telah menyelesaikan program magister ilmu lingkungan menyatakan bahwa akan membentuk LSM yang akan memberikan masukan kepada pemerintah dalam proses-proses pembangunan, telah membuat semakin rapuhnya pondasi negeri.

Menjadi menarik, disaat pegawai negeri sipil malah lebih tertarik memberikan masukan kepada pemerintah melalui sebuah institusi yang disebut LSM (lembaga swadaya masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya ruang bagi seorang staff pemerintah untuk berkreasi dan menuangkan pemikiran dan kreatifitasnya di dalam institusinya sendiri, sehingga menjadi penting (baginya) untuk membangun sebuah institusi berbeda.

Ketertutupan ruang di wilayah pemerintahan terhadap sebuah perbaikan sistem, telah menjadikan paham menyerah pada sistem menjadi membumi. Perubahan (secara cepat) menjadi sangat sukar digapai. Merubah dari dalam sistem pun kemudian sangat terlihat sukar dilakukan.

Bila merujuk pada prinsip tata pemerintahan yang baik, maka selayaknya pemerintah memberikan ruang partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada publik, termasuk kepada staf pemerintahan sendiri. Mekanisme organisasi pemerintahan masih cenderung statis, serta terkadang menghilangkan unsur-unsur keberpihakan pada publik, telah menjadikannya sebagai sebuah sistem tertutup dan anti kritik.

Kegagalan perubahan hingga saat ini lebih banyak dibangun oleh

hilangnya semangat melakukan perubahan. Dapat dibayangkan, ketika seorang pengajar di perguruan tinggi saja telah menularkan semangat pesimistik, maka bisa dihitung berapa banyak mahasiswa yang akan terpengaruh oleh pemahaman tersebut. Bila saja seorang mahasiswa akan menularkan pemahaman ini kepada lingkup keluarga saja, maka telah ada bilangan empat sebagai faktor pengali dari jumlah tersebut. Dan bila saja setiap tahun akan tetap disebarkan semangat pesimistik, maka perubahan negeri ini tidak akan pernah terjadi.

Ilmu lingkungan hidup ketika hanya menjadi bagian yang dipelajari dan dipahami, namun kemudian ia menjadi sebuah pengetahuan semata tanpa dipraktekkan, maka ilmu lingkungan hidup hanya akan menjadi penghias dalam daftar riwayat hidup ataupun dalam rak buku semata. Lingkungan hidup yang telah menjadi icon baru dalam proses pembangunan hari ini, walaupun baru dalam tahapan wacana, sudah selayaknya menjadi paham tersendiri dari berbagai pihak yang pernah mempelajarinya.

Wilayah praktek dari ilmu lingkungan hidup, tak terbatas hanya pada wilayah akademis maupun lembaga swadaya masyarakat semata. Ilmu lingkungan hidup dapat dipraktekkan pada ruang-ruang kehidupan keseharian, hingga pada wilayah pekerjaan. Ilmu lingkungan hidup bukanlah sebuah pengetahuan, namun sebuah paham.

Semakin banyaknya pihak yang tertarik untuk melakukan studi di Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan, semisal dengan akan masukkan aparat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, dapat menjadi sebuah pemicu kesadaran bahwa semakin banyak pihak yang memahami pentingnya ilmu lingkungan hidup. Sehingga sebuah proses pembelajaran di ilmu lingkungan hidup harus mengalami perkembangan, menyesuaikan diri dengan pengetahuan yang ada hari ini dan masa datang, dengan tidak melupakan pengetahuan yang pernah ada sebelumnya.

Seandainya saja semakin banyak yang menjadikan lingkungan hidup sebagai sebuah paham, tidak sekedar pengetahuan, bukan tidak mungkin di masa datang akan terbangun sebuah tata pemerintahan yang baik dan berperspektif lingkungan hidup. Dan tentunya, tidak akan lagi ada kebijakan negara yang merusak ekosistem, serta tidak akan lagi ada kebijakan negara yang hanya berpihak pada pemodal. Efek terbaik yang akan dihasilkan adalah sebuah kesejahteraan rakyat yang memiliki sumber kehidupannya dan membangun perekonomian secara mandiri, tanpa ketergantungan terhadap pihak di luarnya.

Mungkin ini sebuah mimpi. Mungkin juga sebuah catatan kecil bagi

sebuah proses pembelajaran yang diharapkan mampu memberikan perubahan (walaupun hanya bagian kecil) bagi negeri ini yang baru saja memperingati kebangkitan nasionalnya. Menyerah pada sistem, tidak ada dalam kamus orang-orang yang telah memahami substansi berpikir sistem. [060527]

Jagung Bakar dan Dunia Pendidikan

05. 26. 2006 - 350 dilihat

Awan putih di Sabtu malam berangsur menghilang. Jagung bakar menjadi santapan. Bintang bertebaran di langit. Detak jam melalui tengah malam. Separuh bulan memantulkan cahaya mentari. Hembusan angin mengintimidasi diri. Kokok ayam di malam buta tak ingin rejekinya didahului manusia.

Celotehan malam hari bergulir dari sebuah pertanyaan, apa sebenarnya sebuah hal yang ingin diubah? Pertanyaan ini mengalir dikarenakan telah dilakukannya beberapa aktivitas untuk menginspirasi dan memotivasi kawan-kawan mahasiswa untuk berbuat sesuatu dan mulai mengembangkan diri. Ragam tanggapan. Mulai dari sekedar ingin membangun kesadaran diri, hingga memerdekakan diri.

Pertanyaan menjadi semakin menggurita. Apakah yang telah terjadi adalah sebuah pendidikan? Bisa jadi sebuah upaya membangun anak negeri. Namun sebagian besar, sebenarnya proses yang terjadi di dalam kampus saat ini, bukanlah sebuah pendidikan. Hanyalah sebuah pengajaran. Memberikan informasi. Memberikan pengetahuan. Tanpa sebuah upaya membangun sebuah perilaku dan karakter dari mahasiswa.

Proses yang terjadi bahkan, oleh seorang kawan, dinyatakan sebagai sebuah proses membebaskan begitu banyak kewajiban bagi mahasiswa. Pertanyaan sederhana, apakah mahasiswa itu konsumen? Karena begitu banyaknya kewajiban yang muncul berikutnya, semisal absensi, quis, ujian, praktikum, dan lainnya. Padahal, sudah sangat jelas disaat telah dibayarnya biaya perkuliahan, maka telah tunailah kewajiban seorang mahasiswa. Kemudian menjadi sebuah kewajiban bagi kampus untuk memberikan hak bagi mahasiswa berupa pengetahuan, pendidikan, berikut fasilitas kampusnya, untuk sebuah pengembangan diri mahasiswa.

Kampus memiliki kecenderungan menjadi sebuah super-mall. Etalase bisnis. Segala sesuatu tak ada yang gratis. Ruh dari pendidikan telah menuju pintu kematian. Pendidikan bukan lagi sebagai sebuah ciri pembangunan generasi. Kuantitas lebih diutamakan dibandingkan dengan kualitas.

Fungsi ideal perguruan tinggi telah tereduksi ke dalam fungsi ekonomi dan politik. Kenyataan menunjukkan perguruan tinggi bukan

lagi sebagai area mewujudkan doktrin Tri Dharma, tetapi lebih merupakan wilayah perebutan kekuasaan ekonomi dan politik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tekanan pasar terhadap dunia pendidikan tinggi justru menimbulkan respon negatif. Tanpa adanya kebijakan dekomodifikasi pemerintah terhadap perguruan tinggi yang disertai dengan pengetatan administrasi agar kultur akademik menguat, pendidikan tinggi di tanah air akan semakin terseok-seok dan semakin menjauhkan diri dari kemampuan menciptakan karya-karya akademik yang bermutu (Heru Nugroho, 2006) [1]

Kegelisahan kawan-kawan di kampus saat ini adalah semakin menjauhnya kawan-kawan dari dunia akademis. Pembelajaran berlangsung dalam proses yang kurang menyenangkan. Pengetahuan bagaikan sebuah duri yang menyakitkan menusuk ke dalam jiwa generasi. Tak ada yang menyenangkan.

Sementara, ditengah kelesuan gairah untuk berkuliah di perguruan tinggi lokal, masing-masing perguruan tinggi lokal berlomba untuk meraih konsumen. Pelajar diberikan bom informasi berkaitan dengan program, yang tentunya menampilkan gambaran positif dari masing-masingnya kampusnya. Tak pernah digambarkan tentang kesibukan para dosennya yang ?mengobral diri? demi sebuah kebanggaan dan kekayaan pribadi. Pun tak pernah digambarkan bahwa tak jelas masa depan setelah perkuliahan. Minimnya fasilitas kampus. Tak ada ruang kreasi.

Semakin banyak mahasiswa, semakin banyak dana segar mengalir. Hidup kembalilah kehidupan di kampus. Dosen bisa digaji. Listrik terbayar. Walau air harus mampet.

[1] *Lebih jauh bisa dilihat pada Nugroho H. Ekonomi Politik Pendidikan Tinggi: Universitas Sebagai Arena Perebutan Kekuasaan. Dalam buku Hadiz, VR dan D Dhakidae. Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia. Equinox Publishing. Jakarta. Indonesia. 2006. p155-186.*

Unmul Juga Bisa #2

Halal, Gratis, Ikhlas: Demi Anak Negeri

05. 9. 2006 - 1,330 dilihat

Universitas Mulawarman, dalam beberapa tahun terakhir menyatakan dirinya sebagai perguruan tinggi yang berperspektif internasional. Dalam kebijakan rektor, hal ini dimaknai hanya dengan meletakkan persyaratan TOEFL dalam kelulusan sarjana dan pascasarjana dari kampus ini. Tak lebih.

Dalam perkembangannya kemudian, dalam beberapa gedung di Unmul, yang saat ini telah memiliki label mungkin agar tak hilang, terdapat antena yang mengarah ke Rektorat. Bukan untuk membangun kendali, namun inilah jaringan antar komputer yang terbangun di Unmul. Bila ditelusuri kemudian Unmul memperoleh dana tak kurang dari 2 miliar rupiah untuk pengembangan teknologi informasinya untuk masa waktu 30 bulan.

Masih tak banyak yang tahu bahwa saat ini Unmul telah memiliki akses internet yang akan sangat membantu memperkuat posisi Unmul di dunia global. Bahkan segelintir staf pengajar pun masih belum merasakan manfaat dari keberadaan akses internet tersebut.

Dalam satu diskusi bebas dengan Onno W Purbo, pegiat TI Indonesia yang pernah menjadi dosen di ITB, mengenai seandainya ada uang satu miliar rupiah dan ada tugas untuk mengembangkan kecerdasan informasi di kampus, beliau mengatakan bahwa dengan uang tersebut akan membuat lomba penulisan buku, dan uangnya bisa dipinjamkan ke penerbit agar menjadikan semakin banyak anak negeri yang bisa memperoleh pengetahuan melalui buku, dan kemudian uang akan kembali utuh, bahkan mungkin lebih.

Ketika dipertanyakan lebih dalam, berapa sebenarnya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan TI di satu kampus, beliau menyampaikan bahwa ketika membangun jaringan komputer berinternet di ITB, dilakukan dengan modal Rp. 0,-. Bahkan kemudian bisa memberikan akses internet gratis kepada dua perguruan tinggi lain dan beberapa sekolah menengah di wilayah Bandung.

Ironis. Bila kemudian melihat dana pengembangan teknologi informasi (berikut digital library) di Unmul, ternyata menghabiskan dana hingga 2 miliar rupiah, tanpa berdampak luas bagi komunitas di luar Unmul. Juga ketika ternyata saat ini semakin banyak keluhan dari berbagai

kalangan pengguna di Unmul berkaitan dengan kualitas jaringan yang ada.

Di salah satu fakultas, juga ditemukan kejanggalan disaat seorang dosen telah menawarkan agar membangun jaringan intranet dengan biaya yang lebih murah dengan wilayah yang lebih luas, namun ketika dana tersedia lima kali lipat, ternyata hanya bagi seperlima dari wilayah jangkauan yang ditawarkan.

Halal, Gratis dan Ikhlas

Kata yang selalu terbersit dari setiap ungkapan seorang Onno dalam diskusi bebas tersebut adalah halal, gratis dan ikhlas. Selalu berulang kata halal diucap, termasuk disaat ditanyakan tentang teknis bisa memasuki wilayah jaringan komputer bukan milik.

Gratis. Ketika Indonesia membutuhkan saluran telekomunikasi telepon yang murah dan dapat digapai oleh berbagai kalangan rakyat, Onno menawarkan VoIP Merdeka yang kemudian diperbaharui dengan VoIP Rakyat. Ketika biaya internet masih dipandang mahal di negeri ini, Onno dan persekawanannya menawarkan RT-RWNet. Termasuk ketika sebagian besar buku sebagai referensi telah menjadi barang mahal, Onno membagikan pengetahuannya melalui e-book secara gratis.

Halal. Ketika frekwensi 2,4GHz masih dianggap sebagai barang berijin oleh pemerintah, Onno menggalang dukungan berbagai pihak untuk menekan pemerintah agar memberikan kemudahan bagi penyedia jasa internet (Internet Service Provider) untuk menggunakan jalur frekwensi tersebut. Termasuk dalam penggunaan VoIP Rakyat, celah pelanggaran hukum merupakan satu pertimbangan yang diperhatikan oleh seorang Onno.

Ikhlas. Ini bagian yang sepertinya menjadi sangat sulit untuk sebagian besar manusia yang telah berpengetahuan. Seorang Onno akan sangat senang berbagi pengetahuan. Selalu yang diungkap tentang ketika berbagi pengetahuan akan ada pengetahuan yang berlipat. Dengan pengetahuan juga akan segera bangkitnya anak negeri ini untuk mengejar ketertinggalannya.

Uang Bukan Segalanya

Uang, yang selama ini dipandang sebagai sebuah penghambat terbesar bagi pengembangan sesuatu di negeri ini, telah pula dilewati oleh Onno. Pilihan berhenti menjadi dosen dengan tujuan membagikan pengetahuannya pada wilayah yang lebih luas, merupakan sebuah

pembelajaran bagi para pengajar (dan pendidik) di wilayah negeri ini. Dengan menulis buku, semakin banyak yang memperoleh manfaat pengetahuan. Dengan menulis buku, ada sedikit uang untuk kebutuhan kehidupan. Termasuk ketika membangun jaringan teknologi informasi di kampusnya, dengan tanpa bermodal besar.

Lakukanlah untuk membuktikan. Ini hal yang diungkap oleh seorang Onno. Ketika tekanan Bank Dunia yang memaksa Indonesia menerima utang untuk pengembangan teknologi informasi di Indonesia, seorang Onno kemudian memaparkan tentang telah besarnya utang yang pernah diberikan sebelumnya oleh Bank Dunia yang tak menghasilkan apa-apa bagi negeri ini. Pemikiran seorang Onno, yang juga ditulis dalam harian Kompas (8/5/2006), adalah Indonesia bisa membangun tanpa utang, termasuk untuk pengembangan teknologi informasi di negeri ini.

Lebih daripada itu, uang akan tetap mengalir disaat keikhlasan dan bekerja bersama tetap dilakukan di negeri ini. Sistem barter (tukar-menukar) bukan tidak mungkin akan kembali terjadi, disaat pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas telah tersedia bagi seluruh rakyat di negeri ini.

Universitas Mulawarman, sebagai satu-satunya universitas negeri di tanah berkekayaan alam melimpah, sudah seharusnya tak hanya tampil di headline media massa dengan menampilkan pengetahuan seksual semata. Bukti nyata pengetahuan Unmul sudah selayaknya ditunjukkan dengan menghiasi berbagai media di negeri ini, termasuk di toko-toko buku ataupun di jurnal internasional, dengan berbagai karya pengetahuan. Menjadi Universitas Internasional bukan hanya dengan TOEFL, Unmul harus memulai dengan menulis dan juga teknologi informasi yang murah dan berkualitas bagi seluruh mahasiswanya. [060509]

Maaf, Tak Ada Tempat Untuk Petani

05. 1. 2006 - 390 dilihat

Negeri ini dinobatkan sebagai negeri agraris. Sebuah negeri yang dibangun dengan pondasi pertanian sebagai penopang kehidupannya. Akan tetapi, benarkah negeri ini adalah negeri agraris? Ataukah sebenarnya slogan negeri ini sebagai negeri agraris hanyalah sebuah dongeng pengantar tidur? Petani, termasuk di dalamnya nelayan, benarkah sudah semakin menikmati kesejahteraan atau malah semakin terpuruk dalam membangun kehidupannya.

Bila melihat Kalimantan Timur, dengan luas daratan 21,1 juta hektar, ternyata 14,65 juta hektar kawasannya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya kehutanan, dan 5,24 juta hektar untuk kawasan budidaya non kehutanan, dimana dari luasan tersebut 4,7 juta hektar diperuntukkan bagi pengembangan budidaya perkebunan.

Bila ditelisik lebih dalam, tak kurang dari 4,09 juta hektar kawasan budidaya perkebunan ternyata diprioritaskan untuk perkebunan kelapa sawit. Sehingga dari luasan daratan Kaltim, hanya 0,6 juta hektar yang diperuntukkan bagi pertanian.

Dalam setiap rencana pembangunan propinsi, selalu dikemukakan bahwa Kaltim akan mengutamakan pembangunan pertanian (dalam arti luas) sebagai prioritas pembangunan. Ada tanda tanya besar di balik angka statistik bila dilihat dari mimpi yang dibangun oleh pemerintah Kaltim saat ini. Tak ada tempat untuk petani.

Sepertinya, pemerintah memandang bahwa sebagian rakyat yang berkehidupan di Kaltim di masa datang tak akan lagi menjadikan nasi (padi-beras) sebagai makanan pokoknya. Dari luasan lahan yang disediakan, di masa datang, (dalam bayangan) Pemerintah lebih menyediakan buah kelapa sawit sebagai makanan pokok rakyat.

Apa yang terjadi di Yakuhimo, di saat pemerintah lokal lebih memprioritaskan pembangunan fisik dan kepentingan politik, menjadikan kemudian terlupakan untuk mempersiapkan simpanan pangan, sehingga kemudian terjadi krisis pangan, yang berujung pada kelaparan.

Dari komoditas unggulan di 13 kabupaten-kota di Kaltim, terlihat bahwa padi hanya menjadi unggulan di Kabupaten Nunukan, Pasir, Berau dan Kutai Kartanegara. Selebihnya mengunggulkan kelapa sawit, pariwisata

dan barang tambang.

Begitu minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian (termasuk perkebunan non-sawit), sangat terlihat jelas dari rencana pembangunan tahunan propinsi (termasuk kabupaten-kota), dimana sebagian besar energi pembangunan hanya diarahkan pada dukungan terhadap perkebunan besar kelapa sawit, pertambangan dan industri kehutanan. Padahal sudah sangat jelas, hingga saat ini makanan pokok rakyat Kaltim masih belum berubah.

Dengan tingginya dukungan terhadap kepentingan non-rakyat, menjadikan sebagian besar wilayah-wilayah produktif rakyat (umumnya wilayah pertanian dan kebun tradisional rakyat), harus digusur demi kepentingan investasi eksploitatif. Ini kemudian menjadikan perekonomian semakin rapuh dan semakin rentannya ketahanan kehidupan rakyat, dikarenakan terjadinya ketergantungan rakyat terhadap pihak lain, tidak lagi terbangunnya ketahanan pangan di tingkat lokal.

Wilayah-wilayah subur yang harusnya diperuntukkan bagi kepentingan petani, selalu dikalahkan oleh kepentingan pertambangan. Bahkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sangat jelas terjadi pemaksaan pemindahan petani dari sawahnya, akibat akan digalinya batubara yang ada di kawasan tersebut. Dengan dalih telah adanya perijinan, kemudian petani harus meninggalkan sumber kehidupannya, dan selalu diiringi dengan intimidasi dan bayangan memulai ulang kehidupan dari awal.

Sementara di wilayah lainnya, para petani dipaksa untuk menyerahkan sertifikat tanahnya, dengan janji akan diberikan perkebunan plasma kelapa sawit, di areal yang selama ini menjadi areal persawahan. Ketika sertifikat telah diberikan, tak lagi ada tempat untuk bercocok tanam, kebun plasma yang dijanjikan pun tak kunjung ada. Belum lagi skema kredit yang dipaksa untuk diikuti dalam membangun kebun plasma, telah menjadikan petani dipaksa untuk berpikir keras mencari uang yang akan melunasi kredit yang (terpaksa) diterima.

Di lain sisi, sejak pertanian menjadi sebuah industri, maka petani di negeri ini mulai dipaksa untuk menggunakan bibit, pupuk dan pestisida dari perusahaan. Tenaga penyuluh lapangan pun dibekali dengan pengetahuan berbasis kepentingan perusahaan. Yang terjadi kemudian adalah semakin tingginya ketergantungan petani terhadap perusahaan pembuat pupuk dan pestisida, serta penyedia bibit tanaman, yang membuat petani bukan memiliki ketahanan, malah berada pada jeratan kepentingan. Petani semakin dimainkan oleh para distributor, yang

menjadikan leher mereka semakin tercekik dengan meningginya harga bibit tanaman, pupuk dan pestisida. Lebih jauh lagi, petani pun berada dalam lingkaran kredit yang berkelanjutan.

Pemerintah telah sangat berhasil untuk menghilangkan pola-pola pertanian tradisional dengan dalih kemajuan teknologi pertanian, yang pada kemudian telah menghilangkan ketahanan pangan lokal. Hilangnya bibit tanaman lokal hingga terjadinya degradasi pengetahuan pengelolaan lahan secara tradisional akibat paksaan teknologi dan pengetahuan (kebanyakan dari luar negeri yang ditanamkan melalui pendidikan) telah menguburkan impian kesejahteraan bagi petani.

Sementara bencana banjir, kekeringan dan kebakaran hutan semakin mengancam keberlanjutan pertanian. Sawah dan ladang semakin sering kelebihan dan kekurangan air, yang secara nyata menurunkan produktifitas pertanian.

?

Bila saja benar, bahwa negeri ini adalah negeri agraris dan bahari, maka sudah selayaknya Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kaltim dibuat untuk mendukung kepentingan petani, bukan dengan sebuah pemaksaan terhadap kepentingan-kepentingan pihak pemodal dan penguasa semata. Bila salah dalam membuat penataan ruang, berakibat pada sebuah dosa berkepanjangan di wilayah ini, karena hanya akan menyisakan bencana bagi generasi kemudian di wilayah ini.

Masih sangat banyak komoditas rakyat yang perlu perlindungan kebijakan dari pemerintah. Komoditas rotan, madu, damar, hingga rumput laut, masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah. Masih pula ada komoditas karet, pisang, kopi, coklat, vanili yang sangat menjanjikan secara ekonomi, sosial-budaya dan ekologi, bila didukung oleh perangkat kebijakan dan pasar yang berpihak kepada rakyat.

Pemerintah sudah selayaknya melakukan reposisi dan membenarkan posisiuduknya sebagai pelayan rakyat, dengan memberikan pelayanan dan pemenuhan terhadap perekonomian rakyat. Sudah bukan waktunya lagi selalu berpihak pada kepentingan pemenuhan kebutuhan pemodal (investor). Saat ini waktunya untuk membangun kebangkitan ekonomi rakyat untuk ketahanan lokal.

AMDAL: Hilangnya Hak Lingkungan Hidup

04. 25. 2006 - 9,229 dilihat

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam sebuah lokakarya regional koordinasi tata lingkungan wilayah Kalimantan, Ir Hermien Roosita MM, Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa hanya 119 kabupaten/kota yang memiliki komisi penilai AMDAL dari 474 kabupaten/kota di Indonesia. Dari angka tersebut, hanya 50% yang berfungsi menilai AMDAL. Sementara 75% dokumen AMDAL yang dihasilkan berkualitas buruk sampai sangat buruk.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa selama ini AMDAL memerlukan waktu proses yang lama, itdak ada penegakan hukum terhadap pelanggar AMDAL, kontribusi pengelolaan lingkungan yang masih rendah, menjadi beban biaya, dan dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh (oknum) aparat pemerintah, pemrakarsa atau konsultan. Lebih rusaknya, ketika AMDAL justru hanya sebagai alat retribusi, bukan sebagai bagian dari sebuah studi kelayakan, sehingga sering kali ditemui banyak AMDAL yang justru melanggar tata ruang.

Ruh AMDAL ketika pertama kali dikeluarkan kebijakannya, adalah merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Namun dikarenakan minimnya pengetahuan dari pemerintah dan rakyat dalam memahami AMDAL, menjadikan pemrakarsa dan konsultan menggunakan AMDAL sebagai sebuah dokumen asal jadi, dan kecenderungan mengutip dokumen AMDAL lainnya sangat tinggi. Sehingga AMDAL tidak dapat menjadi sebuah acuan kelayakan sebuah kegiatan berjalan.

Dalam sebuah rencana proyek jalan LADIA-GALASKA di Nanggroe Aceh Darussalam, sangat terlihat jelas bahwa proyek jalan dilaksanakan jauh sebelum dokumen AMDAL disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL. Hal serupa ditemui dalam proyek jalan yang melalui Pulau Balang di Teluk Balikpapan, dimana saat ini proyek telah dilaksanakan, sementara AMDAL belum selesai direvisi.

Pasal 15 (1) UU No. 23/1997 menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Hal ini kemudian ditegaskan dalam pasal 3 PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

1. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam.
2. Eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui.
3. Proses dan kajian yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya.
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sumberdaya.
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik.
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati.
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertahanan negara.

Dalam proses penyusunan dokumen AMDAL, sangat sering ditemui konsultan (tim penyusun) AMDAL meninggalkan berbagai prinsip dalam AMDAL. Terutama posisi rakyat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Proses keterbukaan informasi dijamin oleh kebijakan, di mana pasal 33 PP No. 27/1999 menegaskan kewajiban pemrakarsa untuk mengemukakan kepada publik dan saran, pendapat, masukan publik wajib untuk dikaji dan dipertimbangkan dalam AMDAL. Dan pasal 34 menegaskan bagi kelompok rakyat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya ketertibatan masyarakat dalam keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk :

1. Melindungi kepentingan masyarakat;
2. Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan;
3. Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
4. Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

Di mana prinsip dasar pelaksanaannya menganuti: 1) Kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat; 2) Transparansi dalam pengambilan keputusan; 3) Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan 4) Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan Gubernur.

Dokumen AMDAL (kelayakan lingkungan hidup) yang merupakan bagian dari kelayakan teknis finansial-ekonomi (pasal 2 PP No. 27/1999) selanjutnya merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 7 PP No. 27/1999). Dokumen AMDAL merupakan dokumen publik yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektoral, lintas disiplin, dan dimungkinkan lintas teritorial administratif.

Namun, dari sisi proses, bila menilik Pasal 20 PP No. 27/1999, maka terbuka kemungkinan terjadinya kolusi dalam persetujuan AMDAL. Dalam ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Dan dalam ayat (2) disebutkan apabila instansi yang bertanggung jawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan

dianggap layak lingkungan. Kolusi kemudian bisa terjadi disaat tidak adanya keputusan tentang persetujuan AMDAL dalam jangka waktu 75 hari, maka secara otomatis suatu kegiatan dan/atau usaha dianggap layak secara lingkungan.

Sejak dibubarkannya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, maka kemudian Kementerian Lingkungan Hidup semakin mengecil perannya dalam upaya pengendalian dampak lingkungan, termasuk dalam pengawasan AMDAL di berbagai tingkatan. Terlebih lagi, pasca dikeluarkannya PP No. 25 tahun 2000, menjadikan hilangnya mekanisme koordinasi antar wilayah, yang pada akhirnya menjadikan lingkungan hidup sebagai bagian yang menjadi tidak begitu penting.

Empat kelompok parameter yang terdapat di studi AMDAL , meliputi Fisik ? kimia (Iklim, kualitas udara dan kebisingan; Demografi; Fisiografi; Hidro-Oceanografi; Ruang; Lahan dan Tanah; dan Hidrologi), Biologi (Flora; Fauna), Sosial (Budaya; Ekonomi; Pertahanan/keamanan), dan Kesehatan masyarakat, ternyata juga masih sangat menekankan pada kepentingan formal saja. Lalu kemudian, permasalahan sosial-budaya dan posisi rakyat menjadi bagian yang dilupakan.

Satu hal dari proses di Komisi Penilai AMDAL, ketika ternyata terjadi pembohongan dalam dokumen AMDAL (dalam hal ini saat penilaian dokumen AMDAL Pembangunan Bandara Udara Sungai Siring), hanya dianggap sebagai kesalahan ketik. Permakluman kemudian terjadi dikarenakan kuatnya kepentingan politis dibalik sebuah rencana kegiatan. Hal ini bukan hanya terjadi sekali. Dalam beberapa kali diskusi dengan para pihak yang dilibatkan dalam Komisi Penilai AMDAL, sangat jelas terlihat kerancuan dalam proses penilaian AMDAL. Tidak adanya kriteria dan indikator penilaian, telah menjadikan proses penilaian AMDAL menjadi sangat subyektif. Dan kemudian, penilaian yang sepotong-sepotong pun pada akhirnya menjadikan aspek dampak lingkungan hidup (sebagai sebuah komponen yang komprehensif) menjadi bagian yang sengaja untuk dilupakan.

Posisi kelayakan kegiatan dari AMDAL, sebenarnya sangat tergantung pada kelompok Akademisi atau para ahli yang dilibatkan dalam Komisi Penilai AMDAL. Ketika kemudian independensi (kebebasan ikatan) dari akademisi dalam menilai dokumen diikat saat kelompok ini pun menjadi konsultan penyusun AMDAL, telah menjadikan kelompok akademisi atau para ahli tidak lagi profesional dalam mengambil keputusan. Bias perkawanan dan keberlanjutan proyek (sustainable project) sangat menjadikan proses penilaian AMDAL menjadi hanya panggung boneka semata.

Hal yang kemudian menjadi sangat lemah adalah proses pengawasan pelaksanaan (implementasi) dari dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dimana tidak ada perangkat hukum yang menyatakan sanksi terhadap pelanggar dokumen ini. Ketika kemudian terjadi pencemaran lingkungan ataupun terjadi konflik sosial, barulah digunakan perangkat hukum lainnya (semisal UU No. 23/1997, UU No. 41/1999 jo UU No. 19/2004 ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Perdata).

AMDAL yang pada awalnya ingin menaikkan posisi tawar lingkungan hidup dalam berkehidupan, kemudian malah berkontribusi terhadap hilangnya hak lingkungan hidup. Setiap kali sebuah kegiatan dan/atau usaha sangat terlihat jelas berdampak terhadap lingkungan hidup maupun komunitas rakyat, maka AMDAL berada di barisan terdepan untuk mengeliminir gejala yang terjadi. Dengan melihat kondisi ini, maka bukan tidak mungkin AMDAL akan berkontribusi terhadap terjadinya ekosisida/ecocide (tindakan pengrusakan seluruh atau sebagian dari sebuah ekosistem). Pemusnahan ekosistem semakin cepat terjadi dikarenakan tidak adanya perangkat penyaring (filter) dari kegiatan pengrusakan lingkungan hidup.

Dalam mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup (dan kualitas manusia didalamnya), maka aparat pemerintah sudah selayaknya memahami ulang tentang Hak Menguasai Negara. Juga menjadi penting adanya undang-undang payung dalam rangka menjamin pemenuhan kewajiban negara terhadap hak konstitusional rakyat untuk: (1) melaksanakan reforma agraria (land reform); (2) pengelolaan agraria atau kekayaan alam dengan mengacu pada asas kehati-hatian (precautionary principle), serta; (3) perlindungan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Di sisi penataan kelembagaan, menjadi penting dilakukannya reformasi kelembagaan, meliputi: (1) kelembagaan yang terkait kebijakan makro pengelolaan lingkungan hidup; (2) kelembagaan dengan fungsi perlindungan dan konservasi lingkungan, dan; (3) integrasi kelembagaan yang memiliki fungsi menjamin akses terhadap pemanfaatan lingkungan secara adil dan berkelanjutan. Selain menjadi penting menganut prinsi desentralisasi kewenangan berdasarkan fungsi, di mana diharapkan dapat mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok penerima dampak. Bentuk yang ditawarkan adalah pemerintahan rakyat (community governance), dimana kelembagaan bersifat ad-hoc, informal, mewakili kepentingan, pendekatan berdasarkan isu dan kepentingan, serta dikelola dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kelembagaan formal pemerintah menjadi bagian dari

kepemerintahan rakyat ini.

Untuk kondisi sistem pemerintahan yang ada saat ini, dalam hal ini terhadap AMDAL, penting untuk meletakkan ruh (filosofi) lingkungan hidup dalam setiap pelatihan mengenai AMDAL, sehingga tidak menjadikan penyusun, penilai dan pemantau AMDAL kehilangan ruh dari lingkungan hidup itu sendiri.

Menjadi penting juga bagi pemerintah di tingkat lokal hingga nasional untuk membangun clearing house lingkungan hidup, termasuk dokumen AMDAL didalamnya yang aksesable (mudah diakses) oleh rakyat. Juga untuk segera hadir mekanisme yang sederhana dan terbuka untuk mengelola respon publik terhadap proses AMDAL yang akan dan sedang berlangsung. Selain pula pemerintah mulai membangun perangkat sanksi terhadap pengelola kegiatan yang tidak melaksanakan RKL/RPL yang telah dibuatnya.

Dari sisi akademisi ataupun para ahli yang terlibat dalam penyusun maupun penilai AMDAL, sangat penting untuk kembali membuka ulang pemikiran agar tidak terjebak pada kepentingan kehidupan saat ini semata. Silaunya keping mata uang terkadang membutuhkan hati, namun bisa jadi suatu saat keping mata uang itu akan membutuhkan keturunan anda.

Sementara dari komunitas lokal, sudah saatnya berani bersuara tentang ketidakadilan dan penipuan yang berlangsung secara berkelanjutan hingga saat ini. Karena suatu saat, penerima dampak pertama dari kegiatan dan/atau usaha yang seolah-olah telah lulus AMDAL adalah komunitas lokal. Sangat penting juga membangun kapasitas melalui pemahaman tentang AMDAL KIJANG (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kaki Telanjang), yang sebenarnya bisa menjadi sebuah perangkat pemantauan lingkungan hidup oleh rakyat dengan sederhana dan berdasarkan parameter yang tersedia di lingkungan itu sendiri.

Memimpikan Kesejahteraan dari Kelapa Sawit

04. 7. 2006 - 11,541 dilihat

Pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar di Kalimantan Timur telah menjadi sebuah perbincangan publik. Berbagai pro-kontra terlontar menyikapi rencana pembangunan satu juta hektar perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan Kaltim. Kabupaten Nunukan menjadi salah satu wilayah yang rencananya akan dibangun perkebunan kelapa sawit skala besar.

Mimpi-mimpi kesejahteraan pun dilemparkan oleh para pimpinan daerah kepada masyarakatnya. Apalagi menjelang pergantian kepala daerah, isu pembangunan kebun sawit telah menjadi salah satu janji manis yang terlontar. Kebun kelapa sawit akan dibangun dan diberikan kepada masyarakat.

Lalu, apakah benar sawit bisa memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat? Apakah perkebunan sawit skala besar akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal? Dan apakah pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan keinginan masyarakat ataukah hanya menjadi kepentingan pemerintah dan pengusaha?

Mitos Kesejahteraan Kebun Sawit

Selalu diungkapkan disaat pemerintah mempromosikan pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah peningkatan ekonomi yang akan diperoleh dari perkebunan kelapa sawit. Dalam beberapa kajian, terungkap bahwa perkebunan kelapa sawit tidak memberikan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat, dan hanya memberikan kucuran rupiah bagi pengusaha. Prof. Maman Sutisna, guru besar silvikultur, menyampaikan bahwa dengan mengalihkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak memberikan nilai tambah apapun, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi ekologi. Lebih lanjut disampaikan, bahwa masih terdapat komoditi pertanian lainnya yang bisa memberikan nilai ekonomi yang lebih baik, semisal budidaya kemiri maupun jambu mete.

Sementara sebuah kajian dari Laila Nagib, peneliti LIPI, menyampaikan bahwa kesejahteraan petani kelapa sawit dipengaruhi oleh luas lahan, hasil produksi dan harga kelapa sawit. Keterbatasan lahan yang dimiliki, pengelolaan kebun yang tidak optimal, dan penentuan harga sepihak yang tidak menguntungkan petani, merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kesejahteraan petani. Akibatnya petani tetap hidup

miskin, terjat hutang atau terjebak dalam permainan pemodal.

Di lain propinsi misalnya, digambarkan oleh Nordin, peneliti perkebunan besar di Kalteng, bahwa dengan mengalihkan kebun-kebun tradisional komunitas masyarakat menjadi perkebunan kelapa sawit, telah menghilangkan penghasilan Rp. 500 ribu ? Rp. 700 ribu setiap bulannya.

Pembangunan kebun plasma sawit kepada masyarakat ternyata juga diikuti dengan skema kredit dengan bunga komersil dan jangka panjang. Hal ini ternyata telah menambah beban ekonomi baru bagi masyarakat. Pupuk, bibit, pestisida, tidaklah diberikan gratis kepada masyarakat, namun menjadi sebuah paket kredit yang harus dibayarkan disaat panen. Sehingga dalam perhitungan ekonomi kebun plasma, komponen tenaga kerja menjadi dihilangkan untuk menunjukkan nilai keuntungan yang besar bagi petani plasma, yang sejatinya sangat merugikan bagi petani.

Bencana Ekologis Perkebunan Besar Kelapa Sawit

Sementara, dari berbagai daerah yang telah melakukan pembukaan perkebunan besar kelapa sawit, semisal Kabupaten Pasir, saat ini telah mengalami bencana lingkungan, baik banjir maupun kekeringan, dikarenakan terganggunya fungsi aliran air (hidrologis) lahan karena tanah tak lagi mampu menyerap air dan menyimpannya.

Bencana ekologis ini diperparah karena pemberian perijinan perkebunan besar kelapa sawit mengabaikan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 376/Kpts-II/1998 tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit, dimana kesesuaian lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit memiliki kriteria: (1) kelerengan max 25%; (2) ketinggian 0-300 m dari permukaan laut; (3) curah hujan 1750-4000 mm/tahun dengan rata-rata bulan kering per tahun 0-3 bulan; (4) kedalaman efektif tanah: untuk tanah mineral > 100 cm, untuk ketebalan tanah gambut, dan; (5) temperatur rata-rata per tahun 24? - 29?C. Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi perkebunan budidaya kelapa sawit harus memenuhi kriteria (1) berdasarkan Rencana Tata Ruang Propinsi berada pada kawasan budidaya non kehutanan; (2) tidak dibebani hak; (3) pulau kecil yang luasnya kurang dari 10 km² tidak termasuk yang dapat dilepaskan; (4) diprioritaskan pada lahan kosong atau terbuka berdasarkan citra landsat yang terbaru, dan; (5) minimal luas areal 10.000 hektar.

Dari sisi ekonomi lingkungan, Greenomics menyampaikan bahwa akibat

pembukaan perkebunan besar kelapa sawit , Kaltim akan kehilangan tidak kurang 210 triliun rupiah serta mengalami kerugian ekologi (fungsi pengaturan gangguan ekosistem, tata air, penyedia air, pengendali banjir, siklus unsur hara, dan pengendalian limbah) sebesar 14,7 triliun rupiah setiap tahunnya. Nilai yang tidak sebanding dengan nilai yang akan diperoleh oleh negara dan rakyat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar saat ini.

Dari pengalaman masa lalu juga terungkap bahwa semakin meluasnya lahan kritis di Kaltim salah satunya diakibatkan oleh pembukaan areal hutan dengan perijinan kelapa sawit yang akhirnya tidak dilakukan penanaman. Hanya 6,7% perkebunan besar kelapa sawit yang melakukan penanaman kelapa sawit, selebihnya hanya mengambil kayu dan meninggalkan lahan kritis. Tak kurang dari 3,5 juta hektar lahan kritis di Kaltim saat ini yang ditinggalkan dan tak menjadi prioritas dalam pengelolaannya.

Kesejahteraan Masyarakat atau Kesejahteraan Pengusaha?

Dari beberapa kali berinteraksi dengan komunitas lokal, tergambar bahwa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah pendidikan dan kesehatan berkualitas dan gratis, serta akses transportasi yang memadai dalam membantu pergerakan ekonomi lokal. Tak pernah terbersit untuk masuknya perkebunan kelapa sawit dikarenakan masih begitu banyak komoditas produktif di tingkat masyarakat yang belum maksimal terpasarkan dikarenakan terkendala permasalahan transportasi. Penggunaan transportasi air saat ini masih memiliki beban ekonomi yang tinggi bagi masyarakat.

Akses transportasi ini pula yang selalu digaungkan oleh pemerintah dan pengusaha ketika akan membangun perkebunan besar kelapa sawit. Namun ternyata, ketika dilihat lebih dalam dari realisasi di lapangan, kenyataannya adalah pembangunan sarana transportasi selama ini juga dipenuhi oleh anggaran negara, bukan oleh pengusaha. Pengusaha juga meminta pemerintah membangun akses transportasi antar kampung hingga ke pusat perekonomian untuk menunjang usaha perkebunan mereka. Hanya jalan di dalam perkebunan saja yang dibangun oleh pengusaha, itupun hanya dilakukan bila masih terdapat kayu komersial di kawasan tersebut, dikarenakan biaya pembuatan jalan dapat ditutupi dengan menjual kayu komersial tersebut.

Bila demikian, maka sebuah janji untuk membuka isolasi kawasan masyarakat dengan membangun jalan oleh perusahaan perkebunan, senyatanya hanya sebuah manipulasi dan penipuan. Karena senyatanya masyarakat memiliki hak atas anggaran negara (APBN/APBD) untuk

kebutuhan transportasi, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan gratis.

Politik Kelapa Sawit

Belakangan, pembangunan perkebunan kelapa sawit juga telah menjadi sebuah komoditas politik. Kepentingan-kepentingan politikus sangat terlihat dalam pembangunan perkebunan besar kelapa sawit. Begitu besarnya kebutuhan keuangan untuk pertarungan politik, telah menjadikan kelahiran negosiasi politik antara politikus dengan pengusaha perkebunan. Pemberian perijinan perkebunan besar, dibarengi dengan kucuran dana politik. Sehingga bukan sesuatu yang aneh lagi bila menemukan adanya janji politik berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat.

Belakangan, peranan aparat keamanan juga sangat terlihat dalam upaya-upaya pengamanan perkebunan besar kelapa sawit di berbagai wilayah. Polisi dan TNI terlihat sangat proaktif mengamankan perkebunan besar kelapa sawit, bukan lagi untuk mengamankan negara untuk masyarakat. Ada apa dibalik semua ini?

Saatnya Tidak Lagi Tertipu Janji Manis

Saat ini, ditengah begitu banyaknya kepentingan yang bermain dan memainkan kepentingan masyarakat, sudah saatnya masyarakat menjadi lebih kritis terhadap berbagai gagasan dari pihak pemerintah maupun pengusaha. Apakah sebuah janji akan direalisasikan dan memberikan keuntungan sebenarnya? Ataupun sebenarnya hanya sebuah penjeratan baru bagi masyarakat yang akhirnya menjadi sebuah belitan kesengsaraan? Kesejahteraan akan sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat bisa memilih secara lebih cerdas dan kritis. Bukan dengan sebuah buaian janji politik, yang terkadang tak pernah berpihak pada masyarakat disaat telah berkuasa.

Kesejahteraan masyarakat hanya akan bisa terwujud bila pemimpin yang dipilih adalah yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Jangan pernah memberikan kepercayaan kepada kelompok yang akan menindas dan menghisap masyarakat.

PENDIDIKAN: Penciptaan Sebuah Robot

03. 20. 2006 - 6,207 dilihat

Pendidikan merupakan hak asasi setiap generasi. Pendidikan merupakan sebuah proses pembangunan kerangka berpikir manusia sejak ia berada di permukaan bumi. Undang-Undang Dasar negeri ini telah mengamankan agar pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diterima oleh warga.

Kondisi kekinian dunia pendidikan di negeri ini sangatlah mengiris keyakinan. Proses-proses pendidikan yang terbangun adalah sebuah ruang terbatas bagi penciptaan mesin-mesin (robot) pekerja yang hanya memiliki kemampuan berpikir statis, bukan pada sebuah proses penciptaan manusia pemikir yang sangat diperlukan untuk kelangsungan kehidupan di permukaan bumi ini.

Tingginya biaya pendidikan telah menjadi sebuah permasalahan pertama di dunia pendidikan. Pendidikan menjadi hanya milik kelompok kelas menengah dan atas, sedangkan pada warga miskin, pendidikan menjadi sebuah barang yang sangat sukar untuk dijangkau. Walaupun telah ada sebuah pijakan dengan berbagai slogan, semisal wajib belajar 9 tahun hingga pendidikan gratis, namun kenyataannya sekolah sebagai wadah pendidikan telah menjadi media bisnis.

Semakin menurunnya kualitas pembelajaran di dalam lingkungan sekolah telah menjadikan semakin suburnya bisnis-bisnis pendidikan luar sekolah yang senyatanya hanya untuk menjadikan pendidikan dimiliki hanya oleh mereka yang punya kekayaan. Kursus, bimbingan belajar, hingga bimbingan keterampilan telah menjadi menu pokok bagi anak, bukan lagi menjadi menu sampingan, dikarenakan kualitas pembelajaran di sekolah yang tak mampu memenuhi hal tersebut.

Sementara dari kualitas guru yang dihasilkan oleh lembaga penghasil guru, menciptakan begitu banyaknya guru hanya berpikir pada sebuah capaian tertulis, bukan pada pengembangan kemampuan berpikir anak. Telah terpenuhinya catatan, nilai evaluasi belajar yang tinggi, hingga menjadi juaranya anak pada lomba keilmuan telah menjadikan otak anak menjadi sebuah memori komputer yang tak memiliki sebuah kemampuan berkreasi.

Dari kesemuanya, kemudian dunia pendidikan semakin ditekan dengan kepentingan pemodal yang menciptakan kebutuhan pekerja, bukan manusia pemikir, sehingga pendidikan hanya diarahkan pada memenuhi

kebutuhan lapangan kerja, tidak untuk menghadirkan ruang aktivitas baru dalam perjalanan kehidupan.

Paulo Freire pernah menyampaikan bahwa pendidikan adalah sebagai praktek pembebasan, bukanlah transfer atau transmisi pengetahuan yang terdapat dari berbagai kebudayaan. Pendidikan juga bukan perluasan pengetahuan teknis. Pendidikan bukan aksi untuk mendepositokan informasi-informasi atau fakta-fakta kepada siswa. Pendidikan bukanlah pelanggengan nilai-nilai dalam sebuah kebudayaan. Pendidikan bukanlah sebuah upaya mengadaptasikan siswa dengan keadaan. Freire memandang pendidikan sebagai praktek pembebasan di atas seluruh situasi gnosilogikal yang sebenarnya.

Apa yang diungkapkan oleh seorang Freire mungkin bukan hal baru juga bagi sebagian besar warga negeri ini, hanya kemudian menjadi semakin terbelenggu oleh sistem yang dibangun oleh kepentingan penguasa dalam beberapa waktu lalu menjadikan terjadinya pembelengguan kreatifitas dan gagasan baru di berbagai tingkatan.

Masih belum terlupakan di saat tahun 1980-an, dunia kampus dibelenggu dengan kebijakan NKK/BKK. Dengan kemudian dilakukan pelabelan besar-besaran untuk membangun permusuhan dengan pengetahuan filsuf Eropa dan Rusia. Kemudian pengekan semakin dikuatkan dengan lembaga-lembaga berlabel keagamaan, yang membangun pertengkaran antar manusia. Sangat menyedihkan ketika ternyata itu terjadi disaat belum terlalu utuh melihat sebuah nilai yang coba ditawarkan.

Ketika kemudian sejak tahun 1960-an, modal asing mulai mencengkramkan dirinya di negeri ini, sangat terlihat jelas sebagian besar wilayah kreatifitas dan ruang ekspresi warga dipenjarakan. Sistem pendidikan sebagai sebuah ruang awal kemerdekaan negeri ini dikuasai oleh kurikulum titipan pemodal. Menciptakan robot pekerja. Sehingga kemudian ketika lahir berbagai penemu di negeri ini, harus rela meninggalkan negeri untuk lebih dapat mengembangkan kapasitas dan mengekspresikan dirinya bagi kemajuan peradaban dunia.

Darmaningtyas dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Rusak-Rusakan menyampaikan bahwa ada banyak hal yang membuat pendidikan melenceng semakin jauh dari cita-cita idealnya. Semakin elitis dan tak terjangkau pendidikan oleh rakyat miskin, pengelolaan pendidikan yang birokratis dan hegemonik, hingga begitu banyaknya malpraktek di dunia pendidikan, telah berkontribusi bagi kehancuran generasi kemudian di negeri ini.

Semakin tingginya korupsi, menjamurnya bisnis pendidikan, hingga saling lempar tanggung jawab menjadikan dunia pendidikan negeri ini tak pernah beranjak dari keterpurukannya. Bila melihat pada sebuah undang-undang yang pernah dihadirkan di negeri ini pada tahun 1950, jelas tersampaikan bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sementara dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan hanyalah sebuah normatif bahkan kurang mudah dilaksanakan.

Lebih jauh ketika memandang pengelolaan pendidikan hari ini, maka sangat terlihat bahwa kualitas guru yang hadir hari ini adalah buah dari sebuah produk yang tidak sempurna. Hilangnya nilai-nilai kemanusiaan pada sebagian guru, lebih disebabkan karena tekanan kehidupan yang dimiliki oleh para guru ditambah dengan minimnya pengetahuan dan kreatifitas yang dimiliki. Tingginya biaya untuk menjadi guru hingga rendahnya gaji guru telah menumbuhkan hilangnya rasa kemanusiaan dari dunia pendidikan. Ditambah dengan sebuah kurikulum pendidikan guru yang bersifat kinetis mekanis, telah membangun dinding pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif dari seorang guru.

Bukan salah kemudian ketika terjadi kasus aborsi, hamil muda, penggunaan narkoba, hingga tindakan lain oleh siswa yang dianggap sebagai kejahatan, maka dunia pendidikan seolah memusuhi, bukan berupaya untuk memberikan bantuan psikologis terhadap siswa tersebut. Skorsing hingga dikeluarkan dari sekolah, seolah menjadi satu-satunya solusi agar tak tercemarkan nama baik sekolah. Menjauhkan para siswa yang bisa jadi dibentuk oleh dunia pendidikan itu sendiri, malah dibiarkan untuk menggung resiko sendiri. Akhirnya bukan menjadikan negeri ini lebih baik, namun bukan tidak mungkin akan menjadikan negeri ini semakin meningkat jumlah kejadian kejahatan dan tindakan yang tidak diharapkan.

Sudah saatnya dunia pendidikan negeri ini meletakkan kembali cita-cita pendidikan yang pernah digaungkan sebelum negeri ini merdeka. Pendidikan di negeri ini sudah saatnya bukan untuk mengekor pada kepentingan negara utara. Begitu banyak kekayaan alam negeri ini tentunya akan menghasilkan lebih banyak pemikir-pemikir baru yang akan lebih baik dibandingkan pemikir di negara utara. Memperbaiki sistem pengelolaan pendidikan, mulai di wilayah pendidik, hingga pada fasilitas pendidikan, harus menjadi agenda utama. Mendekatkan kembali pendidikan negeri ini pada budaya dan alam negeri ini tentunya akan menghasilkan suasana negeri yang lebih baik.

Perombakan mendasar pada kurikulum pendidikan dasar hingga

menengah, serta perubahan kurikulum dan memperbanyak ragam bahan bacaan pada tingkat pendidikan tinggi sudah saatnya dilakukan, agar tidak lagi menjadikan pendidikan sebagai sebuah pabrik penghasil robot. Menata ulang sistem pendidikan tidak harus menunggu dari pemerintah pusat yang pasti tidak akan pernah berpikir untuk kebaikan negeri ini. Membangun dari sebuah komunitas terkecil akan lebih berharga.

Pendidikan berkualitas bagi rakyat sudah harus menjadi agenda penting kepala desa di negeri ini. Lupakanlah berharap pada pelaku politik dan pemerintahan, karena mereka hanya akan menciptakan ketergantungan berkelanjutan pada kepentingan pemodal asing, serta hanya bisa menggadaikan negeri ini pada penjajah.

Dan penting bagi mereka yang telah pernah memperoleh pendidikan untuk terus bergerak, berjuang dan menyuarakan ketidakadilan di negeri ini agar kemudian di generasi mendatang akan tercipta generasi yang dekat dengan alam, menghargai arti kemanusiaan, mandiri, berkecukupan dan demokratis.

tak penting berbuat sesuatu untuk indonesia

03. 6. 2006 - 276 dilihat

Indonesia negeri kaya! Kalimat ini yang selalu terungkap dalam berbagai tulisan hingga celotehan berbagai pihak di negeri ini. Berbagai kekayaan alam terpaparkan di seluruh wilayah. Tak mungkin akan ada sebuah kemiskinan bila menyaksikan bertimpahnya potensi yang dimiliki. Ironis! Kondisi kemudian bahwa tak kurang dari 50-60 juta penduduk negeri ini masih merupakan penduduk miskin. Begitupun ketika Bantuan Langsung Tunai (BLT) digulirkan, perebutan pun tak dapat dihindarkan hingga beberapa harus berkorban nyawa.

Dalam obrolan ringan dengan beberapa kawan yang saat ini menjadi pegawai negeri sipil, banyak diperoleh celotehan mengenai sukarnya koordinasi, pentingnya setoran, serta terbelenggunya ruang gerak. Berbeda saat berbincang dengan kawan yang beraktivitas sebagai konsultan. Besaran setoran 5% untuk penyedia proyek bukanlah masalah. Malah bila menemukan pelanggaran (borok) dari pemerintah maka inilah yang bisa dijadikan sebagai titik tawar agar memperoleh proyek berikutnya. Sementara seorang kawan yang menjadi karyawan perusahaan, selalu berusaha untuk mencari titik masuk ke kalangan pemerintah agar perusahaannya dapat mulai beroperasi ?mengelola? kekayaan negeri ini.

Di sebuah warung kopi, para mahasiswa dan pegiat organisasi non pemerintah masih tetap sibuk berdebat tentang sebuah ideologi. Sibuk mencari bentuk negara. Sementara itu, perubahan berjalan sangat cepat di negeri ini. Tak ada yang mampu menahan laju kepentingan para pemilik modal dan kroninya untuk menggerus habis kekayaan negeri ini.

Sudah sangat jelas dipaparkan dalam berbagai tulisan, bahwa sejak ratusan tahun yang lalu, Indonesia telah dijadikan sebagai sumber bahan baku industri di negara utara serta menjadi pasar dari produk industri, disamping sebagai tempat sampah buangan limbah yang terkadang mengandung racun.

Tak mungkin dielakkan bahwa hingga saat ini sesungguhnya Indonesia tengah dikendalikan oleh negara industri di utara belahan bumi ini. Amerika Serikat berikut konconya masih menancapkan kuku tajamnya di negeri ini dengan menggunakan berbagai tangannya. World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), World Bank, hingga melalui Multi-National Corporations (MNCs) ataupun

TransNational Corporations (TNCs). Dan juga kepentingan negara kapitalis terus menguatkan cengkramannya menggunakan lembaga konservasi internasional, semisal The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund for Nature (WWF), Conservation International (CI), Wildlife Conservation Society (WCS), hingga forum-forum dunia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Belum termasuk lembaga donor internasional bertajukkan pengentasan kemiskinan, semisal USAID, yang senyatanya hanya untuk ?membangunkan jalan tol? bagi industri Amerika untuk menancapkan kakinya di berbagai negara.

John Perkins dalam bukunya *Confessions of an Economic Hit Man* mengakui bahwa ia telah melakukan penipuan kepada negara-negara di belahan dunia agar menjadikan korporasi raksasa mengendalikan sumberdaya alam planet bumi ini. Lebih mengenaskan bila menyaksikan angka 87 miliar dolar yang dibelanjakan oleh Amerika untuk berperang di Irak agar dapat menguasai minyak Irak, padahal dengan separuhnya saja dapat memenuhi kebutuhan air bersih, makanan yang layak, layanan sanitasi dan pendidikan dasar bagi setiap orang di bumi ini.

Lebih jauh bila melihat kekayaan negeri ini, secara perlahan ternyata sudah dikuasai oleh para pemilik modal dan negara ?penjajah?. Penguasaan pulau-pulau kecil oleh pengusaha asing, secara perlahan telah menggerogoti wilayah tangkapan ikan para nelayan. Pulau Bidadari, Kepulauan Karimunjawa, Kepulauan Komodo, Kepulauan Derawan, hingga Pulau Sipadan-Ligitan, telah dikuasai kepemilikannya oleh orang asing. Dengan dalih pariwisata dan pinjam-pakai, bahkan terkadang dibumbui dengan isu konservasi, maka pulau-pulau di Indonesia tak lagi diperuntukkan bagi warga negeri ini.

Dalam wilayah perdagangan kayu, isu illegal logging didukung secara besar-besaran oleh negara-negara Amerika dan Inggris. Hibah untuk penyusunan standar legalisasi kayu pun dikucurkan, diiringi dengan teknologi sertifikasi kayu. Namun kembali, kesemuanya adalah tetap dalam sebuah kerangka bisnis dan menguatkan industri di negeri mereka. Bagi Indonesia sendiri hanya menumbuhkan perpecahan dan penindasan terhadap rakyat. Teknologi sertifikasi kayu sendiri hanya menjadi arena penjualan teknologi, serta keahlian konsultan asing, selain untuk menguasai harga pasar kayu.

Dalam industri kelapa sawit, Indonesia diiming-imingi janji kesejahteraan. Selebihnya terjadi pengusuran wilayah kelola rakyat, kekerasan, hingga penguasaan aset tanah oleh perusahaan asing. Yang kemudian ketika minyak sawit (CPO) dihasilkan, Indonesia masih belum mampu mendirikan industri hilir, sehingga nilai ekonomi lebih hanya akan didapat oleh negara pemilik industri hilir, selebihnya pekerja di

kebun sawit selalu memperoleh upah murah di bahwa nilai kesejahteraan yang dijanjikan.

Lubang-lubang di negeri ini pun akan semakin banyak dengan begitu banyaknya perijinan pertambangan mineral, hingga kawasan hutan lindung pun digadaikan demi industri ini. Keuntungan yang sangat kecil yang dimiliki oleh negeri ini tak pernah menjadi sebuah hal yang penting dilihat oleh penguasa negeri, karena mereka telah disibukkan menghitung lembaran dolar di meja kerja mereka.

PT Freport dan PT Kelian Equatorial Mining adalah salah satu contoh nyata bahwa perusahaan tembaga dan emas tak memakmurkan rakyat. Ditambah dengan PT Newmont Minahasa Mineral di Teluk Buyat yang meninggalkan limbah beracun di perairan, masih belum dipandang penting oleh petinggi negeri ini. Belum lagi berton-ton limbah beracun di kolam limbah PT KEM di hulu sungai Mahakam yang suatu saat akan mengalir Mahakam dan akan meracuni ratusan ribu rakyat di sepanjang Mahakam.

Rangkaian peristiwa bencana di negeri ini harusnya menjadi sebuah peringatan bagi pemimpin negeri. Inilah sebuah hukuman yang harus diterima akibat menggadaikan kepentingan generasi mendatang. Sudah bukan waktunya lagi membuncitkan perut dan membangun istana di atas tanah yang dikelilingi sungai darah dan air mata rakyat. Sebuah perubahan mendasar harus terjadi di negeri ini. Penguasaan kekayaan alam oleh segelintir orang harus segera dihapuskan. Tanah sebagai sumber produksi rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dan dilindungi dari upaya pengambilan paksa oleh pemilik modal.

Kemakmuran rakyat tidak akan sanggup dibangun dengan memberikan kekeluasaan pada kelompok pemodal untuk berkuasa di negeri ini. Rakyat harus bersatu merebut kekuasaan. Petani, pekerja, masyarakat adat dan kalangan terdidik harus kembali bergandengan tangan untuk melawan kepentingan-kepentingan penguasa dan pemodal. Merebut kembali kemerdekaan sejati bagi negeri ini. Enyahkan pihak asing yang beranekaragam bentuknya di negeri ini. Jangan pernah percaya pada lembaga konservasi internasional, lembaga donor asing, apalagi terhadap Bank Dunia dan IMF. Rebut kembali kedaulatan negeri yang dicabik oleh segelintir penghianat negeri.

Bila saja ini tak dilakukan, tak penting lagi berbuat sesuatu untuk Indonesia!

